



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEMENANGAN PARTAI CONGRESS (*THE INDIAN  
NATIONAL CONGRESS PARTY—INC*) PADA PEMILU LOK  
SABHA INDIA TAHUN 2004**

**TESIS**

**SARIFAH JUITA GIRSANG  
1006745474**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK  
JAKARTA  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEMENANGAN PARTAI CONGRESS (*THE INDIAN  
NATIONAL CONGRESS PARTY—INC*) PADA PEMILU LOK  
SABHA INDIA TAHUN 2004**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Politik (M.IP)**

**SARIFAH JUITA GIRSANG  
1006745474**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK  
JAKARTA  
JUNI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama** : Sarifah Juita Girsang  
**NPM** : 1006745474  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 26 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

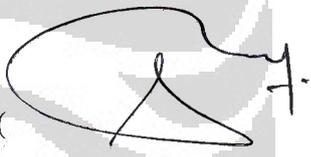
Tesis ini diajukan oleh

Nama : Sarifah Juita Girsang  
 NPM : 1006745474  
 Program Studi : Ilmu Politik  
 Judul Tesis : Kemenangan Partai Congress (*The Indian National Congress Party-INC*) Pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang: **Dr. Valina Singka Subekti, M.Si** (  )

Sekretaris Sidang: **Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si** (  )

Pembimbing: **Evida Kartini, S.IP, M.Si** (  )

Penguji Ahli: **Dr. Isbodroini Suyanto, MA** (  )

Ditetapkan di : Jakarta  
 Tanggal : 26 Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kasih serta pertolonganNya sehingga penulis mampu berjuang menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kemenangan Partai Congress (*The Indian National Congress Party-INC*) Pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004.”** Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pengerjaan tesis ini sebenarnya telah menghabiskan waktu yang tidak sedikit kurang lebih 1,5 tahun. Bermula sejak penulis mengambil mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Politik pada semester 2 yang dikoordinasi oleh ibu **Dr. Valina Singka Subekti, M.Si**, dan diselangi dengan *Reading Course* pada semester antara serta dilanjutkan dengan mata kuliah Latihan Penelitian Ilmu Politik di bawah bimbingan **Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA** pada semester 3, membuat penulis merasa sangat terbantu. Bagi penulis ketiga mata kuliah ini telah menjadi dasar dan mempermudah penulis dalam pengerjaan tesis di program Pascasarjana ilmu Politik Universitas Indonesia. Oleh karena itu, berjalan baiknya pengerjaan tesis ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih kepada ibu **Dr. Isbodroini Suyanto, MA** selaku pembimbing akademis penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama kuliah. Kehadiran beliau dalam setiap mata kuliah membuat kelas menjadi ‘sibuk’ dengan tugas *critical review* dan membuat penulis menikmati suasana perkuliahan di S2 karena adanya tugas-tugas. Serta kesediaan beliau yang meminjamkan buku-buku India yang penulis gunakan sebagai bahan bacaan ketika *Reading Course* dan sebagian untuk bahan tesis. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu **Dr. Valina Singka Subekti, M. Si** selaku ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmunya, khususnya untuk mata kuliah MPIP. Penulis merasa sangat terbantu dengan materi penelitian kualitatif yang disajikan beliau karena penelitian yang penulis kerjakan juga menggunakan metode kualitatif. Serta dorongan beliau

kepada kami untuk cepat-cepat menyelesaikan dan tidak menunda-nunda pengerjaan tesis.

Tidak lupa juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu **Nurul Nurhandjati, S.IP, M.Si.**, yang telah mempertemukan penulis dengan dosen pembimbing penulis melalui mata kuliah *Reading Course*, yaitu mbak **Evida Kartini, S.IP, M.Si** karena konsentrasi politik di Asia Selatan. Selain itu, beliau juga tetap tekun mendukung angkatan 2010 untuk semangat mengerjakan tesis, terutama lewat 'sms cinta' beliau. Selanjutnya, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada pembimbing penulis, mbak **Evida Kartini, S.IP., M.Si.** Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai sekretaris jurusan Ilmu Politik S-1, beliau tetap memberikan bimbingan yang maksimal kepada penulis. Lewat saran serta masukan beliau, penulis menjadi percaya diri dalam mengerjakan tesis ini. Selain itu, penulis juga merasa senang karena semua tulisan penulis dibaca dan diberi catatan-catatan penting. Ketelitian beliau dalam memperhatikan setiap tulisan penulis membuat tesis ini menjadi jauh lebih baik. Oleh karena itu, pengerjaan tesis ini berjalan dengan baik dan mudah karena kesediaan beliau dalam mengarahkan penulis mengerjakan poin-poin penting dalam tesis ini.

Rasa terima kasih juga ditujukan kepada mas **Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si** selaku sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia yang mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan keluhan-keluhan dalam pengerjaan tesis serta memberikan masukan serta dukungan untuk mengerjakan tesis. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan FISIP UI, bapak **Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc.**, serta kepada Rektor UI, bapak **Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri**, sebagai pimpinan tertinggi di mana penulis menimba ilmu kurang lebih 2 tahun. Terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh staff pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI yang sudah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staff di sekretariat Pascasajana Ilmu Politik UI, mas Andri, mbak Retno, mbak Romlah, serta yang lainnya, yang sedikit banyak telah mau meluangkan waktu dalam melayani keperluan-keperluan sekretariat penulis selama masa perkuliahan.

Kepada kedua orang tua penulis, *Lovely Dad*, J. Girsang dan *Lovely Mom*, M. Maringga, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Berkat doa dan dukungan kedua pahlawanku tersebut, penulis memiliki keberanian untuk berdiri hingga di titik saat ini. Kiranya penulis akan terus berjuang maju untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan dukungan serta doa mereka yang penuh. Karya tulisan ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yang meskipun di masa lanjut usianya terus berjuang menyekolahkan penulis. Terima kasih sebesar-besarnya juga ditujukan kepada keenam saudara penulis (K Maria Girsang dan keluarga, K Meri Girsang dan keluarga, K Masnur Girsang dan keluarga, K Mutiara Girsang dan keluarga, B Sahat Girsang dan keluarga, serta K Marna Girsang dan keluarga) yang memberikan dukungan baik materi, spiritual serta beberapa kritikan-kritikan yang membuat penulis menjadi lebih dewasa.

Kepada teman-teman penulis di jurusan Ilmu Politik angkatan 2010: Mas Rizki, B Mouddy, Kadek, Mila, Mbak Ellena, Bambang, Husein, Mina, Meli, Fajrin, Bung Lessy, Mas Agung, Mas Guntur, Mas Reko, Mas Eko Sri Raharjo, Mas Iko, Mas Lukman, Adang, Roman, Ipang, Mbak Pungky, Mas Teguh, Mas Dimas, Mas Kurniawan; terima kasih atas seluruh bantuan dan kebersamaan selama ini. Kiranya tali silaturahmi tetap terjalin walaupun entah ke mana akan berpencar lagi. Kepada teman-teman lainnya Winda Pinem, Mas Rico, Mas Habibie, Kaka Rafael, Mbak Meata, B Bram, Pak Gede, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-per satu, penulis juga mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan serta bantuan selama ini.

Spesial *thanks* kepada sahabat-sahabat terbaik penulis, K Meli yang mau mendengarkan semua keluhan serta cerita sukacita dari penulis. terima kasih untuk waktu yang dihabiskan bersama lewat telpon serta doa-doanya walaupun jarak memisahkan. Semoga semangat dalam menjalani perkuliahan S-2 HI-nya di UGM. K Helentina yang tetap baik dan sabar dalam menghadapi penulis. Terima kasih buat dukungan dan motivasinya serta kesediaannya menerima penulis ketika melakukan 'pengasingan' di Bogor. Semangat juga dalam menjalani kuliah S-2 di IPB. Kepada yang terkasih, B Bram Sipayung, terima kasih sudah menjadi pribadi yang sabar dan setia dalam mendukung pengerjaan tesis ini, baik melalui doa, waktu dan energi. Terima kasih karena mau mendengar keluhan-keluhan berkaitan

dengan tesis dan buat sarn-sarannya yang menyejukkan hati dan siap sedia menemani penulis ketika lembur walaupun dipisahkan oleh jarak yang jauh.. Maaf karena kadang dicuekin juga karena sudah menemukan mood yang baik untuk menulis tesis ini. Semoga semuanya indah pada waktunya dan tesis ini sebagai buah perjuangan selama menimba ilmu di ‘kampung orang’.

Terima kasih juga buat teman-teman sekosan, buat K July yang sangat baik. Terima kasih sudah menjadi teman penulis dan juga memberikan dukungan-dukungan atau saran ketika penulis mengalami kebuntuan. Buat K Hibur terima kasih sudah mau mendukung penulis lewat doa bahkan menyempatkan diri untuk mendampingi penulis ketika sidang tesis ini. Terima kasih juga kepada K Didi yang sekarang juga lagi S2 di India, terima kasih banget buat diskusi-diskusinya, bahkan bahan-bahan tesis yang sangat berguna sebagai sumber data penelitian ini. Semoga kualiahnya cepat selesai juga. Terima kasih buat Prof. Niraja Jaya Gopal dari JNU yang sudah mau berdiskusi dan bersedia menjadi informan peneliti. Bahkan bahan-bahan yang diberikan sangat banyak membantu penulis. Demikian juga dengan Pak Sanjay Kumar, CSDS New Delhi, yang sudah mau menjadi informan peneliti serta telah memberikan banyak informasi di mana penulis bisa mendapatkan sumber-sumber lainnya yang sangat berguna untuk penelitian ini.

Akhirnya, penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua orang secara umum dan terkhusus kepada penulis dalam wacana akademis dan pendidikan politik. Penulis menyadari bahwa meskipun tesis ini telah dikerjakan semaksimal mungkin, tulisan ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan dan pembahasannya. Oleh karena itu, penulis tetap mengharapkan seluruh saran, kritik, dan masukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 26 Juni 2012

Penulis



Sarifah Juita Girsang, S.IP

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarifah Juita Girsang

NPM : 1006745474

Program Studi : Ilmu Politik

Departemen : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kemenangan Partai Congress (*The Indian National Congress Party—INC*) pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedi/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juni 2012

Yang menyatakan



(Sarifah Juita Girsang)

## ABSTRAK

Nama : Sarifah Juita Girsang  
NPM : 1006745474  
Judul : Kemenangan Partai Congress (*The Indian National Congress Party- INC*) Pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004  
(xvii + 161 hal + 25 tabel + 3 gambar + 3 lampiran + 47 buku (1968-2011) + 19 jurnal + 9 situs internet + 2 makalah + 5 surat kabar + 2 interview)

Tesis ini membahas kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan partai Congress menang pada Pemilu India 2004 akan dijelaskan dalam penelitian ini. Pemilu India 2004 ini, sebelumnya telah diprediksi akan dimenangkan oleh partai BJP, partai yang sedang memerintah India sejak tahun 1999-2004. Sementara partai Congress, partai yang pernah menguasai India sejak tahun 1950-an hingga 1980-an, diprediksi tidak akan muncul lagi untuk memerintah India.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori partai politik oleh Alen Ware, teori dinasti politik oleh G. Mosca dan Stephen Hess, serta teori koalisi pra-pemilu oleh Sona Nadenichek. Ketiga teori ini menjadi teori inti penelitian ini. Sementara teori kepemimpinan oleh Weber dan Selligman, teori budaya politik oleh Almond dan Verba, serta teori marketing politik oleh Marshment merupakan teori pendukung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data-data diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel, internet serta wawancara dengan Niraja Jaya Gopal dan Sanjay Kumar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India Tahun 2004 merupakan perpaduan dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya, *pertama* krisis kepemimpinan dalam partai Congress dapat diatasi ketika Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress. *Kedua*, partai Congress menawarkan pemerintahan yang bersifat inklusif dengan slogan kampanye *Aam Aadmi* atau orang awam menjelang Pemilu 2004. *Ketiga*, berbeda dengan kebijakan pada Pemilu 1999, partai Congress berhasil membangun koalisi pra-pemilu dengan 18 partai regional lainnya pada Pemilu 2004. Faktor eksternal diantaranya, *pertama* perubahan perilaku pemilih India dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang berorientasikan isu atau lebih rasional. *Kedua*, kebijakan-kebijakan di bawah pemerintahan BJP sebagian besar bersifat eksklusif.

Temuan penelitian diantaranya adalah perubahan strategi pemilu partai Congress yang menerapkan pembangunan koalisi pra-pemilu dengan partai-partai regional lainnya. Kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif ternyata tidak berhasil. Dinasti politik sangat berpengaruh dalam perpolitikan India.

Implikasi teoritis untuk teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Teori dinasti politik G. Mosca dan Stephen Hess juga terbukti dalam penelitian ini. Untuk teori koalisi pra-pemilu Golder, yaitu koalisi pra-pemilu umumnya terjadi di negara dengan sistem pemiludisproposionalitas dan multipartai, terbukti. Akan tetapi, pendapat Golder untuk perundingan pembagian jabatan-jabatan dan penetapan kebijakan-kebijakan koalisi sebelum pemilu, tidak ditemukan dalam penelitian ini. Prakteknya, perundingan pembagian jabatan-jabatan menteri dan pembentukan kebijakan-kebijakan koalisi dilakukan setelah hasil pemilu diketahui.

**Kata kunci: pemilu demokratis, dinasti politik, Congress dan BJP**

## ABSTRACT

Name : Sarifah Juita Girsang  
Title : The Victory of Indian National Congress Party in the 2004 Indian Lok Sabha Election

(xvii + 161 pages + 25 tables + 3 illustrations + 3 attachments + 47 books (1968-2011) + 19 journals + 11 internet sites + 2 scientific papers + 5 newspapers + 2 interviews)

The purpose of this thesis is to investigate the victory of Congress party in the 2004 Indian Lok Sabha Election. The internal and external factors that led the Congress party in winning the 2004 India's election will be described in this research. The 2004 India's election had previously been predicted to be won by the BJP party, a party which had been ruling India since the year 1999-2004. While the Congress party, the party that once ruled India from the 1950s to the 1980s, was predicted not to rule India anymore.

The theory applied in this research is based on the political party theory by Alen Ware, political dynasty theory by G. Mosca and Stephen Hess, as well as, the pre-election coalition theory by Sona Nadenichek. The third theory becomes the ground theory of this research. This research is also supported by the leadership theory by Weber and Selligman, political culture theory by Almond and Verba, and the theory of political marketing by Marshment. This research is conducted by implementing qualitative methods. The data are obtained from books, journals, articles, internet, as well as, interviews with Niraja Jaya Gopal and Sanjay Kumar.

The results of this research indicate that the victory of Congress Party in the Indian 2004 Lok Sabha Election is a combination of internal and external factors. The internal factors range from; first, a crisis of leadership in the Congress Party was successfully overcome when Sonia Gandhi was the head of the Party. *Second*, Congress Party offered an inclusive governmental with its campaign slogan "Aam Aadmi" or common people towards the 2004 election. *Third*, in contrast to the policy in the 1999 election, Congress Party managed to build a pre-election coalition with 18 other regional parties in the 2004 election. A change of behavior in India's voters from traditional voters to an issue-oriented or more rational voter becomes one of the external factors of the victory of Congress Party in 2004. *Second*, the policy under the BJP's governmental is mostly exclusive.

The results of this research provide evidence of a change in the election strategy executed by the Congress party. This party applied a pre-election coalition development with other regional parties. The exclusive policies implemented by BJP party did not work accordingly. Political dynasty has a great influence in India's politic.

The theoretical implication of Alen Ware's political party theory is proved right in this research, as well as the theory of political dynasties by G. Mosca and Stephen Hess. The theory of pre-election coalition by Golder that generally occurs in countries with multiparty electoral systems is also proved right. However, the opinion of Golder to negotiate the sharing of positions and the stipulation of the coalition policies prior to the election, are not found in this research. In fact, the negotiation for sharing positions of ministers and the establishment of the coalition policies were executed after the result of the election came out.

**Key words: democratic election, political dynasty, Congress and BJP**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Keperluan Akademis	viii
Abstrak	ix
Abstract	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xv
Daftar Singkatan	xvi
<b>1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Kajian Literatur	14
1.6 Kerangka Teori	18
1.7 Alur Berpikir	32
1.8 Metode Penelitian	34
1.9 Sistematika Penelitian	36
<b>2. POLITIK DI INDIA: PARTAI CONGRESS DAN PEMILU INDIA</b>	<b>37</b>
2.1 Komposisi Masyarakat India	37
2.2 Demokrasi dan Demokratisasi di India	40
2.3 Struktur Pemerintahan India	45
2.4 Sistem Kepartaian India	50
2.4.1 Partai-Partai Regional	51
2.4.2 Partai-Partai Nasional	57
2.4.2.1 Partai Congress	58
2.4.2.2 Partai Janata Bharatiya atau <i>The Bharatiya Janata Party (BJP)</i>	70
2.5 Pemilu di India	71
2.5.1 Rangkaian Pemilu Lok Sabha India (1952 -2004)	72
<b>3. FAKTOR INTERNAL KEMENANGAN PARTAI CONGRESS PADA PEMILU LOK SABHA 2004</b>	<b>76</b>
3.1 Kepemimpinan Partai Congress	76
3.1.1 Partai Congress di Bawah Kepemimpinan Sonia Gandhi	82
3.2 Isu-Isu Populis Partai Congress Pada Masa Kampanye	91
3.3 Kebijakan Partai Congress Membangun Koalisi dengan Partai-Partai Regional Lainnya	98

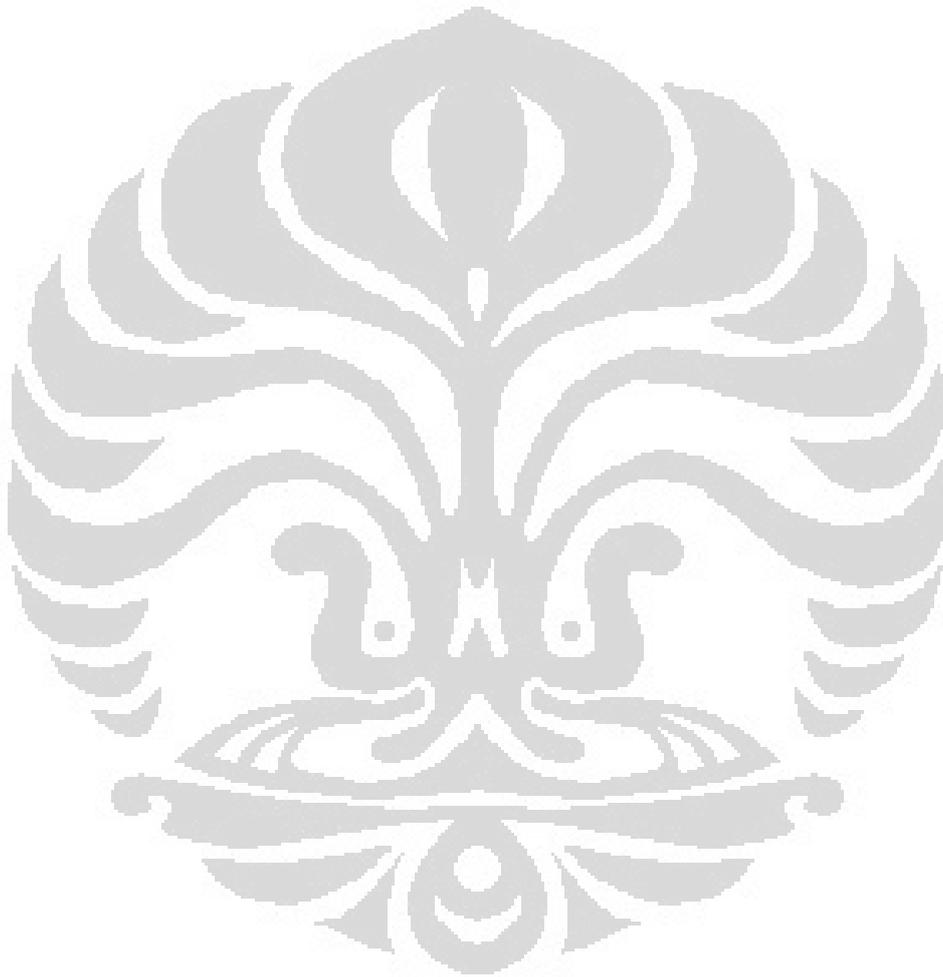
<b>4. FAKTOR EKSTERNAL KEMENANGAN PARTAI CONGRESS PADA PEMILU LOK SABHA 2004</b>	<b>115</b>
4.1 Perubahan Perilaku Pemilih India	119
4.2 Kebijakan Partai BJP Yang Eksklusif	127
4.2.1 Slogan Kampanye <i>India Shining</i> dan Kebijakan-Kebijakan Partai BJP yang <i>Pro-Rich</i>	127
4.2.2 Kebijakan Partai BJP Untuk Meningkatkan Penerapan Agenda Hindutva	139
<b>5. Kesimpulan</b>	<b>148</b>
DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN	
EPILOG	



## DAFTAR TABEL

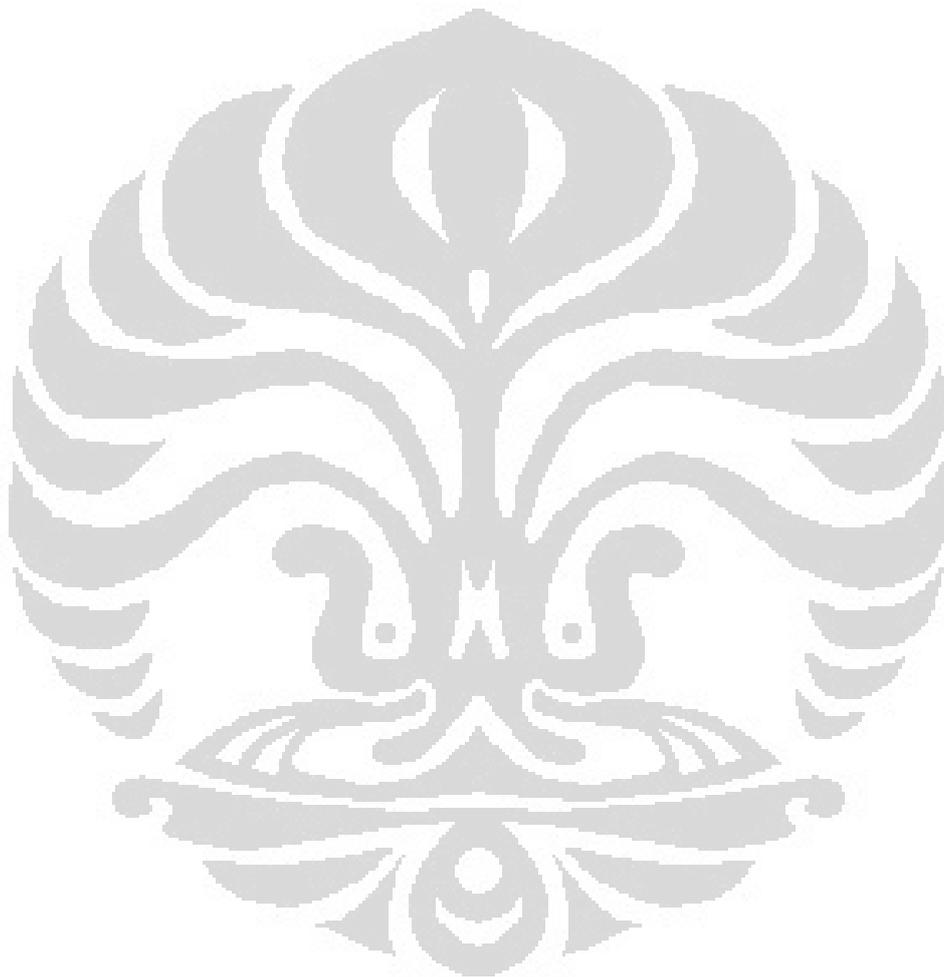
Tabel 1.1. Perbandingan Perolehan Kursi Partai Congress dan BJP pada Pemilu Lok Sabha 2004	11
Tabel 1.2. Daftar Narasumber Yang Akan Diwawancarai	35
Tabel 2.1. Komposisi Agama di India Berdasarkan Sensus 2000	38
Tabel 2.2. Nilai Indeks HDI India Pada tahun 2000	40
Tabel 2.3. Jumlah Kursi Di Lok Sabha Sejak Pemilu 1952-2004	48
Tabel 2.4. Dukungan Pemilih Terhadap Partai Regional	51
Tabel 2.5. Peningkatan Jumlah Partai Politik India (1952-2004)	52
Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Negara Bagian dan Teritori (Tahun 2004)	55
Tabel 2.7. Partai-Partai Regional India Yang Berpengaruh Setelah Pemilu 1989	56
Tabel 2.8. Partai-Partai Nasional India Sejak Pemilu 1952-2004	57
Tabel 2.9. Pemimpin Partai Congress Sejak 1947-2004	62
Tabel 2.10. Konstelasi Politik India Pada Pemilu 1996	67
Tabel 2.11. Perolehan Kursi Partai BJP di Lok Sabha sejak Pemilu 1952-Pemilu 2004	71
Tabel 2.12. Partai Mayoritas di Pada Pemilu Lok Sabha, 1952-2004	73
Tabel 3.1. Produksi Sektor Utama Ekonomi India, 1992-2003	97
Tabel 3.2. Perbandingan Basis Daerah: Partai Congress, BJP dan Partai-Partai Regional Antara Pemilu 1984 dengan Pemilu 1998	101
Tabel 3.3. Hasil Pemilu Lok Sabha India 2004, Koalisi Pimpinan Partai Congress	106
Tabel 3.4. Perbandingan Koalisi Partai Congress dan BJP antara Pemilu 2004 dengan Pemilu 1999	107
Tabel 3.5. Alokasi Jabatan Menteri Untuk Koalisi UPA 2004-2009	113
Tabel 4.1. Proyeksi Kursi Berdasarkan Poling Pemilu 2004	116
Tabel 4.2. Opini Pemilih Pada Kondisi Ekonomi, Berdasarkan Kelas (Tahun 1999-2004)	122
Tabel 4.3. Opini Pemilih Pada Kondisi Ekonomi,	

Berdasarkan Identitas Kasta (Tahun 1999-2004)	123
Tabel 4.4. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 1999-2004)	124
Tabel 4.5. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Pekerjaan (Tahun 1999-2004)	125
Tabel 4.6. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Latar Belakang Desa/Kota (Tahun 1999-2004)	126



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Perolehan Kursi Partai Congress di Lok Sabha Sejak Pemilu 1952-Pemilu 2004	61
Gambar 2.2. Perbandingan Partai Congress dan BJP Sejak Pemilu 1952-2004	74
Gambar 3.1. Perubahan Politik India Setelah Tahun 1989	100



## DAFTAR SINGKATAN

AC	: Arunachal Congress
AIADMK	: All India Anna Dravida Munetra Kazagham
AICC	: All India Congress Committee
AIIC (T)	: All India Indira Congress (Tiwari)
AITC	: All India Trimonal Congress
BJD	: Biju Janata Dal
BJP	: Bharatiya Janata Party
BJS	: All India Bhartiya Jan Sangs
BLD	: Bharatiya Lok Dal
BPI	: Bolshevik Party of India
BSP	: Bahujan Samaj Party
CPI	: Cummunist Party of India
CPM	: Cummunist Party of India (Marxist)
CSDS	: Center for the Study of Developing Societies
DMK	: Dravida Munnetra Kazagham
EIU	: Economist Intelligent Unit
FBL (MG)	: Forward Bloc (Marxist Group)
FBL (RG)	: Forward Bloc (Ruikar Group)
GDP	: Gross Domestic Product
HDI	: Human Development Index
HMS	: Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha
HVC	: Himachal Vikas Congress
HVP	: Haryana Vikas Party
ICS	: Indian Congres (Socialist)
INC	: Indian National Congress
JD	: Janata Dal
JD (S)	: Janata Dal (Seculer)
JD(U)	: Janata Dal (United)
JKPDP	: Jammu and Kashmir Peoples' Democratic Party
JMM	: Jharkhand Mukti Morcha
JNP	: Janta Party
JNP (S)	: Jan Party (Secular)
JP	: Janata party
JS	: Jan Sangh
KC (M)	: Kerala Congress
KLP	: Krishikar Lok Party
KMPP	: Kisan Mazdoor Praja Party
LJNSP	: Lok Jan Sakhti Party
LKD	: Lok Dal
MDKM	: Marumalachi Dravida Munnetra Kazagham
MUL	: Muslim League of Kerala
NCMP	: National Common Minimum Program
NCO	: Indian National Congress (Organisation)
NCP	: Nationalis Congress Party
NDA	: National Democratic Alliance
OBC	: Other Backward Castes

PDS	: Party of Democratic Socialism
PM	: Perdana Menteri
PMK	: Pattali Maltlital Katchi
PRBP	: Peoples Republican Party
PSP	: Praja Socialist Party
RCPI	: Revolutionary Communist Party of India
RJD	: Rahstriya Janata Dal
RRP	: Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad
RPI	: Republican Party of India
RPI (A)	: Republican Party of India (A)
Rs	: Rupee
RSP	: Revolutionary Socialist Party
RSS	: Rashtriya Swayamsevak Sangs
SAD	: Shiromani Akali Dal
SAP	: Samata Party
SCF	: All India Scheduled Caste Federation
SDSA	: State of Democracy in South Asia
SOC	: Socialist
SP	: Socialist Party
SSP	: Samyukta Socialist Party
SWA	: Swatantra
TDP	: Telegu Desam Party
TRS	: Telangana Rashtra Samiti
UF	: United Front
UNDP	: United Nations Development Program
RLD	: Rashtrya Lok Dal
TRC	: Tamizhaga Rajiv Congress

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran partai politik sebagai peserta pemilu dalam negara-negara era modern ini dianggap sebagai mesin yang menggerakkan kehidupan demokrasi. Pemilu yang diikuti oleh partai politik dan bersifat adil juga merupakan salah satu indikator demokrasi. Seperti yang disebutkan oleh G. Bingham Powell, Jr bahwa pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang kritis yang juga harus dibantu oleh organisasi-organisasi lainnya dan peraturan-peraturan yang mendorong terjadinya komunikasi dan kerjasama.<sup>1</sup> Hal ini pun telah terjadi di India, sejak negara tersebut merdeka.

India adalah salah satu negara kolonial Inggris yang telah mendapatkan kemerdekaannya pada 15 Agustus 1947. Pemerintahan kolonial Inggris menguasai India selama lebih dari dua abad. India akhirnya mendapatkan kemerdekaannya setelah melalui perjuangan yang panjang dan disertai dengan berbagai warisan peninggalan dari kolonial Inggris. Sampai saat ini, berbagai warisan peninggalan tersebut masih mempengaruhi keberlangsungan negara India. Sejak kedatangan pemerintahan kolonial Inggris, institusi-institusi dan struktur ekonomi pemerintahan Inggris membentuk ulang kehidupan masyarakat India baik di perkotaan dan pedesaan. Bahkan sistem pemerintahan India pasca kemerdekaan India.<sup>2</sup>

Pengaruh kolonial Inggris bagi masyarakat perkotaan India, khususnya putra-putra elite regional India yang berkasta tinggi, adalah mereka memiliki kesempatan mengenyam pendidikan dan masuk ke perguruan tinggi yang berbahasa pengantar bahasa Inggris. Hal ini menjadi kesempatan baru bagi mereka untuk mengenal ide-ide dan konsep-konsep Barat yang modern. Awal 1820-an, jumlah elite yang menguasai pendidikan Barat dan mampu berbahasa Inggris meningkat. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok yang memperdebatkan masa lalu dan masa depan negara India. Sementara pengaruh bagi masyarakat pedesaan India adalah adanya perubahan sasaran pertanian dari

<sup>1</sup> G. Bingham Powell Jr, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions* (New Haven: Yale University, 2000), hlm. 4.

<sup>2</sup> Judith E. Walsh, *A Brief History of India* (New York: Infobase Publishing, 2011), hlm. 137.

produksi pertanian untuk konsumsi lokal menjadi produksi pertanian untuk dijual di seluruh dunia.<sup>3</sup> Perubahan ini disebabkan adanya pengenalan sistem irigasi, mekanisasi industri dan pembangunan jalur transportasi yang menyalurkan hasil pertanian India ke berbagai daerah baik domestik maupun untuk kebutuhan negara di sekitar India.

Selain bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan India, kehadiran pemerintahan kolonial Inggris di India pun memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan India. Sebagaimana disebutkan David E. Apter bahwa sistem kolonialisme adalah sebagai proses modernisasi bagi negara-negara kolonial. Apter mengategorikan India pada tahap perwakilan ketika di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Senada dengan penegasan Apter bahwa kolonial Inggris menunjang terjadinya evolusi pemerintahan sebuah negara, dengan melibatkan elite-elite yang berpendidikan Barat dalam kehidupan politik.<sup>4</sup> Walaupun struktur pemerintahan India merupakan hasil pencampuran yang kompleks antara tradisi Inggris dan Amerika, demokrasi parlementer model Inggrislah yang digunakan oleh India. Pemimpin-pemimpin India sangat menghormati sistem Inggris. Mereka meyakini bahwa perdana menteri yang didukung oleh mayoritas di parlemen akan menggunakan kekuasaan yang ia butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi suatu negara baru.<sup>5</sup>

India sebagai salah satu negara di Asia yang demokratis dapat ditunjukkan dengan faktor lain. Pemerintahan yang demokratis, menurut Miriam Budiardjo, dapat terselenggara dengan terpenuhinya beberapa syarat-syarat dasar, di antaranya ialah; 1) perlindungan konstitusional; 2) badan kehakiman yang bebas

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>4</sup> David E. Apter, *Politik Modernisasi* (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 57-59. Apter menjelaskan kolonialisme sebagai proses modernisasi, berlangsung melalui empat tahap utama; tahap perintisan (*pionering*), birokrasi (*beraucratic*), perwakilan (*representative*), dan pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsibel government*). Menurut Apter, tahap perwakilan/ *representative* ini adalah tahap di mana para pemimpin masyarakat lokal berpartisipasi di dalam pemerintahan pusat. Institusi perwakilan ini muncul sebagai kancah invasi politik para nasionalis yang ingin mengubah parlemen dari lembaga perdebatan menjadi suatu badan pembuat kebijakan yang efektif. Di bawah pemerintahan kolonial Inggris, untuk pertama kalinya diperkenalkannya sistem perwakilan pada tahun 1853, dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan 12 orang. Akan tetapi, hanya setelah Undang-Undang Pemerintahan India 1935, kehadiran perwakilan orang Indian yang terpilih di parlemen menjadi penting.

<sup>5</sup> Monte Palmer, *Comparative Politic: Political Economy, Political Culture, and Political Interdependence* (Ontorio: Thomson Wadsworth, 2006), hlm. 386.

dan tidak memihak; 3) pemilihan umum yang bebas; dan 4) kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan untuk berserikat/berorganisasi.<sup>6</sup> Beberapa syarat tersebut telah tertuang dalam pembukaan Konstitusi 1950 India yang menjamin keadilan, kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan bagi semua rakyat India. Selain perlindungan konstitusional tersebut, India juga memiliki beberapa syarat lainnya yang menunjukkan dirinya sebagai salah satu negara demokrasi, yaitu pers yang bebas, jumlah kelompok penekan dan partai politik yang banyak. Banyaknya kelompok penekan atau partai politik ini menunjukkan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk wadah berkumpul, berdiskusi atau berpendapat. Selain itu, diselenggarakannya pemilu dalam interval waktu yang teratur dan berkesinambungan.<sup>7</sup> Tidak ada kelompok masyarakat India yang hak pilihnya dibatasi atau dilarang.

Pemilu di India, mulai Pemilu 1952 hingga Pemilu 1999, diikuti oleh banyak partai politik. Sistem kepartaian India sejak Pemilu 1952 hingga Pemilu 1999 mengalami perubahan-perubahan. Perubahan sistem partai politik India ini dapat pula disebut dengan evolusi sistem partai politik. Pemahaman perihwal evolusi sistem partai India tersebut dapat digali mulai dari pembentukan Partai Congress sebagai sebuah kekuatan politik, yang berdiri sejak tahun 1885, dan menjadi sebuah gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan India.

Para ahli politik India mengelompokkan evolusi sistem kepartaian India ini kedalam empat tahap. *Tahap pertama*, antara Pemilu 1952 hingga Pemilu 1967, sistem partai politik India dikelompokkan sebagai sistem partai tunggal. Walaupun partai politik yang mengikuti pemilu tersebut jumlahnya banyak, terdapat satu partai yang dominan, yaitu partai Congress. Tahap ini disebut juga dengan partai Congress sebagai partai konsensus.<sup>8</sup> *Tahap kedua*, antara Pemilu 1967 hingga Pemilu 1989, walaupun partai Congress masih mampu memenangkan pemilu, partai ini tidak dapat menghindari kekuatan-kekuatan

<sup>6</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 116.

<sup>7</sup> Monte Palmer, *op.cit.*, hlm. 408.

<sup>8</sup> Disebut sebagai partai konsensus dapat dipahami karena partai Congress berhasil menguasai seluruh perpolitikan India, baik di tingkat pusat atau lokal, meskipun masih ada beberapa partai politik lainnya yang menjadi peserta pemilu. Besarnya dukungan terhadap partai Congress ini, hampir seluruh wilayah India, membuat partai ini mendapatkan status sebagai partai konsensus. Sebagaimana definisi konsensus itu sendiri, yaitu kesepakatan umum. Dengan kata lain, partai Congress mendapatkan dukungan hampir di seluruh wilayah India. Sebagaimana definisi konsensus, yaitu kesepakatan bersama.

oposisi. Para ahli politik India pun menggambarkan tahap ini sebagai tekanan terhadap partai Congress. *Tahap ketiga*, antara Pemilu 1989 hingga Pemilu 1998 sistem partai politik India kemudian digolongkan sebagai sistem multipartai. Tahap ini digambarkan sebagai kemunduran atas kekuasaan partai Congress secara relatif dan munculnya partai Janata Bharatiya (Bharatiya Janata Party-BJP) serta partai-partai regional lainnya. Terakhir, *tahap empat*, antara Pemilu 1998 hingga sekarang sistem kepartaian India yang multipartai digambarkan sebagai 'era koalisi' yang sempurna. Partai Congress dan BJP adalah partai besar India yang masing-masing memimpin aliansinya atau partai-partai regional lainnya, yang sebagian besar adalah partai regional.<sup>9</sup>

Kemunduran partai Congress secara relatif, seperti yang digambarkan para ahli politik India pada tahap ketiga, terlihat ketika pada Pemilu 1989. Meskipun pada Pemilu 1989 berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha sebanyak 197 kursi dibandingkan partai lainnya, partai Congress tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya yang di Lok Sabha untuk bisa menjalankan pemeritahan.<sup>10</sup> Partai yang bisa menjalankan pemerintahan adalah partai yang berhasil mendapatkan minimal 50% + 1 anggota, yaitu 273 dari 543 anggota-anggota Lok Sabha.

Kegagalan partai Congress dalam membentuk koalisi di bawah kepemimpinan Rajiv Gandhi pada Pemilu India 1989 ini merupakan awal dari perubahan besar di India. Kekalahan tersebut telah mengubah perpolitikan India, dan menjadi titik balik yang penting dalam perkembangan sistem kepartaian India. Ini ditandai dengan munculnya kekuatan politik baru yang menantang hegemoni partai Congress yang merupakan partai yang berkuasa sejak India merdeka, misalnya partai BJP yang berhasil mendapatkan kursi terbanyak pada Pemilu Lok Sabha India tahun 1996, 1998 dan 1999, ataupun beberapa partai regional yang memiliki pengaruh besar di masing-masing regional mereka.

<sup>9</sup> Maidul Islam, "Verdict 2004: From Identities to Issues and Interests?," Makalah Seminar Sarjana Muda Internasional, Maret 2006, hlm. 2.

<sup>10</sup> Robert L. Hardgrave dan Stanley A. Kochanek, *India: Government and Politics in Developing Nation* (New York: Harcourt-Braced World Inc., 2008), hlm. 260.

## 1.2 Rumusan Masalah

Selama hampir empat puluh tahun pasca merdeka, India dikenal sebagai negara demokrasi dengan dominasi satu partai yaitu partai Congress. Menurut Richard L. Park dan Bruce Bueno de Mesquita, dominasi mula-mula partai Congress memiliki empat sumber yaitu: karisma Mahatma Gandhi dan Pandit Jawaharlal Nehru, martabat partai Congress yang bertambah karena dikenal sebagai kendaraan gerakan kemerdekaan, dasar organisasi lokal dan regional partai Congress yang luas, dan fleksibilitas partai dalam menarik jajaran ideologi, regional, dan kelompok komunal lebih luas atau yang disebut dengan partai lintas-kelompok (*Catch-All Party*).<sup>11</sup>

Mahatma Gandhi dan Pandit Jawaharlal Nehru merupakan dua dari banyak tokoh pejuang kemerdekaan India. Kedua tokoh ini menggunakan partai Congress, yang memiliki nama asli *The Indian National Congress*—INC, sebagai kendaraan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Keberhasilan partai Congress sebagai satu kekuatan politik untuk memperoleh kemerdekaan India membuatnya menjadi salah satu aktor politik penting dalam perpolitikan India.

Pandit Jawaharlal Nehru, yang selanjutnya disebut Nehru, merupakan presiden atau ketua partai Congress yang menjadi perdana menteri India pertama. Dalam memimpin partai Congress, Nehru dikenal sebagai pemimpin yang berkarisma. Nehru disebut sebagai “komandan besar”. Sebutan ini terkait dari peran penting yang dimainkannya ketika mengatasi permasalahan internal partai Congress. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, partai Congress memiliki karakteristik sebagai partai yang rentan dengan fraksi-fraksi, internal partai yang sangat kompetitif, personal pemimpin fraksi lebih bersifat pragmatis daripada mendasarkan kepentingannya atas ideologi, dan konflik fraksi menempati posisi teratas dalam partai Congress. Kemampuan Nehru dalam memimpin dan mengambil kebijakan dan politik secara menyeluruh di internal partai membuatnya menjadi tokoh partai yang berpengaruh.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Richard L. Park and Bruce Bueno de Mesquita, *India's Political Systems* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1979), hlm. 121.

<sup>12</sup> Paul R. Brass, *The Politics of India since Independence* (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm. 70.

Dominasi partai Congress dalam perpolitikan India secara keseluruhan dapat dilihat melalui kemenangan partai Congress baik pemilihan di Lok Sabha atau Majelis Rendah di parlemen nasional dan Vidhan Sabha atau Dewan Perwakilan Daerah di parlemen negara bagian secara mayoritas. Dominasi ini memberikan kesan bahwa partai Congress merupakan satu-satunya partai yang mampu membentuk sebuah gerakan nasional, khususnya selama dua dekade pasca India merdeka. Pemilu India di bawah pimpinan Nehru yaitu Pemilu 1952, 1957, dan 1962 merupakan era kemenangan Congress yang terus berlanjut, baik di parlemen nasional maupun parlemen di negara bagian.<sup>13</sup>

Tidak hanya di bawah kepemimpinan Nehru partai Congress mampu mendominasi perpolitikan India, tapi juga mampu bertahan hingga di bawah kepemimpinan dua generasi Nehru, yaitu putrinya Indira Gandhi dan cucunya Rajiv Gandhi, hingga tahun 1989.<sup>14</sup> Dinasti Nehru-Gandhi memiliki peran penting dalam keberlangsungan partai Congress. Dengan demikian adalah hal yang aksiomatis bahwa perpolitikan India hingga tahun 1989 digambarkan dengan dominan satu partai yaitu partai Congress, dengan keberadaan anggota dinasti Nehru-Gandhi sebagai pemimpin partai.

Di era kepemimpinan Indira Gandhi, partai Congress berhasil mendapatkan jumlah kursi yang mayoritas di Lok Sabha. Meskipun demikian, terjadi konflik internal di awal kepemimpinan Indira, yaitu antara kelompok Indira Gandhi dengan pejabat teras Congress yang disebut Sindikat. Konflik ini bermula ketika Indira Gandhi menolak sikap Sindikat yang menurutnya terlalu mendikte dirinya dan Congress. Konflik internal ini pun berakibat pada pecahnya partai Congress menjadi dua bagian pada tahun 1969, yaitu fraksi Congress (I) untuk Indira dan fraksi Congress (O) untuk oposisi atau Sindikat. Kekalahan Congress ketika dipimpin Indira hanya terjadi pada Pemilu 1977. Hal ini disebabkan pada tahun 1975 Indira Gandhi memberlakukan UU Darurat Militer dan menangkap banyak tokoh oposisi dengan alasan mengganggu stabilitas negara. Pemberlakuan UU Darurat Militer tersebut dikarenakan banyaknya tekanan yang diterima Partai Congress, baik dari dalam maupun luar Congress.

<sup>13</sup> Richard L. Park, *op.cit.*, hlm. 121-122.

<sup>14</sup> Robert L. Hardgrave, *op.cit.*

Meninggalnya Indira Gandhi pada tanggal 31 Oktober 1984 mengakibatkan pemilu dipercepat pada tahun itu juga. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, maka Pemilu Lok Sabha tahun 1984 merupakan pemilu di mana partai Congress mendapatkan jumlah 405 kursi di Lok Sabha atau sama dengan 49,1%. Rajiv Gandhi pun menggantikan kepemimpinan ibunya sebagai pemimpin partai Congress. Salah satu faktor yang menyebabkan besarnya jumlah kursi yang diperoleh partai Congress di *Lok Sabha* adalah simpati terhadap meninggalnya Indira Gandhi.

Pasca Indira Gandhi, Rajiv Gandhi dipandang sebagai orang yang tepat dalam memimpin partai Congress. Rajiv dianggap lebih fleksibel dibandingkan ibunya dan menggunakan kekuasaan persuasifnya untuk membangun kembali organisasi partai pada tingkat negara bagian. Di bawah pemerintahan Rajiv, pertumbuhan ekonomi India mengalami peningkatan. Akan tetapi, orang-orang terdekat Rajiv memberikan kontribusi yang negatif terhadap partainya. Kepemimpinan Rajiv Gandhi yang dikenal bersih menjadi rusak karena ketidaktegasannya terhadap orang-orang terdekatnya yang nyata melakukan korupsi secara terang-terangan. Selain munculnya banyak partai-partai regional pada akhir tahun 1980-an, kasus korupsi oleh anggota-anggota partai Congress membuat partai Congress tidak mendapatkan dukungan yang cukup di Lok Sabha pada Pemilu 1989. Popularitas partai Congress di bawah pimpinan Rajiv Gandhi mengalami kemunduran secara relatif, sebagaimana yang digambarkan para ahli politik India dalam mengelompokkan evolusi sistem kepartaian India.

Selain kasus korupsi anggota-anggota partai Congress, meninggalnya Rajiv Gandhi pada tanggal 21 Mei 1991, sehari setelah Pemilu 1991 berlangsung, mengakibatkan partai Congress terus mengalami penurunan. Keberadaan anggota dinasti Nehru-Gandhi yang oleh elite-elite partai Congress dianggap penting, membuat para elite partai Congress menawarkan posisi pemimpin partai Congress kepada Sonia Gandhi, yang merupakan isteri Rajiv Gandhi. Sonia Gandhi dipandang lebih memungkinkan sebagai pemimpin partai Congress dibandingkan kedua anaknya yang masih muda, yaitu Priyanka dan Rahul. Akan tetapi, saran

dan bujukan para elite partai Congress ditolak Sonia Gandhi.<sup>15</sup> Oleh karena tawaran para elite partai Congress ditolak oleh Sonia Gandhi, partai Congress pun kemudian memilih Narasimha Rao sebagai ketua partai Congress. Narasimha Rao menjadi ketua partai Congress serta menjadi perdana menteri India karena partai Congress memenangkan Pemilu 1991. Dinasti Nehru-Gandhi berakhir, untuk pertama kali partai dalam waktu yang cukup lama, Congress dipimpin oleh dinasti non-Nehru-Gandhi.

Partai Congress di bawah pimpinan Narasimha Rao memiliki persamaan ketika dipimpin oleh Rajiv Gandhi, yaitu adanya tindakan korupsi oleh anggota-anggota partai Congress. Tindakan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh anggota-anggota partai Congress, Narasimha Rao dan anaknya pun kemudian diketahui juga melakukan tindakan korupsi. Partai Congress yang mengalami krisis kepemimpinan, penyelenggaraan pemerintahan yang kurang memuaskan di bawah pimpinan Narasimha Rao serta semakin berpengaruhnya partai BJP pada akhir tahun 1990-an mengakibatkan partai Congress mengalami penurunan popularitas. Partai Hindu Nasionalis ini pun kemudian menjadi pilihan alternatif bagi rakyat India selain partai Congress. Menurunnya popularitas partai Congress dapat dilihat dengan kalahnya partai Congress pada Pemilu 1996, 1998, dan 1999 secara berturut-turut. Sementara partai BJP, berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha pada ketiga pemilu tersebut.<sup>16</sup> Dari ketiga pemilu tersebut, partai BJP berhasil menjadi partai yang memerintah dalam waktu yang lama adalah Pemilu 1999, di mana partai BJP memerintah India hingga tahun 2004. Pada Pemilu 1996, partai BJP gagal menjadi partai yang memerintah karena tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya di Lok Sabha dalam waktu yang ditentukan, sementara untuk Pemilu 1998, Partai BJP tidak bertahan lama sebagai partai yang memerintah karena kalah dalam mosi tidak percaya.

Pemilu India ke-14 lalu pada 2004 dilakukan dalam empat tahap antara 20 April dan 20 Mei 2004. Pada pemilu ini diperkirakan 390 juta pemilih

<sup>15</sup> Nurul Islam Sarkar, *Sonia Gandhi: Thrust with India* (New Delhi: Atlantic Publisher, 2007), hlm. 19-20.

<sup>16</sup> Iman Nurendo, *Kekalahan Partai Congress pada Pemilu India Tahun 1996, 1998, dan 1999: Sebuah Kajian Perbandingan* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm. 7-11.

memberikan suaranya atau 56% dari 675 juta pemilih yang terdaftar.<sup>17</sup> Dalam sejarah pemilu India, Pemilu India 2004 digambarkan sebagai pemilu yang unik. Hasil pemilu yang diluar dugaan oleh sebagian besar orang India, baik dua partai terbesar India, yaitu partai Congress dan BJP, maupun para pengamat politik India yang sebelumnya memprediksi partai Congress akan kalah. Hasil Pemilu India 2004 membuat pertanyaan “mengapa BJP kalah?” dan “mengapa partai Congress menang?” banyak diperbincangkan atau didiskusikan. Hal ini terlihat dalam koran-koran India dan oposisi-oposisi yang terlibat dalam perdebatan ideologi yang kuat dalam menerjemahkan hasil pemilu yang diluar dugaan tersebut.<sup>18</sup> Perdebatan mengenai hasil Pemilu India 2004 ini pun digambarkan seperti semangatnya pemilu itu sendiri.

Sebelum hasil Pemilu 2004 diumumkan, pemimpin partai Congress berusaha untuk mengurangi memberikan harapan-harapan sebelum hasilnya diumumkan. Sementara partai BJP yang dipimpin oleh, Atal Behari Vajpayee, dengan ‘*India Shining*’ dan ‘*Feel Good*’ sebagai slogan kampanye pemilu, memiliki percaya diri yang besar akan memenangkan pemilu. Bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan, Vajpayee telah mendesak untuk mengubah susunan pos-pos menteri yang menguntungkan.

Pemilu India 2004 tersebut dipercepat 6 bulan dari jadwal pemilu yang sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu Oktober 2004. Partai BJP yang memiliki beberapa faktor yang menjamin percaya dirinya untuk menang pada Pemilu 2004, memutuskan untuk mempercepat pemilu Lok Sabha 2004. Beberapa faktor tersebut diantaranya; *pertama*, perekonomian India di bawah pemerintahannya telah mengalami pertumbuhan yang baik dengan tingkat pertumbuhan 8% per tahun. *Kedua*, terdapat kemajuan negosiasi dengan negara Pakistan mengenai permasalahan negara bagian Kashmir. *Ketiga*, melalui *polling* diketahui bahwa rakyat India secara konsisten menyatakan bahwa Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee adalah orang yang paling diinginkan untuk memimpin India. *Keempat*, sebagian besar survey menunjukkan bahwa koalisi partai BJP adalah partai yang akan menjadi pemenang Pemilu 2004, walaupun terdapat perbedaan tipis dengan

<sup>17</sup> Judith E. Walsh, *op.cit.*, hlm. 310.

<sup>18</sup> Zoya Hasan, “Indian Elections 2004: A Setback for BJP’s Exclusivist Agenda,” diakses dari <http://www.ceri-sciencespo.com/archive/sept04/artzh.pdf>, pada tanggal 27 Oktober 2011, hlm. 2.

koalisi pimpinan Congress. *Kelima*, pemilu di lima negara bagian India yang dilaksanakan pada akhir tahun 2003, tiga di antaranya dimenangkan partai BJP yaitu Rajasthan, Madhya Pradesh, dan Chhattisgarh.<sup>19</sup> Menjelang pemilu tersebut, partai pemerintahan atau koalisi yang dipimpin partai BJP, sudah memprediksi bahwa partainya akan kembali memenangkan pemilu tersebut. Beberapa elite partai BJP memastikan hal tersebut. Misalnya presiden partai BJP, Venkaiah Nandu, menyatakan bahwa era Congress telah berakhir dalam politik India, era partai BJP telah mulai seperti dalam pernyataannya “*the Congress era in Indian politics is over, and the era of the BJP has begun.*”<sup>20</sup>

Sebagian besar ahli politik India yang terpelajar memprediksikan kemenangan partai BJP pada Pemilu 2004. Sementara partai Congress, selain tidak mampu lagi menjadi partai yang dominan seperti pada era 50-an hingga 80-an, diperhitungkan pada Pemilu 2004 yang lalu tidak akan kembali berkuasa.<sup>21</sup> Dugaan para ahli politik India ini didukung karena kekalahan partai Congress atas BJP pada pemilu negara bagian akhir 2003 di tiga negara bagian, yaitu Rajasthan, Madhya Pradesh dan Chhattisgarh. Partai Congress pun diduga semakin melemah. Dikarenakan India menggunakan sistem pemerintahan parlementer, partai yang mendapatkan kursi dominan (50%+1) otomatis menjadi partai yang menjalankan pemerintahan. Sementara partai lainnya masih bisa menjadi partai yang memerintah dengan membentuk koalisi pemerintah, apabila tidak ada satu partai tunggal yang mampu mendapatkan kursi mayoritas (50%+1).

Partai Congress yang diprediksi kalah dan partai BJP akan menang pada Pemilu Lok Sabha India 2004 tidak menjadi kenyataan. Ketika hasil pemilu diumumkan, partai Congress berhasil mendapatkan 145 kursi (27%) dan secara keseluruhan bersama aliansinya, yaitu UPA (*United Progressive Alliance*) yang dipimpinnya mendapatkan 224 kursi (49%) dari 543 kursi di Lok Sabha. Sementara partai BJP yang kalah tipis atas partai Congress mendapatkan 138 kursi (25%) dan secara keseluruhan bersama aliansi yaitu NDA (*National*

<sup>19</sup> Steven I. Wilkinson, “Election in India: Behind the Congress Back,” *Journal of Democracy*, Vol. 16, No. 1, Januari 2005, hlm. 153-154.

<sup>20</sup> John Zavos, “The Shapes of Hindu Nationalism”, dalam Khatarine Adeney dan Lawrence Saez, *Coalition Politics and Hindu Nationalism*, (New York: Routledge, 2005), hlm. 36.

<sup>21</sup> Baldev Raj Nayar, “Regime Change in A Divided Democracy,” *Asian Survey*, Vol. XLV, No. 1, Januari/Februari 2005, hlm. 72.

*Democratic Alliance*) yang dipimpinnya mendapatkan 185 kursi (34%) dari 543 kursi di Lok Sabha. Aliansi partai Congress berhasil menjadi partai yang memerintah setelah didukung oleh partai-partai kiri dari luar, yang memiliki 69 kursi.<sup>22</sup> Berikut tabel Perbandingan Perolehan Kursi partai Congress dan partai BJP pada Pemilu Lok Sabha 2004.

**Tabel 1.1. Perbandingan Perolehan Kursi Partai Congress dan BJP pada Pemilu Lok Sabha 2004**

	Congress	Aliansi Congress <sup>23</sup>	BJP	Aliansi BJP <sup>24</sup>
Kursi	145	224	138	185
%	27	49	25	34

Sumber: Telah diolah kembali dari Paranjoy Guha Thakurta, *Divided We Stand: India in a Time of Coalitions* (New Delhi: Sage Publications, 2007), hlm. 79.

Kekalahan partai Congress pada tiga pemilu Lok Sabha sebelumnya salah satunya disebabkan karena terjadi krisis kepemimpinan dalam tubuh partai Congress karena tidak adanya dinasti Nehru-Gandhi yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan India. Setelah Rajiv Gandhi meninggal, maka Sonia Gandhi adalah kandidat yang pertama kali dipertimbangkan menjadi pemimpin partai Congress, tetapi tawaran tersebut dua kali ditolak karena alasan ingin lebih memperhatikan keluarganya. Keadaan partai Congress yang semakin memburuk pun akhirnya membuat Sonia Gandhi menerima tawaran para sindikat Congress sebagai ketua partai Congress. Meski menghadapi beberapa tantangan,

<sup>22</sup> Paranjoy Guha Thakurta, *Divided We Stand: India in a Time of Coalitions* (New Delhi: Sage Publications, 2007), hlm. 79.

<sup>23</sup> *Indian National Congress (INC), Rashtriya Janata Dal (RJD), Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), Nationalist Congress Party (NCP), Pattali Malttal Katchi (PMK), Telangana Rashtra Samiti (TRS), Jharkhand Mukti Morcha (JMM), Lok Jan Sakhti Party (LJNSP), Marumalachi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK), Janata Dal (Secular) JD (S), Muslim League of Kerala (MUL), Republican Party of India (A) RPI (A), Jammu and Kashmir Peoples' Democratic Party (JKPDP), Republican Party of India (RPI), Peoples Republican Party (PRBP), Kerala Congress (M) (KCM), Party of Democratic Socialism (PDS), Arunachal Congress (AC), Himachal Vikas Congress.* Untuk alokasi kursi lihat Tabel 3.2.

<sup>24</sup> *Bharatiya Janata Party (BJP-138 kursi), Telegu Desam Party (TDP-5 kursi), Janata Dal (United) JD (U)-7 kursi, Shiv Sena-12 kursi, All India Trimonal Congress (AITC-2 kursi), Biju Janata Dal (BJD-11 kursi), Shiromani Akali Dal (SAD-7kursi), All India Anna Dravida Munetra Kazhagam (AIADMK-0 kursi), Rashtrya Lok Dal (RLD-3kursi).*

di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi, krisis kepemimpinan telah dapat diatasi dan terciptanya konsolidasi dalam tubuh partai Congress.<sup>25</sup>

Menjelang pemilu 2004, Sonia Gandhi mengumumkan bahwa partainya akan membangun koalisi dengan partai-partai regional lainnya. Pada Pemilu 2004 tersebut, partai Congress didukung oleh banyak partai-partai regional lainnya, yang pada Pemilu 1999 adalah aliansi partai BJP. Sebelumnya, menjelang Pemilu 1999 Komite Kerja Congress memutuskan tidak menerapkan Deklarasi Panchmarhi 1998, yang menyatakan bahwa partainya akan tetap bisa memenangkan pemilu dengan dirinya sendiri tanpa adanya koalisi pra-pemilu yang kuat. Deklarasi Panchmarhi ini sebenarnya merugikan partai Congress sendiri. Hal ini diakibatkan karakteristik koalisi yang ada pada masa tersebut adalah koalisi anti-Congress dari partai-partai regional yang muncul pada tahun 1980-an. Sementara partai BJP, saingan partai Congress, malah membangun koalisi dengan partai-partai lainnya. Keputusan partai BJP untuk membangun koalisi pra-pemilu dengan aliansinya ini dikenal dengan adanya Deklarasi Chennai 1999.<sup>26</sup> Sementara partai BJP menjelang Pemilu 2004, mengurangi beberapa aliansinya. Keputusan partai Congress untuk tidak menerapkan Deklarasi Pachmarhi tersebut setelah dilakukannya pertemuan para elite partai Congress di Shimla.

Partai BJP dalam kampanyenya fokus pada ekonomi India yang semakin membaik karena telah mengalami globalisasi yang telah memberikan kesejahteraan kepada kelas menengah perkotaan dan kelas bisnis India yang merupakan kelompok pendukung partai BJP. Pemerintahan partai BJP dalam memusatkan perhatian pada reformasi ekonomi melakukan privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara. Undang-undang tenaga kerja yang baru memudahkan bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja dan investasi asing. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan partai BJP sebagian besar merupakan kebijakan yang pro-rich. Walaupun berhasil meningkatkan perekonomian India,

<sup>25</sup> Karli Srinivasulu, "Political Mobilization, Competitive Populism, and Changing Party Dynamics in Andhra Pradesh", dalam Paul Wallace dan Ramashray Roy, *India's 2009 Elections: Coalition Politics, Party Competition, and Congress Continuity* (New Delhi: Sage Publication India, 2011), hlm. 301.

<sup>26</sup> Bertrand Lefebvre dan Cyril Robin, "Pre-electoral Coalitions, Party System and Electoral Geography: A Decade of General Elections in India (1999-2009)," *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, No. 3, 2009, hlm.6.

sebagian besar masyarakat India yang miskin dan pedesaan kurang mendapatkan pengaruh tersebut. Partai BJP yang menekankan agenda *Hindutva* ternyata berdampak pada sedikitnya usaha dalam menghentikan kekerasan terhadap kelompok agama-agama di luar Hindu. Oleh karena itu, masyarakat miskin dan pedesaan serta kelompok masyarakat perkotaan yang non-Hindu menjadi kelompok yang kurang beruntung dalam pemerintahan partai BJP. Sonia Gandhi dalam kampanyenya menyerang isu-isu yang menjadi fokus partai BJP tersebut. Menurut Sonia Gandhi, sebagian besar masyarakat India tidak merasakan gaya hidup yang disebut-sebut oleh pemerintahan partai BJP. Oleh karena itulah, Sonia Gandhi dalam kampanyenya menjanjikan pemerintahan yang lebih inklusif bagi semua masyarakat India dengan slogan kampanyenya *Aam Aadmi*.<sup>27</sup> Secara garis besar, selain menekankan isu-isu populis partai Congress berusaha memberikan kritikan terhadap pemerintahan partai BJP yang semakin giat menerapkan kebijakan yang eksklusif.

Bagi partai-partai peserta pemilu, pemilu merupakan waktu yang paling menentukan apakah partai mereka akan menjadi partai yang menjalankan pemerintahan apabila berhasil memenangkan pemilu tersebut. Keadaan ini, juga penting bagi partai Congress dan BJP, dua partai terbesar India. Kemenangan Pemilu 2004 ini menjadi penting bagi partai Congress di dalam membangun kembali basis-basis partainya yang telah mengalami penurunan selama 8 tahun menjadi partai oposisi.

Untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini akan menjawab ***“Mengapa Partai Congress (INC) dapat memenangkan Pemilu Lok Sabha India tahun 2004?”*** Pertanyaan ini akan diturunkan menjadi:

1. Faktor-faktor internal apakah yang menyebabkan kemenangan partai Congress (INC) pada Pemilu Lok Sabha India 2004?
2. Faktor-faktor eksternal apakah yang menyebabkan kemenangan partai Congress (INC) pada Pemilu Lok Sabha India 2004?

<sup>27</sup> Zoya Hasan, “Bridging a Growing Divide? The Indian National Congress and Indian Democracy,” *Contemporary South Asia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2006, hlm. 474.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses Pemilihan umum Lok Sabha India 2004.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India 2004. Faktor-faktor yang akan diteliti mencakup faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepemimpinan partai Congress dan kebijakan-kebijakan atau isu-isu yang dikeluarkan partai Congress. Faktor eksternal meliputi partai-partai yang menjadi koalisi partai Congress dan kebijakan-kebijakan partai BJP saat menjadi partai yang memerintah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk akademis dan praktis. Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran akan teori koalisi pra-pemilu, khususnya pada masa pemilu India 2004. Secara praktik, penelitian ini memberikan masukan bagi pemilihan India, khususnya partai-partai India. Pemilu India 2004 menurut pengamatan dunia dikatakan sebagai pemilu yang demokratis, peralihan kekuasaan antara partai yang baru muncul, yaitu partai BJP, kepada partai besar yang telah berkuasa sejak India merdeka, yaitu partai Congress. Hal ini sekaligus dapat menjadi masukan bagi partai-partai nasional Indonesia yang akan menjadi peserta pemilu.

### **1.5 Kajian Literatur**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas hasil Pemilu India 2004, terutama yang berkaitan dengan kemenangan partai Congress. Akan tetapi, beberapa tulisan yang akan dijelaskan di bawah ini, sebagian besar menggunakan satu aspek yang berhubungan dengan penyebab kemenangan partai Congress. Yang kemudian oleh peneliti sendiri aspek-aspek tersebut digolongkan menjadi faktor internal atau faktor eksternal. Dengan demikian, walaupun peneliti menggunakan tulisan-tulisan ini sebagai sumber data, penelitian ini diupayakan untuk membahas secara lengkap mengenai penyebab

kemenangan partai Congress pada Pemilu India 2004, baik internal dan eksternal Congress.

*Pertama*, tulisan Arun R. Swamy dengan judul *Back to the Future: The Congress Party's Upset Victory in India's 14<sup>th</sup> General Election*.<sup>28</sup> Dalam tulisan ini, Swamy menjelaskan bahwa partai Congress, yang diprediksi kalah, berhasil memenangkan Pemilu 2004 serta mengalahkan BJP. Swamy menjelaskan bahwa kemenangan Congress ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan karena telah ditunjukkan melalui hasil *polling* melawan aliansi NDA, yang dipimpin partai BJP. Hasil *polling* tersebut memang menunjukkan bahwa, walaupun beda tipis, partai BJP lebih unggul dibandingkan partai Congress. Selanjutnya Swamy menjelaskan secara singkat dua hal yang membuat partai Congress menang. *Pertama*, meskipun mendukung program reformasi ekonomi yang tetap dijalankan partai BJP, partai Congress memberikan kritikan terhadap usaha-usaha partai BJP dalam melakukan upaya reformasi tersebut. Partai Congress menyatakan bahwa pemerintahan partai BJP menekankan isu-isu yang menarik bagi kelas menengah perkotaan, yang tidak mengesankan bagi masyarakat miskin dan pemilih pedesaan. Slogan partai BJP, yaitu 'India Shining' menunjukkan rasa optimisme pemerintah terhadap prestasi pemerintah dalam semua arena, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan jalan raya yang modern hingga peningkatan pendapatan internasional lainnya. Hanya sedikit isu-isu yang relevan dengan pemilih mayoritas India yang sebagian besar adalah masyarakat miskin, pedesaan dan yang mata pencahariannya tergantung pada pertanian. Isu-isu inilah kemudian yang diperjuangkan oleh partai Congress selama kampanye Pemilu 2004. Aspek ini, oleh peneliti dapat digolongkan baik internal dan eksternal partai Congress. Menjadi internal Congress, karena isu ini menjadi isu yang diperjuangkan Congress semasa kampanyenya. Menjadi eksternal Congress karena prestasi partai BJP yang tidak memuaskan membuat pemilih memilih partai yang lebih memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan dasar, terutama masyarakat kelas miskin dan pemilih pedesaan. Aspek kedua yang dijelaskan

<sup>28</sup> Arun R. Swamy, "Back to the Future: The Congress Party's Upset Victory in India's 14<sup>th</sup> General Election," *Asia-Pacific Center for Security Studies*, Terbitan Berkala, No. 0704-0188, hlm. 1-12. Sejak tahun 2000 menjadi staf peneliti *East-West Center's* dengan fokus demokratisasi, konflik etnik, dan isu-isu keamanan regional di Asia, khususnya Asia Selatan.

swamy adalah strategi partai Congress dalam membangun koalisi dengan partai-partai regional lainnya. Hal yang tidak dilakukan partai Congress pada pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 1999. Akan tetapi, Swamy tidak menjelaskan dengan jelas partai-partai apa saja yang menjadi aliansi partai Congress dan mengapa partai-partai tersebut mau berkoalisi dengan partai Congress. Aspek ini akan dijelaskan secara mendalam oleh peneliti dalam faktor eksternal.

*Kedua*, tulisan Zoya Hasan dengan judul *Bridging a Growing Divide? The Indian National Congress and Indian Democracy*.<sup>29</sup> Sebenarnya tulisan Hasan ini secara garis besar menggali realisasi janji-janji yang diberikan partai Congress ketika kampanye Pemilu 2004, yaitu menghadirkan pemerintahan yang lebih inklusif. Dengan kata lain, upaya-upaya yang dilakukan partai Congress bersama aliansinya setelah Pemilu 2004 berlangsung. Akan tetapi, menurut peneliti, tulisan ini akan membantu peneliti dalam menggali lebih dalam, baik aspek internal dan eksternal Congress. Diawal tulisannya tersebut, Hasan menuliskan bahwa Pemilu 2004 adalah hasil dari pemberontakan orang-orang yang merasa tidak diikutkan dalam proses reformasi di bawah pemerintahan partai BJP. Dalam usaha pemimpin partai Congress mendapatkan dukungan organisasi, ia tetap menekankan kejelasan ideologi untuk menyakinkan pemilih bahwa partai Congress akan menunjukkan pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif. Dengan kata lain, para pemilih memberikan dukungannya kepada partai Congress, yang memimpin aliansi UPA, yang menjanjikan pluralisme dan inklusifisme dan menolak politik pembelahan atau eksklusifisme partai BJP. Menurut peneliti, aspek ini hampir sama dengan yang dituliskan Swamy, dapat dilihat sebagai internal dan eksternal partai Congress. Isu-isu yang diperjuangkan partai Congress selama kampanye ini akan dimasukkan untuk membantu menggambarkan internal Congress. Hasan memang menyebutkan pemimpin partai Congress yang berusaha mendapatkan dukungan. Akan tetapi, usaha-usaha yang dilakukan pemimpin tersebut tidak secara lengkap dijelaskan Hasan. Oleh karena itu, aspek kepemimpinan ini akan dimasukkan pada bagian internal Congress oleh peneliti dan akan dikembangkan lebih jelas. Sementara bisa menjadi bagian eksternal

<sup>29</sup> Zoya Hasan, *op.cit.*, hlm. 473-488. Zoya Hasan fokus pada masalah-masalah etnis, partai politik, pemilu, gender dan identitas, khususnya di wilayah Utara India. Ia juga terlibat dalam berbagai penelitian.

Congress, karena prestasi pemerintah BJP yang tidak mengikutsertakan masyarakat kelas miskin, yang sebagian besar tinggal di pedesaan, dalam proses reformasi.

*Ketiga*, tulisan oleh K. C. Suri dengan judul *Democracy, Economic Reforms and Election Results in India*.<sup>30</sup> Suri berpendapat bahwa reformasi ekonomi memiliki hubungan dengan hasil Pemilu India 2004. Isu-isu besar demokrasi seperti; pembangunan, kesejahteraan, kebebasan, keadilan, dan persamaan, dihubung-hubungkan dalam menerjemahkan hasil Pemilu 2004 tersebut. Suri menjelaskan bahwa isu reformasi ekonomi selalu menjadi isu menjelang Pemilu. Perekonomian India yang berkembang dengan baik di bawah pemerintahan BJP mendapat kritikan. Kritikan yang dimaksudkan Suri di sini adalah masyarakat India bukanlah anti terhadap reformasi ekonomi, akan tetapi lebih kepada implementasinya yang dianggap kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat India. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh perhatian pemerintah fokus bukan kepada kesejahteraan orang-orang India tapi memelihara kesenangan keuangan internasional dan sebagian kecil orang-orang India yang memiliki modal besar. Kurang terakomodasinya kebutuhan masyarakat India, khususnya kelas menengah ke bawah, dianggap membuat partai pemerintah kurang populis. Pilihan pun kemudian diberikan kepada partai yang memberikan banyak perhatian terhadap isu-isu besar demokrasi tersebut. Tulisan K. C. Suri ini akan digunakan sebagai salah satu sumber untuk menjelaskan faktor eksternal kemenangan partai Congress, yang menggali tentang aspek ekonomi. Meskipun demikian, tulisan K. C. Suri ini bukanlah satu-satunya sumber bagi peneliti dalam menjelaskan faktor eksternal kemenangan partai Congress. Dengan artian, tulisan K. C. Suri akan dikembangkan dengan data-data lainnya yang berkaitan, yang oleh peneliti dianggap sebagai faktor eksternal penyebab kemenangan partai Congress pada Pemilu 2004.

<sup>30</sup> K. C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic & Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, hlm. 5404-5411. K.C.Suri adalah seorang Profesor Ilmu Politik di Central University, Andhra Pradesh. Ia mengajar teori-teori politik dan politik India untuk level pascasarjana dan juga menjadi peneliti dalam beberapa proyek pemerintah.

## 1.6 Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan untuk membahas penelitian ini adalah teori partai politik, kepemimpinan, dinasti politik, budaya politik, marketing politik dan teori koalisi pra-pemilu.

### Teori Partai Politik

Dalam negara-negara modern saat ini, sangat sulit membayangkan politik tanpa kehadiran partai politik. Partai politik menjadi peserta yang ikut ketika diselenggarakannya pemilu di negara-negara tersebut. Menurut Puhle bahwa partai politik adalah inti dari demokrasi. Tidak seperti kelompok-kelompok kepentingan dan bahkan institusi-institusi mediator kepentingan, partai politik tidak hanya mewakili pemerintahan. Bersama dengan pemilih, partai dan perwakilannya yang terpilih adalah aktor-aktor utama dalam sebagian besar prosedur dasar yang sangat utama dalam demokrasi, yaitu pemilihan badan legislatif dan pemerintahan, secara langsung dan tidak langsung.<sup>31</sup> Hal ini secara khusus dapat dilihat telah terjadi di negara India yang dikenal sebagai negara demokrasi di Asia. Sejak India merdeka, India telah memiliki partai politik yang menandakan negaranya adalah negara yang demokrasi. Partai yang paling terkenal semenjak India merdeka bahkan hingga hari ini adalah partai Congress.

Begitu pentingnya partai politik dalam negara-negara modern saat ini, memunculkan pertanyaan tepatnya apakah partai politik itu? Dalam regim demokrasi, partai politik adalah mediator utama antara pemilih-pemilih dan kepentingan-kepentingan mereka, pada satu sisi, dan sebagai institusi pembuat keputusan pada sisi yang lain. Partai adalah saluran interaksi politik antara 'masyarakat sipil' dengan 'negara'.<sup>32</sup> Menurut Alan Ware partai politik adalah sebuah institusi yang a) mencari pengaruh di dalam negara, sering dengan mengusahakan menduduki posisi-posisi di pemerintahan, dan b) biasanya

<sup>31</sup> Hans-Jurgen Puhle, "Still the Age of Catch-Allism? Volksparteien and Parteienstaat in Crisis and Re-aqulibirium," dalam Richard Gunter, Jose Ramon Montero dan Juan J. Linz (eds.), *Political Parties: Old Concepts and New Challenges* (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 58-59.

<sup>32</sup> *Ibid.*

mendukung kepentingan masyarakat lebih dari satu dan dalam beberapa hal berusaha “mengumpulkan kepentingan-kepentingan.”<sup>33</sup>

Sebagai salah satu aktor yang penting dalam perpolitikan, tentunya partai politik ini memiliki fungsi. Miriam Budiarjo menjelaskan umumnya ada beberapa fungsi yang akan dijalankan partai di negara yang demokratis.<sup>34</sup> *Pertama*, sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik berperan sebagai perantara antara yang memerintah dan yang diperintah. Partai politik berperan untuk mengagregasi dan mengartikulasi aspirasi atau pendapat dari suatu kelompok masyarakat supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dan saling berbenturan. Setelah itu, partai politik akan merumuskannya menjadi usul kebijakan yang dimasukkan ke dalam program partai untuk diperjuangkan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum. Pada sisi yang lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. *Kedua*, sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah suatu proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana seseorang tersebut berada. Proses ini menentukan sikap politik seseorang misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, hak dan kewajiban. Partai politik sebagai salah satu agen untuk mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi lainnya. *Ketiga*, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional. Untuk kepentingan internalnya, partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas yang dapat memberikan kesempatan lebih besar bagi partai untuk mengembakan diri. Dengan memiliki kader-kader yang baik partai tidak akan kesulitan untuk mengajukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional. *Keempat*, sebagai sarana pengatur konflik. Potensi selalu ada di setiap masyarakat. Dalam hal ini, partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat

<sup>33</sup> Alan Ware, *Political Parties and Party Systems* (New York: Oxford University Press, 1996), hlm. 5.

<sup>34</sup> Miriam Budiarjo, *op.cit.*, hlm 405-409.

menumbuh-kembangkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Untuk memahami sistem kepartaian di India dapat digunakan hasil analisa Maurice Davurger, yang mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai dan sistem multipartai. Namun yang akan dijelaskan pada bagian ini adalah sistem multipartai yang berlaku di India. Sistem multipartai dianggap sebagai keadaan yang menggambarkan keanekaragaman budaya politik. Dengan demikian, terdapat banyak partai yang bersaing. Pola multipartai dianggap lebih sesuai untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas yang terdapat dalam masyarakat pada satu wadah yang sempit saja, misalnya perbedaan yang tajam antara ras, agama atau suku bangsa.<sup>35</sup>

### **Kepemimpinan**

Menurut Gary Yukl, ketika mendefinisikan konsep kepemimpinan, maka konsep tersebut tidak dalam ruang hampa yang jauh dari sesuatu hal yang ada di sekelilingnya. Ciri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan peran, persepsi orang lain mengenai keabsahan pengaruh serta tempat merupakan pengaruh umum yang mempengaruhi dalam menjelaskan konsep kepemimpinan. Dalam kepemimpinan terdapat proses mempengaruhi yang dilakukan oleh pemimpin terhadap orang yang dipimpin untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah disepakati bersama.<sup>36</sup>

Menurut Sartono, pemimpin dalam suatu struktur sosial membawa fungsi atau peranan untuk menguasai, mengatur dan mengawasi agar tujuan kolektif tercapai dan terjaga nilai-nilai sosial kultural masyarakatnya. Ditinjau dari pendekatan struktural fungsional diperlukan persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari pihak kedua, yaitu yang dipimpin dengan pihak pertama, yaitu yang memimpin. Sedangkan dalam masyarakat tradisional, kekuasaan dan pengaruh bersumber pada prinsip kekuasaan yang kerama, yaitu karisma. Otoritas tradisional lazimnya juga diterima oleh rakyat tanpa mempersoalkan legitimasinya. Selain itu, kepemimpinan merupakan pertemuan antar berbagai

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 415.

<sup>36</sup> Gary Yukl, *Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhallindo, 1998), hlm. 2.

faktor antara sifat golongan atau kelompok yang dipimpin, kepribadian sang pemimpin dan situasi atau kejadian yang menimpa kelompok tersebut. tetapi intinya adalah struktur sosial menjadi penentu penting dalam pembentukan kepemimpinan.<sup>37</sup>

Max Weber, seorang sosiolog Jerman, membagi tiga jenis kepemimpinan dan wewenangnya, yaitu pemimpin yang tradisional, rasional-absah, dan karismatik.<sup>38</sup> Pemimpin tradisional merupakan pemimpin yang mempunyai “wewenang tradisional” yang mendapatkan dari tradisi kepercayaan zaman dahulu melalui pensucian. Misalnya seorang pemimpin keturunan raja diwarisi tahta kerajaan sehingga menjadi raja. Wewenang bagi seorang pemimpin yang rasional-absah adalah berdasarkan kepercayaan dalam legitimasi atau kesahan peraturan dan dalam hak pemimpin mengeluarkan perintah karena peraturan tersebut. Wewenang ini disebut juga sebagai wewenang birokrasi. Wewenang untuk pemimpin karismatik adalah berdasarkan “persembahan pemimpin terhadap para pengikut dengan kesucian, kepahlawanan, karakter khusus seorang individu, dan juga pola normatif atau keteraturan yang telah disampaikan. Weber mendefinisikan ‘karisma’ sebagai kualitas seorang individu dengan segala kebaikan sikapnya, mengatur tingkah lakunya dan diberkati dengan kekuatan luar biasa, memiliki jiwa kemanusiaan dan kekuatan atau kualitas tertentu sebagai manusia. Sifat-sifat ini yang harus dimiliki seorang pemimpin karismatik menurut Weber adalah rasa percaya diri, memiliki visi dan misi, memperlihatkan sifat-sifat yang luar biasa, harus dipandang sebagai ‘agent of change’, serta kesadaran akan situasi. Ditambah lagi, seperti yang dituliskan oleh Anna Ruth Willner dan Dorothy Willner bahwa kepemimpinan karismatik sangatlah berkaitan selama masa ketidakpastian dan krisis ekonomi, politik dan sosial.<sup>39</sup> Pada intinya, pemimpin karismatik adalah seorang yang dianggap sebagai penyelamat.

Kepemimpinan dan pergantiannya, menurut Lester G. Selligman, merupakan suatu transformasi seleksi kepada anggota masyarakat oleh

<sup>37</sup> Sartono Kartodirjo (ed.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta., 1990), hlm. 6-7.

<sup>38</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology* (New York: Bedminster Press, 1968), hlm. 328.

<sup>39</sup> Anna Ruth Willner dan Dorothy Willner, “The Rise and Role of Charismatic Leaders”, *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 358, No. 77, 1965, hlm. 80.

masyarakat itu sendiri yang didasarkan atas kualifikasi tertentu yang kemudian akan menempatkan mereka yang terpilih untuk memegang peranan-peranan khusus dalam sistem politik. Kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin menurut Selligman adalah:

1. Keahlian politik, seperti keahlian berpidato (orator), menarik simpati masyarakat (propaganda) dan kemampuan mengorganisir (organisor) dan melaksanakan kebijakan. Semua syarat ini merupakan syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Dengan keahlian ini seorang pemimpin bisa mendapatkan kepercayaan dari pendukungnya.
2. Representasi, syarat di mana seorang pemimpin haruslah mencerminkan serta menguatkan dan memperkokoh nilai-nilai dasar dari sistem yang dianut oleh masyarakatnya. Representasi ini sangat dibutuhkan karena masyarakat pendukung suatu nilai menjadi sangat peka akan kelangsungan nilai-nilai yang mereka anut, mereka takut akan hilangnya identitas diri mereka sebagai kelompok masyarakat. Untuk itulah, seorang elite politik atau pemimpin politik harus merepresentasikan secara utuh nilai-nilai dan seluruh unsur-unsur yang ada di masyarakatnya, baik secara simbolis dan atau fungsional. Representasi ini juga penting sebagai jaminan aman atau tidaknya kedudukan seorang pemimpin.
3. Karir dan mobilitas merupakan gambaran kegiatan dan pengalaman organisasi dan professional yang disentuhnya dan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas tokoh yang bersangkutan dalam kegiatan politik. Syarat ini menjadi pendukung bagi usaha seorang tokoh dalam rangka mengambil atau mempertahankan kedudukan mereka. Tetapi dalam masyarakat tradisional, pertalian keluarga dan senioritas menjadi salah satu kunci utama untuk menjadi pemimpin.
4. Integrasi tokoh-tokoh politik merupakan syarat pelengkap tetapi sangat dibutuhkan oleh tokoh jika ingin menjadi pemimpin atau tokoh kunci. Dengan adanya integrasi dari tokoh-tokoh lain, selain menjadi sumber keabsahan juga mempermudah dan memperkuat kedudukannya dalam menjalankan tugasnya.<sup>40</sup>

Menurut Selligman, keempat syarat tersebut jika salah satunya atau lebih tidak terpenuhi atau di bawah taraf orang atau kelompok lain, hal tersebut akan menjadi hambatan dalam usaha meraih kekuasaan politik. Teori kepemimpinan ini, baik pemimpin karismatik Weber dan kriteria-kriteria pemimpin Selligman akan digunakan untuk menganalisa kepemimpinan partai Congress yang dibawah

<sup>40</sup> Lester G. Selligman, "Pengangkatan Tokoh-Tokoh Politik", dalam Affan Gaffar (Terj.), *Beberapa Aspek dalam Pembangunan Politik: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 28-38.

kepemimpinan Sonia Gandhi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori pemimpin karismatik Weber, bahwa pemimpin karismatik muncul ketika terjadi ketidakpastian, salah satunya dalam politik. Pemimpin tersebut dipandang sbagai agen perubahan atau *agent of change*. Partai Congress setelah Rajiv Gandhi meninggal mengalami krisis kepemimpinan dan juga terjadi konflik internal. Kondisi yang demikian dihadapi oleh Sonia Gandhi ketika ia akhirnya menjadi ketua partai Congress pada 6 April 1998.

Kriteria atau syarat-syarat menjadi pemimpin yang disebutkan oleh Selligman tersebut juga akan digunakan untuk melihat kepemimpinan Sonia Gandhi mulai dari keterlibatannya dalam partai Congress hingga akhirnya ia membawa partai Congress pada kemenangan pad Pemilu Lok Sabha India 2004. Teori ini akan menganalisa apakah Sonia Gandhi memiliki kriteria atau syarat yang sijelaskan oleh Selligman, baik keahlian politik, representasi, karir dan mobilitas serta integrasi tokoh-tokoh politik.

### **Teori Dinasti Politik dan Budaya Politik**

Dinasti politik merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi di banyak negara. Selain terjadi di negara-negara berkembang, dinasti politik ini juga terjadi di negara yang menganut demokrasi secara kokoh, misalnya Amerika Serikat. Di negara-negara Asia, sebagai contoh negara berkembang, banyak terdapat dinasti politik, misalnya negara Filipina terdapat dinasti politik Aquino, Pakistan dengan dinasti politik Jinnah dan Bhutto, Indonesia dengan dinasti politik Sukarno, bahkan yang terjadi di salah satu daerah Indonesia, yaitu Banten dengan dinasti politik Ratu Atut. Sementara di negara India, yang menjadi negara inti penelitian ini, juga terdapat dinasti politik Gandhi.

Menurut Mosca, seperti yang dikutip oleh Dal Bo dan Snyder, dalam sebuah masyarakat ada kecenderungan untuk menurunkan kelasnya pada generasi selanjutnya atau di bawahnya. Hal ini tentunya juga termasuk dalam ranah politik. Apabila sebuah posisi politik telah terbuka maka keluarga yang sebelumnya telah mendapatkan kekuasaan politik tersebut akan menyerahkan kekuasaan politiknya

pada generasi di bawahnya.<sup>41</sup> Tulisan Mosca tersebut tentu dapat menjelaskan mengapa dinasti politik dapat bertahan di dalam sebuah negara, bahkan ketika suatu negara tersebut telah menganut demokrasi secara kokoh.

Stephen Hess menjelaskan bahwa dinasti politik dapat bertahan hidup dan juga dapat mati. Hidup atau matinya suatu dinasti politik memang ditunjang oleh tindakan dari generasi selanjutnya. Orang-orang yang termasuk dalam dinasti politik tersebut memiliki keuntungan yang tentunya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan.<sup>42</sup> Keuntungan inilah kemudian, yang apabila dimanfaatkan oleh mereka yang terlibat di dalamnya, dapat mempertahankan suatu dinasti politik yang sudah ada.

Keuntungan yang dijelaskan Hess tersebut, senada dengan keuntungan yang kemudian dijelaskan oleh Mosca dan Ronald Brownstein. Mosca menuliskan bahwa setelah posisi politik terbuka maka seorang anggota keluarga yang berasal dari keluarga yang berkuasa akan mendapatkan keuntungan. Ronald Brownstein menjelaskan bahwa keuntungan yang tidak dimiliki oleh kandidat yang tidak berasal dari dinasti politik tersebut adalah nama besar keluarga, kekayaan keluarga, jaringan politik yang telah dibangun anggota dinasti politik sebelumnya, namanya sendiri terkenal, dan yang terpenting adalah sebuah bukti kepada masyarakat bahwa keluarganya mampu untuk berpolitik, sebagaimana telah ditunjukkan oleh anggota dinasti politik sebelumnya.<sup>43</sup>

Keuntungan dinasti politik, menurut Hess, juga disebabkan karena anggota dinasti politik telah memiliki bukti bahwa keluarga mereka dapat berpolitik. Seorang pemilih menurut Hess akan memiliki kecenderungan untuk memilih seorang kandidat yang berasal dari dinasti politik. Hal ini dimungkinkan karena pemilih telah mempunyai bukti nyata bahwa keluarga kandidat yang berasal dari dinasti politik dapat memimpin. Selain itu, pemilih juga lebih yakin dengan kemampuan berpolitik kandidat yang berasal dari keluarga dinasti politik. Menurut Hess, menjadi bagian dari dinasti politik tidak harus berasal dari satu

<sup>41</sup> G. Mosca, *La Classe Politica* (Bari: Laterza Editori, 1966), hlm. 74, dalam Ernesto Dal Bo, et.al., "Political Dynasties," *The Review of Economic Studies*, Vol. 76, hlm. 115.

<sup>42</sup> Stephen Hess, *America's Political Dynasties* (New Jersey: Transaction Publishers, 1997), hlm. 1-2.

<sup>43</sup> Ronald Brownstein, *The Power and the Glitter: The Hollywood-Washington Connection* (New York: Pantheon, 1990), hlm. 316-343.

keluarga tetapi juga dapat terjadi ketika seorang politisi terlibat pernikahan dengan anggota keluarga dinasti.<sup>44</sup>

Tulisan Dal Bo, Hess dan Brownstein tersebut sebenarnya mengangkat dinasti politik yang berkembang di AS. Meskipun demikian, penulis melihat bahwa tulisan mereka tersebut relevan atau sesuai dengan penelitian ini. Meskipun AS merupakan sebuah negara yang telah memiliki demokrasi kokoh namun kasus dinasti politik tetap terdapat dalam negaranya. India meskipun dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di Asia dinasti politik telah lama berlangsung di negara ini. Dinasti politik yang terkenal tersebut adalah Dinasti Gandhi, yang dimulai dari Nehru yang memimpin partai Congress sekaligus sebagai perdana menteri mulai dari tahun 1950-an hingga 1960-an, dilanjutkan oleh Indira Gandhi, putrinya, yang memimpin partai Congress sekaligus perdana menteri mulai akhir tahun 1960-an hingga pertengahan tahun 1980-an. Setelah Indira Gandhi meninggal, posisinya pun kemudian dilanjutkan oleh putranya, Rajiv Gandhi hingga tahun 1991. Setelah beberapa tahun partai Congress tidak dipimpin oleh dinasti Gandhi, kembali pada tahun 1998 Sonia Gandhi, yang merupakan istri Rajiv Gandhi kembali memimpin partai Congress. Meskipun Sonia Gandhi tidak menjadi perdana menteri setelah partainya menang pada Pemilu 2004, dinasti politik Gandhi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitikan India. Keterlibatan generasi dinasti politik selanjutnya sudah menjadi budaya dalam perpolitikan India.

Keberadaan dinasti politik ini memiliki hubungan dengan budaya politik yang terjadi di India. Oleh karena itu akan dijelaskan juga tentang eori budaya politik. Budaya politik menurut Almond dan Verba, seperti yang dikutip oleh Septi Meliana, adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.<sup>45</sup> Almond dan Verba melihat bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik, yaitu orientasi kognitif, afektif

<sup>44</sup> Stephen Hess, *op.cit.*, hlm. 1-2.

<sup>45</sup> Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 13, dalam Septi Meliana, *Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus: Budaya Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Aek Tuhul, Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan)* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 6.

dan evaluatif. Orientasi kognitif ialah berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif ialah perasaan terhadap sistem politik, peranannya serta para aktor dan penampilannya. Orientasi evaluatif ialah keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Ada beberapa tipe budaya politik. Berdasarkan sikap yang ditunjukkan, budaya politik ada dua yaitu budaya politik militan dan toleransi. Budaya politik militan di mana perbedaan yang terdapat dalam masyarakat tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang terbaik tetapi dipandang sebagai usaha menantang dan jahat. Budaya politik toleransi di mana pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai dan berusaha mencari konsensus yang wajar di mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Bersikap netral atau kritis terhadap ide orang lain tetapi tidak curiga.

Dalam realitas politik yang berkembang di dalam masyarakat, Almond mengklasifikasikan budaya politik di antaranya: budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.<sup>46</sup> Budaya politik parokial di mana tingkat partisipasi politik masyarakat rendah yang disebabkan faktor kognitif rendah, misalnya tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik kaula yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Mereka secara pasif mematuhi pejabat pemerintah dan undang-undang tetapi mereka tidak memilih atau tidak melibatkan diri mereka dalam politik. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi. Masyarakat mengetahui politik dan dapat serta membuat tuntutan-tuntutan politik, maupun memberikan dukungan politik mereka terhadap pemimpin politik yang berbeda.

Menurut M. Suresh Kumar, sebelum kedatangan pemerintahan kolonial budaya politiknya dikategorikan dengan tipe parokial, di mana sistem monarki masih dipelihara dan memiliki kesadaran politik yang rendah. Kehadiran pemerintahan kolonial Inggris membuat masyarakat India menyadari akan hak-

<sup>46</sup> Gabriel A. Almond and Bingham Powell, Jr., *Competitive Politics Today: A World View* (New York: Harper Collins College Publishers, 1996), hlm. 38.

hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Oleh karena itu, melalui adanya gerakan kemerdekaan, India mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1947 dan melakukan pemilu pertama kalinya pada tahun 1952. Meningkatnya partisipasi masyarakat, khususnya pada saat pemilu digambarkan oleh Kumar sebagai petanda India memasuki tipe budaya politik yang partisipan.<sup>47</sup> Senada dengan pendapat M. Suresh Kumar, jurnalis Sukumar Muralidharan menyatakan bahwa bila sebelumnya masyarakat India menjelang pemilu dimobilisasi dengan simbol-simbol tradisional di India, sekarang politik identitas tersebut sangat rendah. Para pemilih sekarang lebih memperhatikan isu-isu nyata dari akuntabilitas dan kualitas pemerintah dalam membuat kebijakan. Berikut kutipan pendapat Muralidharan.

*More than at any time in the recent past, the electorate today is inclined to go by real issues of accountability and quality of governance in making its choices. The power of polarising symbols and identity politics is now at a relatively low ebb.*<sup>48</sup>

### **Teori Marketing Politik**

Sebagai kajian keilmuan baru yang masih dalam tataran embrionik, marketing politik yang pertama kali dimulai di Amerika Serikat terus mengalami perkembangan definisi yang beragam dan berubah. Marketing politik yang awalnya dipelajari oleh bidang marketing, kini telah juga dipelajari oleh bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi di beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia dan melahirkan para pakar dibidangnya. Newman mendefinisikan marketing politik sebagai aplikasi dari prinsip dan prosedur pemasaran dalam kampanye politik oleh berbagai individu dan organisasi. Prosedurnya terdiri dari proses analisis, pembangunan opini, eksekusi dan strategi manajemen kampanye oleh kandidat, partai politik, pemerintah, kelompok kepentingan dan tim lobby yang bertujuan untuk mengarahkan opini publik, menaikan sentimen ideologi mereka, memenangkan pemilu, dan pemilihan legislatif serta referendum sebagai

<sup>47</sup> M. Suresh Kumar, "Political Culture in India: A Case of Manipur", *Dialogue*, Vol. 10, No. 2, Oktober-Desember 2008, hlm. 3.

<sup>48</sup> S. Muralidharan, 'The Flop Show in Ayodya', *Frontline*, 7 November 2003, hlm 4.

respon atas kebutuhan dan keinginan dari sekelompok individu atau organisasi tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>49</sup>

Menurut Lees Marshment ada empat hal utama yang melandasi pentingnya penggunaan marketing politik bagi partai-partai politik.<sup>50</sup> *Pertama*, terjadinya pergeseran paradigma pemilih dari ideologi ke program kerja. Adanya de-ideologisasi pasca berakhirnya Perang Dingin secara global telah merubah pula cara pandang dan preferensi para pemilih partai politik. Masyarakat cenderung menggantikan ikatan-ikatan ideologis (tradisional) dengan hal-hal yang lebih pragmatis, yaitu program kerja yang ditawarkan oleh kontestan. Masyarakat cenderung melihat apa yang bisa dan apa yang ditawarkan oleh partai politik maupun kontestan dibandingkan dengan alasan-alasan ideologis yang ada dibalik satu partai politik atau kontestan. Hal ini terlihat nyata sekali dengan semakin membesarnya persentase pemilih non-partisan, yaitu para pemilih yang menunggu partai politik mana yang kiranya menwarakan solusi paling baik ketimbang yang lainnya. Partai politik macam inilah yang akan mereka pilih dalam Pemilu.

*Kedua*, meningkatnya pemilih non-partisan. Terdapat trend di sejumlah negara yang memperlihatkan semakin meningkatnya proporsi non-partisan dalam Pemilu. Non-partisan adalah sekelompok masyarakat yang tidak menjadi anggota atau mengikatkan diri secara ideologis dengan partai politik tertentu. Kaum non-partisan melihat pentingnya kemampuan dan kapasitas orang atau program kerja partai politik mana yang dapat memberikan solusi atas permasalahan bangsa dan negara ketika program-program itu dikomunikasikan selama periode menjelang Pemilu.

*Ketiga*, meningkatnya massa mengambang (*floating mass*). Dengan meningkatnya jumlah pemilih non partisan maka jumlah massa mengambang semakin besar. Massa mengambang ini seringkali sangat menentukan menang tidaknya suatu partai politik dalam Pemilu. Massa mengambang adalah kelompok masyarakat yang diperebutkan oleh partaipartai dan kandidat yang bersaing dalam Pemilu. Massa mengambang ini semakin besar seiring semakin kritisnya masyarakat.

<sup>49</sup> B. I. Newman, *Handbook of Political Marketing* (Thousand Oaks, CA: Sage, 1999), hlm. xiii.

<sup>50</sup> J. Lees-Marshment, *Political Marketing and British Political Parties: The Party's Just Begun* (Manchester: Manchester University Press, 2001), hlm. 252-255.

*Keempat*, adanya persaingan politik. Sistem multipartai yang kini banyak dianut oleh negara yang sedang meniti ke arah demokrasi ataupun baru saja melaksanakan transisi dari otoriter menuju demokrasi, ditambah dengan semakin kritisnya masyarakat dalam memilih partai politik telah menempatkan partai politik pada iklim kompetisi yang ketat untuk memperebutkan pemilih. Dengan demikian partai politik atau kandidat semain dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam melihat dan menganalisis permasalahan bangsa dan negara. Konsekuensinya, partai politik yang paling bagus dalam menyusun program kerjanya yang mempunyai peluang lebih besar untuk memenangkan Pemilu.

Marketing Politik tidak hanya sebatas masalah iklan dan komunikasi politik. Dalam pandangan Marshment, marketing politik adalah pendekatan komprehensif yang menyangkut cara sebuah institusi politik memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. Oleh karena itu, kondisi sosial budaya suatu wilayah geografis dan demografis juga harus diperhitungkan dalam segmentasi dan formulasi isu politik.<sup>51</sup>

### **Teori Koalisi Pra-Pemilu**

Di sebagian besar demokrasi parlementer, hampir jarang satu partai tunggal mampu menguasai mayoritas kursi di legislatif. Sebagai akibatnya, partai-partai politik yang merupakan peserta pemilu, yang ingin menjalankan kekuasaan eksekutif, mau tidak mau terpaksa memilih untuk masuk dalam beberapa bentuk koalisi. Partai-partai tersebut memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, koalisi pascapemilu. Partai-partai dapat bersaing secara independen pada waktu pemilihan dan berharap menjadi bagian dari koalisi pemerintah yang kemudian dibentuk setelah pemilu. Pilihan kedua, suatu partai dapat membentuk koalisi pra-pemilu dengan partai-partai lainnya sebelum pemilu dengan harapan dapat memerintah bersama setelah itu.

Teori pembentukan koalisi pra-pemilu ini dikembangkan oleh Sona Nadenichek Golder dalam bukunya yang berjudul *The Logic of Pre-Electoral*

<sup>51</sup> *Ibid.*

*Coalition Formation.* Golder menyatakan munculnya bukunya ini bertujuan untuk menyeimbangkan ilmu pengetahuan atau literatur koalisi yang selama ini didominasi oleh koalisi pemerintahan yang terbentuk setelah pemilu. Kenyataan ini juga disinggung oleh G. Bingham Powel, yaitu perlunya tanggapan yang serius oleh teoritis terhadap adanya keadaan empirik di mana munculnya koalisi pra-pemilu yang diumumkan oleh partai-partai politik. Powel menyatakan lagi bahwa begitu sedikit yang diketahui tentang munculnya koalisi seperti ini dan tentang macam-macam bentuknya. Pernyataan Powel ini jugalah yang menegaskan munculnya kehadiran karya Golder tersebut.<sup>52</sup>

Menurut Golder, koalisi pra-pemilu umum terjadi dan koalisi mempengaruhi hasil pemilu. Ditambahkannya lagi bahwa tepat seperti pembentukan koalisi pemerintah, munculnya koalisi pra-pemilu adalah hasil dari proses perundingan atau tawar-menawar di antara para pemimpin partai yang peduli terhadap keuntungan-keuntungan jabatan dan kebijakan. Sebagai contoh, pemimpin partai yang ingin membentuk koalisi pra-pemilu harus mencapai persetujuan terhadap strategi pemilu bersama dan distribusi keuntungan-keuntungan jabatan yang mungkin bertambah di antara mereka. Proses ini mungkin melibatkan penguraian platform koalisi bersama; memutuskan partai mana yang akan menjalankan jabatan-jabatan kementerian yang lebih berkuasa; memilih kandidat partai mana yang mengundurkan diri dalam pemilihan di distrik tersebut; atau menentukan pemimpin partai mana yang menjadi perdana menteri. Jelasnya, beberapa proses tawar-menawar atau perundingan koalisi pra-pemilu melibatkan isu-isu distribusi yang menguntungkan bagi masing-masing partai dibandingkan seandainya mereka berjuang sendiri pada waktu pemilu.

Pembentukan koalisi pra-pemilu tepat seperti pembentukan koalisi pemerintah, tetapi memiliki sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain; *pertama*, keuntungan-keuntungan pemilu yang berasal dari persaingan bersama sebagai koalisi, misalnya koalisi pra-pemilu dapat mempengaruhi kemungkinan kemenangan pemilu, sementara tidak untuk koalisi pemerintah. Kemungkinan sebuah koalisi pemilu dapat menarik jumlah pemilih atau kursi yang lebih tinggi

<sup>52</sup> Sona Nadenichek Golder, *The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation* (Ohio: The Ohio State University, 2006), hlm. 5.

dibandingkan bila masing-masing partai bersaing secara independen. *Kedua*, kemungkinan besar pembentukan koalisi pra-pemilu yang didasarkan pada ideologi partai lebih kuat dibandingkan pembentukan koalisi setelah pemilu. Hal ini dipertimbangkan karena pemilih mungkin enggan memilih koalisi pemilu yang terdiri dari partai-partai dengan ideologi dan pilihan kebijakan yang bertentangan.<sup>53</sup>

Teori pembentukan koalisi pra-pemilu ini menurut Golder didasarkan pada keyakinan bahwa pemimpin-pemimpin partai peduli tentang keuntungan jabatan dan kebijakan. Setiap pemimpin partai harus membandingkan keperluan yang mereka harapkan untuk diperoleh jika mereka bersaing secara independen terhadap keperluan yang mereka harapkan terima jika mereka bersaing sebagai bagian dari koalisi pemilu. Hal utama yang perlu dicatat mengenai koalisi pra-pemilu adalah koalisi tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan sebuah partai untuk masuk pemerintahan bersama dengan koalisi. Mengenali hal ini, para pemimpin partai akan membentuk koalisi pra-pemilu jika mereka berpikir bahwa ikut koalisi pra-pemilu akan meningkatkan kemungkinan mereka masuk pemerintahan. Dengan demikian, menurut Golder koalisi pra-pemilu adalah kumpulan partai-partai yang tidak bersaing secara independen dalam pemilu, baik karena di depan umum mereka setuju untuk menyelaraskan kampanye-kampanye mereka, memainkan kandidat-kandidat bersama atau daftar gabungan, atau masuk pemerintah bersama setelah pemilu.<sup>54</sup>

Ada beberapa kriteria yang diberikan Golder untuk koalisi pra-pemilu tersebut. *Pertama*, sebuah koalisi pemilu harus dinyatakan di depan umum. Kriteria ini penting karena satu alasan utama untuk membentuk sebuah koalisi sebelum pemilu dibandingkan setelah pemilu adalah untuk mempengaruhi perilaku pemilih. Pernyataan di depan umum ini tidak perlu meminta adanya persetujuan tertulis secara eksplisit antara anggota-anggota partai, atau dapat juga dipahami sebagai 'koalisi implisit'. *Kedua*, anggota partai-partai dalam koalisi pemilu tidak dapat bersaing di pemilu seperti partai yang betul-betul independen. Kriteria ini bersifat inklusif dan diakui bahwa partai-partai dapat berkoordinasi

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 5-8.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dalam strategi-strategi pemilu mereka dalam pelbagai cara. *Ketiga*, koalisi pemilu harus pada level nasional. Berdasarkan kriteria ketiga ini secara tidak langsung dipahami bahwa koalisi pra-pemilu yang terjadi hanya di satu daerah tertentu dari suatu negara tidaklah termasuk koalisi pra-pemilu. Singkatnya, partai nasional melibatkan partai-partai lokal dan koalisi ini hampir berlangsung di sebagian besar daerah lain di negara tersebut. Hal lain yang penting dicatat dalam teori koalisi pra-pemilu yang dikembangkan oleh Golder tersebut adalah hipotesis yang dikembangkan Golder sendiri. Menurutnya, kemungkinan yang meningkatkan pembentukan koalisi pra-pemilu terjadi apabila aturan pemilunya bersifat disproportionalitas dan terdapat jumlah partai yang cukup besar.

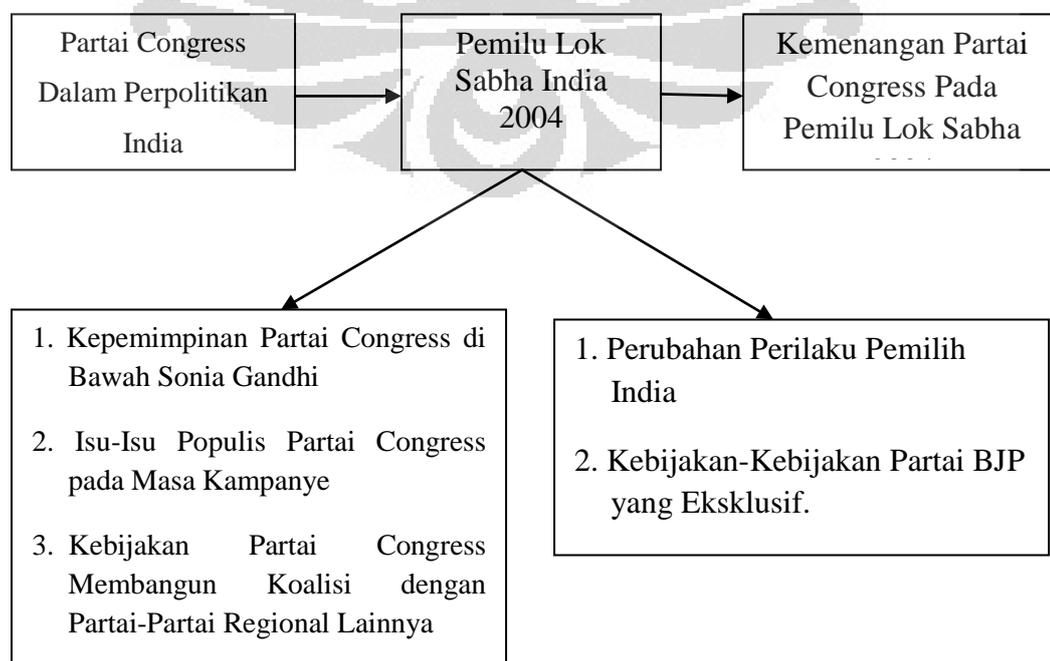
Demikianlah teori koalisi pra-pemilu yang dikembangkan oleh Golder ini akan digunakan penulis untuk menjelaskan strategi pembentukan koalisi pra-pemilu oleh partai Congress dengan aliansinya, yang lazim dikenal dengan Aliansi Progresif Bersatu (UPA). Seperti tujuan yang mendasari pembentukan koalisi pra-pemilu ini adalah untuk mendapatkan kursi lebih. Apabila berhasil mendapatkan kursi lebih, ada kemungkinan mampu untuk menjadi partai yang menjalankan kekuasaan eksekutif. Partai Congress dan aliansinya tersebut, sebelum sepakat membentuk koalisi, dapat diduga bahwa masing-masing pemimpinnya memiliki kesadaran atau perhatian terhadap keuntungan-keuntungan jabatan dan kebijakan. Meskipun sebenarnya di India terdapat banyak partai sejak pemilu pertama atau Pemilu 1952, sistem partai India masih dianggap sebagai sistem dominasi satu partai, yaitu partai Congress. Setelah Pemilu 1989, di mana tidak ada satu pun partai tunggal yang memperoleh kursi mayoritas di Lok Sabha maka sistem multipartai pun telah diakui menjadi sistem kepartaian di India. Keberadaan partai yang begitu besar di India, memungkinkan dorongan untuk membentuk koalisi pra-pemilu semakin besar, seperti yang diasumsikan oleh Golder tersebut.

## **1.7 Alur Berpikir**

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor utama yang menyebabkan kemenangan partai Congress pada pemilu Lok Sabha India tahun 2004, yang

kemudian dikelompokkan sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Untuk kategori faktor internal, terdapat tiga faktor, yaitu 1) krisis kepemimpinan partai Congress teratasi setelah Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress sejak 1998 hingga menjelang Pemilu 2004; 2) Slogan kampanye partai Congress, *The Aam Aadmi* atau *The Common Man*, yang menjanjikan pemerintahan yang inklusif, Partai Congress mengangkat isu-isu yang populis terutama bagi masyarakat miskin dan pedesaan; serta 3) Kebijakan partai Congress untuk membangun koalisi dengan partai-partai regional lainnya, berbeda dengan pemilu sebelumnya yang tidak melakukan koalisi dengan partai-partai regional lainnya yang ditandai dengan adanya Deklarasi Panchmarhi 1998.

Sementara untuk kategori faktor eksternal terdapat dua faktor, yaitu 1) perubahan perilaku pemilih India, serta 2) kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif. Sebagian besar kebijakan-kebijakan BJP adalah kebijakan yang *pro-rich* atau pro-orang kaya dan kurang mengesankan bagi lapisan masyarakat India secara keseluruhan. Kebijakan BJP yang *pro-rich* ini terlihat dari slogan kampanye, yaitu *India Shining*. Partai BJP sangat menekankan agenda Hindu nasionalisnya. Penekanan yang kuat akan agenda *Hindutva* ini membuat pendukung BJP berkurang, baik partai-partai aliansinya dan kader pendukungnya sendiri. Kedua faktor ini, yaitu internal dan eksternal merupakan faktor yang menyebabkan kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India tahun 2004. Berikut dapat digambarkan alur berpikir dari penulisan penelitian ini.



## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki keunggulan dalam melihat suatu gejala sosial secara mendalam, mengamati prosesnya lalu memberikan kesimpulan. Metode penelitian ini lebih fokus kepada proses daripada hasil atau produk. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang hal-hal yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah berdasarkan penilaian subjektif, interpretatif dan data kontekstual.<sup>55</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian.

Penelitian kualitatif ini memiliki kriteria tertentu, oleh Alan Byrman disebutkan, di antaranya: kedudukan suatu penelitian kualitatif adalah penggalian interpretatif subyek; hubungan peneliti dengan yang diteliti adalah dekat; hubungan teori/konsep dengan data empirik adalah *emergent*; teori dimunculkan atas dasar data empirik; strategi penelitiannya tidak terstruktur; lingkup penelitian/klaim temuan adalah *ideographic*, mencari sebuah kebenaran di mana dalam pendekatan *ideographic* ini menempatkan temuan hasil penelitian dalam konteks sosial budaya dan konteks waktu dan konteks historis yang dilakukan secara spesifik di mana penelitian dilakukan; dan konsep tentang realitas sosial yang dilakukan secara prosedural dan realitas dianggap sebagai produk dari konstruksi sosial.<sup>56</sup> Metode penelitian kualitatif ini bersifat eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu. Jika penelitian kualitatif deskriptif menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa, kapan, di mana dan bagaimana, maka penelitian ini akan menambahkan penjelasan sebagai jawaban atas jawaban pertanyaan mengapa.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua cara. *Pertama* studi kepustakaan atau riset kepustakaan. Melalui studi kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data tersebut adalah dari buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel atau makalah-makalah, surat kabar, dan hasil

<sup>55</sup> Aurbach and Silverstein, 2003, Glasser and Strauss, 1967, Maxwell 1992, Strauss and Corbin 1998, dalam S Bruce Thompson, *Qualitative Research: Grounded Theory-Sample Size and Validity*, hlm.5, lihat di [www.buseco.monash.edu.au](http://www.buseco.monash.edu.au).

<sup>56</sup> Alan Byrman, *Quantity and Quality in Social Research* (Boston: Unwin Hyman, 1988), hlm. 94.

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh CSDS (*Center for the Study of Developing Societies*, yang selanjutnya disebut dengan CSDS)<sup>57</sup> di New Delhi, India. *Kedua*, adalah melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang memiliki informasi terkait dengan permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berhadapan langsung dengan menggunakan internet.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan peneliti tidak observasi langsung. Observasi langsung yang dimaksud adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan atau ke India yang memungkinkan peneliti mampu mengetahui bagaimana pengalaman, pendapat atau perasaan serta pengetahuan terutama orang-orang India yang ikut pada Pemilu Lok Sabha India 2004. Observasi langsung ini tidak dapat dilakukan peneliti dikarenakan kurangnya dana yang tersedia atau keterbatasan dana. Oleh karena itulah, untuk mengurangi tingkat keterbatasan tersebut, peneliti berusaha melakukan penelaahan dengan studi pustaka dan wawancara tidak langsung melalui internet untuk mendapatkan informasi terkait dengan dua pengamat yang juga merupakan peneliti politik India.

**Tabel 1.2. Daftar Narasumber Yang Akan Diwawancarai**

No.	Nama	Jabatan
1.	Niraja Gopal Jayal	Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Jawaharlal Nehru, India. Selain itu, ia juga menjadi konsultan Program Pembangunan untuk PBB, Yayasan Ford ( <i>The Ford Foundation</i> ), Bank Dunia ( <i>World Bank</i> ), Departemen Inggris untuk Pembangunan Internasional. Keahliannya adalah pemerintahan, perempuan, kewarganegaraan, desentralisasi dan teori politik lingkungan.
2.	Sanjay Kumar	Sekretaris CSDS dan ekaligus Peneliti Senior India. Keahliannya berkaitan dengan sistem pemilu, demokrasi, tidak hanya untuk India, namun juga negara-negara di Asia Selatan.

<sup>57</sup> CSDS adalah sebuah institusi penelitian yang bertempat di New Delhi, India yang didirikan pada tahun 1963 dan sebagian besar didanai oleh Dewan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial India. Selain melakukan penelitian yang interdisipliner, institusi ini juga memberikan perkuliahan terhadap para sarjana baik dari universitas-universitas India atau dari luar yang berkaitan dengan metode penelitian. Sebagai institusi penelitian di bidang sosial, CSDS memiliki arsip yang lengkap mengenai perilaku-perilaku politik masyarakat India, baik secara nasional dan per negara bagian yang didapatkan melalui survey. Ada empat program atau proyek yang sedang dikelola institusi ini, yaitu perbandingan demokrasi yang dikelola tim Lokniti, institute untuk studi-studi Cina, program untuk teori-teori politik dan program bahasa India.

## 1.9 Sistematika Penelitian

Penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari lima bab; yaitu:

Bab 1, **“Pendahuluan”** yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, kerangka teori, alur berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Fungsi dari bab I ini adalah memberi gambaran persoalan yang akan diteliti dan alat analisa yang digunakan untuk menelitinya.

Bab 2, **“Politik di India: Partai Congress dan Pemilu India”**, yang akan membahas gambaran umum politik India, partai Congress, dan beberapa partai besar lainnya di India serta pemilu-pemilu India, mulai dari Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004.

Bab 3, **“Faktor Internal Kemenangan Partai Congress pada Pemilu Lok Sabha 2004”**. Pada bab ini akan dibahas mengenai internal partai Congress yang mencakup kepemimpinan partai Congress dan kebijakan-kebijakan politik partai Congress menjelang Pemilu 2004. Kebijakan-kebijakan partai Congress dapat dilihat dalam manifesto 2004 atau isu-isu yang diangkat pada waktu kampanye. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan pula tentang kebijakan partai Congress untuk terlibat dalam koalisi dengan partai-partai regional yang sebelumnya tidak diakui dalam Deklarasi Pancmarhi 1998.

Bab 4, **“Faktor Eksternal Kemenangan Partai Congress pada Pemilu Lok Sabha 2004”**. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang kinerja pemerintahan BJP, saingan utama partai Congress, yang telah mampu memperbaiki perekonomian India, namun secara keseluruhan belum dapat dinikmati masyarakat India. Kurangnya sensitif BJP mempengaruhi *mood* atau suasana hati pemilih India dengan memilih partai Congress sebagai partai alternatif.

Bab 5, **“Penutup”**, yang berisi kesimpulan akhir dari pembahasan dan temuan penelitian serta implikasi teoritis atau keterkaitannya dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **POLITIK DI INDIA: PARTAI CONGRESS DAN PEMILU INDIA**

Lahirnya India sebagai salah satu negara modern dan dikenal sebagai negara demokratis terbesar di dunia, sebenarnya memiliki lintasan sejarah yang panjang. Jauh sebelum masa modern sekarang telah diperhitungkan dalam kancan dunia internasional, India pada masa peradaban kuno juga sangat terkenal, misalnya Peradaban Lembah Sungai Indus. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan keberlangsungan India sebagai suatu negara, yaitu komposisi masyarakat India, demokrasi dan demokratisasi di India, struktur pemerintahan India, sistem kepartaian dan pemilu di India. Pada subbagian pertama akan menjelaskan mengenai keanekaragaman masyarakat India, terutama dalam hal agama, bahasa serta pembangunan India yang mencakup pendidikan, GDP, dan harapan hidup. Selanjutnya, pada bagian kedua akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di India, baik demokrasi sebagai pengaruh dari pemerintahan kolonial Inggris di negara tersebut ataupun pengaruh dari pemikiran para nasionalis India. Pada bagian sistem kepartaian India ini akan dijelaskan tentang partai regional dan partai nasional. Partai Congress yang pernah mendominasi perpolitikan India akan dijelaskan pada subbagian ini. Sementara pada bagian akhir akan dijelaskan tentang partisipasi pemilih dan partai mayoritas pada pemilu Lok Sabha India 1952-2004 secara singkat. Tujuan dari bab 2 ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kondisi perpolitikan India, yang praktiknya secara tidak langsung akan dapat dilihat pada bab-bab selanjutnya, yaitu bab 3 dan 4.

#### **2.1 Komposisi Masyarakat India**

India adalah salah satu negara yang terletak di Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat kedua di dunia. India dikenal sebagai negara yang heterogen, baik dalam agama, bahasa, dan suku. India juga dikenal sebagai asal atau rumah bagi agama-agama besar di dunia, misalnya Hindu dan Budha. Mayoritas penduduk India memeluk agama Hindu. Meskipun 80,5% populasinya merupakan pemeluk agama Hindu, masih ada beberapa agama lain yang diakui di

India misalnya, Islam, Kristen, Sikh, dan lainnya. Berikut tabel komposisi agama-gama di India, berdasarkan Sensus 2000.

**Tabel 2.1. Komposisi Agama di India Berdasarkan Sensus 2000**

Agama	Persen	Juta Jiwa
Hindu	81,3	865,9
Islam	12	127,8
Kristen	2,3	24,5
Sikh	1,9	20,2
Lainnya	2,5	26,6
	Total	1.065

Sumber: Telah diolah kembali dari Monte Palmer, *Comperative Politics: Political Economy, Political Culture, and Poliitical Interdependence* (Ontorio: Thomson Wadsworth, 2006), hlm. 371.

Islam adalah agama kedua terbesar di India. Islam dan Hinduisme kemudian menghadirkan sistem agama agama yang saling berlawanan dengan sedikit kesempatan untuk disepakati bersama. Ketika terjadi perselisihan di antara dua agama ini, maka sapi dan babi telah dijadikan sebagai simbol politik. Bagi Hindu, sapi adalah hewan suci oleh karena itu tidak dapat disembelih, sementara bagi Islam babi adalah hewan yang najis atau haram. Pada waktu kedua kelompok ini saling bertikai, sering kali kalangan Muslim akan membunuh sapi sementara kalangan Hindu akan melemparkan babi yang merupakan ke dalam mesjid.

Kaum Muslim hanya mewakili 12% dari populasi India tapi persentase tersebut diterjemahkan menjadi kurang lebih 127,8 juta jiwa. Sebagian besar kaum Muslim berkonsentrasi di bagian Utara India. Sementara agama Hindu, walaupun tersebar merata di bagian India lainnya, memiliki konsentrasi lebih besar di bagian Barat India, misalnya Gujarat. Konsentrasi Muslim India secara geografis ini meningkatkan pengaruh politik mereka dan sudah pasti membuat mereka menuntut dengan gigih mengenai otonomi regional yang lebih luas. Kekerasan yang sering terjadi antara kedua kelompok agama ini membuat kesatuan India sering untuk dipertanyakan, misalnya kekerasan Kashmir, Punjab dan bagian utara lainnya.<sup>58</sup>

Pada masa kemerdekaan, di mana partai Congress adalah salah satu gerakan kemerdekaan India, menjanjikan negara yang sekular di mana agama

<sup>58</sup> Robin Jeffrey dan Lance Brennan, *Spinning a Nation: into India* (Canberra: Curriculum Corporation, 2007), hlm. 5.

tidak penting dalam distribusi pekerjaan pemerintah dan sumber daya-sumber daya lainnya. Oleh karena itu, partai Congress mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat Muslim. Bangkitnya Hindu nasionalisme pada tahun 1990-an yang diwakili oleh partai BJP sebagai bentuk politiknya memiliki kaitan dengan hal tersebut. Partai BJP menganggap bahwa partai Congress telah mengabaikan kepentingan-kepentingan kelompok mayoritas, yaitu Hindu, sementara lebih menyokong kelompok minoritas, yaitu Muslim. Partai BJP pun mengajak masyarakat India yang mayoritas Hindu untuk bersatu dan menjadi makmur dengan sebuah dasar budaya Hindu nasionalis.<sup>59</sup>

Selain heterogen dalam agama, India juga heterogen dalam bahasa. Bahasa nasional India adalah Hindi dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, yang digunakan baik untuk komunikasi nasional, politik dan komersial. Sementara bahasa lainnya yang diakui India adalah Telegu, Bengali, Marathi, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannda, Oriya, Punjabi, Assamese, Konkani, Kashmiri, Nepali, Sindhi dan masih ada 2.400 bahasa suku lainnya.

Berdasarkan data HDI (*Human Development Index*), yang merupakan indeks gabungan untuk mengukur harapan hidup, pendidikan dan GDP, yang diterbitkan oleh UNDP (*United Nations Development Programm*) pada tahun 2000, diketahui bahwa negara India menduduki posisi empat terendah dengan rangking 124 dari 127 negara. Pada tahun 2000, nilai indeks HDI India bernilai 0,563. Indeks harapan hidup di India bernilai 0,63 atau sama dengan 63 tahun, indeks pendidikannya bernilai 0,55 atau 55,7% mulai dari umur 15 tahun hingga tingkat atas, serta indeks GDP bernilai 0,51 atau setara dengan \$2.077.<sup>60</sup> Setiap sekali 10 tahun, tingkat melek huruf di India meningkat 10%. Tingkat melek huruf di masing-masing negara bagian berbeda-beda karena system pendidikan dikelola oleh masing-masing pemerintah negara bagian. Pada tahun 2001, tidak sedikit juga masyarakat India yang ekonomi rata-rata atau pendapatannya di bawah \$1 per hari. Berikut tabel nilai indeks HDI India pada tahun 2000.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>60</sup> "Human Development Report 2000," diakses dari [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2000\\_EN.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_EN.pdf), pada tanggal 21 Mei 2012, hlm. 159.

**Tabel 2.2. Nilai Indeks HDI India Pada Tahun 2000**

<b>Rangking HDI</b>	<b>Harapan Hidup</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>GDP</b>
124 dari 127	0,63 atau 63 thn	0,55 atau 55,7% (mulai dari 15 tahun ke atas)	\$ 2.077

Sumber: Telah diolah kembali dari "Human Development Report 2000," diakses dari [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2000\\_EN.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_EN.pdf), pada tanggal 21 Mei 2012, hlm. 159.

## **2.2 Demokrasi dan Demokratisasi di India**

Di tengah-tengah kondisi pendapatan ekonomi India yang rendah, tingkat kemiskinan dan buta huruf yang tinggi, serta adanya perbedaan etnis yang sangat besar, tidak menghalangi tumbuhnya demokrasi di India. Keberhasilan demokrasi di India ini berbeda dengan teori-teori umumnya yang menetapkan prasyarat berlakunya demokrasi. Pada umumnya teori tersebut menyebutkan demokrasi berkembang di negara yang sudah berada pada tahap industri di mana pengusaha-pengusaha dan masyarakat kelas menengah di negara tersebut sebagian besar akan menguasai politik. Kenyataannya, India bukanlah negara industri melainkan negara yang ekonominya sedang berkembang. Para pengusaha dan kelas menengah India tidak sepenuhnya menguasai politik India. Oleh karena itu, dengan tidak hanya berfokus pada faktor-faktor sosio-ekonomi, demokrasi India dapat dipahami dengan baik melalui penganalisaan bagaimana distribusi kekuasaan dinegosiasikan dan direnegosiasikan dalam masyarakat India tersebut. Misalnya bagaimana pemerintah pusat mengatasi berbagai kelompok sosial—etnis, kelas, kasta dan daerah—yang sadar politik, yang pada waktu tertentu menuntut pembagian sumber penghasilan, otonomi dan pemerintahan sendiri yang lebih besar.

Hingga sekarang, meskipun tidak ada konsensus mengenai bagaimana mengukur demokrasi, penulis menggunakan lima kriteria yang digunakan oleh Unit Intelijen Ekonomis (*Economist Intelligent Unit-EIU*) dalam mengukur index demokrasi, yaitu: 1) proses pemilu dan pluralisme; 2) kebebasan-kebebasan sipil; 3) keberfungsian pemerintah; 4) partisipasi politik; dan 5) budaya politik. EIU menggunakan skala 0 sampai 10 dalam mengukur index demokrasi tersebut. Index demokrasi tersebut berdasarkan 60 indikator yang telah dikelompokkan ke dalam lima kategori tersebut. Berdasarkan metode penelitian EIU tersebut demokrasi kemudian dibagi menjadi demokrasi penuh (*full democracy*), demokrasi bercacat (*flawed democracy*), regim cangkokan (*hybrid regime*), dan

regim otoriter (*authoritarian regime*). Pada tahun 2007 berdasarkan penelitian EIU tersebut, negara India dikategorikan sebagai negara demokrasi bercacat yang menempati posisi ke-35 dengan total nilai 7,68. Proses pemilu dan pluralisme bernilai 9,58; kebebasan-kebebasan sipil bernilai 8,21; keberfungsian pemerintah bernilai 5,56; partisipasi politik bernilai 5,63; dan budaya politik bernilai 9,41.<sup>61</sup>

Demokrasi India dapat diketahui dengan melihat sejarah atau pembentukan negara tersebut. Demokrasi yang sedang berlangsung di India umumnya dipahami sebagai warisan pemerintahan kolonial Inggris. Namun, menganggap demokrasi India sepenuhnya sebagai warisan pemerintahan kolonial Inggris di negara tersebut tentunya dapat diperdebatkan. Seperti yang dituliskan Kohli dan Sumit Sarkar. Kohli berpendapat bahwa transisi India menuju demokrasi pada tahun 1940-an sebaiknya diteliti lebih lanjut. Hal ini dikarenakan para sejarawan sering meninggalkan isu-isu ini untuk digali oleh para ahli politik. Menurutnya, para sejarawan belakangan ini tidak memusatkan diri mereka dengan masa lalu, yang merupakan domainnya. Yang artinya, para sejarawan tersebut kurang menggali lebih mendalam tentang masa lalu India yang berkaitan dengan munculnya demokrasi India. Kesan bahwa demokrasi India sebagian besar adalah warisan kolonialisme Inggris menurutnya kurang benar. Karena demokrasi yang berlangsung di India tersebut, tidak terjadi di banyak koloni-koloni Inggris sebelumnya, misalnya Pakistan.<sup>62</sup>

Sementara menurut Sarkar Sumit bahwa munculnya demokrasi India, selain melibatkan peran pemerintah kolonial Inggris, peran para nasionalis India juga tidak dapat diabaikan. Ia menekankan bahwa orang-orang nasionalis India berperan dalam membentuk demokrasi India sesuai dengan versi mereka sendiri. Dalam versi mereka, demokrasi menggambarkan adanya hak suara secara penuh bagi semua orang dewasa, pemerintahan yang sekularisme dan berstruktur federal. Pemerintahan kolonial Inggris memang telah memperkenalkan politik pemilu. Akan tetapi tidak semua orang dewasa memiliki hak pilih yang sama. Hanya

<sup>61</sup> Laza Kekic, "The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy," diakses dari [http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY\\_INDEX\\_2007\\_v3.pdf](http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf), pada tanggal 17 Mei 2012, hal. 1-11.

<sup>62</sup> Atul Kohli, *The Success of India's Democracy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 4. Perlu diketahui bahwa Pakistan yang merupakan partisi dari India selama lebih dari 60 tahun pasca kemerdekaannya secara reguler telah mengalami kudeta militer sebanyak empat kali.

orang-orang tertentu saja, misalnya para pemilik tanah. Hak pilih secara penuh untuk orang dewasa inilah yang dituntut oleh para pemimpin nasionalis India, yang digalang mereka dengan kelompok massa India. Di sisi lain, melalui gerakan nasionalis India yang ada, para pemimpin nasionalis India terdorong untuk mengembangkan konsepsi 'bersatu dalam perbedaan' atau (*unity in diversity*). Konsepsi ini kemudian mengarah pada terciptanya struktur federal. Struktur federal yang terbentuk tersebut sangat berbeda dari pemikiran kolonial Inggris. Konsepsi 'bersatu dalam perbedaan' ini dapat diartikan walaupun terdapat banyak sekali perbedaan, misalnya; agama, bahasa, etnis, dan regional, tetap diupayakan untuk bersatu. Selain itu, karakteristik demokrasi India yang tercipta melalui peran para nasionalis India tersebut adalah terbentuknya politik yang pragmatis dan sekularisme yang menawarkan perlakuan yang sama bagi pelbagai komunitas agama yang ada di India. Hal ini terdorong karena adanya pembagian daerah Hindu dan Muslim oleh pemerintahan kolonial Inggris.<sup>63</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa demokrasi India ini bukanlah sepenuhnya bentukan atau warisan pemerintahan kolonial Inggris. Akan tetapi, akar demokrasi yang diperkenalkan pemerintahan kolonial Inggris kemudian dipertajam atau diperkaya lewat peran para elite nasionalis India dan kelompok massa politik India. Sehingga muncul demokrasi yang sesuai dengan versi India.

Selama tahun 1950-an, sebagian besar warga negara India adalah penduduk miskin dan buta huruf serta tidak sepenuhnya menjalankan hak-hak politik mereka. Mereka memiliki pemahaman yang sedikit tentang praktek demokrasi modern. Pemikiran persamaan politik dan hak-hak demokratis agaknya asing bagi mereka di tengah-tengah adanya masyarakat pedesaan yang hirarkis. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dalam peradaban India. Hirarki ini dikenal dengan sistem kasta atau pembagian kelompok sosial dan jabatan dalam masyarakat. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 1960-an, ketika Nehru memimpin partai Congress, terjadi perubahan. Munculnya aktor-aktor politik baru yang menjadi oposisi partai Congress menandai telah berkembangnya kesadaran persamaan politik dan hak-hak politik. Warga negara India, yang sebagian besar penduduk miskin dan tinggal di pedesaan tersebut, mulai menunjukkan kurangnya

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

ketergantungan mereka terhadap kelompok-kelompok pemimpin India, yaitu orang-orang yang duduk di pemerintahan India.<sup>64</sup>

Ketika Indira Gandhi kemudian menjadi pemimpin partai Congress, ia mengerti adanya perubahan tersebut. Oleh karena itu, slogan-slogan populisnya secara langsung ditujukan kepada kelompok-kelompok yang baru muncul ini dengan menggunakan pengaruh elite-elite pedesaan yang tradisional. Akan tetapi, karena gagal mengurangi kemiskinan pada tahun 1970-an dan awal 1980-an membuatnya susah untuk mengkonsolidasikan posisinya dengan pendukungnya yang sebagian besar adalah masyarakat pedesaan yang miskin. Rasa kecewa tersebut kemudian ditunjukkan dengan berbagai ekspresi. Kelompok-kelompok yang dikenal dengan kasta terbelakang (*backward caste*) adalah aliran utama gerakan penuntut di seluruh India, yang menuntut adanya kepastian pembagian kesempatan kerja serta kesempatan pendidikan bagi kasta-kasta tertentu. Masyarakat miskin dan pedesaan India, serta kelompok-kelompok masyarakat pedesaan kelas menengah India secara politik telah lebih aktif.

Tuntutan-tuntutan lainnya yang disuarakan oleh kelompok-kelompok tersebut yang menunjukkan aktifnya mereka secara politik adalah harga hasil panen pertanian lebih tinggi dan harga kebutuhan-kebutuhan seperti pupuk, listrik dan kredit lebih rendah. Mereka juga menuntut agar pemerintahan tidak mengabaikan petani sementara membantu kelas-kelas atas perkotaan. Demokrasi India terbukti bersifat inklusif dan dalam perkembangannya mengakomodasi anggota-anggota kasta yang lebih rendah dan menengah ke dalam sistem politik. Meningkatnya kesadaran akan hak-hak politik serta kewarganegaraan oleh umumnya masyarakat India, telah menimbulkan banyaknya permintaan untuk kekuasaan dan sumber daya lebih. Institusi demokrasi ditantang sekaligus memfasilitasi permintaan-permintaan tersebut. Dengan kata lain, permintaan-permintaan tersebut akan membantu memperdalam karakteristik demokrasi India.

Masyarakat India, walaupun tingkat buta huruf (42%)<sup>65</sup> dan kemiskinan di negaranya tinggi, tetapi mereka juga memiliki tingkat melek politik yang cukup tinggi (merujuk indeks *Economist Intelligent Unit* tahun 2007, partisipasi politik

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15.

<sup>65</sup> Giorgio Shani, "Re-branding India? Globalization, *Hindutva* and the 2004 Elections," *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*, Vol. 3, 2004, hlm. 46.

India bernilai 5,63) yang membuat mereka menghasilkan pertimbangan-pertimbangan yang matang secara politik. Pertimbangan-pertimbangan yang matang inilah yang kemudian membuat masing-masing kelompok masyarakat India mengekspresikan rasa kekecewaan terhadap setiap pemerintah yang dianggap tidak mewakili kepentingan mereka, baik lewat aksi-aksi protes ataupun melalui pemilu.<sup>66</sup> Menurut mereka, pemilu adalah salah satu waktu yang tepat bagi mereka dalam memberikan sanksi kepada partai yang tidak memenuhi kebutuhan atau tuntutan mereka dan memilih partai yang menyuarakan hal tersebut sebagai penghargaan.

Berdasarkan survey SDSA (*State of Democracy in South Asia*)<sup>67</sup> pada tahun 2004 di India dapat juga menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat India tentang demokrasi. Dalam pertanyaan yang dimuat oleh SDSA tersebut, setiap responden disuruh untuk memilih salah satu dari empat katogori demokrasi yang menurut mereka adalah karakteristik demokrasi paling esensial. Pilihan tersebut adalah: 1) kesempatan mengganti pemerintah melalui pemilu; 2) kebebasan memberikan kritikan terhadap orang-orang yang memerintah; 3) setiap orang memiliki hak yang sama; dan 4) menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar kepada setiap orang. Data survey tersebut menunjukkan  $\pm$  42% responden mempertimbangkan bahwa penyediaan kebutuhan dasar adalah karakter demokrasi yang paling esensial. Dari 42% responden ini, 57% merupakan buta huruf, 46% merupakan warga pedesaan, dan 55% merupakan kelompok pendapatan rendah.<sup>68</sup> Dukungan yang besar terhadap demokrasi serta keyakinan bahwa demokrasi adalah instrumen memenuhi kebutuhan dasar dapat menjadi kunci untuk melihat sifat pemilih India. Bahkan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pemimpin politik membentuk pendukung pemilunya.

<sup>66</sup> Atul Kohli, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>67</sup> Proyek survey SDSA ini merupakan salah satu dari empat fokus penelitian CSDS India. Survey ini dilakukan oleh Tim Lokniti CSDS yang khususnya mengkaji tentang perbandingan demokrasi di kawasan Asia selatan.

<sup>68</sup> K. C. Suri, "Patterns of Electoral Support and Party Leadership in India: Some Obsevation Based on Emperical Research," diakses dari <http://www.cses.org/plancom/2006Bangalore/Suri2006.pdf>, pada tanggal 27 November 2011.

### 2.3 Struktur Pemerintahan India

Ada lima pandangan yang menjadi pertimbangan Nehru dan pemimpin partai Congress lainnya dalam membentuk institusi-institusi politik India pasca merdeka.<sup>69</sup> *Pertama*, India menjadi negara yang demokrasi dan hal ini tak dapat ditawar lagi. *Kedua*, India membutuhkan pemerintahan yang cukup kuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah besar yang dihadapi oleh negara baru. *Ketiga*, hak-hak asasi rakyat India harus dilindungi dari tingkah laku pemerintahan yang kuat. *Keempat*, institusi-institusi politik yang baru harus memperbaiki ketidakadilan sistem kasta dan ketidakadilan masyarakat India lainnya. *Kelima*, institusi-institusi politik India harus memperhatikan perbedaan budaya dan daerah India yang sangat besar. Struktur pemerintahan India yang terbentuk adalah hasil pencampuran model Inggris dan Amerika Serikat, dengan demokrasi parlementer ala Inggris sebagai intinya. Namun pun demikian, para pemimpin Congress memahami bahwa India bukanlah Inggris, di mana ketegangan komunal yang sering terjadi dapat mengancam hak-hak asasi rakyat India. Oleh karena itu, dipersiapkan konstitusi tertulis, seperti yang tidak dimiliki Inggris, yang memuat prinsip-prinsip dasar HAM rakyat India, adanya lembaga-lembaga tinggi negara, serta kejelasan batasan fungsi dan kewenangan, dan hubungan antar lembaga agar tergambar jelas fungsi mekanisme *checks and balances* dalam pemerintahan. Diberlakukannya Konstitusi 1950 pada 26 Januari 1950, menjadi sumber hukum India. Di mana sebelumnya Konstitusi 1950 ini telah melalui diskusi dan perdebatan yang panjang secara konsisten mulai dari Desember 1946 hingga November 1949.

Di dalam Konstitusi 1950 India terdapat pembagian atau pemisahan fungsi kekuasaan dalam sistem pemerintahannya, yang dikenal juga dengan sistem Trias Politika, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif India dilaksanakan oleh presiden dan perdana menteri. Presiden dan wakil presiden adalah kepala negara. Presiden dan wakilnya dipilih oleh dewan pemilih, yaitu anggota-anggota majelis rendah dan majelis tinggi yang terpilih, untuk masa jabatan lima tahun. Presiden India pada dasarnya memiliki peran yang simbolik, misalnya sebagai pembuka pada acara-acara kenegaraan. Presiden

<sup>69</sup> Monte Palmer, *op.cit.*

memilih perdana menteri, walaupun sesungguhnya perdana menteri adalah seorang pemimpin partai politik yang mendapatkan suara terbanyak di Lok Sabha. Presiden dapat memainkan peran yang menentukan dalam proses penunjukan perdana menteri bila terjadi *deadlock* atau kebuntuan di Lok Sabha. Peran penting lainnya yang dimainkan presiden adalah mengangkat gubernur negara-negara bagian dan teritori India, hakim Mahkamah Agung dan jabatan-jabatan tinggi lainnya.

Perdana menteri India adalah seorang pemimpin partai politik yang mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha. Secara resmi, peran perdana menteri adalah mengusulkan undang-undang kepada Parlemen, menuntun undang-undang tersebut melawati proses parlemen, dan melaksanakan program-program yang disetujui Parlemen. Dalam prakteknya, perdana menteri juga mengangkat gubernur-gubernur, hakim-hakim Mahkamah Agung, dan jabatan penting lainnya. Kementerian India sangat besar dan kompleks. Perdana menteri mengepalai Dewan Menteri atau yang dikenal dengan Kabinet. Setiap anggota Dewan Menteri bertanggung jawab untuk menjalankan satu atau lebih kementerian. Dewan Kementerian terdiri atas tiga lapis, yaitu Kabinet, menteri non-Kabinet, dan wakil menteri. Kabinet biasanya terdiri atas hampir 20 orang politisi partai pemerintah yang paling senior, yang akan memberitahukan perdana menteri tentang isu-isu penting kebijakan publik. Menteri yang dianggap paling bergengsi atau berkuasa adalah menteri luar negeri, keuangan, dan menteri pertahanan.

Berdasarkan Konstitusi 1950 India, Presiden India adalah orang yang sangat berkuasa. Sektor pemerintahan eksekutif, secara teknis dikepalai oleh presiden. Namun pada prakteknya, kekuasaan eksekutif India dipegang oleh Dewan Menteri yang dikepalai oleh perdana menteri.<sup>70</sup> Ketidakjelasan yang ada dalam Konstitusi 1950 menyebabkan kondisi tersebut. Pada satu sisi, Konstitusi 1950 menetapkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pada sisi yang lain menetapkan PM sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari dan tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden melainkan kepada Parlemen. Keadaan ini terjadi sejak awal kemerdekaan India dan bersamaan dengan pemisahan Pakistan dari India. Keadaan ini menjadi masa yang sangat penting

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 79.

bagi keberlangsungan negara India. Oleh karena itulah, Jawaharlal Nehru memegang hampir semua tanggung jawab tersebut. Sementara Presiden Dr. Rajendra Prasad menempatkan dirinya sebagai simbol saja dan bertindak sesuai dengan petunjuk PM Nehru.<sup>71</sup> Keadaan ini berlanjut hingga Indira Gandhi menjadi perdana menteri. Di bawah Indira Gandhi kekuasaan presiden pun menjadi lemah. Tidak ada satu pun cabang pemerintahan India yang lama bertahan melawan keputusan Perdana Menteri, Indira Gandhi, yang sangat berkuasa tersebut.<sup>72</sup>

Badan legislatif India menggunakan sistem dua majelis atau dua kamar, baik legislatif nasional dan negara bagian. Legislatif nasional terdiri atas majelis rendah yang disebut Lok Sabha dan majelis tinggi atau disebut juga Rajya Sabha. Lok Sabha ini dianggap sebagai tonggak utama demokrasi di India. Dengan kata lain, majelis ini merupakan majelis yang terpenting. Masa jabatan anggota Lok Sabha maksimal lima tahun. Partai yang berhasil mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha akan menjalankan pemerintahan atau menjadi anggota Dewan Kabinet. Ini merupakan mekanisme agar perselisihan antara Kabinet dan pemimpin parlementer jarang terjadi. Berdasarkan Pasal 81 Konstitusi 1950, anggota Lok Sabha terdiri atas tidak lebih dari 550 orang dan tidak kurang dari 25 orang, yang dipilih secara langsung di negara-negara bagian. Berdasarkan Amandemen Konstitusi 1950 ke-2 tahun 1953, satu anggota Lok Sabha yang terpilih akan mewakili lebih dari 750.000 populasi. Keputusan ini dibuat karena populasi India sedang meningkat.<sup>73</sup> Oleh karena itu, jumlah kursi di Lok Sabha untuk setiap pemilunya kadang berubah-ubah. Berikut tabel jumlah kursi di Lok Sabha sejak Pemilu 1952-2004.

<sup>71</sup> Norman D. Palmer, *op.cit.*, hlm. 124-125.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 389.

<sup>73</sup> D. C. Gupta, *Indian Government & Politics* (New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1983), hlm. 181.

**Tabel 2.3. Jumlah Kursi Di Lok Sabha Sejak Pemilu 1952-2004**

No.	Tahun Pemilu	Total Kursi Lok Sabha
1.	1952	489
2.	1957	494
3.	1962	494
4.	1967	520
5.	1971	518
6.	1977	542
7.	1980	542
8.	1984	514
9.	1989	529
10.	1991	521
11.	1996	543
12.	1998	543
13.	1999	543
14.	2004	543

Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai sumber

Majelis tinggi India atau Rajya Sabha dipilih oleh anggota badan legislatif negara-negara bagian. Jumlah anggotanya kira-kira 250 orang. Kira-kira 12 orang dicalonkan presiden India dari kalangan ahli kebudayaan, pekerjaan sosial, cendekiawan, dan sebagainya dengan masa jabatan 6 tahun. Di bidang perundang-undangan wewenangnya hampir sama dengan majelis rendah, kecuali dalam hal rancangan undang-undang keuangan, di mana kedudukannya hanya sebagai penasihat. Rajya Sabha tidak dapat menjatuhkan kabinet.<sup>74</sup> Perdana menteri dan Dewan Kabinet bertanggung jawab hanya kepada Lok Sabha. Jika Lok Sabha dan Rayja Sabha menghadapi perbedaan tanggapan mengenai suatu rancangan undang-undang, rancangan undang-undang tersebut ditutup dan seterusnya dilanjutkan kembali antara kedua majelis hingga persetujuan dicapai. Jika masing-masing majelis belum bisa saling menerima rancangan undang-undang tersebut, presiden dapat mengadakan pembahasan bersama-sama untuk menyelesaikan perbedaan. Ketika partai Congress menguasai kedua majelis tersebut, konflik antara kedua majelis tersebut terbatas. Akan tetapi, sejak berkembangnya kekuatan partai-partai regional dan komunal, telah menguatkan Rayja Sabha untuk menuntut hak-hak negara bagian.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Miriam Budiarmo, *op.cit.*, hlm. 321-322.

<sup>75</sup> Monte Palmer, *op.cit.*, hlm. 391.

Selain kedua lembaga di atas, India juga memiliki lembaga yudikatif. Keberadaan ketiga lembaga tersebut merupakan cerminan dari Trias Politika di wilayah kepercayaan publik. Bila fungsi legislatif dan eksekutif mengikuti sistem pemerintahan yang dianut suatu negara, apakah sistemnya presidensil di mana legislatif dan eksekutif bisa bersifat pemisahan/pembagian atau sistemnya parlementer di mana legislatif dan eksekutifnya bercampur, maka tidak demikian halnya dengan lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif yang digambarkan oleh Mahkamah Agung India bersifat independen dan bebas dari pengaruh politik serta kekuasaan. Dalam pelaksanaan fungsinya, Mahkamah Agung tersebut tidak bisa dicampuri atau diintervensi oleh lembaga apapun. Hadirnya lembaga yudikatif atau Mahkamah Agung India diharapkan dapat menjalankan misi utamanya yaitu menjaga dan memelihara tegaknya supremasi hukum. Inilah perbedaan prinsipil antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan yudikatif.

Mahkamah Agung India menyelenggarakan kekuasaan peradilan tertinggi dalam sistem peradilan nasional India. Mahkamah Agung India ini dikepalai oleh seorang hakim agung yang dipilih oleh presiden setelah berkonsultasi dengan beberapa hakim Mahkamah Agung dan hakim senior di negara-negara bagian. Seorang hakim agung akan pensiun pada usia 65 tahun. Mahkamah Agung juga penengah akhir dari kasus-kasus sipil dan kriminal.<sup>76</sup> Mahkamah Agung memiliki hak untuk melakukan *judicial review* atau wewenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan Konstitusi atau tidak, dan menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi. Kasus-kasus yang dapat ditangani Mahkamah Agung adalah yang mencakup perselisihan antara pemerintah pusat dengan negara-negara bagian, atau antar negara-negara bagian. Banyak ahli menyatakan bahwa sistem peradilan India sangat lemah. Kondisi ini terbukti ketika Mahkamah Agung menyatakan banyak program-program sosial Indira Gandhi tidak konstitusional. Usaha untuk menghidupkan kembali posisi sistem peradilan India yang independen, dinyatakan oleh Moog akan dicapai dengan mudah pada era pemerintahan koalisi yang lemah.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Richard L. Park, *op.cit.*, hlm. 87.

<sup>77</sup> Robert Moog, "Elite-Court Relations in India." *Asian Survey*, Vol. 38, No. 4, hlm. 410-423.

## 2.4 Sistem Kepartaian India

Partai politik adalah sebuah kumpulan orang-orang terorganisir yang memiliki prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan bersama. Tujuan utama dari partai-partai politik adalah untuk memperoleh dan menjaga kekuasaan politik. Hal tersebut juga terjadi di India, di mana orang-orang secara terorganisir membentuk partai berdasarkan prinsip-prinsip dan dengan tujuan tertentu pula. Sistem kepartaian di India telah mengalami banyak perubahan mulai sejak berdirinya negara India hingga sekarang. Dengan kata lain, sistem kepartaian India telah mengalami evolusi.

Evolusi sistem kepartaian India dapat diusut dari pembentukan Congress Nasional India (*The Indian National Congress*) sebagai sebuah kekuatan politik pada 1885. Pertemuan pertama Congress ini diadakan pada Desember 1885 di Bombay yang dihadiri oleh 73 delegasi. Para delegasi tersebut mewakili setiap provinsi India Inggris, di mana 54 delegasi adalah Hindu, yang sebagian besar adalah kelas Brahmana; 2 delegasi Muslim, dan selebihnya berasal dari komunitas Parsi atau Jain. Semua delegasi tersebut merupakan delegasi yang berpendidikan bahasa Inggris.<sup>78</sup> Perkumpulan ini kemudian, muncul menjadi partai yang sangat berpengaruh di India yang lazim dikenal dengan Partai Congress (*Congress Party*).

Evolusi sistem kepartaian India ini dikelompokkan ke dalam empat tahap oleh para ahli politik India, yaitu: tahap I antara tahun 1952-1967 yang menunjukkan sistem dominan satu partai, yaitu partai Congress. Partai Congress mendominasi perpolitikan India, baik pusat maupun lokal, dengan pengecualian di negara bagian Kerala yang selama tahun 1956-1959 dimenangkan oleh partai komunis India. Tahap ini dijelaskan oleh para ahli politik India sebagai tahap 'Kekuasaan Congress'. Tahap II antara tahun 1967-1989 yang menandakan 'kekuasaan Congress berada di bawah tantangan' dari pihak oposisi. Oleh karena munculnya kekuatan-kekuatan oposisi terhadap partai Congress, para ahli politik India pun menggambarkan tahap ini sebagai sistem Congress yang kedua. Tahap III antara tahun 1989-1998 yang digolongkan sebagai tahap 'pascapemerintahan

<sup>78</sup> Judith E. Walsh, *op.cit.*, hlm. 167.

Congress dan Munculnya Sistem Multipartai'. Selama tahap ini, perubahan penting yang terjadi dalam sistem kepartaian India adalah munculnya partai BJP sebagai saingan utama partai Congress, ditambah banyaknya muncul partai-partai regional. Sehingga, para ahli politik India pun menggambarkan tahap ini sebagai tahap kemunduran partai Congress. Terakhir, tahap IV antara tahun 1998-hingga sekarang digambarkan sebagai 'Era Koalisi' yang sempurna, yang merupakan hasil dari multipartai pascapemerintahan Congress.<sup>79</sup> Dengan kata lain, sistem kepartaian India telah berubah dari sistem partai tunggal menjadi sistem multipartai, baik partai-partai regional dan nasional.

#### 2.4.1 Partai-Partai Regional

Partai regional adalah partai yang memiliki pengaruh di negara-negara bagian dan kegiatan-kegiatannya dibatasi di negara-negara bagian atau regional tertentu. Suatu partai disebut dengan partai regional apabila mendapatkan 1/25 dari total kursi dewan legislatif di sebuah negara bagian.<sup>80</sup> Partai regional ini dibentuk untuk menyuarakan kepentingan daerah tertentu. Tidak jarang partai-partai regional ini memiliki umur yang singkat dengan kekuatan yang lemah pula. Kadang-kadang, partai-partai regional ini mampu menunjukkan bahwa mereka sangat berkuasa di wilayah mereka masing-masing.

Dalam perkembangan sistem kepartaian India, sebagian besar orang India cenderung percaya bahwa partai-partai regional lebih baik daripada partai-partai nasional. Masyarakat negara bagian menginginkan partai-partai regional memainkan peran yang lebih besar dalam politik, terutama sekali di negara bagian dibandingkan partai-partai nasional. Kondisi ini dapat dijelaskan dengan hasil survey yang dilakukan oleh CSDS pada tahun 1996 dan 2004.

**Tabel 2.4. Dukungan Pemilih Terhadap Partai Regional**

Opini	1996	2004
Setuju	34	41
Tidak Setuju	20	31
Tidak Ada Opini	46	28

Sumber: Unit Data Studi Pemilu Nasional CSDS 1996, 2004

<sup>79</sup> Maidul Islam, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>80</sup> M.L. Ahuja, *Handbook of General Elections and Electoral Reforms in India: 1952-1999* (New Delhi: Mital Publications, 2009), hlm. 223.

Selama enam dekade berfungsinya Parlemen India, telah terlihat perubahan dalam lingkungan kepartaian India. Munculnya pelbagai partai regional membuat jumlah partai peserta pemilu *Lok Sabha* meningkat dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Sementara jumlah partai nasional menurun, jumlah partai regional terus meningkat.<sup>81</sup> Berikut tabel peningkatan jumlah partai politik India.

**Tabel 2.5. Peningkatan Jumlah Partai Politik India (1952-2004)**

Tahun	Jumlah Partai Peserta Pemilu	Jumlah Partai Nasional	Jumlah Partai di Parlemen <sup>82</sup>
1952	55	14	22
1957	16	4	12
1962	29	6	20
1967	25	7	19
1971	52	8	24
1977	34	8	18
1980	36	5	17
1984	38	7	21
1989	117	8	24
1991	145	8	24
1996	208	8	28
1998	176	7	39
1999	169	7	39
2004	230 <sup>83</sup>	6	40

Sumber: Sanjay Kumar, "Regional Parties, Coalitions Government and Functioning of Indian Parliament: The Changing Pattern", *Journal of Parliamentary Studies*, Vol. 1, Juni 2010, hlm. 78.

Berdasarkan tabel di atas, partai nasional yang mengikuti pemilu Lok Sabha India paling sedikit empat partai dan setelah Pemilu 1952 paling banyak 8 partai. Bila sebelum Pemilu 1989, jumlah partai politik peserta pemilu, baik partai nasional<sup>84</sup> dan partai regional<sup>85</sup> tidak pernah melebihi 60 partai, maka berbeda

<sup>81</sup> Sanjay Kumar, "Regional Parties, Coalitions Government and Functioning of Indian Parliament: The Changing Pattern," *Journal of Parliamentary Studies*, Vol. 1, Juni 2010, hlm. 77.

<sup>82</sup> Partai di parlemen adalah partai yang berhasil mendapatkan kursi di Lok Sabha, baik partai nasional maupun partai regional.

<sup>83</sup> Untuk nama-nama partai tersebut lihat di Lampiran 3. Dari ke-14 pemilu tersebut, Pemilu 2004 sengaja dipilih untuk dimasukkan dalam lampiran berkaitan dengan tahun pemilu penelitian ini.

<sup>84</sup> Menurut Komisi Pemilihan Umum India untuk mendapatkan status partai nasional maka partai tersebut harus memperoleh  $\pm 4\%$  dari total suara sah di pemilu sebelumnya dengan sekurang-kurangnya 4 negara bagian.

sejak Pemilu 1989. Sejak Pemilu 1989 hingga Pemilu 2004, jumlah partai terus meningkat dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 114 untuk Pemilu 1989 dan 230 untuk Pemilu 2004. Bila dilihat jumlah partai di parlemen, maka jumlahnya pun melebihi jumlah partai nasional. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peningkatan partai regional tidak hanya sebagai peserta pemilu tetapi berhasil mendapatkan kursi di parlemen nasional, yang artinya mempengaruhi perolehan kursi dari masing-masing partai nasional India.

Menurut K.C. Suri, ada dua aspek utama penyebab munculnya partai-partai regional pada tahun 1980-an tersebut.<sup>86</sup> *Pertama*, munculnya kekuatan politik baru yang didukung oleh elite-elite politis kelas menengah hampir di seluruh negara bagian India. *Kedua*, beberapa masyarakat India dengan kasta tertentu sangat ditentukan dengan batas-batas geografi dari negara bagian. Hal ini mengakibatkan berkembangnya oposisi non-Congress dan partai regional di Punjab, Jammu dan Kashmir, Orissa, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Assam dan yang lainnya. Para pemimpin yang mendirikan partai regional menyatakan bahwa partai-partai nasional India tidak mengakomodasi aspirasi-aspirasi regional mereka. Tuntutan ini lebih diarahkan kepada Partai Congress ketika dipimpin Indira Gandhi.

Fenomena menjamurnya partai-partai regional setelah Pemilu 1989 membuat partai-partai nasional tidak mampu menjadi partai mayoritas di Lok Sabha, termasuk partai Congress yang pernah mendominasi Lok Sabha. Seperti yang dituliskan oleh Sanjay Kumar, bahwa munculnya partai-partai regional yang kuat telah membuat partai-partai nasional kesulitan untuk memenangkan mayoritas kursi di parlemen selama pemilu-pemilu nasional. Ketidakmampuan partai tunggal untuk memenangkan mayoritas kursi di pemilu parlemen telah memaksa dua partai politik atau lebih untuk bersama-sama dalam membentuk pemerintahan yang mengarah kepada timbulnya era koalisi dalam politik India.<sup>87</sup>

Pada awalnya, partai-partai regional muncul sebagai saingan yang serius hanya pada pemilu-pemilu majelis dewan di negara bagian. Akan tetapi, dalam

<sup>85</sup> Suatu partai disebut dengan partai regional apabila mendapatkan 1/25 dari total kursi dewan legislatif di sebuah negara bagian.

<sup>86</sup> K.C. Suri, "Parties under Pressure: Political Parties in India Since Independence," diakses dari <http://www.democracy-asia.org/qa/india/KC%20Suri.pdf>, hlm, 11.

<sup>87</sup> Sanjay Kumar, *op.cit.*, hlm. 74.

perkembangannya partai-partai regional tersebut menjadi tantangan politik yang serius bagi partai-partai nasional, terutama pada pemilu-pemilu Lok Sabha. Keberadaan partai-partai regional dalam sistem partai politik India sebenarnya bukanlah hal yang baru. Hal yang baru adalah ketika partai-partai regional tersebut masuk ke dalam politik tingkat nasional, seperti pada Pemilu 1977. Partai Janata, yang merupakan gabungan partai-partai regional, berhasil mengalahkan partai Congress. Ini adalah pertama kali partai regional berkuasa di tingkat nasional. Pada Pemilu 1980, ketika partai Congress kembali berkuasa, partai regional pun kehilangan masa kejayaan mereka yang baru tercipta. Akan tetapi pada Pemilu 1984, partai regional kembali meningkatkan suara mereka di Lok Sabha.<sup>88</sup> Dengan demikian, berkembangnya partai-partai regional India membuatnya sangat diperlukan dalam pembentukan pemerintahan pada tingkat nasional, terutama sejak Pemilu 1996. Pada pemilu 1996 terdapat 137 anggota Lok Sabha yang berasal dari partai regional. Pada Pemilu 1998, sebagian besar partai regional masuk dalam koalisi pemerintah yang dipimpin partai BJP. Partai-partai regional tersebut memperoleh 162 anggota di Lok Sabha dan 92 dari anggota tersebut adalah bagian koalisi partai BJP. Pada Pemilu 1999, jumlah kursi yang diperoleh partai-partai regional meningkat menjadi 168 anggota dan 109 anggota tersebut adalah bagian dari NDA yang dipimpin BJP.<sup>89</sup>

Dalam Konstitusi India disebutkan bahwa masing-masing negara bagian dan teritori mendapatkan proporsi jumlah kursi yang berbeda di Lok Sabha. Masing-masing negara bagian dan teritori dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Untuk negara India, masing-masing distrik jumlah penduduknya lebih dari satu juta lebih. Berikut grafik proporsi kursi di Lok Sabha dan populasi berdasarkan negara bagian dan teritori India untuk tahun 2004.

<sup>88</sup> Suhas Palshikar, "Regional Parties and Democracy: Romantic Rendezvous or Localized Legitimation?" diakses dari [http://www.democracy-asia.org/Suhas\\_Palshikar\\_democracy\\_regional\\_parties.pdf](http://www.democracy-asia.org/Suhas_Palshikar_democracy_regional_parties.pdf), hlm. 2, pada tanggal 18 Desember 2011.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

**Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Negara Bagian dan Teritori  
(Tahun 2004)**

No.	Negara Bagian/Teritori	Kursi	Populasi
1.	Andhra Pradesh	42	75.727.541
2.	Arunachal Pradesh	2	1.091.117
3.	Assam	14	26.638.407
4.	Bihar	40	82.898.796
5.	Chhattisgarh	11	20.795.956
6.	Delhi	7	13.782.976
7.	Goa	2	1.343.998
8.	Gujarat	26	50.596.992
9.	Haryana	10	21.082.989
10.	Himachal Pradesh	4	6.077.248
11.	Jammu & Kashmir	6	10.069.917
12.	Jharkhand	14	26.909.428
13.	Karnataka	28	52.733.958
14.	Kerala	20	31.838.619
15.	Madhya Pradesh	29	60.385.118
16.	Maharashtra	48	96.752.247
17.	Manipur	2	2.388.634
18.	Meghalaya	2	2.306.069
19.	Mizoram	1	891.058
20.	Nagaland	1	1.988.636
21.	Orissa	21	36.706.920
22.	Punjab	13	24.289.296
23.	Chandhigarh	1	900.914
24.	Rajashtan	25	56.473.122
25.	Sikkim	1	540.493
26.	Tamil Nadu	39	62.110.839
27.	Bengal Barat	42	80.221.171
28.	Uttar Pradesh	80	166.052.859
29.	Pondicherry	1	973.829
30.	Tripura	2	3.191.168
31.	Uttranchal	5	8.497.565
32.	Andaman & Nicobar Islands	1	356.265
34.	Dadra & Nagar Haveli	1	220.451
35.	Daman & Diu	1	158.059
36.	Lakshadweep	1	60.595
<b>Total</b>		<b>543</b>	<b>1.027.053.250</b>

Sumber: Telah diolah kembali dari E. Sridharan, "Electoral Coalition in 2004 General Elections: Theory and Evidence," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5422-5425, dan "The Parliament of India," diakses dari <http://nos.org/317courseE/L-12%20THE%20PARLIAMENT%20OF%20INDIA.pdf>, hlm. 142, pada tanggal 19 Desember 2011.

Berdasarkan tabel di atas, maka partai-partai regional di negara-negara bagian yang memiliki proporsi kursi legislatifnya lebih banyak akan sangat

berpotensi untuk menjadi rekan koalisi atau aliansi bagi partai nasional. Negara bagian tersebut adalah Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajashtan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, dan Bengal Barat/West Bengal. Secara garis besar, partai-partai regional yang berpengaruh tersebut akan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7. Partai-Partai Regional India Yang Berpengaruh Setelah Pemilu 1989**

Negara Bagian	Nama Partai	Keterangan
Andhra Pradesh	Telugu Desam	Partai ini populer di antara pemilih yang miskin, warga pedesaan dan terutama perempuan.
Bihar	RJD dan Samata	Partai Samata adalah salah satu aliansi partai BJP yang paling awal. Sementara partai RJD merupakan aliansi Partai Congress pada Pemilu 1999. Akan tetapi, di negara bagian ini, masyarakat memmberikan antusiasme yang kurang bila beraliansi dengan dengan partai Congress. Partai Samata mendapat dukungan dari pemilih yang berkasta lebih tinggi dan mendapat dukungan lebih besar dari pemilih pedesaan daripada pemilih perkotaan.
Orissa	Biju Janata Dal	Partai ini merupakan partai yang anti-Congress dan menginginkan negara bagian Orissa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, partai ini berusaha mendapatkan dukungan dari pemilih kelas menengah. Partai ini mendapatkan dukungan lebih mudah dari kelompok perempuan dibandingkan laki-laki. BJD mendapatkan dukungan yang baik dari pemilih di perkotaan.
Punjab	Akali Dal	Partai Akali Dal telah aktif sejak pertengahan tahun 1960-an dan telah membentuk basis sosialnya dari kelompok petani pedesaan di negara bagian Punjab. Hampir tiga perempat pendukungnya berasal dari penduduk pedesaan. Partai ini menarik dukungan dari berbagai golongan kasta dan komunitas. Namun, partai ini mendapatkan dukungan yang lemah dari kelompok pemilih yang muda, terutama pemilih yang berpendidikan tinggi.

<b>Negara Bagian</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Keterangan</b>
Tamil Nadu	AIADMK dan DMK	Sejak pertengahan tahun 1960-an, perpolitikan berdasarkan regional di Tamil Nadu telah berkembang secara eksklusif. Bahkan, sejak Pemilu 1989 kedua partai Dravida ini telah menyadari bahwa mereka sangat berpengaruh dalam ya atau tidaknya pembuatan pemerintahan nasional. Tingkat dukungan pemilih laki-laki dan perempuan terhadap partai DMK sama tingginya. Sementara partai AIADMK lebih populer di antara pemilih perempuan. Partai DMK memiliki basis yang kuat di bagian perkotaan dan pemilih yang berpendidikan, sementara partai AIADMK populer di antara pemilih pedesaan dan kurang berpendidikan.
Bengal Barat	Trinmul Congress	Partai Komunis India atau Fron Kiri telah memerintah Bengal Barat sejak akhir tahun1970-an, sehingga politik di negara bagian ini kemudian terbagi dua antara anti-Front Kiri dan Front Kiri. Trinmul Congress ini muncul pada Pemilu 1997 dan baru menjadi aliansi BJP pada pemilu 1999. Partai ini kurang mendapatkan dukungan dari pemilih yang berusia tua. Dukungan laki-laki terhadap partai ini lebih banyak dibandingkan pemilih perempuan.

Sumber: Telah diolah kembali dari M. L. Ahuja, *Handbook of General Elections and Electoral Reforms in India: 1952-1999* New Delhi: Mital Publications, 2009), hlm. 223-230.

#### 2.4.2 Partai-Partai Nasional

Partai nasional adalah partai yang secara umum memiliki pengaruh di seluruh negeri India. Tidak menjadi masalah apakah partai tersebut mendapat kekuatan yang sama di semua negara bagian India atau berbeda dari satu negara bagian terhadap negara bagian lainnya. Berikut tabel mengenai partai-partai yang dikelompokkan sebagai partai nasional di India.

**Tabel 2.8. Partai-Partai Nasional India Sejak Pemilu 1952-2004**

<b>No.</b>	<b>Tahun Pemilu</b>	<b>Nama Partai</b>
1.	1952	BJS, BPI, CPI, FBL(MG), FBL(RG), HMS, INC, KLP, KMPP, RCPI, RRP, RSP, SCF, SP
2.	1957	BJS, CPI, INC, PSP
3.	1962	CPI, INC, JS, PSP, SOC, SWA
4.	1967	BJS, CPI, CPM, INC, PSP, SSP, SWA
5.	1971	BJS, CPI, CPM, INC, NCO, PSP, SSP, SWA

No.	Tahun Pemilu	Nama Partai
6.	1977	BLD, CPI, CPM, INC, NCO
7.	1980	CPI, CPM, INC (I), INC (O), JNP, JNP (S)
8.	1984	BJP, CPI, CPM, ICS, INC, JNP, LKD
9.	1989	BJP, CPI, CPM, ICS, INC, JD, JNP, LKD
10.	1991	BJP, CPI, CPM, INC, JD (JNP), JP, LKD
11.	1996	AIIC(T), BJP, CPI, CPM, INC, JD, JP, SAP
12.	1998	BJP, BSP, CPI, CPM, INC, JD, SAP
13.	1999	BJP, BSP, CPI, CPM, INC, JD(S), JD(U)
14.	2004	BJP, BSP, CPI, CPM, INC, NCP

Ket:

AIIC (T): All India Indira Congress (Tiwari)	KLP: Krishikar Lok Party
BJP: Bharatiya Janta Party	KMPP: Kisan Mazdoor Praja Party
BJS: All India Bhartiya Jan Sangs	LKD: Lok Dal
BLD: Bharatiya Lok Dal	NCO: Indian National Congress (Organisation)
BSP: Bahujan Samaj Party	NCP: Nationalis Congress Party
BPI: Bolshevik Party of India	PSP: Praja Socialist Party
CPI: Cummunist Party of India	RCPI: Revolutionary Communist Party of India
CPM: Cummunist Party of India (Marxist)	RRP: Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad
FBL(MG): Forward Bloc (Marxist Group)	RSP: Revolutionary Socialist Party
FBL(RG): Forward Bloc (Ruikar Group)	SAP: Samata Party
HMS: Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha	SCF: All India Scheduled Caste Federation
ICS: Indian Congres (Socialist)	SOC: Socialist
INC: Indian National Congress	SP: Socialist Party
JD: Janata Dal	SSP: Samyukta Socialist Party
JNP: Janta Party	SWA:Swantantra
JNP (S): Jan Party (Secular)	
JS: Jan Sangh	

Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel di atas, beberapa partai nasional tidak memiliki umur yang lama. Partai nasional India yang terbilang memiliki umur yang panjang minimal mengikuti lima pemilu Lok Sabha, di antaranya adalah partai Congress, partai Komunis India, partai Komunis (Marxis) India, partai Janata Dal, dan BJP. Pada subbagian ini, partai nasional yang akan dijelaskan lebih lanjut adalah partai Congress dan BJP. Kedua partai ini menjadi partai yang saling bersaing dan memiliki pengaruh hampir di seluruh negara bagian India.

#### 2.4.2.1 Partai Congress

Partai Congress (*Indian National Congress*) dibentuk pada Desember 1885 di Bombay. Presiden INC yang pertama adalah W.C. Bonnarjee. Awal dibentuknya partai ini adalah sebagai perkumpulan intelektual yang berpendidikan berbahasa Inggris, yang umum berasal dari kasta tinggi. Tujuan dibentuknya

perkumpulan ini awalnya adalah perdebatan sosial untuk menjamin perkawilan India yang lebih besar di dewan-dewan propinsi.

Pada tahun 1920-an, Congress mengalami beberapa transformasi ketika di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi. Di bawah kepemimpinan Mahatma Gandhi, organisasi tersebut berubah menjadi organisasi massa yang mendapatkan dukungan dari orang-orang biasa. Partai Congress ini kemudian menjadi organisasi politik yang mampu memobilisasi massa untuk melawan pemerintahan kolonial Inggris. Sehingga, partai Congress memainkan peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan dan disebut juga sebagai gerakan kemerdekaan India.

Ketika Gandhi memimpin, ia memiliki strategi politik dengan fokus pada tiga poin fundamental, yaitu 1) mengubah Partai Congress dari sebuah kelompok debat menjadi organisasi politik berdasarkan massa; 2) mengajari massa untuk melawan kolonialisme dengan cara non-kekerasan; dan 3) menggunakan dirinya sendiri sebagai model pengorbanan dan penyangkalan diri. Kebijakan-kebijakan nonkekerasan Gandhi adalah kombinasi dari perlawanan pasif, protes, pemboikotan, *non-cooperative*, dan menghindari pajak.<sup>90</sup>

Memasuki tahun 1930-an, Congress dipimpin oleh seorang aristokrat dan berkharisma, yaitu Jawaharlal Nehru. Nehru menerima jabatan ketua Congress dari ayahnya, Motilal Nehru pada tahun 1929. Nehru adalah seorang yang berpendidikan Barat, pekerja keras dan idealis, serta merupakan sosok yang brilian. Nehru bergabung dengan partai Congress pada 1921. Di bawah partai Congress, Nehru dan Gandhi adalah dua tokoh pejuang India yang memiliki kedekatan yang akrab hingga tercapainya kemerdekaan India pada 1947. Meskipun Nehru adalah murid Gandhi, cara pandang dan bentuk perjuangan mereka berbeda. Menurut pandangan Nehru, dalam perjuangan maka kekerasan dibolehkan dalam keadaan tertentu. Hal ini berbeda dengan prinsip Gandhi yang anti-kekerasan. Gandhi menampilkan sosok seorang yang Hindu tradisional dan menekankan perekonomian rumah tangga. Sedangkan Nehru lebih menampilkan sosok seorang modernis yang menggunakan terminologi Barat dan menekankan

<sup>90</sup> Monte Palmer, *op.cit.*, hlm. 376.

perekonomian industri. Gandhi adalah seorang yang konservatif sedangkan Nehru cenderung radikal. Namun pun demikian, kedua tokoh ini saling menghormati.<sup>91</sup>

Nehru, yang juga oleh saran Gandhi terhadap partai Congress, menjadi perdana menteri India yang pertama pada 1947. Nehru adalah orang yang meletakkan landasan Konstitusi 1950 India dan dasar ideologi partai Congress. Ide-ide Nehru secara garis besar adalah; 1) *Unity of India* atau persatuan India, yang menggabungkan seluruh perbedaan bahasa, agama, sistem kasta dan kepentingan regional; 2) *Secular State* atau negara sekular sebagai wujud dari persatuan India; 3) *Socialist-Democrat* atau demokrat sosialis yang merupakan ideologi yang menekankan pada kesamaan kelas dan kasta serta tetap dalam kerangka demokrasi; dan 4) *Non-Alignment* atau non-blok yang merupakan ide untuk politik luar negeri India. Keempat prinsip ini dikenal dengan konsep *Nehruvian*, dilakukan Nehru dengan baik untuk internal partai Congress maupun untuk pemerintahan India ketika ia berkuasa.<sup>92</sup>

Secara formal, partai Congress adalah partai massa. Partai ini memiliki struktur organisasi hirarki yang rumit mulai dari lokal ke distrik ke negara bagian ke komite seluruh India hingga ke posisi puncak yang terdiri dari Komite Kerja (*Working Committee*), dan seorang presiden atau ketua partai Congress. Selama periode pimpinan Nehru, Dewan Pengurus Negara Bagian dan Pusat adalah hirarki yang memiliki peran untuk menentukan nominasi kandidat, baik pemilu Vidhan Sabha dan Lok Sabha. Meskipun jabatan secara struktural penting, yang lebih penting ketika Nehru memimpin adalah hubungan golongan secara informal, baik dari tingkat lokal hingga nasional.

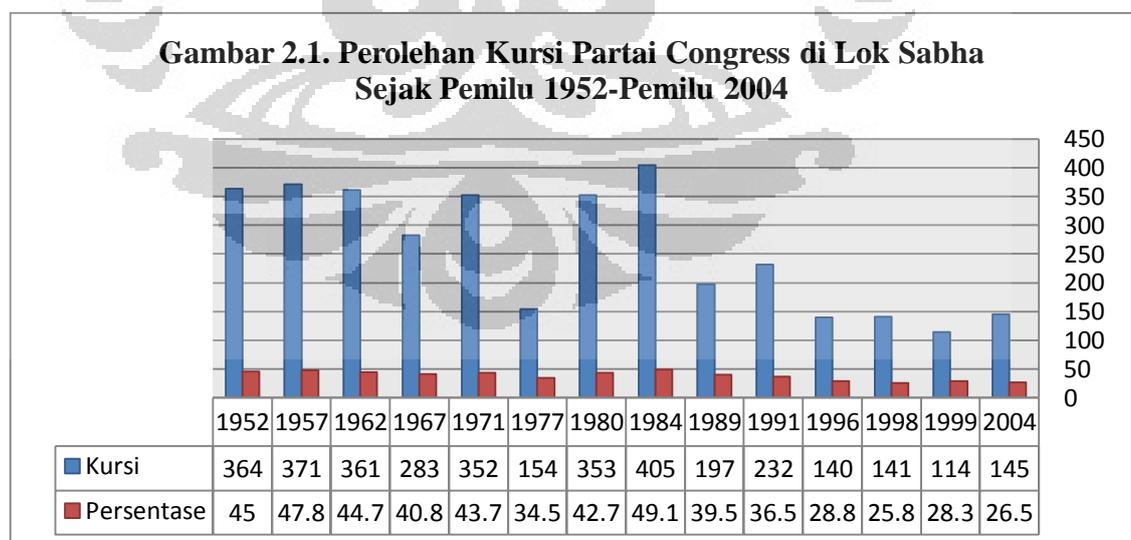
Salah satu karakteristik partai Congress yang menarik adalah terjadi persaingan antargolongan, terutama pada tahun 1950-an hingga 1960-an. Persaingan antargolongan ini ditujukan untuk menguasai komite-komite penting di setiap tingkat. Tidak jarang persaingan antargolongan tersebut berlangsung sengit. Seringkali pula, persaingan tersebut tidak berdasarkan ideologi partai. perselisihan-perselisihan tersebut dapat diselesaikan oleh Nehru sebagai pemimpin partai Congress. Kemampuan Nehru menyelesaikan internal partainya

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 377.

<sup>92</sup> Beatrice Pitney Lamb, *India: A World in Transition* (New York: A. P. Publisher, 1968), hlm. 211-212.

yang sangat terfraksi yang membuatnya disebut Komandan Besar partai Congress. Ia mendorong agar masing-masing golongan tetap berusaha menjaga keberlangsungan organisasi partai dan mendorong para pemimpin partai untuk tetap membangun dukungan pemilih, baik di distrik-distrik maupun hingga keseluruhan negeri India.<sup>93</sup>

Dalam perkembangan partai Congress selanjutnya, partai ini sebagian besar telah memenangkan pemilu Lok Sabha yang telah diselenggarakan India mulai dari Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004. Dalam dinamikannya, partai Congress secara terang-terangan menunjukkan ketergantungannya pada anggota dinasti Nehru-Gandhi sebagai figur pemimpinnya. Sehingga dalam suksesi kepemimpinan partai Congress, elite-elite partai Congress pun mengusahakan agar anggota dinasti Nehru-Gandhi dipilih sebagai pemimpin partai. Kondisi yang harus dipenuhi oleh anggota dinasti Nehru-Gandhi tersebut, menurut para elite partai Congress tersebut, adalah dewasa dan mampu menjadi pemimpin. Namun pun demikian, keberadaan dinasti Nehru sebagai pemimpin Congress, bukanlah satu-satunya faktor yang membuat partai ini berhasil mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat India dan berhasil memenangkan beberapa pemilu di tingkat nasional. Berikut di bawah ini grafik perolehan kursi partai Congress di *Lok Sabha* sejak Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004.



Sumber: Telah diolah kembali dari Paul R. Brass, *The Politics of India since Independence* (New York: Cambridge University Press, 1994), hlm. 77. (untuk Pemilu 1952-1991)

<sup>93</sup> Paul R. Brass, *op.cit.*, hlm. 70.

Berdasarkan grafik di atas, hingga Pemilu 1984 partai Congress cenderung berhasil mendapatkan kursi mayoritas di Lok Sabha, yaitu lebih dari 273 kursi, kecuali Pemilu 1977 yang dikalahkan partai Janata. Untuk Pemilu 1989 dan Pemilu 1991, meskipun tidak berhasil mendapatkan kursi mayoritas di Lok Sabha, partai Congress masih memperoleh kursi terbanyak dibandingkan partai-partai lainnya. Namun pada Pemilu 1989, partai Congress tidak menjadi partai yang memerintah karena tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari partai-partai lainnya yang ada di Lok Sabha. Sejak Pemilu 1996 hingga Pemilu 1999, partai Congress mendapatkan kursi kedua terbanyak setelah BJP di Lok Sabha dan sekaligus masa tersebut adalah masa partai Congress di luar pemerintahan. Sementara pada Pemilu 2004, walaupun hanya mendapatkan 145 kursi, partai Kogres berhasil menjadi partai yang mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha. Keberlangsungan partai Congress mulai dari Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004 yang lalu, dipimpin oleh elite-elite yang berbeda kendatipun anggota dinasti Nehru-Gandhi selalu menjadi aktor penting dalam kepemimpinan Congress tersebut. Masing-masing elite pemimpin partai Congress memiliki gaya kepemimpinan tertentu dengan kondisi yang dihadapi juga berbeda. Berikut tabel pemimpin partai Congress sejak India merdeka hingga Pemilu 2004 yang lalu.

**Tabel 2.9. Pemimpin Partai Congress Sejak 1947-2004**

No.	Nama	Jangka Waktu
1.	Pandit Jawaharlal Nehru	1947-1964
2.	Lal Bahadur Shastri	1964-1966
3.	Indira Gandhi	1966-1984
4.	Rajiv Gandhi	1984-1991
5.	Narasimha Rao	1991-1996
6.	Sitaram Kesri	1996-1998
7.	Sonia Gandhi	1998-2004

Sumber: Telah diolah kembali dari Monte Palmer, *Comperative Politics: Political Economy, Political Culture, and Political Interdependence* (Ontorio: Thomson Wadsworth, 2006), hlm. 388

Partai Congress di bawah kepemimpinan Nehru berhasil menguasai kursi Lok Sabha secara mayoritas mulai dari pemilu pertama hingga pemilu ketiga, yaitu Pemilu 1952, 1957, dan 1962. Secara berturut-turut partai Congress mendapatkan 364, 371, dan 361 kursi di Lok Sabha. Hingga pemilu ketiga

tersebut, sistem kepartaian India disebut dengan *One Party System* karena belum ada partai lain yang mampu menjadi oposisi Congress. Hampir seluruh jabatan penting pemerintahan India, baik di pusat dan negara bagian India, dipegang oleh partai Congress. Baik internal Congress dan rakyat India menerima baik kepemimpinan Nehru.

Selama Nehru memimpin India, dalam keadaan tertentu kebijakan-kebijakannya selalu diterima rakyat. Meskipun demikian, juga terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintahan Nehru, misalnya ketegangan yang disebabkan oleh agama dan regional. Kelompok massa yang melakukan protes memaksa Nehru untuk menentukan ulang batas-batas negara bagian India yang didasarkan pada bahasa mereka.<sup>94</sup> Atau dengan kata lain, masing-masing negara bagian menuntut adanya keistimewaan negara bagian, baik berdasarkan bahasa atau agama.

Pasca India merdeka, partai Congress mengalami suksesi pertama kalinya sejak Nehru meninggal pada tahun 1964 karena penyakit serangan otak. Kedudukan Nehru kemudian digantikan Gulzarilal Nanda selama dua minggu sampai Sindikat Congress<sup>95</sup> memutuskan pengganti Nehru. Untuk menyelesaikan masa jabatan Nehru hingga tahun 1967, Lal Bahadur Shastri ditunjuk Sindikat sebagai PM India. Belum selesai masa jabatan tersebut, Shastri meninggal dunia pada 1966. Gulzarilal Nanda kembali mengisi jabatan tersebut.

Waktu pemilu India yang keempat pada 1967 semakin dekat dan ada kekhawatiran bahwa dukungan masyarakat terhadap partai Congress terus menurun, para Sindikat kembali mencari kandidat yang populer dan memiliki karakter yang lembut. Para Sindikat hanya memiliki satu pilihan logis yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu putri Nehru, Indira Gandhi. Menurut para Sindikat tersebut, hubungan darah yang dimiliki Indira Gandhi tersebut masih berpengaruh untuk meningkatkan popularitas partai Congress. Keyakinan para sindikat tersebut didukung dengan nama belakang Indira, yaitu Gandhi. Walaupun sebenarnya nama tersebut adalah nama belakang suaminya dan tidak memiliki kaitan dengan Mahatma Gandhi. Tafsiran Sindikat bahwa partai Congress akan

<sup>94</sup>Monte Palmer, *op.cit.*, hlm. 379.

<sup>95</sup> Sindikat Congress merupakan sebutan untuk orang-orang penting partai Congress atau disebut juga sebagai para pejabat teras partai Congress.

tetap populer dengan keberadaan anggota dinasti Nehru, terbukti dengan menangnya partai Congress pada Pemilu 1967 dengan perolehan kursi 283.

Di bawah kepemimpinan Indira Gandhi, partai Congress menghadapi banyak tantangan, baik dari internal maupun eksternal. Tantangan internal yang dihadapi partai Congress bermula ketika Indira Gandhi tidak melibatkan para Sindikat dalam proses pembuatan kebijakan. Terlalu mendikte dirinya dalam memimpin dan partai Congress adalah alasan Indira Gandhi untuk tidak melibatkan para Sindikat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, penafsiran para Sindikat bahwa Indira Gandhi adalah pemimpin yang berkarakter lembut ternyata kurang tepat. Hal ini dapat juga dilihat ketika ia memerintah India pada tahun-tahun selanjutnya.

Ketegangan antara Indira Gandhi dan Sindikat terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada tahun 1969. Para Sindikat menghentikan Indira Gandhi sebagai pemimpin partai dan meminta anggota partai Congress di Lok Sabha untuk memilih perdana menteri baru. Akan tetapi, anggota partai Congress di Lok Sabha menolak hal tersebut. Ketidakterpilihannya anggota partai Congress di Lok Sabha ini pun membuat para Sindikat memisahkan diri dari pimpinan Indira Gandhi, dengan fraksi Congress (O) atau oposisi. Fraksi ini dipimpin oleh Morarji Desai yang kemudian bergabung dengan partai Janata. Sementara untuk pimpinan Indira Gandhi disebut dengan Congress (I). Meskipun partai Congress menghadapi tantangan internal hingga berakibat pecahnya partai tersebut, Congress mampu memperoleh suara yang mayoritas di Lok Sabha pada Pemilu 1971 dengan 352 kursi. Kemampuan Indira Gandhi menampilkan performa pemerintahannya dengan baik membuat partainya memenangkan pemilu tersebut.

Pada Pemilu 1977, untuk pertama kalinya partai Congress mengalami kekalahan dan dimenangkan oleh partai Janata yang dipimpin Morarji Desai, mantan Sindikat partai Congress. Selain kebijakan Indira yang menerapkan UU Darurat Perang pada 1975, program pengendalian kelahiran yang dipopulerkan Sanjay Gandhi, putra Indira, adalah penyebab kekalahan Partai Congress pada Pemilu 1977. Secara umum, rakyat pedesaan India yang miskin menolak kebijakan program pengendalian kelahiran tersebut. Rasa frustrasi mereka terhadap kebijakan tersebut, ditunjukkan dengan memilih partai oposisi yang melawan

kebijakan tersebut.<sup>96</sup> Untuk pertama kalinya India diperintah oleh pemerintahan non-Congress. Akan tetapi, pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Morarji Desai dari partai Janata tersebut hanya bertahan 3 tahun. Pemerintahan yang tidak kompak serta konflik personal adalah penyebab jatuhnya koalisi tersebut. Sehingga, pemilu yang baru diagendakan pada bulan Juni 1980.

Pemilu 1980 kembali dimenangkan oleh partai Congress dan Indira Gandhi kembali menjadi perdana menteri India. Sanjay Gandhi yang semakin menonjol dalam perpolitikan India adalah tokoh yang dipersiapkan Indira Gandhi sebagai penggantinya. Akan tetapi, hal ini tidak terwujud karena Sanjay Gandhi meninggal dunia akibat kecelakaan pesawat. Selama 4 tahun kemudian, pemerintahan Indira menghadapi hubungan yang krisis antara pusat dengan negara bagian karena permasalahan agama, wilayah, dan minoritas yang berkaitan dengan bahasa. Keadaan semakin rumit ketika kelompok Sikh menuntut “wilayah otonomi sikh”. Pemerintahan Indira Gandhi sangat menghindari tuntutan kelompok Sikh tersebut karena dapat mempengaruhi kelompok-kelompok komunal lainnya untuk menuntut hal yang sama. Kondisi tersebut dikawatirkan dapat mengakibatkan perpecahan kesatuan India. Penolakan pemerintahan Indira terhadap permintaan kelompok Sikh ternyata membuat elemen-elemen ekstrim komunitas Sikh melancarkan kampanye teror melawan regim, membunuh pejabat-pejabat negara dan menghancurkan fasilitas-fasilitas pemerintahan. Pemerintahan Indira pun merespon keadaan ini dengan kekuatan militer penuh dan menyerang Kuil Golden, kuil tersuci di daerah Sikh, di mana kelompok tersebut berlindung.<sup>97</sup> Wafatnya Indira Gandhi yang dibunuh oleh pengawal pribadinya, yang berasal dari komunitas Sikh, pada 31 Oktober 1984 diduga terkait dengan masalah tersebut.

Setelah Indira meninggal, sama seperti ketika Nehru meninggal, maka elite-elite partai Congress pun berusaha mencari pengganti pemimpin yang dianggap tetap populer. Pilihan tersebut pun jatuh pada Rajiv Gandhi, yang semula enggan untuk masuk dalam politik. Pada Pemilu 1984, Congress memperoleh suara yang lebih besar dibandingkan hasil pemilu-pemilu

<sup>96</sup> Richard L. Park, *op.cit.*, hlm. 132.

<sup>97</sup> Monte Palmer, *op.cit.*, hlm. 382.

sebelumnya. Rajiv memulai masa jabatannya dengan mereformasi dan mendemokratisasi organisasi Congress. Usaha ini pun dimulai dengan memanggil para elite partai untuk pemilu lebih awal tahun 1986. Akan tetapi, berhadapan dengan penurunan popularitasnya yang cepat dan prospek ancaman lebih lanjut akan kekuasaannya yang muncul ketika waktu pemilihan semakin dekat, Rajiv pun membatalkan rencana pemilu tersebut. Congress di bawah pimpinan Rajiv pun menjadi sangat sentralistik, dengan kepemimpinan negara bagian dan lokal terpecah, dan ketidakhadiran kekuatan organisasi Congress.

Pemilu yang semula direncanakan pada 1986 kemudian dilanjutkan pada 1989. Karena tidak berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya di Lok Sabha, maka yang memerintah India adalah pemerintahan koalisi oleh partai-partai lainnya. Ketidakstabilan pemerintahan koalisi selama 2 tahun pun membuat pemilu kembali digelar. Pemilu 1991 kembali dimenangkan Congress, akan tetapi pada tahun yang sama, Rajiv Gandhi terbunuh. Ketergantungan Congress terhadap keluarga Nehru semakin nyata nampak, setelah pembunuhan Rajiv Gandhi pada 21 Mei 1991. Karena tidak adanya keturunan Nehru yang dewasa untuk mengambil kepemimpinan partai, kelompok pengikut Rajiv terdekat, mencoba untuk membujuk istri Rajiv, seorang keturunan Italia, Sonia Gandhi.<sup>98</sup> Sonia Gandhi sebelumnya tidak pernah memainkan peran penting dan tidak menunjukkan sikap tertarik terhadap politik. Atas penolakan Sonia Gandhi menjadi pemimpin Congress, perebutan kedudukan tersebut pun berlangsung di antara elite-elite penting Congress, yang kemudian dimenangkan oleh Narasimha Rao. Kehadiran dinasti Nehru, membawa keuntungan tersendiri bagi partai Congress. Oleh karena itu, tidak hadirnya dinasti Nehru setelah Pemilu 1991 pun membawa kerugian bagi popularitas Congress.

Partai Congress yang dipimpin Narasimha Rao sejak Pemilu 1991 memberikan kontribusi terhadap menurunnya popularitas partai Congress menjelang Pemilu 1996. Pada tahun 1992, di bawah pemerintahan Rao terjadi peristiwa pembongkaran mesjid Babri di Ayodhya. Rao dipandang sebagai PM yang tidak tegas dan tidak mampu menghalangi pembongkaran mesjid tersebut. Para kelompok minoritas, khususnya Islam, yang mencurigai dirinya membuat

<sup>98</sup> Paul R. Brass, *op.cit.*, hlm. 73.

kesepakatan dengan tokoh-tokoh BJP.<sup>99</sup> Selain peristiwa tersebut, terungkapnya skandal kolusi, korupsi, dan suap kurun 1993-1996 di bawah pemerintahan Rao adalah penyebab partai Congress tidak lagi populer pada Pemilu 1996.<sup>100</sup> Pemilu 1996 ini pun kemudian dimenangkan BJP. Pemilu 1996 ini terdapat tiga kekuatan utama politik India, yaitu partai Congress dan aliannya, BJP dan aliannya, serta Front Bersatu (*United Front*). Untuk mengetahui masing-masing daerah yang menjadi basis utama dari ketiga kekuatan politik India pada Pemilu 1996 ini, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.10. Konstelasi Politik India Pada Pemilu 1996**

Wilayah	Negara Bagian	Total Kursi	Perolehan Kursi		
			Congress & Aliansinya <sup>101</sup>	BJP & Aliansinya <sup>102</sup>	Front Bersatu <sup>103</sup>
<b>Utara India</b>	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Uttar Pradesh, Chhattigarth dan Delhi	126	20	75	31
<b>Selatan India</b>	Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andaman & Pulau Nicobar, Lakshadweep dan Pondicherry	130	40	6	84
<b>Timur India</b>	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Sikkim, Tripura dan Bengal Barat	141	37	26	78
<b>Barat India</b>	Dadra & Diu, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra dan Rajasthan	143	47	88	8
<b>Total</b>		540	164	195	201

Sumber: Telah diolah kembali dari Ramesh Takur, "A Changing of The Guard in India", *Asian Survey*, Vol. XXXVIII, No. 6, 1998, hlm. 611.

<sup>99</sup> Sudha Pai, "Transformation of The Indian Party System: The 1996 Lok Sabha Elections," *Asian Survey*, Vol. XXXVI, No.12, 1996, hlm. 1175-1176.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Partai Congress bersama aliannya, yaitu RJD dan KCM.

<sup>102</sup> Partai BJP bersama aliannya, yaitu Akali Dal, BJD, HVP, Lok Shakti, MDMK, PMK, Samata Party, Shiv Sena dan AITC.

<sup>103</sup> Font Bersatu terdiri dari CPI, CPM, JD, AIFB, TMC, TDP, RSP, DMK, AIADMK, BSP, AGP, JMM, dan NC.

Berdasarkan tabel di atas, partai Congress bersama aliansinya mengalami kekalahan hampir di seluruh wilayah Utara India. Bersama aliansinya, partai Congress hanya mampu mendapatkan 20 kursi di wilayah Utara India. Sementara BJP dan aliansinya yang memiliki basis pendukung di daerah Utara tersebut, mampu meningkatkan perolehan kursi dari 56 menjadi 75 kursi. UF (Front Bersatu) pun mendapatkan sisanya sebanyak 31 kursi. Tidak berbeda dengan di wilayah Selatan India partai Congress bersama aliansi pun mengalami penurunan drastis dari sebelumnya 90 kursi menjadi 40 kursi. BJP dan aliansinya hanya mendapatkan 6 kursi yang sebelumnya adalah 5 kursi. Sementara partai-parti yang tergabung dalam UF mampu mendapatkan kursi terbanyak di wilayah tersebut, yaitu 84 kursi.

Untuk wilayah bagian Timur India partai Congress dan aliansinya mengalami sedikit peningkatan dengan meraih 37 kursi yang sebelumnya adalah 34 kursi. BJP dan aliansinya mendapatkan jumlah kursi lebih besar dibandingkan sebelumnya yakni dari 7 kursi menjadi 26 kursi. Sementara UF mengalami penurunan dari 94 kursi menjadi 78 kursi. Untuk wilayah Barat partai Congress dan aliansinya hanya mendapatkan 47 kursi dibandingkan sebelumnya 84 kursi. BJP dan aliansinya mampu meningkatkan perolehan kursinya dari 49 kursi menjadi 88 kursi. Sementara UF hanya mendapatkan 8 kursi yang sebelumnya adalah 7 kursi.

Meskipun BJP berhasil mendapatkan kursi terbanyak dibandingkan partai lainnya pada Pemilu 1996, yaitu 161 kursi, partai ini gagal membentuk pemerintahan. UF kemudian menjadi partai yang memerintah dengan didukung oleh partai Congress. Selama pemeritahan UF ini terdapat dua PM. Perdana Menteri pertama dalam koalisi minoritas ini adalah H.D. Deve Gowda yang berkuasa selama 10 bulan, setelah Congress menarik dukungannya dengan alasan Gowda gagal mempertahankan pemerintahan yang sekuler.<sup>104</sup> PM selanjutnya adalah Inder Kumar Gujral bertahan 7 bulan, setelah Congress menarik dukungannya dengan alasan DMK yang adalah aliansi UF diduga terlibat dalam pembunuhan Rajiv Gandhi.

<sup>104</sup> Eswaran Sridharan, "Coalition and Party Strategies in India's Parliamentary Federation," *Publius*, Vol. 33, No. 4, 2003, hlm. 132.

Setelah kekalahan Congress pada Pemilu 1996, Rao pun didesak mundur oleh elite-elite Congress dan digantikan oleh Sitaram Kesri yang tidak populer. Menjelang pemilu 1998, Sitaram Kesri dan elite-elite penting partai Congress lainnya kembali membujuk keluarga Nehru untuk terlibat dalam Congress menjelang Pemilu 1998. Meskipun Sonia Gandhi menolak tawaran menjadi ketua partai Congress, keluarga Nehru, Sonia Gandhi beserta anak-anaknya Priyanka dan Rahul, terlibat dalam partai Congress pada bulan Januari-Februari 1998 sebagai juru kampanye. Ketidakpopuleran Sitaram Kesri sebagai pemimpin partai Congress dianggap berpengaruh terhadap kalahnya partai Congress dari BJP pada Pemilu 1998. Pemilu 1998 tersebut kembali dimenangkan BJP. Keberhasilan BJP dalam meningkatkan jumlah kursi di *Lok Sabha* didapatkan dari wilayah-wilayah yang dimenangkan UF pada Pemilu 1996.

Koalisi minoritas BJP hasil Pemilu 1998 tidak bertahan lama hanya bertahan 14 bulan karena pemerintah kalah dalam mosi tidak percaya. Akhirnya pemilu kembali dilaksanakan pada Agustus-September 1999. Pemilu ini kembali dimenangkan BJP dengan perolehan kursi sebanyak 182 kursi di *Lok Sabha*. BJP berhasil membentuk sebuah aliansi yang kuat dan mencapai mayoritas mutlak dengan 296 kursi pada Pemilu 1999. Partai Congress yang dipimpin Sonia Gandhi setelah Sitaram Kesri mengundurkan diri pasca Pemilu 1998. Beberapa penyebab kekalahan partai Congress pada Pemilu 1999 adalah pengalaman politik Sonia Gandhi yang minim serta isu-isu yang dikembangkan oleh BJP. BJP adalah partai yang mengembangkan agenda yang pro pada agama Hindu dan menggunakan isu nasionalisme Sonia Gandhi untuk melemahkan partai Congress.

Peristiwa lain yang perlu digarisbawahi dalam menurunnya dominasi partai Congress ialah kekecewaan partai-partai regional terhadap partai ini karena dengan mucah menarik dukungannya, terutama Pemilu 1996 yang dipimpin oleh 13 partai atau disebut *United Front*. Hal ini membuat partai-partai kecil atau regional sulit memberikan dukungannya pada partai Congress.<sup>105</sup> Pada sisi lain, partai-partai regional dan kecil tersebut memberikan dukungan yang lebih besar terhadap BJP sebagai alternatif Congress. Sementara partai Congress beralasan bahwa ketidakstabilan koalisi minoritas membuatnya tidak tergantung dengan

<sup>105</sup> *Ibid.*

partai-partai regional atau kecil. Hal ini ditandai dengan adanya Deklarasi Panchmarhi 1998 oleh Congress bahwa mereka tidak akan memiliki beberapa aliansi pemilu dengan partai-partai regional atau partai-partai kecil.

Berbeda dengan pemilu 1999, di mana Sonia Gandhi dianggap masih memiliki pengalaman yang minim dalam politik, maka Pemilu 2004 dengan dipimpin oleh orang yang sama, partai Congress berhasil mendapatkan suara terbanyak di Lok Sabha. Meski perolehan partai Congress beda tipis dengan BJP, partai Congress menjadi partai yang memerintah dengan didukung oleh aliansi-aliansinya yaitu partai-partai regional. Sonia Gandhi yang merupakan ketua Congress, memberikan kesempatan kepada Manmohan Singh sebagai tokoh yang menjadi perdana menteri India.

#### **2.4.2.2 Partai Janata Bharatiya atau *The Bharatiya Janata Party* (BJP)**

Partai BJP dibentuk pada tahun 1980 yang setelah itu telah memperluas pengaruhnya di daerah-daerah Hindi, Gujarat dan Maharashtra. Sejak tahun 1989, partai tersebut juga telah mencoba untuk memperluas pangkalannya di daerah India Selatan. Sejak pembentukannya pada 1980, BJP telah meningkatkan jumlah kursinya di Lok Sabha secara berangsur-angsur. Pada 1984, BJP hanya mampu mendapatkan dua kursi. Pada Pemilu 1989 jumlah kursi yang diperoleh meningkat menjadi 86. Pada Pemilu 1991 kekuatan BJP di *Lok Sabha* meningkat menjadi 120 yang kemudian meningkat menjadi 161 pada Pemilu 1996. Pada Pemilu 1998, BJP memenangkan 182 kursi dan Pemilu 1999 jumlahnya kursinya tetap yaitu 182 kursi di *Lok Sabha*. Pada Pemilu 1999, BJP ikut bersaing sebagai sebuah rekan aliansi, sekaligus pemimpin Aliansi Demokratis Nasional (*National Democratic Alliance*). Akan tetapi, pada Pemilu 2004 BJP berada di posisi nomor dua, setelah Partai Congress. BJP pun memainkan peran sebagai partai oposisi. BJP muncul sebagai sebuah partai nasional yang signifikan tetapi dasar pendukungnya masih terbatas di daerah-daerah tertentu, daripada tersebar di seluruh wilayah India.

BJP merupakan partai reinkarnasi dari Partai Jana Sangh dan *Bharatiya Jana Sangh*. Partai Jana Sangh pada Pemilu 1952 dan 1957 masing-masing mendapatkan 3, 4 kursi. Pemilu 1962 Jana Sangh memperoleh 14 kursi, Pemilu

1967 memperoleh 35 kursi, dan Pemilu 1971 mendapatkan 22 kursi di *Lok Sabha*. Setelah itu partai Jana Sangh bergabung dengan partai sayap kanan lainnya menjadi partai Janata<sup>106</sup> yang memenangkan Pemilu 1977. Partai Jana Sangh kemudian mengubah namanya menjadi *Bharatiya Jana Sangh* (BJS), yang pada 1980 kembali mengubah namanya menjadi BJP dan ikut Pemilu 1984. Kehadiran BJP pada waktu itu masih belum populer dan sambutan rakyat India belum besar terhadap partai tersebut.<sup>107</sup> Kehadiran partai BJP ini kemudian berhasil menjadi satu-satunya partai saingan Congress. Berikut tabel perolehan kursi partai BJP di Lok Sabha sejak Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004.

**Tabel 2.11. Perolehan Kursi Partai BJP di Lok Sabha sejak Pemilu 1952-Pemilu 2004**

No.	Tahun Pemilu	Jumlah Kursi	Persentase
1.	1952	3	3,1
2.	1957	4	5,9
3.	1962	14	6,4
4.	1967	35	9,4
5.	1971	22	7,4
6.	1977	-	-
7.	1980	-	-
8.	1984	2	7,7
9.	1989	86	11,4
10.	1991	120	20,1
11.	1996	161	20,3
12.	1998	182	25,6
13.	1999	182	23,8
14.	2004	138	22,2

Ket:

Partai BJP merupakan reinkarnasi dari partai Jana Sangh dan Bharatiya Jana Sangh yang telah mengikuti pemilu tahun 1950an hingga 1970an. Partai ini sebelumnya berganti nama secara sah pada tahun 1980 dan kembali mengikuti Pemilu 1984.

Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai sumber.

## 2.5 Pemilu di India

Sesuai dengan sistem pemerintahan yang digunakan negara India, yaitu sistem parlementer, maka pemilihan umum yang penting di India akan berkaitan dengan pemilihan anggota legislatif, baik untuk legislatif nasional dan negara bagian. Waktu pelaksanaan pemilu legislatif nasional yang terdiri dari dua kamar

<sup>106</sup> Richard L. Park, *op.cit.*, hlm. 140.

<sup>107</sup> K.R. Malkani, *op.cit.*

ini tidak berlangsung bersamaan. Pemilu Lok Sabha yang meskipun masa jabatannya maksimal 5 tahun, maka waktu pemilu untuk Lok Sabha belum tentu setelah 5 tahun tersebut tercapai. Hal tersebut tergantung dari kestabilan parlemen. Misalnya, partai yang mendapatkan jumlah kursi terbanyak dan berhasil menjadi partai pemerintah bisa saja mempercepat waktu pemilu, baik partai tersebut menganggap partainya mungkin memenangkan pemilu maupun karena kondisi di parlemen sudah tidak stabil. Contohnya saja pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu. Partai BJP yang memiliki keyakinan akan kemungkinan memenangkan pemilu, memutuskan untuk mempercepat pemilu dari jadwal sebenarnya. Anggota Lok Sabha ini akan dipilih secara langsung oleh rakyat India. Sementara untuk pemilu Rajya Sabha yang memiliki masa jabatan maksimal 6 tahun, anggotanya sebagian besar dipilih oleh badan legislatif dari masing-masing negara bagian. Beberapa anggota Rajya Sabha ini adalah kalangan ahli yang ditunjuk yang mewakili bidang budaya, pekerjaan sosial, cendekiawan dan sebagainya. Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan bahwa pemilu Lok Sabha dipilih langsung oleh rakyat India secara nasional, sementara pemilu Rajya Sabha dipilih oleh dewan perwakilan di masing-masing negara bagian. Untuk pemilu di negara bagian, pemilihan juga ditujukan untuk memilih dewan legislatif di negara bagian. Dewan perwakilan di negara bagian ini memiliki kesamaan dengan dewan nasional, yakni terdiri dari dua kamar dan proses pemilihannya pun sama dengan pemilihan di nasional. Akan tetapi, ada perbedaan untuk Rajya Sabha dan Vidhan Parishad sebagai majelis tinggi. Bila Rajya Sabha sebagian besar dipilih oleh dewan perwakilan di negara bagian, maka Vidhan Parishad, sebagian anggotanya ada yang dipilih langsung oleh rakyat India di negara bagian tersebut.

### **2.5.1 Rangkaian Pemilu Lok Sabha India (1952-2004)**

Proses pemilu telah diterima menjadi bagian dari cara hidup demokrasi India. Jumlah pemilih yang memberikan hak pilihnya dalam setiap pemilu sejak India merdeka mengalami peningkatan. Selain peningkatan jumlah pemilih, peningkatan jumlah individu yang mencari jabatan publik melalui pemilu, juga mencerminkan antusiasme terhadap proses pemilu ini. Pemilihan terhadap orang-orang yang menduduki jabatan politik tersebut, dipilih melalui sistem distrik. Sistem distrik atau yang dikenal juga dengan *the first past the post* (FPTP)

dipandang cocok untuk India, setelah diperdebatkan 3 tahun sejak India merdeka oleh Dewan Konstituante.

Sejak Pemilu India yang pertama, 1952 hingga Pemilu 2004, berbagai partai, baik nasional dan regional, telah bersaing untuk mendapatkan jabatan publik. Bila hingga tahun 1980-an, walaupun terdapat banyak partai politik, partai Congress berhasil mendominasi suara di Lok Sabha. Akan tetapi, sejak Pemilu 1989 kekuatan partai Congress kini menghadapi banyak saingan, baik dari partai-partai nasional lainnya maupun partai-partai regional lainnya. Sejak Pemilu 1989, tidak ada satu partai tunggal pun yang berhasil mendapatkan suara mayoritas di Lok Sabha, termasuk partai Congress. Oleh karena itu, berkoalisi atau beraliansi dengan partai-partai regional lainnya menjadi salah satu strategi yang pantas dipertimbangkan. Untuk mengetahui partisipasi pemilih dalam pemilu serta dinamika kekuatan partai politik peserta pemilu Lok Sabha India, sejak Pemilu 1952 hingga Pemilu 2004, berikut disajikan data dalam bentuk tabel.

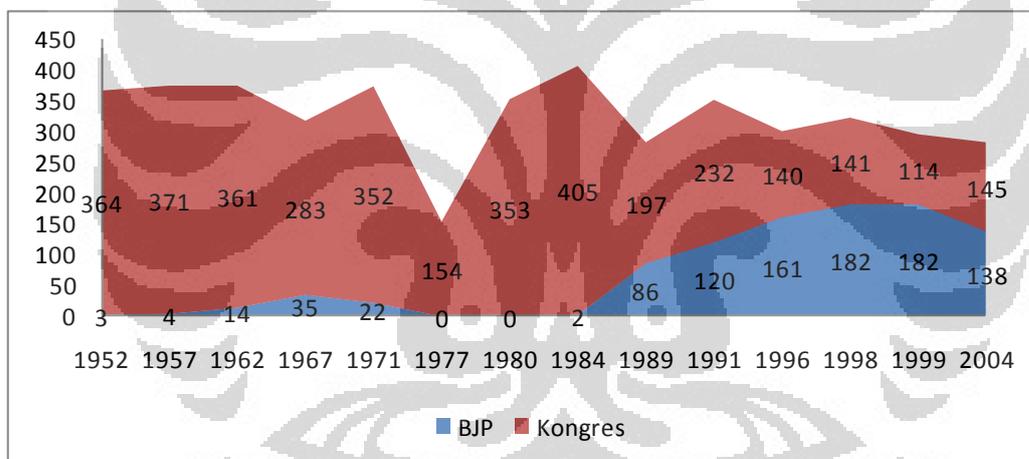
**Tabel 2.12. Partai Mayoritas di Pada Pemilu Lok Sabha, 1952-2004**

Thn	Pemilih Yang Terdaftar	Partisipasi Pemilih	Partai Congress		Partis Komunis India		Partai Komunis India (Marxis)		Partai Janata Bharatiya/Jana Sangh		Partai Janata		Partai Janata Dal	
			% Pemilih	Kursi	% Pemilih	Kursi	% Pemilih	Kursi	% Pemilih	Kursi	% Pemilih	Kursi	% Pemilih	Kursi
'52	173.213.635	105.944.495	45	364	3,3	16	-	-	3,1	3	-	-	-	-
'57	193.552.069	123.435.815	47,8	371	8,9	27	-	-	5,9	4	-	-	-	-
'62	217.682.215	119.904.315	44,7	361	9,9	29	-	-	6,4	14	-	-	-	-
'67	250.603.334	152.734.611	40,8	283	5,0	23	4,4	19	9,4	35	-	-	-	-
'71	274.094.493	151.536.802	43,7	352	4,7	23	5,1	25	7,4	22	-	-	-	-
'77	321.174.327	194.273.915	34,5	154	2,8	7	4,3	22	-	-	41,3	295	-	-
'80	363.940.700	202.705.413	42,7	353	2,6	11	6,1	36	-	-	18,9	31	-	-
'84	400.106.249	256.335.344	49,1	405	2,7	6	5,7	22	7,7	2	6,9	10	-	-
'89	498.906.429	309.060.509	39,5	197	2,6	12	6,6	33	11,4	86	-	-	17,8	142
'91	498.366.380	282.705.803	36,5	232	2,5	14	6,2	35	20,1	120	-	-	11,9	56
'96	592.572.288	334.873.286	28,8	140	2,0	12	6,1	32	20,3	161	-	-	8,1	46
'98	602.340.382	373.678.215	25,8	141	1,8	9	5,2	32	25,6	182	-	-	3,2	6
'99	619.559.944	371.669.282	28,3	114	1,5	4	5,4	33	23,8	182	-	-	-	-
'04	671.565.614	389.363.989	26,5	145	1,4	10	5,7	43	22,2	138	-	-	-	-

Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai laporan Pemilu Lok Sabha (www.eci.gov.in/ARCHIVE, diakses pada 26 Maret 2012).

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi pemilih di setiap pemilu Lok Sabha India menunjukkan peningkatan. Secara garis besar, partisipasi pemilih tersebut berada di atas 50%. Sementara untuk partai politik peserta pemilu Lok Sabha, partai Congress dan partai Komunis India terlihat selalu muncul di setiap pemilu. Meskipun kekuatan kedua partai politik tersebut jauh berbeda, di mana perolehan kursi partai Komunis tidak pernah melebihi 10%. Dari partai politik peserta pemilu tersebut, terlihat bahwa partai Congress dan BJP mampu mendapatkan kursi di atas 20% sejak Pemilu 1991 dibandingkan partai lainnya. Berikut grafik perbandingan kedua partai tersebut. Khusus untuk partai BJP meskipun secara resmi muncul pada Pemilu 1984, akan tetap dimasukkan sejak Pemilu 1952 karena merupakan reinkarnasi dari partai Jana Sangh.

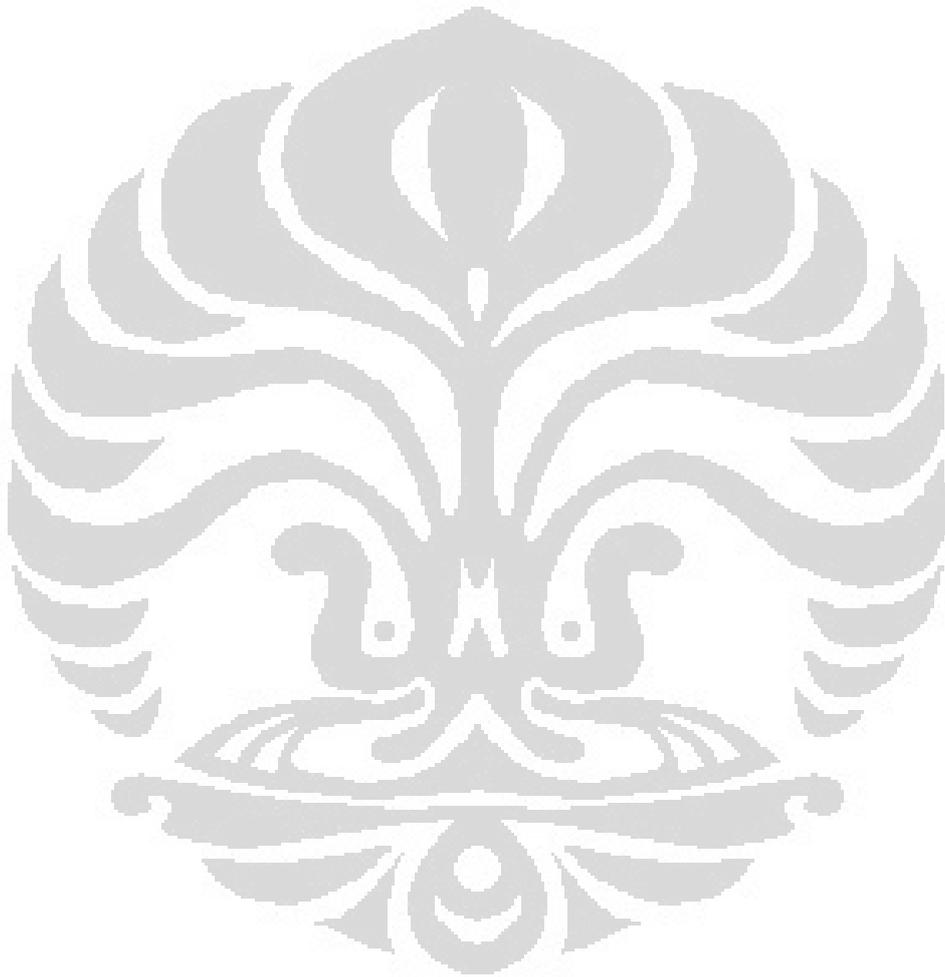
**Gambar 2.2. Perbandingan Partai Congress dan BJP Sejak Pemilu 1952-2004**

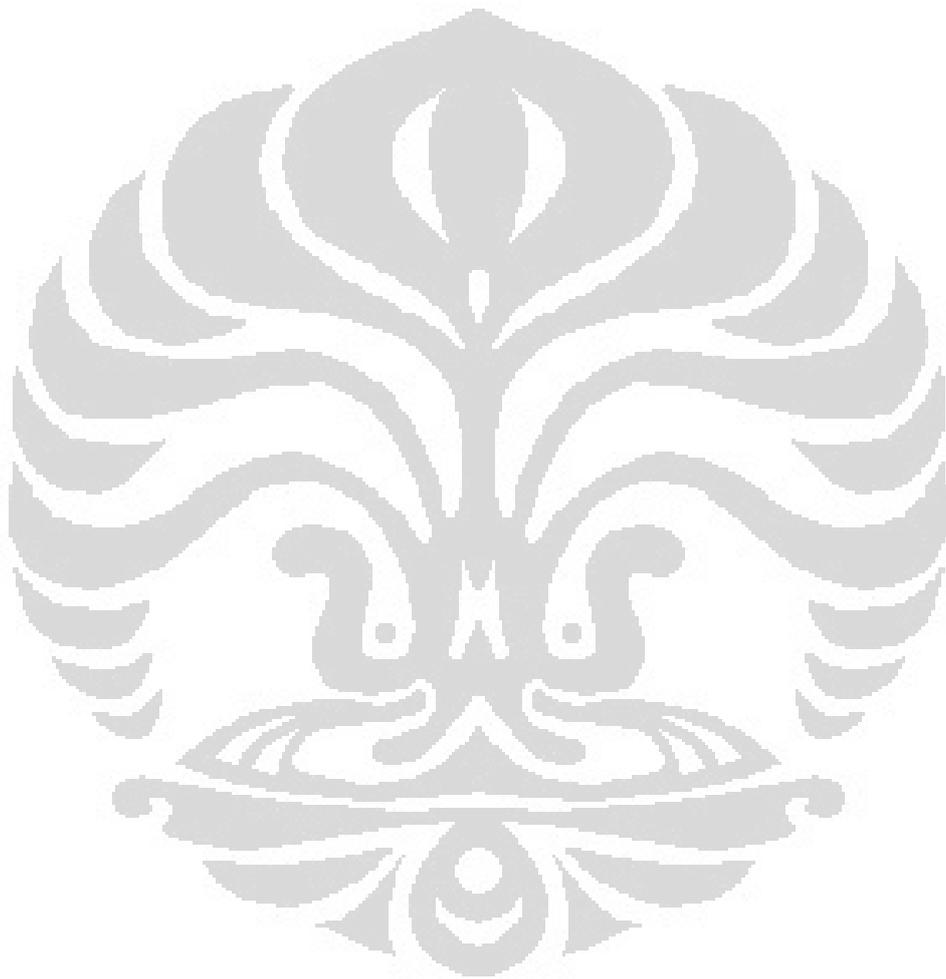


Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai sumber

Berdasarkan grafik di atas, ada beberapa hal yang menarik untuk diperhatikan. Bila sejak Pemilu 1952 hingga Pemilu 1984, kecuali Pemilu 1977 partai Congress masih mampu mendapatkan kursi mayoritas terbanyak di Lok Sabha tidak demikian halnya sejak Pemilu 1989 hingga Pemilu 2004 yang lalu. Sejak Pemilu 1989 hingga Pemilu 2004 partai Congress hanya sekali mampu melebihi 200 kursi. Bahkan dalam rentang waktu tersebut partai Congress mengalami penurunan kursi yang drastis, yaitu Pemilu 1999 dengan perolehan hanya 114 kursi. Sementara partai BJP yang hanya mendapatkan 2 kursi pada pemilu pertama yang diikutinya, yaitu sejak

Pemilu 1984, mampu muncul menjadi saingan yang potensial bagi partai Congress. Meskipun partai ini tidak mendapatkan kursi mayoritas di Lok Sabha, dengan minimal 272 kursi, partai BJP mampu mengalahkan perolehan kursi partai Congress. Dengan kata lain, partai BJP mengalami peningkatan perolehan kursi yang cenderung stabil dibandingkan partai Congress yang cenderung menurun.





## **BAB 3**

### **FAKTOR INTERNAL KEMENANGAN PARTAI CONGRESS PADA PEMILU LOK SABHA 2004**

Setelah delapan tahun berada di luar pemerintahan atau menjadi partai oposisi sejak Pemilu 1996, 1998, dan 1999, tidak dapat dipungkiri bahwa kemenangan partai Congress pada pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu mendatangkan keuntungan tersendiri bagi partainya. Baik memampukan partai tersebut untuk menguatkan kembali basis pendukungnya yang telah mengalami penurunan sejak akhir tahun 1980-an, maupun menunjukkan kemampuannya untuk kembali memerintah India, seperti era-era sebelumnya yaitu era 1950-an hingga awal 1980-an.

Kemenangan suatu partai dalam pemilu tentunya tidak cukup dijelaskan hanya dengan satu aspek saja, terutama bagi negara India yang heterogen baik dari segi etnis, bahasa, regional, agama dan kelompok-kelompok komunal lainnya. Oleh karena itu, bab ini berusaha menggali beberapa aspek yang dapat menjelaskan penyebab kemenangan partai Congress, khususnya pada Pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu. Kemenangan suatu partai dalam pemilu kemungkinan besar tidak terlepas dari usaha-usaha yang diberikan partai tersebut terhadap lingkungan luarnya. Usaha-usaha atau upaya-upaya ini yang diberikan partai tersebut kemudian dikelompokkan sebagai bagian internal partai Congress. Pada bagian ini, ada tiga sub bagian penting yang dikelompokkan menjadi bagian internal partai Congress, yaitu kepemimpinan, isu-isu yang dipopulerkan partai Congress menjelang pemilu, serta kebijakan yang dikeluarkan partai Congress terkait dengan pembangunan koalisi dengan partai-partai regional lainnya.

#### **3.1 Kepemimpinan Partai Congress**

Partai Congress cenderung identik dengan nama Nehru-Gandhi. Nama tersebut adalah tokoh partai Congress sekaligus tokoh nasionalis India yang sangat terkenal di negara tersebut, yaitu Pandit Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Bahkan kelanjutan partai Congress tersebut tidak terlepas dengan nama tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu dinasti keluarga yang terkenal dalam struktur kepemimpinan partai memberikan keuntungan tersendiri

bagi partai tersebut, misalnya nama keluarga dari dinasti membuat partai tetap populer atau mudah dikenal orang lain. Selain popularitas, keberadaan anggota dinasti tersebut di dalam kepemimpinan partai politik menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan politik. Secara jelas, keberadaan dinasti yang menguntungkan suatu partai ini dapat dilihat terjadi bagi partai Congress. Sejak India merdeka, walaupun dalam rentang waktu yang singkat partai ini dipimpin oleh dinasti non-Nehru-Gandhi, anggota dinasti Nehru-Gandhi selalu hadir dalam struktur kepemimpinan partai Congress. Misalnya saja, setelah meninggalnya Nehru, putrinya Indira Gandhi dipertimbangkan menjadi pemimpin partai Congress selanjutnya. Hal ini kembali terulang setelah Indira Gandhi meninggal terbunuh, dinasti Nehru-Gandhi dipertimbangkan menjadi pemimpin partai Congress tidak hanya pada Rajiv Gandhi yang diminta untuk memimpin partai Congress, tetapi juga pada istrinya, Sonia Gandhi. Tak seorang pun yang paling diterima sebagai pemimpin dalam partai Congress selain yang sama dengan Nehru.<sup>108</sup>

Salah satu penyebab utama kekalahan partai Congress pada Pemilu 1996, 1998, dan 1999 menurut Nurendro adalah terjadinya krisis kepemimpinan dalam tubuh partai Congress.<sup>109</sup> Krisis kepemimpinan ini dimulai dengan wafatnya Rajiv Gandhi pada 21 Mei 1991. Setelah Rajiv Gandhi, pada tahun 1990-an tidak ada pimpinan partai Congress yang mampu mengembalikan citra partai Congress sebagai partai penguasa dengan memenangkan pemilu. Selain itu, pemimpin partai Congress setelah dipimpin dinasti non-Nehru-Gandhi, kurang mampu menangani atau merekonsiliasi konflik internal yang kerap terjadi antara elite-elite partai Congress. Sebelum kembali dipimpin oleh dinasti Nehru-Gandhi, yaitu Sonia Gandhi, partai Congress dipimpin dua orang yang bukan dari dinasti Nehru-Gandhi, yaitu Narasimha Rao dan Sitaram Kesri.

Narasimha Rao adalah tokoh yang memimpin partai Congress setelah Rajiv Gandhi meninggal dan sekaligus menjadi perdana menteri karena pada Pemilu 1991 partai Congress mendapatkan kursi terbanyak dengan jumlah 232 kursi. Rajiv Gandhi meninggal satu hari setelah putaran pertama pada Pemilu

<sup>108</sup> Vijay Sanghvi, *The Congress: Indira to Sonia Gandhi* (New Delhi: Kalpaz Publications, 2006), hlm. 49.

<sup>109</sup> Iman Nurendroa, *op.cit.*, hlm. 90-103.

1991. Narasimha Rao menjadi PM India dengan pemerintahan minoritas yang disetujui oleh Presiden Ramaswami Venkataraman. Meskipun pemerintahan minoritas, partai ini bisa bertahan sampai lima tahun di bawah pimpinan Rao. Pada awalnya kepemimpinannya, Rao menjadi seorang pemimpin yang kredibel. Akan tetapi, pada akhir masa jabatannya sebagai PM, Rao menjadi figur yang tidak populer, baik bagi rakyat India maupun dari internal partai Congress sendiri.

Narasimha Rao memulai karir politiknya sejak ia bergabung dengan partai Congress sebagai aktivis sebelum kemerdekaan India. Rao menjadi anggota *Vidhan Sabha* di negara bagian Andhra Pradesh mulai tahun 1957 hingga 1977. Rao dikenal sebagai pendukung utama Indira Gandhi, termasuk kejatuhan Indira pada 1977-1979. Ia juga menjadi menteri luar negeri India dalam pemerintahan Indira dan Rajiv sejak tahun 1980 hingga 1989. Rao memiliki hubungan yang sangat dekat dan menjadi orang kepercayaan Indira dan Rajiv Gandhi. Alasan karir dan mobilitas Rao yang berpengalaman sebagai politisi serta kedekatannya dengan keluarga Nehru-Gandhi inilah yang membuat Rao dijadikan sebagai alternatif terkuat setelah Sonia Gandhi sebagai pemimpin partai Congress. Tawaran sebagai pemimpin partai yang ditolak Sonia membuat elite-elite partai Congress mengaggap Rao sebagai sosok yang paling bisa menggantikan dan mewakili dinasti Nehru-Gandhi. Keahlian politik Rao terbukti ketika pada 1991 ia mampu membuat partai Congress tetap solid ketika ditinggalkan dinasti Nehru-Gandhi dan menempatkan partai Congress kembali sebagai partai yang memerintah.<sup>110</sup> Walaupun kemenangan tersebut dianggap lebih sebagai simpati rakyat India atas tragedi yang menimpa Rajiv Gandhi.

Popularitas Rao menjelang Pemilu 1996 tidak lagi sekuat popularitasnya mula-mula, yaitu setelah Pemilu 1991. Popularitas Rao mengalami penurunan menjelang Pemilu 1996. Menurunnya dukungan terhadap Rao dimulai pada 1992 dengan kejadian pembongkaran mesjid Babri di Ayodhya, Uttar Pradesh, oleh kelompok Hindu garis keras yang didukung BJP. Pembongkaran mesjid ini adalah konflik agama yang mengakibatkan banyak korban jiwa, bahkan diduga jumlahnya adalah yang terbesar sejak kemerdekaan India. Konflik seputar mesjid Babri ini telah dimulai sejak lama. Pada 1855 merupakan awal sengketa antara

<sup>110</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

umat Hindu dan Islam memperebutkan lokasi tersebut. Umat Hindu percaya bahwa di lokasi berdirinya mesjid tersebut merupakan bekas kuil Rama pada masa sebelum kedatangan Islam. Menurut orang Hindu, kuil Rama tersebut dihancurkan oleh umat Islam pada masa dinasti Mughal yang menguasai wilayah Ayodhya. Mesjid Babri sendiri menurut sejarah didirikan pada 1528 oleh Maharaja babur dari kerajaan Mughal yang beragama Islam.<sup>111</sup> Pembongkaran mesjid ini membuat Rao dicap sebagai pemimpin yang tidak tegas dan bermuka dua. Rao dinilai tidak tegas karena tidak mampu menghalangi terjadinya pembongkaran mesdjid tersebut. Sementara penilaian bermuka dua ini muncul, yang sebagian besar berasal dari kelompok minoritas, khususnya umat beragama Islam, dikarenakan dirinya dicurigai telah membuat kesepakatan di balik layar terhadap tokoh-tokoh BJP. Hal ini membuat representasinya sebagai orang yang sekuler jadi diragukan.<sup>112</sup>

Alasan lain yang membuat menurunnya reputasinya sebagai pemimpin Congress yang kredibel adalah terungkapnya beberapa skandal kolusi, korupsi dan suap dalam kurun waktu empat tahun, yaitu 1993-1996. Pada tahun 1993-1994 terjadi skandal korupsi menyangkut impor gula yang menyebabkan Menteri Pangan India, Kalpanath Pai, mengundurkan diri. Kemudian pada tahun 1995, oposisi di parlemen juga merilis isu adanya skandal kolusi dan suap yang dilakukan Menteri Komunikasi India, Sukh Ram. Skandal yang dilakukan Ram adalah menerima suap dari beberapa perusahaan yang tidak dikenal dan meloloskannya dalam tender saluran telekomunikasi. CBI kemudian menangkap Ram pada 19 Desember 1996, setelah pada bulan Agustus agen-agen CBI menemukan uang tunai sebanyak 1 juta dolar Amerika di dua rumah Ram. Beberapa bulan sebelum Pemilu 1996, tepatnya bulan Januari, Rao mempersilahkan CBI untuk menyelidiki keterlibatan tujung anggota kabinetnya dan dua gubernur negara bagian pada transaksi *Hawala* (perdagangan gelap) senilai 18 juta dolar.<sup>113</sup> Akan tetapi, kebijakan Rao ini lebih lanjut membuat terbongkarnya skandal-skandal lain dalam kabinetnya dan bahkan melibatkan dirinya sendiri. Tujuan Rao mempersilahkan CBI sebenarnya selain untuk

<sup>111</sup> “Sejarah Konflik Ayodhya”, *Tempo*, 18 Desember 1992.

<sup>112</sup> Sudha Pai, *op.cit.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

membersihkan namanya juga dimaksudkan untuk membersihkan para saingannya, baik dari dalam maupun luar Congress. Ternyata, hal tersebut justru memicu perpecahan antara elite partai Congress. Terjadi perselisihan antara elite-elite pendukung Rao dan elite-elite partai Congress lainnya, misalnya Mandhavao Scindia, Arjun Singh dan Narayan Dutt.

Kepercayaan partai Congress terhadap Rao tidak berlangsung lama meskipun ia masih menjadi ketua partai Congress hingga Pemilu 1996. Rao sebagai pimpinan partai Congress dan PM Inda dianggap sebagai orang yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya skandal-skandal tersebut. Menghadapi rentetan terbongkarnya skandal demi skandal dan kekalahan dalam Pemilu 1996 membuat Rao didesak mundur oleh pimpinan partai Congress lainnya. Partai Congress hanya mendapatkan 140 kursi pada Pemilu 1996, sementara partai BJP mendapatkan 161 kursi. Walaupun partai BJP mendapatkan jumlah kursi terbanyak, namun partai ini gagal memperoleh sekutu koalisi dalam waktu dua minggu guna menjalankan pemerintahannya. Kegagalan BJP mendapatkan koalisi ini membuat *United Front* sebagai pemegang mayoritas kedua di parlemen mendapat mandat dari Presiden India, Shankar Dayal Sharma, untuk membentuk pemerintahan. Koalisi minoritas UF ini didukung oleh partai Congress dari luar. Pemerintahan koalisi minoritas ini tidak berlangsung lama, hanya bertahan 16 bulan.

Kepercayaan oleh elite-elite partai Congress terhadap kepemimpinan Rao tidak berlangsung lama. Rao yang secara resmi mundur sebagai pemimpin partai Congress pada 19 Desember 1996 kemudian digantikan oleh Sitaram Kesri. Sitaram Kesri adalah seorang politikus tua partai Congress yang juga sangat loyal kepada partai Congress. Ia pernah menjadi anggota Lok Sabha pada 1971-1977, kemudian menjadi anggota Rajya Sabha pada 1977-1980. Ia juga pernah menjadi bendehara partai Congress sejak 1980-1996 hingga akhirnya menggantikan Rao. Kesri dikenal sebagai seorang negosiator yang ulung. Akan tetapi, sebelum ia menjadi ketua partai Congress, nama Kesri tidak terlalu terkenal dalam perpolitikan India. Sosoknya yang tidak begitu populer menyebabkannya lebih banyak menjadi tokoh di belakang layar. Langkah pertama Kesri setelah menjadi ketua partai Congress adalah memecat Sukh Ram dan tiga orang pendukung Rao

lainnya, yaitu: Janardhana Poojary, Davendra Dwivedi dan B.P. Maurya. Selain itu, ia juga berhasil membujuk beberapa elite partai Congress yang keluar dari partai Congress karena berselisih paham dengan Rao, yaitu Mandhavao Scindia, Arjun Singh dan Narayan Dutt. Selama Kesri menjadi ketua partai Congress, ia berhasil membujuk Sonia Gandhi dan anak-anaknya untuk bergabung dengan partai Congress. Akan tetapi, tawaran sebagai ketua partai Congress tetap ditolak oleh Sonia Gandhi. Ia lebih suka mendukung Kesri untuk tetap pada jabatannya sebagai ketua partai Congress.<sup>114</sup>

Selama Kesri menjadi ketua partai Congress, ia sudah dua kali menarik dukungannya terhadap PM koalisi UF. Penarikan dukungan terhadap PM H.D. Dave Gowda oleh Kesri karena menurutnya Gowda kurang sekular, sementara alasan untuk menarik dukungannya dari Inder Kumar Gujral, yang juga dari UF, adalah Gujral diduga terlibat dalam pembunuhan Rajiv Gandhi.<sup>115</sup> Ketidakstabilan pemerintahan minoritas ini membuat presiden India mengumumkan akan diadakan pemilu kembali lagi pada 1998. Menjelang pemilu 1998 ini, Dinasti Gandhi, yang diwakili oleh Sonia Gandhi dan anak-anaknya, berperan sebagai juru kampanye partai Congress. Keterlibatan Sonia Gandhi dalam partai Congress, sedikit banyak menimbulkan pro dan kontra di dalam partai Congress. Beberapa anggota senior partai Congress mengundurkan diri dan bergabung dengan partai BJP. Konflik internal antar elite partai Congress, kembali terjadi menjelang pemilu diselenggarakan. Tentu ini sedikit banyak mempengaruhi kemaksimalan persiapan partai Congress menjelang pemilu tiba. Keterlibatan dinasti Gandhi ternyata belum memberikan keuntungan sendiri bagi partai Congress. Namun, paling tidak, kehadiran dinasti ini berhasil mempertahankan perolehan kursi bagi partai Congress, yaitu sebanyak 141 kursi. Kesri yang kurang terkenal, terutama bagi rakyat India, serta kurang memiliki basis dukungan massa mempengaruhi performa partai Congress yang tidak optimal pada Pemilu 1998, yang diselenggarakan pada bulan Januari-Februari 1998. Pemilu 1998 ini, partai BJP berhasil mendapatkan suara terbanyak pertama.

<sup>114</sup> Iman Nurendro, *op.cit.*, hlm. 95-96.

<sup>115</sup> *Ibid.*

### **3.1.1 Partai Congress di Bawah Kepemimpinan Sonia Gandhi**

Sonia Gandhi merupakan sosok yang memimpin partai Congress memasuki Pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu. Bila membaca nama tersebut maka dengan cepat pembaca menangkap bahwa Sonia Gandhi merupakan bagian dari dinasti Nehru-Gandhi. Sonia Gandhi memang merupakan bagian dari dinasti Nehru-Gandhi tetapi tidak berdasarkan keturunan darah. Sonia merupakan wanita keturunan Italia yang lahir pada 9 Desember 1946 dengan nama lengkap Edvide Antonia Maino. Seperti orang Italia pada umumnya yang erat memeluk agama Katolik, ia pun dibesarkan dalam lingkungan keluarga Katolik yang sangat kuat. Sonia pertama kali bertemu dengan Rajiv Gandhi pada tahun 1965 di sebuah restoran Yunani di kota Cambridge. Mereka berdua sama-sama kuliah di Universitas Cambridge walaupun berbeda jurusan. Setelah menjalin hubungan tiga tahun mereka memutuskan untuk menikah. Sonia pun akhirnya pindah ke India dan berada di kediaman perdana menteri yang merupakan ibu Rajiv Gandhi, yaitu Indira Gandhi.

Keterlibatan Sonia Gandhi dalam perpolitikan India, khususnya memegang jabatan penting di partai Congress tersebut bukan hanya karena didasari oleh alasan dinasti semata. Memang sudah menjadi kecenderungan bila salah satu anggota keluarga terlibat dalam politik maka anggota keluarga lainnya akan mengikuti jejak anggota lainnya yang sudah terkenal dalam dunia politik. Misalnya saja ayahnya adalah seorang gubernur maka anaknya pun mengikuti jejak ayahnya dengan minimal menjabat sebagai bupati. Begitu pula anggota lainnya. Nama keluarga pun akan dibawa-bawa dalam perjalanan mereka mencari dukungan.

Tidak semata-mata karena nama Nehru-Gandhi, tetapi keadaan politiklah yang membuat Sonia Gandhi terlibat dalam perjuangan politik India yang keras. Kerasnya dunia politik tersebut bahkan membuat nyawa sebagai taruhannya. Hal ini sudah terbukti terjadi kepada dua anggota dinasti Nehru-Gandhi yang terkenal, yaitu Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Keduanya meninggal dunia lewat upaya pembunuhan.

Setelah Rajiv Gandhi meninggal, Sonia Gandhi adalah salah satu kandidat di urutan pertama yang dipertimbangkan sebagai pemimpin partai Congress. Anak

Rajiv Gandhi yaitu Rahul Gandhi yang berumur 21 tahun dan Priyanka Gandhi yang berumur 19 tahun dianggap kurang mampu memimpin partai Congress karena masih muda. Akan tetapi, Sonia Gandhi menolak tawaran tersebut hingga tahun 1998. Ditolaknya tawaran sebagai ketua partai Congress tersebut karena Sonia berasal bahwa ia sedang berkabung dan ingin berkonsentrasi untuk mengasuh rumah tangganya. Menurut Sonia Gandhi kehidupan politik telah merusak kehidupannya dan juga anak-anaknya. Tidak hanya setelah orang-orang terdekatnya meninggal terbunuh dalam dunia politik, sejak awal pernikahannya dengan Rajiv Gandhi, ia dan suaminya telah memilih kehidupan yang tidak terlibat dengan kehidupan politik.<sup>116</sup>

Rajiv Gandhi akhirnya terlibat dunia politik karena permintaan ibunya, Indira Gandhi. Sebenarnya, Indira Gandhi lebih mempersiapkan putra bungsunya, yaitu Sanjay Gandhi, yang telah aktif dalam dunia politik sebagai penerusnya. Akan tetapi, Sanjay Gandhi meninggal karena kecelakaan pesawat. Sonia Gandhi menyatakan bahwa suaminya tersiksa dengan keputusan yang harus ia buat, antara melindungi kehidupan yang telah mereka pilih atau memilih mendukung ibunya di saat ibunya sangat membutuhkannya. Berbulan-bulan lamanya Sonia Gandhi dapat menerima keputusan Rajiv Gandhi yang akhirnya memilih mendukung ibunya.

Pada 1981 Rajiv Gandhi terpilih masuk jadi anggota parlemen. Walaupun Sonia Gandhi sering bepergian dengan suaminya dalam tugasnya sebagai anggota parlemen, ia menyatakan bahwa perhatian utamanya adalah memastikan keperluan suaminya, seperti keperluan rumah tangga. Selanjutnya, Sonia Gandhi menyatakan bahwa terbunuhnya ibu mertuanya pada 1984, membuat tujuan keluarganya benar-benar berubah. Saat itu, suaminya langsung diminta oleh partai Congress untuk menggantikan ibunya sebagai pemimpin partai Congress. Walaupun Sonia Gandhi memohon dengan sangat agar suaminya menolak tawaran tersebut, ia menyadari bahwa suaminya tidak memiliki pilihan lain. Sonia Gandhi menyatakan bahwa rasa tanggung jawab suaminya terhadap negerinya dan terhadap warisan ibu dan kakeknya juga melekat kuat di dalam dirinya.

<sup>116</sup> "Sonia Gandhi: Secular Life," diakses dari <http://marifa.hct.ac.ae/files/2011/06/TWENTY-FOUR-The-Security-Life-by-Sonia-Gandhi.pdf>, pada tanggal 10 Januari 2012, hlm. 210-211.

Keberadaannya sebagai istri perdana menteri membuatnya juga harus menyeimbangkan kehidupan keluarganya, memastikan bahwa anak-anaknya memiliki kehidupan senormal mungkin dan memberikan batasan perlindungan yang luas bagi mereka semua. Keluarga tetap menjadi prioritas Sonia Gandhi. Setelah kejadian terbunuhnya suaminya, Sonia memutuskan untuk mengasingkan dirinya dan anak-anaknya dari dunia publik dan politik.<sup>117</sup>

Dalam tahun-tahun keterasingan Sonia Gandhi dari dunia politik, ia melihat perubahan dan pergolakan di India. Pertumbuhan ekonomi berjalan cepat. Kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas baru, yang lama tidak terakomodasi, mencoba mencari bagian mereka yang masuk akal. Demokrasi membuat lebih banyak persamaan, namun juga memberikan kekuasaan baru kepada beberapa kekuatan lama—kekuatan yang berusaha mempolarisasikan dan memobilisasi komunitas-komunitas yang berhubungan dengan agama-agama. Mereka mengancam esensi India yang sangat penting—keberagaman agama dan budaya, bahasa-bahasa dan cara hidup. Menurut Sonia Gandhi, keadaan-keadaan tersebut sedang memukul partai Congress. Partai Congress adalah partai yang berjuang untuk kemerdekaan India, sekarang menemukan dirinya di tengah ketidakpastian dan kekacauan.

Kalahnya partai Congress pada Pemilu 1996 membuat tekanan-tekanan mulai dibangun oleh sejumlah besar pekerja-pekerja partai Congress di seluruh India menghimbau Sonia Gandhi untuk keluar dari pengasingan dan masuk kehidupan publik. Kemudian Sonia Gandhi menjelaskan bahwa ia tidak dapat mengabaikan komitmennya sendiri terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip keluarga yang telah ia nikahi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang telah dihidupi mereka dan bahkan mereka mati untuk nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut. Lebih lanjut Sonia Gandhi menyatakan bahwa ia tidak dapat mengkhianati harta peninggalan keluarga tersebut dan menjauh darinya. Walaupun Sonia mengetahui keterbatasannya, ia tidak bertahan lama untuk menyingkir dari dunia politik.<sup>118</sup> Kedaan politik yang seperti itulah yang telah memilih dan membawa Sonia Gandhi kembali ke dunia publik dan politik.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 213-214.

Sebelum resmi menggantikan Sitaram Kesri sebagai ketua partai Congress, Sonia Gandhi dan anak-anaknya telah bergabung dengan partai Congress sebagai juru kampanye menjelang Pemilu Lok Sabha 1998. Kehadiran Sonia dan anak-anaknya dalam kampanye Pemilu 1998 disambut meriah oleh sebagian rakyat India, khususnya kelas bawah. Setiap Sonia berkampanye, tidak kurang dari 100.000 jiwa orang menyambut dan mendengarkan pidatonya.

Banyak pemimpin partai Congress yang tidak senang dengan gaya kepemimpinan Kesri dan bahkan menilai Kesri sebagai kekurangan partai Congress. Para pemimpin tersebut berharap Kesri menyerahkan jabatan tersebut kepada Sonia Gandhi. Meskipun Sonia Gandhi belum memberikan jawaban yang pasti, para pemimpin partai Congress tersebut mendatangi kediaman Sonia Gandhi. Melalui pertemuan Komite Kerja Congress pada 14 Maret 1998, nama Sonia Gandhi disetujui untuk menggantikan nama Kesri. Pada tanggal 6 April 1998 nama Sonia Gandhi telah diratifikasi oleh seluruh pengurus Komite Kerja partai Congress atau AICC (*All India Congress Committee*). Mereka menyakini bahwa di bawah kepemimpinannya yang efisien sebuah regenerasi politik akan berkembang. Setahun sebelum munculnya perlawanan dari tiga senior partai Congress, di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi terjadi persatuan dalam partai Congress.<sup>119</sup>

Awal naiknya Sonia Gandhi sebagai ketua partai bahkan sebagai ketua parlemen partai tidak mendapatkan hambatan, tetapi menjelang Pemilu 1999 partai Congress mendapatkan guncangan dengan peristiwa mundurnya Sonia Gandhi sebagai ketua partai Congress. Peristiwa ini dimulai ketika pada 15 Mei 1999, tiga tokoh senior partai Congress, yaitu: Sharad Pawar, Tariq Anwar dan P.A. Sangma yang mengajukan surat terbuka kepada Sonia. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa mereka tidak keberatan jika Sonia Gandhi menjabat sebagai ketua partai dan parlemen partai. Akan tetapi, mereka tidak yakin apabila Sonia yang kelahiran Italia layak untuk menjadi calon PM India.<sup>120</sup> Ketiga senior partai Congress tersebut meragukan Sonia Gandhi menjadi PM India bila partai mereka memenagkan pemilu. Berikut petikan surat terbuka tersebut.

<sup>119</sup> Nurul Islam Sarhar, *Sonia Gandhi: Thrust with India* (New Delhi: Atlantic, 2007), hlm. 21

<sup>120</sup> "The Revolt: Sharad Pawar, Tariq Anwar and P.A. Sangma Write a Letter," *Sunday*, 23-29 Mei 1999.

*"We accept with the interest and humility the best which we can gather...and we absorb them into our soil. But our inspiration, our soul, our honor, our pride, our dignity, is rooted in our soil. It has to be of this earth."*<sup>121</sup>

"Kami menerima dengan minat dan rendah hati terbaik yang dapat kami himpun... dan kami menyerapnya ke dalam negeri kami. Namun inspirasi kami, jiwa kami, kehormatan kami, harga diri kami, martabat kami, berakar dalam negeri kami. Hal itu harus dari tanah India"

Melalui surat tersebut mereka menyatakan bahwa orang-orang India asli mengharapkan perdana menteri memiliki rekam jejak dalam kehidupan publik. Surat tersebut menyimpulkan bahwa Sonia Gandhi tidak sesuai undang-undang. Mengenai kewarganegaraan Italia Sonia sebenarnya Sonia telah menyerahkan *passport* Italia-nya ke Kedutaan Italia pada 27 April 1983. Sebelum pemerintah Italia memberlakukan hukum tidak mengakui kewarganegaraan ganda di negara tersebut, pemerintah Italia membuka kesempatan bagi warga negara Italia yang kehilangan kewarganegaraan mereka untuk mendaftarkan kembali kewarganegaraan mereka sebagai warga negara Italia. Pendaftaran ulang tersebut dibuka sampai tanggal 31 Desember 1992 dan tidak ada keterangan ataupun bukti yang menunjukkan bahwa Sonia mengajukan kembali permintaan kewarganegaraan Italianya sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, Sonia dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Italianya dan menjadi warga negara India.

Berkaitan dengan surat terbuka tersebut, Sonia Gandhi merasa tersinggung akibat integritasnya dipertanyakan. Sonia Gandhi yang merasa tersinggung memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 16 Mei 1999.<sup>122</sup> Sebelum mengundurkan diri, Sonia Gandhi merespon ketiga tokoh partai Congress tersebut dalam surat pada 15 Mei 1999. Surat tersebut menjelaskan bahwa ia kecewa karena beberapa rekannya meragukan kemampuannya untuk memberikan yang terbaik baik untuk partai juga negara India. Seperti yang dapat dilihat melalui isi suratnya tersebut:

*"At this morning's meeting on the Congress Working Committee, certain of my colleagues expressed views to the effect that my having been*

<sup>121</sup> Yousuf Ansari, *Triumph of Will* (New Delhi: India Research Pres, 2006), hlm. 159.

<sup>122</sup> "The Night Sonia Resigned: Congressmen Begged and Pleaded, But She Said No," *Sunday*, 23-29 Mei 1999.

*born elsewhere is a liability to the Congress Party. I am pained by their lack of confidence in my ability to act the best interest of the party and the country. In these circumstances, my sense of the loyalty to the party and duty to my country compel me to tender my resignation from the post of the Party President.*<sup>123</sup>

”Pada pertemuan Komite Kerja Congress pagi ini, beberapa rekan saya menyatakan pandangan terhadap pengaruh kelahiran saya adalah sebuah kekurangan bagi partai Congress. Saya terluka dengan kurangnya kepercayaan mereka akan kemampuan saya untuk berbuat yang terbaik untuk kepentingan partai dan negeri India. Dalam hal ini, rasa kesetiaan saya kepada partai dan kewajiban terhadap negara memaksa saya untuk menawarkan pengunduran diri saya dari jabatan presiden partai.”

Pengunduran Sonia tersebut disambut dengan demonstrasi para pendukung Sonia, untuk meminta Sonia kembali menjadi ketua partai dan meminta partai Congress memecat tiga tokoh senior yang mengirim surat tersebut. Beberapa pekerja mengancam akan membunuh diri mereka sendiri dengan kapsul sianida, simbol dari histeria massa yang dapat menyebar ketika tokoh ikon mereka di bawah ancaman.<sup>124</sup> Upaya yang dilakukan Komite Kerja Congress untuk menarik Sonia Gandhi kembali sebagai ketua partai Congress adalah dengan memberhentikan ketiga tokoh senior yang mengirim surat tersebut pada 21 Mei 1999. Para Komite Kerja Congress melanjutkan tekanan-tekanan mereka kepada Sonia Gandhi untuk memikirkan ulang keputusan pengunduran dirinya. Kemudian pada tanggal yang sama, Sonia kembali menjadi ketua partai Congress. Mengetahui bahwa dirinya secara penuh diperlukan partai, Sonia pun kembali memutuskan untuk menarik keputusan pengunduran dirinya.<sup>125</sup> Dengan menegaskan keseriusannya dalam memimpin partai Congress dengan mengirim pesan kepada orang-orang yang tidak berpihak kepadanya untuk meninggalkan partai. Dalam surat tersebut ia menyatakan biarlah orang-orang yang berpandangan sempit memilih cara mereka sendiri. Ia beserta pendukungnya tidak takut dan juga tidak peduli.<sup>126</sup>

<sup>123</sup> “Sonia Gandhi, Resignation Letter,” diakses dari [http://www.congresssandesh.com/speeches/resignation\\_letter.htm](http://www.congresssandesh.com/speeches/resignation_letter.htm).

<sup>124</sup> Rani Singh, *Sonia Gandhi: An Extraordinary Life, an Indian Destiny* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), hlm. 177.

<sup>125</sup> Nurul Islam Sarhar, *op.cit.*, hlm. 22.

<sup>126</sup> Rani Singh, *op.cit.*, hlm. 178. Setelah keluar dari partai Congress, Pawar bersama Sangma membentuk partai baru dan menjadi aliansi BJP pada Pemilu 1999.

Pemilu 1999 yang semula ditetapkan Presiden Narayanan pada September-Oktober 1999, akhirnya berlangsung pada Agustus-September 1999, yang kembali dimenangkan partai BJP sebanyak 182 kursi. Sementara partai Congress mendapatkan 114 kursi, jumlah terendah dalam sejarah pemilu yang diikuti partai Congress. Secara umum, dilihat dari sisi kepemimpinan, profil Sonia Gandhi mempunyai beberapa kelemahan bila dibandingkan dengan pemimpin partai lainnya, terutama partai BJP saingan utamanya. *Pertama*, Sonia Gandhi memiliki pengalaman dan karir di politik masih sangat minim. Walaupun ia merupakan bagian dari keluarga yang memerintahkan India sejak ia datang ke India, secara resmi ia masuk politik pada bulan Maret 1997 sebagai juru kampanye partai Congress dan langsung menjadi ketua partai pada 1998. *Kedua*, naiknya Sonia Gandhi menyebabkan timbulnya konflik internal elite partai antara pro dan kontra, dan tidak jarang dengan keluarnya beberapa elite Congress tersebut sekaligus membawa pendukungnya keluar dari partai Congress. Dengan demikian, konsolidasi internal Congress belum tercapai yang mengakibatkan partai tersebut tidak solid menghadapi pemilu. Selain itu, sejak bergabungnya Sonia Gandhi dalam partai Congress, partai BJP mulai menyoroti asal-usul Sonia Gandhi yang bukan asli keturunan India. Setelah Sonia Gandhi menjadi ketua partai Congress dan melakukan mosi tidak percaya pada awal 1999, BJP semakin gencar menyerang pribadi Sonia Gandhi sebagai pengacau kestabilan politik India. Bahkan, BJP berjanji akan mengamandemen konstitusi untuk mencegah orang yang bukan kelahiran India asli untuk menempati posisi puncak pemerintahan.

Upaya eksploitasi identitas Sonia Gandhi oleh BJP ternyata mendatangkan keuntungan tersendiri bagi partai tersebut. Keadaan ini tidak hanya berpengaruh dalam lingkungan partai BJP sendiri tetapi juga mulai mempengaruhi lingkungan partai Congress. Awalnya, serangan identitas dan integritas Sonia hanya dilakukan oleh non-Congress, akan tetapi pada Mei 1999 beberapa tokoh senior partai Congress juga melakukan hal tersebut.<sup>127</sup> Dengan demikian, unsur kepemimpinan partai Congress menjadi unsur yang sangat penting dalam keberlangsungannya, terutama mencegah terjadinya perpecahan dalam tubuh partai Congress yang lebih parah.

<sup>127</sup> "Partai Congress Terancam Pecah," *Kompas*, 22 Mei 1999.

Menurut penilaian Niraja Jaya Gopal ketika Sonia Gandhi masuk partai Congress, Sonia Gandhi harus mengambil alih partai yang sedang kacau dan organisasi partai yang retak karena adanya konflik antar fraksi-fraksi. Oleh karena itu, setahun adalah waktu yang pendek bagi Sonia Gandhi untuk membangkitkan lagi partai Congress pada Pemilu 1999. Menjelang Pemilu 2004, Sonia Gandhi bepergian secara intensif ke seluruh negeri India untuk membangkitkan kembali partai Congress. Menurutnya, Sonia Gandhi berhasil dalam mencapai tujuannya tersebut.<sup>128</sup> Pendapat Niraja tersebut sesuai dengan pernyataan Sonia Gandhi bahwa keberhasilan partai Congress dalam Pemilu Nasional 2004 yang lalu merupakan pekerjaan politik partai Congress selama enam tahun, sejak tahun 1998.<sup>129</sup> Pekerjaan politik selama enam tahun ini bisa dilihat dari sejak peristiwa pengunduran Sonia menjadi ketua partai Congress, 16 Mei 1999. Setelah keputusan pengunduran diri tersebut dicabut karena adanya dukungan yang kuat dari pendukung partai Congress yang loyal, Sonia Gandhi telah menunjukkan sikap kepemimpinannya yang tegas. Misalnya surat yang menyatakan agar orang-orang yang tidak sepihak dengannya untuk meninggalkan partai Congress.

Di bawah pimpinan Sonia Gandhi pula, peran partai Congress dari pusat mengalami perubahan dibandingkan dengan pimpinan Indira dan Rajiv Gandhi. Menurut Karli Srivinasulu, partai Congress di bawah pimpinan Sonia Gandhi berbanding terbalik dengan Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi yang dulunya dalam membuat keputusan sangat sentralistik. Indira maupun Rajiv sering mencampuri fungsi yang seharusnya dijalankan oleh partai-partai dan pemerintah-pemerintahan provinsi, termasuk perubahan menteri negara bagian (*chief ministers*).<sup>130</sup> Di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi, komite-komite partai Congress di provinsi telah diijinkan untuk berfungsi lebih berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Tidak hadirnya campur tangan secara terang-terangan dari pusat telah membatasi munculnya fraksi-fraksi di negara-negara bagian. Strategi yang dilakukan Sonia Gandhi ini terbukti berhasil mencegah partai terganggu atau tidak efektif.

<sup>128</sup> Interview dengan Prof. Niraja Jaya Gopal, pada tanggal 7 April 2012 melalui surat elektronik.

<sup>129</sup> "Sonia Gandhi:...", *op.cit.*, hlm. 214.

<sup>130</sup> Karli Srinivasulu, *op.cit.*, hlm. 301.

Nurul menyatakan bahwa dinasti Nehru-Gandhi sangat diperlukan dalam partai Congress. Dinasti tersebut telah 37 tahun memimpin partai Congress dan India dan terhenti hanya dua kali, yaitu Lal Bahadur Shastri pada 1964-1966 dan Oleh Morarji Desai pada 1977-1980. Ketika pemerintahan non-Nehru memerintah India, rakyat memiliki sedikit harapan dari mereka dan dibingungkan dengan masalah stabilitas pemerintahan. Sejak di bawah pimpinan Sonia Gandhi yang menyakini demokrasi, terjadi perubahan dalam suksesi kepemimpinan partai Congress. Untuk pertama kalinya, setelah adanya pemberontakan dari tiga senior partai Congress tersebut, pada tahun 1999 Sonia Gandhi dipilih sebagai presiden atau ketua partai Congress melalui proses pemungutan suara. Pada proses pemungutan suara tersebut, Sonia Gandhi berhadapan dengan kawakan pemimpin partai Congress, yaitu Jitendra Prasad. Setelah partai Congress menang pada pemilu nasional pada 2004, pemilihan untuk presiden partai kembali diadakan. Pada tahun 2005, Sonia Gandhi dipilih untuk kedua kalinya sebagai ketua partai Congress dengan dukungan penuh.<sup>131</sup>

Di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi, selain adanya konsolidasi dalam internal partai Congress setelah ia didukung secara penuh oleh elite-elite partai Congress, basis dukungan partai Congress yang sebelumnya mengalami penurunan kembali menguat. Selama waktu pemilu Sonia melakukan kampanye yang maksimum. Kesuksesan partai Congress di bawah pimpinan Sonia Gandhi adalah menangnya partai Congress pada pemilu negara bagian di New Delhi, Madhya Pradesh dan Rajashtan. Setahun kemudian partai ini juga memenangkan tiga negara bagian yang dipimpin oleh partai BJP. Di negara bagian Maharashtra beberapa pemimpin partai Shiv Sena yang terkemuka bergabung dengan partai Congress. Hal ini juga terjadi di negara bagian Karnataka. Partai Congress di bawah kepemimpinannya berlanjut menjadi formasi politik terbesar hampir di seluruh India.<sup>132</sup> Kesuksesan ini menunjukkan bahwa ia bukanlah pemimpin yang rata-rata. Kebaikan, rasa kasihannya yang alami disertai dengan temperamen yang lembut, Sonia Gandhi telah memenangkan hati sebagian besar rakyat India. Populartitasnya terus meningkat di seluruh negeri India.

<sup>131</sup> Nurul Islam Sarhar, *op.cit.*, hlm. 22-23.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

Sonia Gandhi menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kesejahteraan masyarakat India. Ia selalu siap memberi bantuan kepada masyarakat India dan ini merupakan caranya menunjukkan rasa kasihannya. Ia tidak pernah berpikir apa yang akan ia dapat dari orang lain tapi berpikir apa yang dapat ia berikan kepada orang lain. Keterlibatan Sonia Gandhi dalam politik tidak untuk mempertunjukkan dirinya. Hal ini juga ia tanamkan kepada para kadernya. Setelah partai Congress mendapatkan suara terbanyak pada Pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu, Sonia Gandhi tidak serta merta menjadi perdana menteri. Sebagaimana mestinya dalam sistem pemerintahan parlementer bahwa yang menjadi perdana menteri adalah ketua partai yang berhasil mendapatkan suara terbanyak. Sonia Gandhi memutuskan menyerahkan jabatan tersebut kepada seorang Sikh yang beragama Islam, yaitu Manmohan Singh. Manmohan Singh merupakan menteri keuangan pada pemerintahan Narasimha Rao. Keputusan Sonia Gandhi untuk menyerahkan posisi yang penting tersebut kemudian dinilai oleh seorang jurnalis dan yang menganut ideologi RSS, yaitu M.G. Vaidhya sebagai tanda kematangan rasa politik dan sekaligus kemampuan politik Sonia.<sup>133</sup>

### **3.2 Isu-Isu Populis Partai Congress Pada Masa Kampanye**

Pemerintahan India, yang dijalankan oleh partai BJP bersama koalisinya, mengumumkan untuk mempercepat pemilu dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pemilu 2004 yang dilaksanakan pada antara 20 April hingga 20 Mei 2004 lalu, dipercepat enam bulan dari jadwal sebenarnya, yaitu Oktober 2004. Menjelang pemilu tersebut, masing-masing partai telah mempersiapkan dirinya. Partai Congress yang dipimpin oleh Sonia Gandhi mempersiapkan partainya untuk menghadapi Pemilu 2004, meskipun dirinya masih mendapatkan tekanan dari partai BJP yang menyinggung isu asal-usul kelahiran dan kurangnya pengalaman politik Sonia.

Salah satu usaha yang dilakukan Sonia Gandhi dalam mempersiapkan partainya memasuki masa kampanye adalah dengan mengundang perwakilan golongan muda untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sonia Gandhi pun mengundang Sachin Pilot, sebagai perwakilan golongan muda, pada pertemuan di

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

tahun 2003. Saat itu, Sonia Gandhi dan timnya sedang dalam proses mempersiapkan manifesto pemilu partainya. Tujuan Sonia Gandhi mengundang Pilot sebagai perwakilan adalah untuk mendengar apa yang diinginkan golongan muda untuk dilakukan partai Congress, kebutuhan, aspirasi serta harapan yang mereka inginkan dari partai Congress. Partai Congress pun melibatkan Pilot bersama 20 pemuda lainnya yang berasal dari berbagai daerah India untuk mendapatkan ide-ide mereka dan mengirim mereka ikut berkampanye ke seluruh wilayah India.<sup>134</sup>

Pada Pemilu 2004 yang lalu, partai Congress memiliki slogan kampanye yang hampir sama dengan slogan kampanye pada masa Indira, *Remove Poverty*, yaitu *Congress ka haath, aam aadmi ke saath Congress's hand (the party's electoral symbol) is with the common man*. Slogan kampanye partai Congress ini kemudian dikenal dengan *Aam Aadmi/Common Man*, yang menunjukkan keberpihakan partai Congress kepada agenda anti-kemiskinan. Pemilihan terhadap maskot pemilu tersebut memiliki alasan tersendiri. Menurut Parvesh Hashmi, Sekretaris Komite Congress Seluruh India, slogan pemilu tersebut menunjukkan bahwa partainya butuh membangun rasa kepercayaan dari masyarakat level akar rumput (*grassroots level*) dan menyatakan pesan bahwa partainya tidaklah berdasarkan pada kasta. Untuk memperlihatkan keseriusan tersebut, ia menjelaskan lebih lanjut bahwa partainya mengadakan pertemuan-pertemuan dan berhubungan dengan daerah-daerah terpencil, yaitu pedesaan-pedesaan India. Pada sisi yang lain, kelompok inti partai atau orang-orang pembuat keputusan utama partai Congress menyadari bahwa aset utama partai adalah Sonia Gandhi. Oleh karena itu, mereka berusaha menyusun sumber daya-sumber daya mana yang harus diperhatikan. Kelompok inti partai tersebut memutuskan konstituen mana yang cocok untuk dikunjungi atau tidak oleh Sonia Gandhi. Seperti yang dituliskan Rani Singh bahwa Sonia Gandhi merupakan orang yang memainkan mesin partai Congress dan sekaligus memimpin partai tersebut.<sup>135</sup> Terjadi kesinergisan antara Sonia Gandhi dan pendukung-pendukung setianya di partai Congress.

<sup>134</sup> Rani Singh, *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

Media dan publik masih belum sepenuhnya yakin bahwa partai Congress dipercaya dalam agenda anti-kemiskinan tersebut. Oleh karena itulah, Sonia Gandhi bersama dengan partainya dalam kampanyenya turun ke desa-desa menyatakan pesan bahwa partainya berkomitmen untuk mengembangkan orang-orang miskin, rakyat pedesaan, serta sektor pertanian. Sonia Gandhi melakukan kampanye ke desa-desa pedalaman India intens dalam waktu tiga minggu. Perjalanan tersebut kurang lebih 30.000 mil dengan jumlah pertemuan umum dengan masyarakat sebanyak 148 pertemuan.<sup>136</sup>

Major Dalbir Singh, yang merencanakan dan mengoordinasikan jam dan rencana perjalanan Sonia Gandhi, mencatat bahwa Sonia Gandhi mempelajari setiap aspek yang diperjuangkan, bahkan setiap segmen konstituen yang fenomenal secara lengkap. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selama kampanye, Sonia Gandhi lebih suka pulang lebih larut malam, tidak jarang sampai pukul 21.30 atau pukul 02.00 dini hari, jam tidurnya hanya lebih dari 3 jam. Dalam kerja ekstra tersebut, Sonia Gandhi mempersiapkan hal-hal yang akan ia berikan pada pengarah singkat serta tidak jarang pula ia mempersiapkan pidato. Memang timnya ada yang bertugas untuk mempersiapkan pidato-pidatonya, tetapi ia akan menggunakan draftnya sendiri. Bila ia membutuhkan data-data dan bukti-bukti ekstra, ia akan menelpon timnya pada tengah malam. Sonia Gandhi menyatakan bahwa ke-28 negara bagian India, masing-masing memiliki identitas, permasalahan, dan pola pemilihan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, semuanya perlu dipelajari untuk diperjuangkan.<sup>137</sup> Kekurangyakinan media dan publik dibayar oleh Sonia Gandhi dan partainya dengan persiapan yang matang.

Selama masa kampanye Pemilu 2004, menurut Arun R. Swamy, setidaknya ada dua isu utama yang menjadi fokus perhatian partai Congress. *Pertama*, partai Congress mengangkat isu tentang pemenuhan kebutuhan investasi sosial serta sektor pertanian dalam kebijakan ekonomi. *Kedua*, partai Congress memberikan dua pilihan kepada rakyat India, yaitu antara pemerintahan sekular atau pemerintahan yang komunal atau sektarian, seperti yang diwakili oleh partai BJP. Selama kampanye tersebut, partai Congress menunjukkan bukti-

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>137</sup> *Ibid.*

bukti pembunuhan yang direncanakan oleh orang-orang Hindu terhadap umat Muslim di Gujarat.<sup>138</sup> Negara bagian Gujarat, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan sekaligus basis utama partai BJP, telah memainkan peran pemimpin dalam memobilisasi emosi perlawanan antara Hindu dengan Muslim. Bagi Sangh Parivar, Gujarat telah menjadi laboratorium ideologi Hindu dan aksi-aksi mereka. Peristiwa ini bermula dari kecelakaan yang menyebabkan 56 penumpang, *Ram Sevaks* atau yang beragama Hindu, meninggal dunia. Sebagian besar anggota *Ram Sevaks* ini kembali dari Ayodhya. Sebelum kejadian ini, beberapa anggota *Ram Sevaks* terlibat perkelahian dengan penjaja Muslim di jalan kereta api di Godhra, ibukota Gujarat. Meskipun kemudian hasil penelitian menunjukkan kejadian tersebut benar-benar merupakan kecelakaan, kekerasan terhadap masyarakat beragama Muslim tidak terelakkan. Sejak 28 Februari 2002 atau yang berlangsung selama sembilan bulan, terjadi pembunuhan dan perampasan secara besar-besaran terhadap kaum Muslim di beberapa kota dan pedesaan Gujarat. Lebih dari 2.000 orang terbunuh, baik anak-anak, wanita, dan laki-laki. Hampir 80% adalah yang beragama Muslim.<sup>139</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Swamy tersebut, Zoya Hasan menjelaskan bahwa selama kampanye partai Congress berusaha menawarkan pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif, baik untuk ekonomi maupun politik.<sup>140</sup> Menurut Hasan pula bahwa pemilihan slogan *Aam Aadmi* oleh partai Congress menunjukkan keseriusan partai tersebut untuk mendukung rakyat India yang selama ini tidak menikmati pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintahan BJP. Partai Congress dalam janji-janjinya berusaha menghidupkan kembali atau restorasi agenda demokrasi India, terutama dalam konteks pertumbuhan ekonomi yang tidak merata pembagiannya. Seperti yang dinyatakan Swamy, yaitu kebutuhan investasi sosial juga dijelaskan Hasan lebih jelas bahwa partai Congress berjanji akan menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan, air bersih, sekolah-sekolah, pekerjaan untuk orang-orang muda dan lingkungan yang baik untuk bisnis dan industri. Sonia Gandhi kembali menegaskan bahwa tujuan partai

<sup>138</sup> Arun R. Swamy, *op.cit.*, hlm.4.

<sup>139</sup> Ghanshyam Shah, "Gujarat after Godhra," dalam Ramashray Roy dan Paul Wallace, *India's 2004 Elections: Grass-roots and National Perspectives* (New Delhi: Sage Publication, 2007), hlm. 151-152.

<sup>140</sup> Zoya Hasan, *op.cit.*, hlm. 473.

Congress adalah menjaga satu kesamaan dan pertumbuhan.<sup>141</sup> Menurut Hasan, kunci utama yang berhubungan dengan kesuksesan partai Congress pada Pemilu 2004 berhubungan dengan kemampuan partai Congress untuk mempertajam fokusnya pada isu-isu inklusi ekonomi dan politik serta kemampuannya menjadi kendaraan yang efektif dalam memenuhi kebutuhan sekelompok besar penduduk India, yang belum menemukan keuntungan dari partai BJP. Penekanan partai Congress pada waktu kampanye bahwa partainya akan memberikan pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif dan tidak eksklusif dapat dilihat dari kutipan di bawah ini.

*"Well, first of all, what we propose to people is what we have always proposed, don't forget that we have been in power for 47 years. We have had stable governments for 47 years. So, we have experience in governance, we have an all inclusive agenda, not an exclusivist one.... our policies are for everyone, for all sections of society.... Economic growth has been lower under this government than under Indiraji, Rajivji and under Narasimha Rao. And I am not saying this out of hot air. There are reports, figures. If you move around, out of Delhi...I was travelling here in western UP, Poorvanchal, eastern UP, in Orissa. If there is economic growth, it is not seen in the rural areas. There is tremendous distress and suffering among the farmers, amongst the youth, and unemployment is rising. The shocking thing is that unemployment is rising also in the private sector... Well, first of all, I know there are some reservations among people on our stand on reforms... economic reforms. There should be no worry whatsoever. The policy of continuing with economic reform will carry on. Nobody should have any doubts on that. But our economic reforms are slightly different from the BJP's. In ours, there is a very strong focus on social welfare programmes, rural development programmes, in poverty alleviation programmes and in administrative and financial strengthening of panchayats which has not taken place. In the case of this government what they have done, they have chipped and chopped so many of the poverty alleviation programmes that they have become practically ineffective. By the way, let me tell you we greatly admire our entrepreneurs, our administrators and members of the business class because they have done a great deal for the country. The business community going ahead, we are all for it. But at the same time we have to focus on the poor."*<sup>142</sup>

<sup>141</sup> *Ibid.*, hlm. 474-475.

<sup>142</sup> Wawancara antara Shekhar Gupta, kepala editor *The Indian Express*, dengan Sonia Gandhi yang disiarkan lewat NDTV 24x7 dalam acara 'Walk The Talk'. Wawancara ini berlangsung setelah Sonia Gandhi melakukan kampanye di daerah Uttar Pradesh, Orissa, Benares, Badhoi, dan Mirzapur. Diakses dari <http://www.aicc.org.in/new/walk-the-talk.php>.

”Benar, pertama sekali, apa yang kami tawarkan kepada masyarakat adalah apa yang selalu kami anjurkan, jangan lupa bahwa kami telah memerintah selama 47 tahun. Jadi, kami mempunyai pengalaman dalam pemerintahan, agenda kami semuanya inklusif bukan eksklusif... Kebijakan-kebijakan kami adalah untuk setiap orang, untuk semua kelompok masyarakat... Pertumbuhan ekonomi pemerintahan sekarang lebih rendah dibandingkan di bawah pemerintahan Indira, Rajiv dan Narasimha Rao. Dan yang saya katakan ini bukan omong kosong. Ada laporan-laporan yang menggambarkan tersebut. Jika anda bergerak ke sekitar, di luar Delhi... Saya sedang bepergian di sini di bagian barat UP, Poorvanchal, di bagian timur UP, di Orisa. Jika ada pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tidak terlihat di daerah-daerah pedesaan. Ada kesukaran dan penderitaan yang besar di antara petani-petani, di antara pemuda, dan pengangguran sedang meningkat. Hal yang mengejutkan adalah pengangguran juga sedang meningkat dalam sektor privat... Benar, pertama sekali, saya mengetahui ada beberapa keberatan di antara masyarakat akan keberpihakan kami terhadap reformasi ekonomi... Tidak akan mengawatirkan siapapun. Kebijakan reformasi ekonomi akan berlangsung. Tak seorang perlu ragu akan hal tersebut. Akan tetapi reformasi ekonomi kami sedikit berbeda dengan BJP. Reformasi ekonomi kami, ada perhatian yang sangat kuat pada program-program kesejahteraan sosial, program-program pembangunan desa, dalam program pengurangan-pengurangan kemiskinan dan dalam administrasi dan penguatan keuangan panchyat yang tidak berlangsung. Dalam hal pemerintahan ini mereka telah melakukan banyak program-program pengurangan kemiskinan yang prakteknya tidak efektif. Biarkan saya memberi tahu bahwa kami sangat mengagumi pengusaha-pengusaha kami, administrator-administrator kami dan anggota-anggota kelas bisnis karena mereka telah melakukan hal besar untuk negeri ini. Kami mendukung komunitas bisnis untuk maju dan pada saat yang sama juga harus fokus pada kelompok miskin.”

Secara garis besar, slogan kampanye partai Congress tersebut ditujukan untuk mengkritik slogan kampanye partai BJP, yaitu *India Shining dan Feel Good*. Selama kampanye, Sonia Gandhi mengkritik partai BJP yang memboros-boroskan uang pada masa kampanye. Partai BJP dan aliansinya menghabiskan \$20 juta dan menekankan bahwa kemakmuran dan kekuatan ekonomi India dicapai di bawah pemerintahan BJP. Sonia menjelaskan bahwa mayoritas India tidak merasakan gaya hidup yang dipuji-puji dalam iklan kampanye BJP. Hal ini yang membuatnya menjanjikan pekerjaan dan ekonomi yang lebih baik bagi orang-orang miskin India.<sup>143</sup>

<sup>143</sup> Judith E. Walsh, *op.cit.*, hlm. 309-310.

Pembelaan Sonia Gandhi terhadap orang-orang miskin yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dapat dipahami. Ini dikarenakan hampir lebih dari 60% penduduk India bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data, pertumbuhan di sektor pertanian dalam beberapa tahun belakangan ini kurang baik. Menjelang tahun 2000 hampir setengah produksi India berasal dari sektor jasa, tidak seperti produksi Cina yang setengah dari produksi sektor industri. Berikut tabel produksi sektor utama ekonomi India dari tahun 1992-2003.

**Tabel 3.1. Produksi Sektor Utama Ekonomi India, 1992-2003**

<b>Tahun</b>	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03
<b>Sektor</b>											
<b>Pertanian</b>	6,1	3,7	5,4	-0,9	9,6	-2,4	6,2	0,3	-0,4	5,7	-3,1
<b>Industri</b>	4,2	6,6	9,3	11,6	7,1	4,3	3,7	4,8	6,6	3,3	6,1
<b>Jasa</b>	5,4	7,7	8,5	70,5	7,2	9,8	8,4	10,1	5,6	6,8	7,1

Sumber: Arun R. Swamy, "Back to the Future: The Congress Party's Upset Victory in India's 14<sup>th</sup> General Election," *Asia-Pacific Center for Security Studies*, Terbitan Berkala, No. 0704-0188, hlm. 4.

Berdasarkan tabel di atas, dari ketiga sektor tersebut terlihat bahwa produksi sektor pertanian memang mengalami penurunan. Sementara untuk sektor industri dan jasa mengalami peningkatan. Peningkatan di dalam sektor industri dan jasa dikarenakan India telah memasuki globalisasi sebagai akibat dari agenda reformasi ekonomi. Pengaruh globalisasi membuat sektor jasa cepat berkembang serta sektor industri bertambah dikarenakan adanya perusahaan-perusahaan asing mengembangkan usahanya di India. Sementara untuk sektor pertanian, banyak hal yang mempengaruhi, misalnya biaya yang mahal berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pertanian, seperti bibit, pupuk serta biaya pemeliharaan lainnya. Sementara itu, lahan pertanian pun semakin berkurang dan sebagian besar petani merupakan keluarga yang miskin. Tidak jarang petani yang gagal panen serta memiliki utang yang banyak kepada tuan tanah mengakhiri hidupnya dengan kata

lain bunuh diri. Secara tidak langsung, globalisasi memberikan pengaruh yang baik untuk sektor industri dan jasa tetapi tidak untuk sektor pertanian.<sup>144</sup>

Khusus sejak tahun 2000-an, tingkat pertumbuhan sektor pertanian sangat rendah. Selain itu, kondisi bertambah buruk bagi masyarakat yang miskin karena anggaran belanja kebutuhan sosial dipotong, terutama subsidi-subsidi makanan, yang berarti juga walaupun tingkat kemiskinan berkurang, banyak dari orang-orang miskin kehidupannya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Selama tahun-tahun pemerintahan koalisi NDA yang dipimpin partai BJP, pemerintah juga secara pelan-pelan memotong jaminan harga kepada petani-petani dan subsidi-subsidi makanan bagi kelompok rakyat miskin. Hal tersebutlah yang membuat partai Congress mendapat kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat India, yang sebagian besar adalah rakyat miskin yang tinggal di daerah pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian.

Berdasarkan isu-isu utama yang diangkat partai Congress pada masa kampanye, baik seperti yang disebutkan Swamy dan Hasan, Partai Congress berhasil memenangkan dukungan dari pendukung tradisionalnya, bahkan kelompok minoritas, seperti hasil survey yang dilakukan CDSC setelah pemilu berlangsung. Pada Pemilu 2004, persentase 'orang kaya' yang memilih adalah 56,7% sementara pemilih 'sangat miskin' yang memilih adalah 59,3%.<sup>145</sup> Dengan demikian, kesempatan partai Congress untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat biasa/miskin lebih banyak dibandingkan pemilih BJP yang didukung oleh kelas orang kaya, akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab empat mengenai faktor eksternal kemenangan partai Congress.

### **3.3 Kebijakan Partai Congress Membangun Koalisi dengan Partai-Partai Regional Lainnya**

Dalam negara India, normalnya pemilu akan diselenggarakan sekali lima tahun. Namun pun demikian, sebelum lima tahun pemilu dapat diselenggarakan tergantung dari keadaan politik yang berlangsung. Misalnya suatu partai yang

<sup>144</sup>*Ibid.*, hlm. 317.

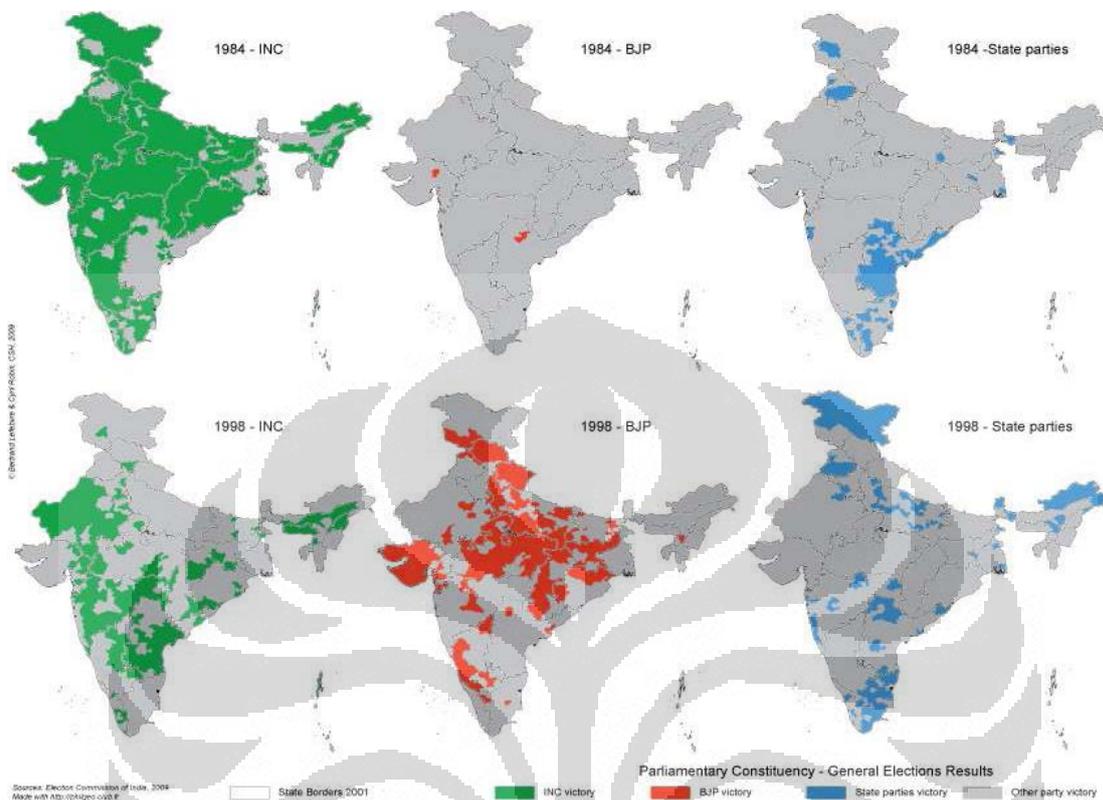
<sup>145</sup>*Ibid.*, hlm. 311.

menjalankan pemerintahan yang merasa keadaan negara berlangsung dengan baik di bawah pemerintahannya dan menganggap partainya mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat, dapat mengumumkan untuk mempercepat pemilu walaupun masa pemerintahannya belum sampai pada lima tahun penuh. Salah satu contohnya adalah partai BJP yang mengumumkan akan mempercepat pemilu enam bulan dari jadwal yang sebenarnya. Tujuan mempercepat pemilu tersebut tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan agar partainya bisa mendapatkan suara terbanyak karena partainya menganggap berhasil mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakatnya.

Lima pemilihan umum India secara berturut-turut, mulai dari Pemilu 1989, 1991, 1996, 1998, dan 1999, telah gagal menghasilkan satu partai tunggal yang mayoritas mendapatkan kursi di Lok Sabha. Sistem politik nasional India telah berpindah dari dominasi satu partai, yaitu partai Congress, ke pemerintahan bipolar multipartai. Bipolar multipartai ini menunjukkan keadaan politik India, di mana dua partai nasional bersama-sama aliansinya yang sebagian besar adalah partai-partai negara bagian. Partai Congress dan BJP bersama masing-masing aliansinya digambarkan sebagai bipolar multipartai. Menjamurnya partai-partai negara bagian atau regional di India, bagaimana pun mempengaruhi partai-partai nasional menjadi sedikit banyak kesulitan mendapatkan suara mayoritas di parlemen atau Lok Sabha. Pada sisi yang lain, munculnya era koalisi multipartai di India memiliki karakteristik anti-Congress. Menurut K.C. Suri, karakteristik ini muncul sebagai balasan dari partai-partai regional kepada partai Congress. Bagi partai-partai regional, hal tersebut adalah sebagai hukuman atas kesombongan partai Congress selama ini yang dianggap mereka kurang sensitive terhadap kepentingan mereka.<sup>146</sup> Oleh karena itu, ketidakmampuan partai tunggal untuk memenangkan mayoritas kursi di pemilu parlemen telah memaksa dua partai politik atau lebih untuk bersama-sama dalam membentuk pemerintahan yang mengarah kepada timbulnya era koalisi dalam politik India. Berikut di bawah ini disajikan peta perubahan politik India setelah tahun 1989 (hasil Pemilu 1984-1998).

<sup>146</sup> K.C. Suri, *op.cit.*

**Gambar 3.1. Perubahan Politik India Setelah Tahun 1989**



Ket : Atas: Pemilu 1984, bawah: Pemilu 1998; Hijau: Kemenangan Congress; Merah: Kemenangan BJP; Biru: Kemenangan partai-partai negara bagian

Sumber: Bertrand Lefebvre dan Cyril Robin, "Pre-electoral Coalitions, Party System and Electoral Geography: A Decade of General Election in India (1999-2009)," *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, No. 3. Tahun 2009, hlm. 5.

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 1984, partai Congress merupakan partai yang mampu menguasai hampir seluruh wilayah India. Partai-partai regional India, perkembangannya belum merata dan sebagian besar berada di Andhra Pradesh, Chhattisgarh dan Orisa. Sementara partai BJP memiliki basis yang sangat kecil di dua negara bagian India, yaitu Gujarat dan Andhra Pradesh. Selanjutnya pada Pemilu 1998, partai Congress kuat di bagian Selatan India, yaitu Andhra Pradesh dan bagian Barat India, yaitu Rajasthan dan Maharashtra. Sementara partai ini lemah di Bagian Utara India, yaitu Uttar Pradesh dan

Jammu & Kashmir, dan di bagian Tengah India, yaitu Madhya Pradesh dan Chhattisgarh. Partai BJP sendiri memiliki basis yang kuat di bagian Utara India, yaitu Himachal Pradesh, Uttaranchal dan Uttar Pradesh, dan bagian Tengah India, yaitu Madhya Pradesh. Namun partai ini lemah di bagian Selatan India, yaitu Andhra Pradesh, dan bagian Timur India, yaitu Arunachal. Sementara partai-partai negara bagian kuat di bagian Timur India, yaitu Arunachal Pradesh dan Sikkim, bagian Selatan India, yaitu Tamil Nadu dan Andhra Pradesh, serta bagian Utara India, yaitu Jammu & Kashmir dan Punjab. Berikut tabel perbandingan basis daerah ketiga kelompok tersebut.

**Tabel 3.2. Perbandingan Basis Daerah: Partai Congress, BJP dan Partai-Partai Regional antara Pemilu 1984 dengan Pemilu 1998**

Partai		Pemilu 1984	Pemilu 1998
Partai Congress	Kuat	Hampir di seluruh wilayah India	Andhra Pradesh, Rajashtan, Maharastra
	Lemah	Andhra Pradesh	Uttar Pradesh, Jammu&Kashmir, Madhya Pradesh, Chhattisgarh
BJP	Kuat	Gujarat dan Andhra Pradesh	Himachal Pradesh, Uttranachal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh
	Lemah		Andhra Pradesh, Arunachal
Partai-Partai Regional	Kuat	Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orisa	Arunachal Pradesh, Sikkim, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Jammu&Kashmir, Punjab
	Lemah		Madhya Pradesh, Chhattisgarh

Sumber: Telah diolah kembali dari Sumber: Bertrand Lefebvre dan Cyril Robin, "Pre-electoral Coalitions, Party System and Electoral Geography: A Decade of General Election in India (1999-2009)," *South Asia Multidiciplinary Academic Journal*, No. 3. Tahun 2009, hlm. 5.

Dengan perubahan peta politik India tersebut, maka pembentukan aliansi pada pemilu merupakan salah satu ciri-ciri yang signifikan dalam pemilu India. Fenomena dan bertumbuhnya partai-partai regional secara tidak langsung berhubungan dengan berkurangnya basis kekuasaan partai Congress. BJP, saingan utama partai Congress, juga menegaskan dirinya sebagai salah satu partai nasional, walaupun partai tersebut memiliki basis yang kuat di bagian Utara India. Untuk menunjukkan kehadirannya di seluruh India, BJP sering bergabung dengan partai-partai regional dalam pemilu-pemilu di semua negara bagian India. Dalam

sistem pemilu India, persentase suara yang tinggi tidak sama dengan jumlah kursi parlemen yang didapatkan karena merupakan sistem distrik. Oleh karena itu, pembentukan aliansi dengan partai-partai regional yang ada di masing-masing negara bagian sangatlah kritis atau penting. Partai Congress yang semula enggan mengakui bahwa India telah memasuki era koalisi, akhirnya menyatakan bahwa partainya butuh membentuk aliansi untuk koalisi pada bulan Desember 2003. Sebelumnya, partai Congress memang dengan mudah mendapatkan 272 tanpa menggunakan aliansi. Sekarang, keadaan sudah berubah.

Ada beberapa hal yang membuat partai Congress mengakui kebutuhannya untuk membentuk koalisi pada Pemilu 2004 yang lalu. *Pertama*, kemenangan partai BJP pada Pemilu 1999 dikarenakan partai tersebut membentuk aliansi koalisi bersama partai regional lainnya. Pada Pemilu 1999 tersebut, partai BJP memimpin aliansi NDA yang beranggotakan resmi 22 partai.<sup>147</sup> Partai BJP bersama aliannya mampu mendapatkan 271 kursi, yang sebagian besar disumbangkan oleh partai BJP yaitu sebanyak 182.<sup>148</sup> *Kedua*, kalahnya partai Congress atas partai BJP pada pemilu dewan negara bagian di lima negara bagian India, pada bulan November 2003. Dari kelima negara bagian tersebut, partai BJP mendapatkan jumlah kursi terbanyak di tiga negara bagian, yaitu Chhattisgarh, Madhya Pradesh, dan Rajasthan. Sementara partai Congress hanya berhasil mendapatkan kursi terbanyak di Delhi. Pranab Mukerjee yang melaporkan kekalahan partai Congress pada pemilu di negara bagian tersebut menyimpulkan bahwa partai Congress dapat memenangkan pemilu hanya dengan pembentukan aliansi.<sup>149</sup> Pernyataan Mukerjee ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Larence Saiz sebelum pemilu di lima negara bagian tersebut berlangsung. Ia menyatakan bahwa, keberhasilan partai pada pemilu di lima negara bagian India pada akhir

<sup>147</sup> Anggota Aliansi NDA ini termasuk BJP, *Indian National Lok Dal Jammu & Kashmir National Conference*, *Shiromani Akali Dal (SAD)*, *Biju Janata Dal (BJD)*, *Shiv Sena*, *Sikkim Democratic Front*, *Haryana Vikas Party*, *Lok Jana Shakti Party*, *Rahstriya Lok Dal*, *Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress*, *Malumalarchi Dravida Munetra Kazagham (MDMK)*, *Dravida Munetra Kazagham (DMK)*, *Pattali Makkal Katchi (PMK)*, *Tamizhaga Rajiv Congress (TRC)*, *Manipur State Congress Party*, *Kerala Congress (Mani)*, *Janata Dal (United) (JD(U))*, *Samata Party*, *Anna MGR*, *Indian Federal Democratic Party*, *Janata party (JP)*.

<sup>148</sup> Khatarine Adeney dan Lawrence Saez, *Coalition Politics and Hindu Nationalism* (New York: Routledge, 2005), hlm. 27.

<sup>149</sup> E. Sridharan, "Electoral Coalitions in 2004 General Elections: Theory and Evidence," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51 (Desember 2004), hlm. 5420. Pranab Mukerjee adalah salah seorang elite penting di partai Congress yang berasal dari Bengal Barat.

tahun 2003 akan menentukan masa pemilu 2004. Bila partai BJP mampu memenangkan pemilu tersebut, maka partai tersebut akan memiliki optimisme menghadapi pemilu 2004.<sup>150</sup> Berkaitan dengan prediksi Saiz tersebut, menurut peneliti, partai Congress sedikit banyak terpengaruh untuk mengubah strateginya dalam menghadapi Pemilu 2004.

Sebelum memasuki Pemilu 2004 yang lalu, atau menjelang Pemilu 1999 yang lalu, keenganan partai Congress mengakui bahwa India telah memasuki era koalisi serta menganggap pemerintahan koalisi adalah penyelewengan dalam politik India terlihat dengan adanya Deklarasi Pachmarhi 1999. Komite Kerja Congress yang melakukan pertemuan di Pachmarhi, Madhya Pradesh pada awal bulan September kemudian menghasilkan Deklarasi Pachmarhi Secara tidak langsung, melalui deklarasi tersebut partai Congress mengakui bahwa partainya harus berjuang sendiri dalam semua perjuangan politik. Partai Congress menilai bahwa partainya masih mampu memenangkan pemilu dengan dirinya sendiri tanpa dengan melibatkan partai yang lain. Melalui deklarasi itu juga, partai Congress menegaskan bahwa mencari aliansi hanya ketika benar-benar dibutuhkan dan terutama bila partai di negara-negara bagian melemah.<sup>151</sup> Sebagai hasil dari deklarasi tersebut, prestasi partai Congress di negara-negara bagian utama sangat buruk, yaitu Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, dan Bengal Barat. Penolakan partai tersebut terhadap koalisi pra-pemilu membuat partai Congress gagal mendapatkan kursi yang lebih banyak.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pada bulan Juni 2003, partai Congress yang telah menyadari pengaruh negatif deklarasi tersebut melakukan pertemuan pribadi antara elite-elite partai Congress di Shimla. Pertemuan pribadi antara elite-elite partai Congress yang diselenggarakan di negara bagian Himachal Pradesh, di mana partai Congress baru kembali berkuasa di daerah tersebut, bertujuan mengubah strategi pemilu menghadapi Pemilu 2004. Pertemuan ini menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat berbeda dengan pertemuan yang sama pada lima tahun yang lalu, yaitu pertemuan di Pachmarhi 1998. Melalui

<sup>150</sup> Lawrence Saez, "India in 2003: Pre-Electoral Maneuvering and the Prospects for Regional Peace," *Asian Survey*, Vol. 44, No. 1, hlm. 26.

<sup>151</sup> Paranjoy Guha Thakurta dan Shankar Raghuraman, *op.cit.*, hlm. 108.

pertemuan tersebut, partai Congress menyatakan bahwa partainya butuh membentuk koalisi untuk mengalahkan aliansi NDA yang dipimpin partai BJP.<sup>152</sup>

Langkah selanjutnya yang dilakukan partai Congress setelah pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Sonia Gandhi adalah menegaskan bahwa partainya siap membentuk aliansi untuk melawan koalisi anti-BJP. Strategi pembangunan koalisi partai Congress sebagai berikut. Pada 26 Desember 2003 Sonia Gandhi menyatakan akan menjadi partai yang berkoalisi dan bersama-sama akan memutuskan siapa yang menjadi pemimpin jika muncul sebagai pemenang pemilu. Pada Pertemuan Shimla pada 28 Desember 2003, Sonia menegaskan akan menjadi partai anti-aliansi BJP. Pada 3 Januari 2004, ketua DMK, Karunanidhi, yang pada Pemilu 1999 mendukung NDA, bersama dengan MDMK dan PMK meninggalkan NDA dan memberikan respon dengan pembicaraan antara aliansi DMK-Congress-Kiri melawan BJP dan AIADMK. Pada 2 Februari 2004, partai Congress menerima 10 kursi yang ditawarkan DMK di Tamil Nadu. Pada 7 Januari 2004, partai Congress menyusun tim tingkat tinggi yang dipimpin oleh Sonia Gandhi untuk mencapai aliansi-aliansi pemilu dengan partai-partai sekular. Pendekatan ini secara resmi diperkuat pada 13 Februari 2004 ketika Pranab Mukerjee melaporkan kekalahan partai Congress pada pemilu negara-negara bagian akhir 2003 yang lalu di Rajashtan, Madhya Pradesh dan Chhattisgarh disimpulkan bahwa Congress dapat menang hanya dengan menggunakan aliansi.<sup>153</sup>

Pada 10 Januari 2004, PDP dan partai Congress di Jammu & Kashmir memutuskan untuk beraliansi pada pemilu yang akan datang. Pada 20 Januari 2004, Congress mulai mendekati partai Telangana Rashtra Samiti (TRS) yang baru terbentuk. Akan tetapi, pada 24 Maret 2004 kesepakatan baru tercapai dimana TRS, di mana Congress bersaing sebanyak 36 kursi dan TRS 6 kursi di negara bagian Andhra Pradesh. Meskipun menjadi koalisi, kandidat dari rekan aliansi bersaing melawan satu sama yang lain baik partai Congress maupun TRS. Pada 23 Januari 2004, terjadi perkembangan yang signifikan di negara bagian Bihar, di mana kesepakatan antara aliansi RJD dengan Congress tercapai.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> E. Sridharan, *op.cit.*, hlm. 5420.

Bersama dengan Laloo Prasad Yadav RJD dan Ram Vilas Paswan Lok Jan Shakti (LJSP) mengumumkan aliansi mereka. Pada 27 Maret kesepakatan tentang nonimasi disepakati di mana RJD akan bersaing untuk 26 kursi, Paswan LJSP 8 kursi, Congress 4 kursi, NCP 1 dan CPM 1 kursi.<sup>154</sup>

Pada 13 Februari 2004 partai Congress mulai berbicara dengan JMM di Jharkhand. 21 Maret 2004, tiga hari sebelum tanggal notifikasi dan hanya 10 hari sebelum tanggal terakhir pengisian nominasi untuk putaran pertama di negara bagian tersebut, Congress dan JMM tercapai kesepakatan. Sementara usaha untuk membangun koalisi di negara bagian Uttar Pradesh dengan partai SP dan BSP gagal. Walaupun demikian, LJSP aliansi Congress mendapatkan 3 kursi dari kesepakatan tersebut. pada 20 Maret 2004, Congress dan NCP mencapai kesepakatan untuk berbagi kursi di Maharashtra bersama dengan aliansi minor. Congress bersaing untuk 26 kursi, NCP 18 kursi dan sisanya untuk 4 aliansi kecil lainnya. Congress dan NCP juga mencapai kesepakatan di beberapa negara bagian lainnya, misalnya Goa masing-masing 1 kursi, di Gujarat, Congress 25 dan NCP 1 kursi.<sup>155</sup>

Oleh karena itu, perubahan utama pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999 adalah perubahan yang terjadi pada partai Congress. Partai Congress yang sebelumnya menentang koalisi dengan Deklarasi Panchmarhi 1998-nya dan dengan keberadaannya yang sebelumnya kurang 'mampu berkoalisi', menjadi pembangun koalisi yang signifikan pada tahun 2004. Partai Congress dianggap kurang mampu berkoalisi daripada BJP karena distribusi kekuatan relatif antara partai Congress dan BJP. Misalnya sebagian besar negara-negara bagian India di Selatan dan Timur, pesaing utama adalah antara partai Congress dengan partai-partai Kiri, dan BJP sebagai partai ketiga. Sementara sebagian besar di Utara India, Gujarat dan Maharashtra persaingan langsung terjadi antara BJP dan partai Congress, atau BJP memimpin koalisi selama 1990-an. Oleh karena itu, sementara partai regional di Selatan dan Timur India (seperti TDP, AIADMK/DMK, BJD, AGP, Lok Shakti) menemukan BJP sebagai rekan yang berguna untuk melawan musuh utama mereka, yaitu partai Congress. Partai Congress tidak dapat bersatu

<sup>154</sup> *Ibid.*, hlm. 5421.

<sup>155</sup> Paranjoy Guha Thakurta, *op.cit.*, hlm. 108.

dengan partai-partai ini atau partai-partai Kiri sejak Congress adalah musuh utama mereka di daerah tersebut.<sup>156</sup>

Pada Pemilu 2004 ini muncul kondisi baru bagi partai Congress, yaitu keadaan mampu berkoalisi dengan sejumlah negara-negara bagian penting untuk pertama kalinya. Pada pemilu ini, partai Congress memiliki aliansi lebih besar dibandingkan aliansi yang dimiliki partai BJP, yaitu 18 partai untuk Congress berbanding 13 partai untuk partai BJP. Berikut hasil Pemilu Lok Sabha India 2004 koalisi yang dipimpin partai Congress.

**Tabel 3.3. Hasil Pemilu Lok Sabha India 2004, Koalisi Pimpinan Partai Congress**

No.	Partai Politik	Suara Sah	% dari Total Suara Sah	Kursi
1.	Indian National Congress (INC)	103.408.949	26,53	145
2.	Rahstriya Janata Dal (RJD)	9.384.147	2,41	24
3.	Dravida Munnetra Kazagham (DMK)	7.064.393	1,81	16
4.	Nationalist Congress Party (NCP)	7.023. 175	1,8	9
5.	Pattali Malttal Katchi (PMK)	2.169.020	0,56	6
6.	Telangana Rashtra Samiti (TRS)	2.441.405	0,63	5
7.	Jharkhand Mukti Morcha (JMM)	1.846.843	0,47	5
8.	Lok Jan Sakhti Party (LJNSP)	2.771.427	0,71	4
9.	Marumalachi Dravida Munnetra Kazagham (MDMK)	1.679.870	0,43	4
10.	Janata Dal (Seculer) JD (S)	5.732.296	1,47	3
11.	Muslim League of Kerala (MUL)	770.098	0,20	1
12.	Republican Party of India (A) RPI (A)	376.510	0,09	1
13.	Jammu and Kashmir Peoples' Democratic Party (JKPDP)	267.457	0,07	1
14.	Republican Party of India (RPI)	295.545	0,08	0
15.	Peoples Republican Party (PRBP)	261.219	0,07	0
16.	Kerala Congress (M) (KCM)	209.880	0,05	0
17.	Party of Democratic Socialism (PDS)	81.999	0,02	0
18.	Arunachal Congress (AC)	76.527	0,02	0
19.	Himachal Vikas Congress	-	-	-
Total				224

Catatan: Partai Himachal Vikas Congress pada Pemilu 2004 melakukan *merger* atau fusi dengan partai Congress di negara bagian Himachal Pradesh tersebut. Sehingga, total kursi yang diperoleh partai Congress dengan adanya fusi tersebut sebanyak 3 kursi dan sudah dimasukkan ke total kursi perolehan partai Congress.

Sumber: Telah diolah kembali dari berbagai sumber; *Administration and Cost of Election (ACE) Peoject* dalam Lawrence Surendra, "Indian Election 2004: A Retropective an Overview," *Phlippine Journal of Third Worl Studies*, Vol. 19, No. 2, hlm. 78-79, Election Commission of India, *Statistical Report on General Elections 2004, to the 14<sup>th</sup> Lok Sahba* (New Delhi: ECI, 2004), hlm. 1-120 dan E. Sridharan, "Electoral Coalitions

<sup>156</sup> E. Sridharan, *op.cit.*, hlm. 5420-5421.

in 2004 General Elections: Theory and Evidence,” *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51 (Desember 2004), hlm. 5418-5428.

Berdasarkan tabel di atas, dari 18 aliansinya partai RJD dan DMK berhasil menyumbangkan lebih dari 15 kursi. Empat partai lainnya menyumbangkan lima kursi atau lebih, yaitu NCP, PMK, TRS, dan JMM. Enam partai lainnya menyumbang kursi dalam jumlah yang lebih sedikit, yaitu 1 sampai 4 kursi. Tidak sedikit juga partai aliansinya yang tidak mendapatkan kursi. Untuk melihat pentingnya koalisi Congress dengan beberapa partai lain pada Pemilu 2004, ada baiknya dilihat dengan menyoroti koalisi di setiap negara bagian dan membandingkannya dengan Pemilu 1999.

**Tabel 3.4. Perbandingan Koalisi Partai Congress dan BJP antara Pemilu 2004 dengan Pemilu 1999**

Negara Bagian	Koalisi Congress	Koalisi BJP	Partai Lainnya	Peserta (2004)	Perolehan Kursi (2004)	Perolehan Kursi (1999)	
Andhra Pradesh <sup>157</sup>	Congress			34	29	5	
	TRS			23	5	0	
	CPI			1	1	0	
	CPI (M)			1	1	0	
			TDP		33	5	29
			BJP		9	0	7
			MIM	2	1	0	
Arunachal Pradesh <sup>158</sup>	Congress			1	0	2	
	ARC			1	0	0	
			BJP		2	2	0
Assam	Congress			14	9	10	
			BJP		14	3	2
			AGP		12	2	0
Bihar	Congress			39	29	8	
		BJP		40	11	30	
			Front Kiri	7	0	1	
Chhattisgarh	Congress			11	1	3	
			BJP		11	10	8
Delhi	Congress			7	6	0	
			BJP		7	1	7

<sup>157</sup> Congress, TRS, CPI dan CPI (M) menjadi aliansi pada Pemilu 2004, walaupun dalam banyak kursi yang diperebutkan, kandidat dari rekan aliansi bersaing melawan satu sama yang lain. TRS tidak ikut dalam Pemilu 1999, karena baru muncul pada Pemilu 2004. BJP dan TDP menjadi aliansi pada Pemilu 1999 dan 2004.

<sup>158</sup> Congress dan ARC menjadi aliansi pada Pemilu 2004. Pada Pemilu 1999, BJP dan ARC adalah rekan aliansi.

Negara Bagian	Koalisi Congress	Koalisi BJP	Partai Lainnya	Peserta (2004)	Perolehan Kursi (2004)	Perolehan Kursi (1999)
Goa <sup>159</sup>	Congress			1	1	0
	NCP			1	0	0
Gujarat <sup>160</sup>		BJP		2	1	2
	Congress			25	12	6
	NCP			1	0	0
Haryana <sup>161</sup>		BJP		26	14	20
	Congress			10	9	0
		HVP		10	1	5
Himachal Pradesh <sup>162</sup>			INLD	9	0	0
	Congress			10	3	0
		BJP		4	1	3
Jammu & Kashmir <sup>163</sup>	Congress			4	3	0
	PDP			3	1	0
		BJP		6	0	2
			National Conference	6	2	0
Jharkand <sup>164</sup>	Congress			9	6	2
	JMM			5	4	0
	CPI			1	1	0
	RJD			2	2	1
		BJP		14	1	11
Karnataka <sup>165</sup>	Congress			28	8	18
	JD(S)			28	2	0
		BJP		24	18	7
		JD(U)		4	0	3
Kerala <sup>166</sup>	UDF			20	1	11
	LDF			20	18	9
		BJP		20	1	0
Madhya Pradesh	Congress			29	4	8
		BJP		29	25	21

<sup>159</sup> NCP dan Congress menjadi aliansi pada Pemilu 2004 dan tidak menjadi aliansi pada Pemilu 1999.

<sup>160</sup> NCP dan Congress menjadi aliansi pada Pemilu 2004 dan tidak menjadi aliansi pada Pemilu 1999.

<sup>161</sup> Pada Pemilu 1999 BJP dan INLD merupakan aliansi, namun tidak lagi menjadi aliansi pada Pemilu 2004.

<sup>162</sup> HVC dan BJP merupakan aliansi pada Pemilu 1999. Pada Pemilu 2004 HVC bergabung dengan Congress.

<sup>163</sup> PDP dan Congress merupakan aliansi pada Pemilu 2004 walaupun kandidatnya berlawanan satu sama lain. Pada Pemilu 1999 kandidat PDP berjuang sebagai independen.

<sup>164</sup> Congress, JMM, CPI, dan RJD merupakan aliansi pada Pemilu 2004 walaupun JMM dan Congress bersaing satu sama lain. Congress dan RJD merupakan aliansi pada Pemilu 1999.

<sup>165</sup> BJP dan JD(U) merupakan aliansi pada Pemilu 1999 dan 2004.

<sup>166</sup> UDF pada Pemilu 2004 terdiri dari Congress, Muslim League dan Congress Kerala (Mani). LDF terdiri dari CPI(M), CPI, dan JD(S) serta Congress Kerala. BJP termasuk partai Demokrat Federal India.

Negara Bagian	Koalisi Congress	Koalisi BJP	Partai Lainnya	Peserta (2004)	Perolehan Kursi (2004)	Perolehan Kursi (1999)	
Maharashtra <sup>167</sup>	Congress			29	4	8	
	NCP			29	25	21	
	RPI(A)			1	1	1	
	RPI			1	0	0	
	PRBP			1	0	0	
	JD(S)			1	0	1	
			BJP		26	13	13
			Shiv Sena		22	12	15
				PWP	3	0	1
			BBM	16	0	1	
Manipur <sup>168</sup>	Congress			1	1	0	
	NCP			1	0	1	
			BJP	2	0	0	
				MPP	1	0	0
Meghalaya <sup>169</sup>	Congress			2	1	1	
			BJP	1	0	0	
			TRMC	1	1	1	
Mizoram	Independen			1	0	0	
				MNF	1	1	1
Nagaland <sup>170</sup>	Congress			1	0	1	
				NPF	1	1	0
Orissa <sup>171</sup>	Congress			21	2	2	
	JMM			1	1	0	
			BJP	9	7	9	
			BJD	12	11	10	
Punjab <sup>172</sup>	Congress			11	2	8	
	CPI			1	0	1	
	CPI(M)			1	0	0	
			SAD	10	8	2	
			BJP	3	3	1	
			SAD(M)	6	0	1	
Chandigarh	Congress			1	1	1	
				BJP	1	1	1
Rajashtan	Congress			25	4	9	
				BJP	25	21	16
Sikkim	Congress			1	0	0	
				SDF	1	1	1
				SSP	1	0	0

<sup>167</sup> Pada pemilu 2004 Congress, NCP, JD(S), RPI(A), RPI dan PRBP menjadi aliansi. PRBP berlum ada pada Pemilu 1999. Pemilu 1999, Congress, RPI dan BBM merupakan aliansi. Shiv Sena dan BJP menjadi aliansi pada Pemilu 1999 dan 2004.

<sup>168</sup> NCP dan Congress menjadi aliansi pada Pemilu 2004.

<sup>169</sup> Pemilu 2004, BJP dan TRMC merupakan aliansi.

<sup>170</sup> NPF tidak ada pada Pemilu 1999.

<sup>171</sup> BJD dan BJP menjadi aliansi pada Pemilu 1999 dan 2004.

<sup>172</sup> Congress, CPI dan CPI (M) menjadi aliansi pada Pemilu 1999 dan 2004.

Negara Bagian	Koalisi Congress	Koalisi BJP	Partai Lainnya	Peserta (2004)	Perolehan Kursi (2004)	Perolehan Kursi (1999)
Tamil Nadu <sup>173</sup>	Congress			10	10	2
	DMK			16	16	12
	MDMK			4	4	4
	PMK			5	5	5
	CPI			2	2	0
	CPI(M)			2	2	1
		AIADMK		33	0	10
		BJP		6	0	4
Pondecherry <sup>174</sup>	PMK			1	1	0
		BJP		1	0	0
Tripura	Congress			2	0	0
	CPI(M)			2	2	2
Uttar Pradesh <sup>175</sup>			NLP	7	1	0
			SJP(R)	2	1	1
			BSP	80	19	14
		BJP+		80	11	25
		SP		68	35	26
		RLD		10	3	2
Uttaranchal	Congress			5	1	1
		BJP		5	3	4
		SP		5	1	0
West Bengal <sup>176</sup>	Congress			37	6	3
		BJP		13	0	2
		TRMC		29	1	8
			Front Kiri	42	35	29

Sumber: Telah diolah kembali dari E. Sridharan "Coalition and Party Strategies in India's Parliamentary Federation." *Publius*. Vol. 33. No. 4, 2003, hlm. 5422-5425.

Berdasarkan tabel di atas, ada dua hal yang dapat dipahami yaitu di negara bagian mana partai Congress mengalami peningkatan dan penurunan bila dibandingkan dengan Pemilu 1999 sebelumnya. Dari beberapa negara bagian besar, secara umum partai Congress mengalami peningkatan pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999, yaitu di Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Gujarat,

<sup>173</sup> DMK, Congress, MDMK, PMK, CPI dan CPI (M) menjadi aliansi pada Pemilu 2004. AIADMK menjadi aliansi BJP pada Pemilu 2004. Pemilu 1999, AIADMK merupakan aliansi Congress. Pemilu 1999, BJP, DMK, MDKM, dan PMK merupakan aliansi.

<sup>174</sup> Pada Pemilu 1999 Congress menjadi kontestan dan menang satu kursi. Namun pada pemilu 2004 karena PMK adalah aliansi Congress, Congress tidak menjadi kontestan. Pada Pemilu 1999, PMK juga menjadi kontestan pemilu.

<sup>175</sup> BJP+ pada Pemilu 2004 termasuk JD (U). SP dan RLD menjadi aliansi pada Pemilu 2004. Pemilu 1999 Congress dan RLD merupakan aliansi.

<sup>176</sup> Front Kiri pada Pemilu 2004 terdiri dari CPI, CPI (M) RSP.

Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, dan Bengal Barat. Sementara mengalami penurunan pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999, yaitu di Arunachal Pradesh, Assam, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Nagaland, Punjab, dan Rajashtan.

Ada tujuh negara bagian yang signifikan di mana partai Congress mampu berkoalisi, yaitu negara bagian Andhra Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Maharashtra, dan Tamil Nadu. Di Andhra Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, dan Maharashtra, partai Congress berhadapan baik dengan BJP dan aliansi BJP yang potensial. Di Andhra Pradesh dan Jammu & Kashmir partai National Congress adalah rekan potensial BJP. Munculnya partai TRS di Andhra Pradesh, menunjukkan Congress memiliki kesempatan untuk membangun koalisi. Di Jharkhand, JMM adalah rekan anti-NDA yang potensial. Di J&K, PDP adalah partai yang anti-NDA dan anti-National Congress. Di Maharashtra, NCP adalah rekan koalisi pemerintahan BJP, tetapi sekarang menjadi rekan anti-NDA yang potensial. Di Bihar dan Tamil Nadu Congress menghadapi aliansi NDA dengan BJP sebagai partai junior. Di Bihar Congress sudah menjadi rekan partai pemerintah, yaitu RJD dan berpotensi untuk berkoalisi. Di Tamil Nadu status Congress sebagai partai ketiga telah berkurang dan memiliki potensi berkoalisi dengan kedua partai di negara bagian tersebut, yaitu AIADMK dan DMK. Di Himachal Pradesh, partai Congress bernegosiasi dengan Sukh Rams' Himachal Vikas Congress yang akhirnya HVP bergabung dengan partai Congress.<sup>177</sup> Secara keseluruhan, koalisi sangat kritis untuk kemenangan Congress di Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand, Himachal Pradesh, Maharashtra dan Jammu & Kashmir. Menjadi kritis karena mengurangi margin kekalahan atau memperbaiki posisi Congress dibandingkan dengan Pemilu 1999 di Maharashtra. Sementara untuk negara bagian Haryana, dan Jharkhand menjadi kritis bagi kemenangan Congress karena BJP memutuskan untuk berjuang sendiri tanpa aliansi dibandingkan Pemilu 1999.<sup>178</sup> Dengan demikian, kemenangan Congress pada Pemilu 2004 ini sangat dibantu oleh koalisi

<sup>177</sup> E. Sridharan, *op.cit.*

<sup>178</sup> John Zavos, "The End of Hindutva? A Reflection on the General Election in India, April/May 2004", makalah yang dipresentasikan pada Institut Eropa untuk Studi Asia, Brussels, 28 Mei 2004, hlm. 6.

partai Congress dan juga karena partai BJP mengurangi rekan koalisinya pada Pemilu 2004.<sup>179</sup>

Koalisi pra-pemilu yang dibangun partai Congress bersama rekan-rekannya, berbeda dengan teori yang diusulkan oleh Golder. Umumnya, di dalam perundingan koalisi pra-pemilu maka kebijakan-kebijakan atau program-program serta pos-pos jabatan menteri sudah dibicarakan. Hal ini tidak terjadi dalam koalisi pra-pemilu yang dibangun oleh partai Congress. Koalisi UPA ini kemudian memiliki kebijakan atau program bersama yang dikeluarkan pada 29 Mei 2004. Dalam dokumen yang dikenal dengan NCMP (*National Common Minimum Programm*) tersebut terdapat sejumlah isu-isu kebijakan ekonomi yang secara signifikan bersifat inklusif. Ada enam prinsip-prinsip dasar yang dijanjikan oleh koalisi tersebut, yaitu: 1) memelihara, melindungi dan memajukan kerukunan sosial dan menjalankan hukum tanpa rasa takut atau sokongan berkaitan dengan semua elemen fundamentalis dan tak jelas yang mencoba mengganggu hubungan baik dan perdamaian sosial; 2) menjamin bahwa pertumbuhan ekonomi sekurang-kurangnya 7-8% per tahun dalam cara yang mendukung lebih dari satu dekade dan dalam cara yang menghasilkan pekerjaan supaya setiap setiap keluarga terjamin dari kehidupan yang dapat berjalan dan aman; 3) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani-petani, buruh perkebunan dan pekerja-pekerja, terutama yang berada dalam sektor yang tak teratur, dan menjamin masa depan yang aman bagi keluarga mereka dalam setiap aspek; 4) secara penuh memberdayakan perempuan melalui politik, pendidikan, ekonomi dan menurut hukum; 5) menyediakan persamaan kesempatan secara penuh, terutama dalam pendidikan dan pekerjaan bagi kasta-kasta terbelakang dan agama minoritas; dan 6) mendukung kreatifitas para pengusaha, pelaku bisnis, para ahli ilmu pengetahuan, insinyur dan semua profesionalisme India dan kekuatan-kekuatan masyarakatnya lainnya yang produktif.<sup>180</sup> Berikut alokasi jabatan-jabatan menteri untuk koalisi UPA untuk 2004-2009.

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Judith E. Walsh, *op.cit.*, hlm. 313.

**Tabel 3.5. Alokasi Jabatan Menteri Untuk Koalisi UPA 2004-2009**

No.	Partai Politik	Kursi di Lok Sabha	Kabinet Nasional <sup>181</sup>	Kabinet Negara <sup>182</sup>
1.	Indian National Congress (INC)	145	24	33
2.	Rahstriya Janata Dal (RJD)	24	3	6
3.	Dravida Munnetra Kazagham (DMK)	16	-	5
4.	Nationalist Congress Party (NCP)	9	1	2
5.	Pattali Maltltal Katchi (PMK)	6	-	1
6.	Telangana Rashtra Samiti (TRS)	5	-	-
7.	Jharkhand Mukti Morcha (JMM)	5	-	-
8.	Lok Jan Sakhti Party (LJNSP)	4	1	-
9.	Marumalachi Dravida Munnetra Kazagham (MDMK)	4	-	-
10.	Janata Dal (Seculer) JD (S)	3	-	-
11.	Muslim League of Kerala (MUL)	1	-	1
12.	Republican Party of India (A) RPI (A)	1	-	-
13.	Jammu and Kashmir Peoples' Democratic Party (JKPDP)	1	-	-

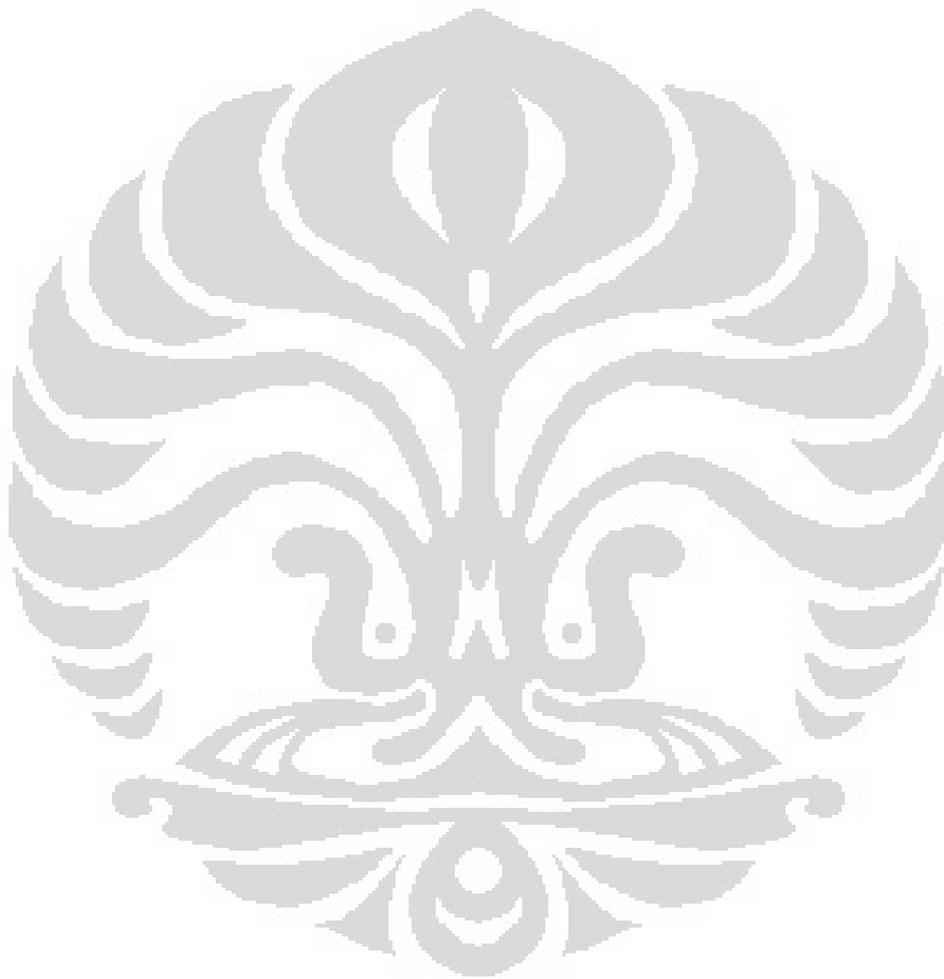
Sumber: Telah diolah kembali dari Election Commission of India (2004) dan india.gov.in

Partai-partai yang dimasukkan ke dalam tabel di atas adalah koalisi pimpinan partai Congress yang mendapatkan kursi di Lok Sabha, sementara 5 partai lainnya yang tidak mendapatkan kursi di Lok Sabha, yaitu RPI, PRPB, KCM, PDS, dan AC, tidak dimasukkan dalam pembagian atau alokasi menteri untuk koalisi UPA. Berdasarkan tabel di atas, partai Congress mendapatkan alokasi yang lebih besar baik untuk menteri kabinet dan menteri negara. Dari 18 aliansi tersebut, terdapat empat partai yang tidak mendapatkan alokasi baik untuk menteri kabinet dan menteri negara, yaitu TRS, JMM, MDMK, JD (S), dan JKPDP. Koalisi ini tetap utuh, walau pun untuk pertama kalinya partai TRS meninggalkan pemerintahan pada Agustus 2006 dengan alasan pemerintah gagal menepati janji untuk menguji kemungkinan dibentuknya negara bagian Telengana. Selanjutnya pada bulan Maret 2007 partai MDMK menarik

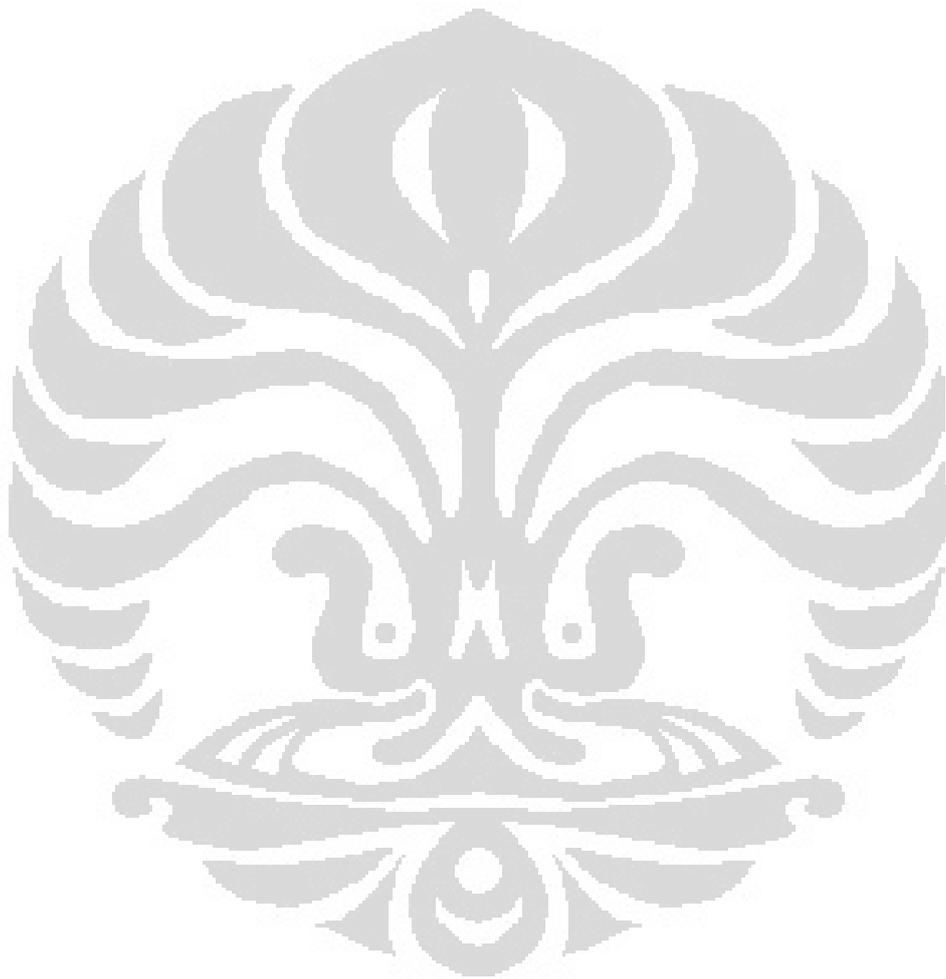
<sup>181</sup> Kabinet Nasional India disebut juga dengan *Union Cabinet Ministers* yang merupakan menteri senior yang mengepalai sebuah kementerian. Menteri kabinet juga dapat mengepalai departemen tambahan lainnya di mana tidak ada menteri kabinet lainnya yang ditunjuk.

<sup>182</sup> Kabinet Menteri Negara ini disebut juga *Minister of Sate*. *Minister of Sate* ini terbagi dua, *Minister of Sate (Independent Charge)* di mana kementerian ini tidak dikepalai oleh Menteri Kabinet. Sementara *Minister of Sate (MoS)* merupakan menteri junior yang dikepalai oleh Menteri Kabinet dan biasanya memiliki tugas spesifik di kementerian tertentu, misalnya MoS Keuangan hanya menangani urusan perpajakan.

dukungannya dari koalisi karena tidak senang dengan ketidak mampuan pemerintahan untuk mengimplementasikan pembagian air antara Karnataka dan Tamil Nadu.<sup>183</sup> Meskipun adanya penarikan dukungan dari kedua partai ini, koalisi tetap bertahan hingga pemilu 2009 yang lalu karena mendapat dukungan dari partai-partai kiri dari luar. Partai-partai kiri ini tidak masuk dalam pemerintahan tetapi berjanji akan mendukung koalisi bila menghadapi keadaan yang sulit di Lok Sabha.



<sup>183</sup> Paranjay Guha Thakurta, *op.cit.*, hlm. 81.



## **BAB IV**

### **“FAKTOR EKSTERNAL KEMENANGAN PARTAI CONGRESS PADA PEMILU LOK SABHA 2004”**

Sejak tahun 1990-an, tidak ada satu pun partai yang secara tunggal mampu memenangkan mayoritas kursi di Lok Sabha, baik partai Congress yang pernah menjadi partai dominan selama empat puluh tahun sejak India merdeka maupun partai-partai lain yang menjadi saingan partai Congress. Contoh lainnya misalnya, partai-partai Komunis India yang telah menjadi peserta Pemilu 1952 atau pun BJP yang secara berturut-turut mengalahkan perolehan kursi partai Congress di Lok Sabha pada Pemilu 1996, 1998, dan 1999. India, walaupun memiliki banyak partai, partai Congress dan BJP adalah dua partai yang secara terang-terangan digambarkan sebagai dua partai nasional yang saling berhadapan atau menjadi saingan. Walaupun sejak Pemilu 1998 telah ada aliansi dengan beberapa partai lainnya, maka aliansi itu selalu menggambarkan persaingan antara partai Congress dan BJP. Putusan Pemilu 2004 secara fundamental berbeda dari Pemilu 1996 ketika baik BJP dan Congress tidak dapat membentuk pemerintahan. Berbeda dari pemerintahan 1996—UF—karena BJP pada waktu ini masih mampu meningkatkan kekuatan dan memiliki potensi untuk diperhitungkan terbukti dengan keberhasilannya pada Pemilu 1998 dan 1999. Akan tetapi pada Pemilu 2004, BJP paling tidak menunjukkan kecenderungan menurun di pusat dan beberapa negara bagian kunci seperti Maharashtra, Andhra Prades dan Karnataka.

Beberapa surat kabar-surat kabar di India terlibat dalam perdebatan yang berusaha menafsirkan putusan pemilu yang tidak diharapkan tersebut. Bahkan pertarungan perdebatan tersebut hampir sehangat pemilu itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemilu yang diprediksi dimenangkan partai BJP ternyata hanya mampu mendapatkan suara kedua terbanyak setelah partai Congress. Berbagai polling-polling yang dilakukan menjelang Pemilu 2004, banyak memprediksikan BJP atau bersama dengan aliansinya akan memenangkan pemilu. Media-media dan pengumpulan suara menyatakan bahwa BJP akan kembali lagi berkuasa. Sangat sedikit orang berpikir bahwa ada kesempatan NDA kalah. Bahkan pimpinan Congress, pada awalnya, selama tahap pertama pemilu tidak cukup

percaya diri untuk kemenangan Pemilu 2004. Berikut beberapa hasil poling yang memprediksikan kemenangan BJP dan aliansinya.

**Tabel 4.1. Proyeksi Kursi Berdasarkan Poling Pemilu 2004**

NDTV	Aaj Tak	Star News
BJP & Allies..... 235 - 255	BJP & Allies..... 266	BJP & Allies..... 267 - 279
Congress & Allies..... 190 - 210	Congress & Allies..... 175	Congress & Allies..... 160 - 172
Others..... 100 - 120	Others..... 102	Others..... 97 - 109

Sumber: Varghese Kallada, "Summary of Exit Polls: General Elections 2004", diakses dari <http://www.hinduonnet.com/elections2004/index.htm>

Berdasarkan hasil poling-poling yang memprediksi kemenangan partai BJP dan aliansinya terhadap partai Congress dan aliansinya, yang dilakukan beberapa media televisi India di atas, menunjukkan bahwa partai BJP dan aliansinya mampu mendapatkan kursi di atas 235 kursi dibandingkan dengan partai Congress dan aliansinya mampu mendapatkan paling banyak 210 kursi. Dengan demikian, melalui prediksi-prediksi tersebut partai BJP dan aliansinya adalah partai yang dianggap akan keluar sebagai pemenang Pemilu Lok Sabha 2004 yang lalu.

Orang-orang yang ingin memperkecil signifikan dari hasil Pemilu Lok Sabha 2004 tersebut menyatakan bahwa alasan anti-terhadap partai yang sedang menjabat, salah penguasaan di tingkat negara bagian, dan pilihan rekan aliansi oleh NDA yang salah dianggap sebagai penyebab kalahnya aliansi NDA. Bahkan, ahli strategi partai BJP dan mantan wakil Perdana Menteri L.K Advani, pun memecahkan kebisuannya dengan menyalahkan kesalahan slogan India Bersinar (*India Shining*) karena gagalannya partai BJP menjadi pemenang. Sementara mantan Perdana Menteri Vajpayee menyalahkan kekerasan Gujarat sebagai faktor utama dalam kekalahan partai yang mengejutkan.<sup>184</sup>

Pemilu India 2004 digambarkan oleh beberapa ahli politik India sebagai peristiwa yang membingungkan. Masing-masing ahli politik India, berusaha menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk dapat menganalisa hasil

<sup>184</sup> Zoya Hasan, *op.cit.*

Pemilu 2004 tersebut. K.C. Suri dan berusaha menjelaskan hasil Pemilu 2004 yang mengaitkannya dengan reformasi ekonomi yang dibangga-banggakan BJP.<sup>185</sup> Arun R. Swamy adalah salah satu yang kurang lebih menyoroti kinerja pemerintahan BJP dalam bidang ekonomi.<sup>186</sup> Christophe Jaffrelot yang berusaha menjelaskan *brand* nasionalis Hindu yang radikal membuat aliansi-aliansi BJP menjauh dan berimplikasi menurunnya dukungan pada BJP.<sup>187</sup> Zoya Hasan yang menafsirkan tindakan eksklusif baik politik dan ekonomi oleh BJP.<sup>188</sup> Zoya Hasan menambakan hasil pemilu tersebut begitu kompleks untuk dijelaskan dalam faktor tunggal. Paling tidak memiliki tiga pesan politik yang sudah jelas. *Pertama*, menolak Vajpayee memimpin pemerintahan NDA dengan mengurangi aliansinya kepada minoritas di *Lok Sabha*. *Kedua*, dengan kuat membubarkan klaim pemerintah yang disimbolkan dengan slogan *India Bersinar*—mengenai pertumbuhan dan pembangunan yang diperoleh negara di bawah BJP dan menentang politik praktek Hindutva oleh BJP. *Ketiga*, munculnya Sonia Gandhi memimpin Congress sebagai partai tunggal terbesar membuat jelas bahwa massa India yang berlimpah telah menolak kampanye penolakan asal usulnya sebagai orang asing.<sup>189</sup> Di dalam semuanya, pesan utamanya adalah perlawanan politik dan perpecahan ekonomi. Menjadi ekspresi ketidakpuasan dan frustrasi dengan tatanan politik yang ada dan penolakan anti-miskin, karakter non-inklusif aliansi BJP.

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan Zoya adalah Giorgio Shani. Menurutnya ada empat penjelasan utama untuk kekalahan BJP pada Pemilu 2004. *Pertama*, kekalahan BJP sebagai penyangkalan yang jelas terhadap visi BJP tentang India sebagai sebuah adikuasa ekonomi dan politik secara rinci 'Hindu'. Bukti-bukti telah menunjukkan kesan bahwa Muslim dan minoritas lainnya bersiasat memilih melawan kandidat BJP di negara-negara bagian seperti Gujarat, yang dilihat sebagai kasus terburuk kekerasan yang diilhami komunal. Mayoritas

<sup>185</sup> K.C. Suri, *op.cit.*

<sup>186</sup> Arun R. Swamy, *op.cit.*

<sup>187</sup> Christophe Jaffrelot, *Hindu Nationalism* (New Jersey: Princeton University Press, 2007). Christophe Jaffrelot adalah ahli politik Prancis dengan spesialisasi Asia Selatan, terutama Pakistan dan India.

<sup>188</sup> Zoya Hasan, *Breaking New Ground: Congress and Welfarism in India* (Paris: Ifri, 2009), hlm. 1-22.

<sup>189</sup> *Ibid.*

pemilih memilih melawan BJP. *Kedua*, walaupun BJP memiliki aliansi banyak dari negara-negara bagian India, namun gagal untuk mendamaikan banyaknya perbedaan yang menjurus kepada perpecahan koalisi NDA sendiri. *Ketiga*, kegagalan BJP dalam memilih rekan atau koalisi pemilunya. Dari negara bagian Tamil Nadu dan Andhra Pradesh, keduanya merupakan daerah Hindi—basis utama BJP—NDA kehilangan 51 kursi. Di Andhra Pradesh, aliansi BJP, TDP kehilangan 24 kursi. Di Tamil Nadu, setelah penarikan dukungan DMK, AIADMK menjadi koalisi BJP. AIADMK kehilangan 10 kursi, setelah DMK memutuskan bergabung dengan Congress. Congress, DMK dan partai-partai komunis kecil lainnya memperoleh kursi yang dikorbankan AIADMK. *Keempat*, gagalannya BJP dalam memenuhi kebutuhan orang miskin. Misalnya, di Andhra Pradesh, koalisi BJP—TDP kalah karena pemilih melawankan kebijakan-kebijakan NDA yang pro-pertumbuhan. Gagalnya BJP memenuhi kebutuhan orang miskin India telah didominasi partai-partai Kiri. Oleh karena itu, melawan kebijakan privatisasi BJP, partai-partai komunis memilih memberikan dukungannya kepada Sonia Gandhi.<sup>190</sup>

Dari beberapa penjelasan analisis politik India tersebut, ditafsirkan bahwa hal tersebut menjadi kondisi yang memberikan ruang yang positif bagi partai Congress, partai saingan utama BJP. Oleh karena penjelasan di atas, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India 2004. Faktor-faktor eksternal yang akan dijelaskan dalam dua bagian yang mencakup tentang perubahan perilaku pemilih India dan kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif. Pada bagian kedua ini akan dibagi dua, yaitu slogan kampanye *India Shining* dan kebijakan-kebijakan partai BJP yang *pro-rich* dan meningkatkan penerapan agenda *Hindutva* partai BJP. Kebijakan pertama tersebut digolongkan sebagai eksklusifisme dalam bidang ekonomi sementara kebijakan kedua digolongkan sebagai eksklusifisme partai BJP dalam bidang politik dan sosial. Secara singkat kedua hal ini ditandai dengan tidak sinkronnya janji-janji BJP ketika kampanye Pemilu 2004 kepada sebagian besar masyarakat India. Terjadinya ketimpangan atau ketidakseimbangan ekonomi antara kelas atas di

<sup>190</sup> Giorgio Shani, *op.cit.*, hlm. 53-54.

perkotaan dan kelas bawah di pedesaan-pedesaan India. Sementara penyebab berkurangnya dukungan terhadap partai BJP karena *brand* nasionalisme Hindu BJP semakin mengarah kepada tindakan radikal yang membuat beberapa aliansinya menarik dukungan diri dari partai BJP.

#### **4.1 Perubahan Perilaku Pemilih India**

Selama 60 tahun lebih atau sejak India merdeka, masyarakat India telah memelihara berlakunya demokrasi di negara tersebut walaupun dengan beberapa keganjilan. India dianggap sebagai contoh yang dapat diperhitungkan untuk berlakunya teori-teori demokrasi yang di mana demokrasi hanya dapat dipertahankan di negara-negara dengan tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi dan adanya keseragaman budaya. Negara India telah dihargai dengan beberapa pemimpin yang terkenal yang memimpin India melewati keadaan yang tidak teratur dan keributan-keributan politis. Masyarakat India juga dihargai karena menunjukkan tingkat kesadaran politik yang masuk akal, kedewasaan dan kemampuan untuk mengganti pemerintah melalui cara pemilu. Pada waktu yang sama pula, kita mendengar bahwa India telah berhadapan dengan kebusukan politik, krisis pemerintahan yang terjadi di sebagian besar negara India, penurunan kualitas kepemimpinan pada beberapa tahun yang lalu.

Banyak diskusi-diskusi di media sebagaimana juga dalam perbincangan penelitian sosial mengenai bagaimana partai-partai dan pemimpin-pemimpin membangun dukungan pemilih pada basis-basis identitas kasta, agama, suku, bahasa dan daerah misalnya. Dalam beberapa tahun ini peran uang, kekerasan dan persuasi-persuasi dalam menjamin kemenangan pemilih jelas terlihat. Beberapa hal ini dianggap merupakan kekuarangan demokrasi di India seperti halnya yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya.

Demokrasi, walaupun demikian, telah diterima atau diyakini oleh sebagian besar masyarakat India sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Berdasarkan survey yang dilakukan CSDS pada tahun 2004 dengan sampel (N) sebanyak 25.754 responden, 88% menyatakan dukungannya terhadap demokrasi sebagai bentuk yang lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Hanya 4,5% responden yang yakin bahwa pemerintahan yang diktator lebih baik, sementara kira-kira 7% merasa

bahwa demokrasi atau diktator tidak membuat perbedaan kepada mereka. Dukungan untuk demokrasi tersebar luas dari semua kelas dan komunitas, laki-laki dan perempuan, masyarakat pedesaan dan perkotaan, dan kelompok elite-elite demikian juga pada kelompok massa. Sebagian besar menginginkan pemerintahan yang demokratis dan merasakan efisiensi secara politis. Ada beberapa isu yang menjadi penting atau isu-isu besar bagi pemilih pada masa pemilu. Berdasarkan survey pasca Pemilu 1996 menunjukkan bahwa para pemilih menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap masalah-masalah seperti pengangguran (17,1%), kemiskinan (11,5%), kenaikan harga kebutuhan (11,5%), kebutuhan air minum (7,9%), korupsi (7,9%), transportasi (4%), dan kebutuhan listrik, fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, sandang dan pangan, dan sebagainya atau yang berkaitan dengan kebutuhan investasi sosial.<sup>191</sup> Sebagian besar masyarakat India terlihat memberikan prioritas terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar, tidak sama dengan orang-orang di masyarakat postmodern atau masyarakat Barat yang industrialis yang menekankan kebutuhan-kebutuhan postmaterilis.

Dengan demikian, dukungan sebagian besar masyarakat India terhadap pemerintahan yang demokratis berarti berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka dari hari ke hari lainnya. Masyarakat menginginkan pemerintah menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Menurunnya kepercayaan kepada pemimpin politik karena ketidakmampuan mereka memenuhi janji-janji mereka. Masyarakat menganggap para pemimpin partai sebagai penghubung mereka dengan pemerintah. Mereka ingin mendapatkan pinjaman, tempat perumahan, hak untuk masuk sekolah dan institusi pendidikan lainnya, jaminan terhadap pekerja kecil, atau bantuan dalam situasi di mana mereka terlibat dalam proses pengadilan atau kasus-kasus polisi. Pemilih cenderung berpikir bahwa pemimpin-pemimpin memiliki kewajiban untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa telah terjadi perubahan perilaku pemilih, sebelumnya perilaku pemilih India dapat didekati dengan pendekatan sosiologis, di mana faktor agama atau aspek kedaerahan dan

<sup>191</sup> K. C. Suri, "Pattern of..., *op.cit.*, hlm. 4-5.

bahasa masih memiliki korelasi terhadap perilaku pemilih, maka sekarang pemilih India telah mengarah kepada pendekatan rasional yang berorientasikan isu. Orientasi isu ini misalnya berkaitan dengan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Seperti pemahaman sebagian besar rakyat India, pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Dari kedua partai terbesar India, partai Congress adalah partai yang intens memberikan perhatian atau mengangkat isu-isu terhadap pemenuhan kebutuhan rakyat India, khususnya kelompok masyarakat miskin dan pedesaan. Penilaian pemilih terhadap kinerja pemerintahan BJP yang menyatakan reformasi ekonomi telah mengubah perekonomian India, dapat digunakan sebagai pertimbangan terhadap perilaku pemilih India. Secara garis besar, berdasarkan hasil penelitian CSDS di bawah ini, dapat juga dilihat sebagai tanda berubahnya pemilih India dari yang tradisional menuju pemilih yang rasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan CSDS tahun 2004, ada lima variabel yang digunakan untuk mengetahui pendapat atau opini pemilih mengenai reformasi ekonomi selama lima tahun di bawah pemerintahan BJP, yaitu kelas, kasta, pekerjaan, tingkat pendidikan dan latar belakang desa/kota. Ada tiga informasi penting yang dapat diketahui dari pendapat pemilih tersebut yang berkaitan dengan reformasi ekonomi di bawah pemerintahan NDA yang dipimpin partai BJP, yaitu siapa yang diuntungkan oleh reformasi ekonomi; bagaimana kondisi ekonomi; dan bagaimana peluang pekerjaan. Apakah reformasi ekonomi menguntungkan semua orang India atau hanya orang kaya atau tidak satu pun yang diuntungkan. Apakah kondisi ekonomi memburuk, sama dengan sebelumnya atau bertambah baik. Begitu juga dengan peluang-peluang pekerjaan, apakah memburuk, sama dengan sebelumnya atau bertambah baik. Berikut disajikan data berdasarkan kelima variabel tersebut.

**Tabel 4.2. Opini Pemilih Pada Kondisi Ekonomi, Berdasarkan Kelas (1999-2004)**

<i>Economic Conditions</i>	<i>Very Poor</i>	<i>Poor</i>	<i>Middle</i>	<i>Upper</i>	<i>N</i>
<b><i>Economic reform benefited</i></b>					
<i>The whole country</i>	20	26	31	39	7418
<i>Only the rich</i>	47	44	44	36	11752
<i>No one has</i>	14	15	13	14	3818
<i>No opinion</i>	19	16	12	11	4121
<b><i>Economic conditions</i></b>					
<i>Deteriorated</i>	26	18	16	12	5156
<i>Remained same as before</i>	52	53	50	45	13861
<i>Improved</i>	19	25	31	39	7177
<i>No opinion</i>	4	4	3	3	917
<b><i>Employment opportunities</i></b>					
<i>Deteriorated</i>	36	43	45	42	11155
<i>Same as before</i>	26	26	29	30	7337
<i>Improved</i>	16	16	17	21	4624
<i>No opinion</i>	23	14	10	8	3995

Catatan: N= sampel, semua dalam persen (%)

Sumber: Telah diolah kembali dari K.C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5404-5411.

Berdasarkan variabel kelas, maka kelas yang lebih miskin (sangat miskin atau *very poor* dan miskin atau *poor*) menyatakan bahwa reformasi ekonomi sebagian besar hanya menguntungkan orang kaya, masing-masing 47% dan 44%. Yang menarik, walaupun kelas menengah dan atas menyatakan bahwa satu pertiga reformasi menguntungkan seluruh negeri India, maka jumlah kelas menengah dan atas yang menyatakan bahwa reformasi ekonomi lebih banyak hanya menguntungkan orang kaya, masing-masing 44% dan 36%. Untuk kategori kondisi ekonomi, maka kelas yang lebih miskin atau sangat miskin dan miskin menyatakan bahwa kondisi ekonomi sama dengan kondisi sebelumnya lebih dari 50%, masing-masing 52% dan 53%. Kondisi ini juga tidak berbeda dengan kelas menengah dan atas yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi sama dengan kondisi sebelumnya, masing-masing 50% dan 45%. Sementara untuk kategori peluang kerja, sebagian besar menyatakan bahwa peluang pekerjaan semakin memburuk, baik dari kelas yang lebih miskin dan kelas menengah ke atas.

**Tabel 4.3. Opini Pemilih Pada Kondisi Ekonomi, Berdasarkan Identitas Kasta (Tahun 1999-2004)**

<i>Economic Conditions</i>	<i>Upper Castes</i>	<i>OBCs</i>	<i>Dalits</i>	<i>Adivasis</i>	<i>Muslim</i>	<i>The Others</i>	<i>N</i>
<i>Economic reform benefited</i>							
<i>The whole country</i>	38	29	19	20	16	27	6951
<i>Only the rich</i>	36	42	51	44	53	42	11007
<i>No one has</i>	13	14	14	16	17	13	3596
<i>No opinion</i>	12	16	16	20	13	19	3794
<i>Economic conditions</i>							
<i>Deteriorated</i>	14	20	24	17	22	17	4855
<i>Remained same as before</i>	51	50,2	50,2	54,8	52	52	12941
<i>Improved</i>	32	26	22	25	22	26	6728
<i>No opinion</i>	3	3	3	3	3	5	826
<i>Employment opportunities</i>							
<i>Deteriorated</i>	42	39	43	41	48	39	10464
<i>Same as before</i>	26	28	26	27	27	29	6829
<i>Improved</i>	22	17	14	13	12	17	2330
<i>No opinion</i>	10	16	17	19	13	15	3723

Catatan: N= sampel, semua dalam persen (%)

Sumber: Telah diolah kembali dari K.C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5404-5411.

Berdasarkan variabel kasta, walaupun lebih dari satu pertiga kasta yang lebih tinggi menyatakan bahwa reformasi ekonomi menguntungkan seluruh negeri India, maka lebih dari 40% kasta lainnya menyatakan bahwa reformasi ekonomi tersebut hanya menguntungkan orang kaya, baik *OBCs*, *Dalits*, *Adivasis*, *Muslim*, dan kasta yang lainnya. Sementara untuk kondisi ekonomi, sama dengan variabel kelas, maka lebih 50% dari masing-masing kasta menyatakan bahwa kondisi ekonomi India sama dengan kondisi sebelumnya. Untuk kategori peluang kerja, walaupun lebih dari 20% dari semua kasta menyatakan bahwa peluang kerja sama dengan sebelumnya, maka angka yang menyatakan memburuk juga lebih besar, yaitu masing-masing kasta menyatakan lebih dari 40%.

**Tabel 4.4. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 1999-2004)**

<i>Economic Conditions</i>	<i>Non-Literate</i>	<i>Up To Primary</i>	<i>Up To Matric</i>	<i>Collage and Above</i>	<i>N</i>
<b><i>Economic reform benefited</i></b>					
<i>The whole country</i>	17	26	33	41	7418
<i>Only the rich</i>	45	44	44	40	11752
<i>No one has</i>	14	15	14	12	3819
<i>No opinion</i>	24	14	10	6	4121
<b><i>Economic conditions</i></b>					
<i>Deteriorated</i>	23	21	17	12	5156
<i>Remained same as before</i>	53	52	51	48	13861
<i>Improved</i>	20	25	30	39	7178
<i>No opinion</i>	5	3	2	2	917
<b><i>Employment opportunities</i></b>					
<i>Deteriorated</i>	35	42	46	47	11156
<i>Same as before</i>	23	27	30	31	7337
<i>Improved</i>	14	18	19	20	4624
<i>No opinion</i>	28	13	5	3	3995

Catatan: N= sampel, semua dalam persen (%)

Sumber: Telah diolah kembali dari K.C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5404-5411.

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel tingkat pendidikan, maka ketiga kategori tersebut, hampir sama dengan variabel kelas. Dari semua tingkat pendidikan, baik yang tidak melek huruf hingga yang berpendidikan tinggi menyatakan bahwa reformasi ekonomi menguntungkan hanya orang kaya, masing-masing lebih dari 40%. Sementara untuk kategori kondisi ekonomi dan peluang pekerjaan, dari masing-masing tingkat pendidikan menyatakan bahwa kondisi ekonomi sama dengan kondisi sebelumnya (lebih 50%) dan peluang pekerjaan memburuk (lebih dari 40%).

**Tabel 4.5. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Pekerjaan  
(Tahun 1999-2004)**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	N
<b><i>Economic reform benefited</i></b>								
<i>The whole country</i>	41	36	25	23	30	21	27	7418
<i>Only the rich</i>	36	42	43	45	45	48	41	11752
<i>No one has</i>	13	13	13	17	12	14	14	3818
<i>No opinion</i>	10	9	20	14	13	17	18	4121
<b><i>Economic conditions</i></b>								
<i>Deteriorated</i>	13	15	21	24	18	24	16	5157
<i>Remained same as before</i>	45	49	49	52	51	52	53	1386
<i>Improved</i>	39	34	27	22	29	21	27	7176
<i>No opinion</i>	3	2	3	3	3	4	5	917
<b><i>Employment opportunities</i></b>								
<i>Deteriorated</i>	45	46	42	47	37	39	40	11156
<i>Same as before</i>	27	30	26	26	28	25	26	7336
<i>Improved</i>	22	19	16	15	21	16	15	7624
<i>No opinion</i>	7	5	16	12	13	20	18	3995

Catatan: I=Professionals/officers, II=Employees, III=Traditional Services, IV=Worker, V=Farmers, VI=Agri workers, VII=Others N= sampel, semua dalam persen (%)

Sumber: Telah diolah kembali dari K.C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5404-5411.

Bila berdasarkan pekerjaan, maka pekerjaan professional/kantoran dan karyawan memberikan penilaian yang lebih tinggi bahwa reformasi ekonomi menguntungkan seluruh negeri India, masing-masing 41% dan 36%. Sementara lebih 40% dari beberapa jenis pekerjaan lainnya yang menyatakan bahwa reformasi ekonomi menguntungkan hanya orang kaya, yaitu; karyawan (42%); pekerjaan tradisional (43%); buruh (45%); petani (45%); pekerja pertanian (48%); atau pun pekerjaan lainnya (41%). Dari masing-masing jenis pekerjaan tersebut, memberikan penilaian yang hampir sama baik kondisi ekonomi dan peluang pekerjaan. Masing-masing menyatakan bahwa kondisi ekonomi sama dengan kondisi sebelumnya (di atas 50%), dan peluang pekerjaan memburuk (kurang lebih 40%). Keadaan ini tidak jauh berbeda bila dilihat dari variabel latar belakang desa/kota, berikut tabelnya.

**Tabel 4.6. Opini Pemilih pada Reformasi Ekonomi Berdasarkan Latar Belakang Desa/Kota (Tahun 1999-2004)**

<i>Economic Conditions</i>	<i>Rural</i>	<i>Urban</i>	<i>N</i>
<b><i>Economic reform benefited</i></b>			
<i>The whole country</i>	26	30	7419
<i>Only the rich</i>	43	44	11753
<i>No one has</i>	14	15	3819
<i>No opinion</i>	16	11	4122
<b><i>Economic conditions</i></b>			
<i>Deteriorated</i>	20	17	5156
<i>Remained same as before</i>	51	51	13861
<i>Improved</i>	26	29	7177
<i>No opinion</i>	4	3	917
<b><i>Employment opportunities</i></b>			
<i>Deteriorated</i>	39	51	11155
<i>Same as before</i>	27	27	7337
<i>Improved</i>	18	15	4624
<i>No opinion</i>	17	8	3995

Catatan: N= sampel, semua dalam persen (%)

Sumber: Telah diolah kembali dari K.C. Suri, "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 51, 2004, hlm. 5404-5411.

Berdasarkan tabel di atas, baik masyarakat perkotaan dan pedesaan menyatakan bahwa reformasi ekonomi menguntungkan hanya orang kaya, masing-masing desa 43% dan kota 44%. Untuk kondisi ekonomi, keduanya menyatakan bahwa kondisi ekonomi sama dengan kondisi sebelumnya, yaitu 51%. Begitu pula dengan peluang kesempatan kerja, masyarakat perkotaan memberikan penilaian yang lebih tinggi (51%) dibandingkan masyarakat pedesaan (39%) bahwa peluang kerja memburuk.

Perubahan perilaku pemilih India mempengaruhi para pemimpin-pemimpin dan partai-partai dalam membangun dukungan pemilih. Pada tahun-tahun sebelum kesadaran politik pemilih India berkembang seperti tahun-tahun belakangan ini, para pemilih sering memilih berdasarkan identitas mereka terhadap suatu partai atau pemimpin partai tersebut. Sebagian besar pemilih mendasarkan pada kasta, agama, bahasa atau daerah. Hingga sekarang, sistem kasta masih dikatakan berpengaruh bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka, meskipun sistem kasta mulai berkurang karena adanya urbanisasi atau

imigrasi. Berdasarkan perkembangan atau perubahan perilaku pemilih, di samping identitas-identitas sosial tersebut, maka pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar mereka menjadi pertimbangan atau isu yang penting bagi pemilih pada masa pemilu India atau dengan kata lain perubahan dari pemilih yang tradisional menjadi pemilih yang rasional.

## **4.2 Kebijakan Partai BJP Yang Eksklusif**

Pemerintahan NDA yang dipimpin oleh partai BJP berhasil memimpin India selama lima tahun. Sejak tahun 1990-an, ekonomi India mengalami pertumbuhan yang cepat. Cepatnya pertumbuhan ekonomi tersebut membuat negara India menjadi salah satu kekuatan yang dipertimbangkan di komunitas Internasional. Prestasi India di bawah pemerintahan BJP tersebut ternyata kurang mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakatnya. Kebijakan-kebijakan yang kurang menguntungkan sebagian besar kelompok masyarakat India membuat popularitas partai ini menurun. Berikut akan dijelaskan beberapa kebijakan pemerintahan BJP yang bersifat eksklusif, baik di bidang ekonomi maupun bidang politik dan sosial.

### **4.2.1 Slogan Kampanye *India Shining* dan Kebijakan-Kebijakan Partai BJP yang *Pro-Rich***

Aliansi NDA yang dipimpin oleh partai BJP mampu bertahan berkuasa selama lima tahun, walaupun pemilu enam bulan dipercepat dari jadwal sebenarnya. Di antara beberapa tujuan utamanya, partai BJP berjanji untuk melanjutkan reformasi ekonomi yang telah dimulai oleh partai Congress pada tahun 1990-an. Dalam Reformasi ekonomi ini, kebijakan-kebijakan ekonomi yang liberal pun diprakarsai. Salah satu yang menarik dari diprakarsainya reformasi ekonomi tersebut adalah munculnya kelas menengah India yang baru dalam India kontemporer. Menurut Leela Fernandes, munculnya kelas menengah India yang baru ini, sebenarnya tidak sesederhana yang didefinisikan oleh globalisasi

kontemporer. Menurutnya, perkembangan kelas menengah baru ini dapat ditandai dalam lintasan sejarah yang panjang, yaitu sejak masa kolonial India masa lalu.<sup>192</sup>

Pada masa kolonial India, ada tiga karakteristik utama yang menandai munculnya kelas menengah ini. *Pertama*, para elite kelas menengah tersebut memiliki jenis sumber daya sosioekonomi yang istimewa, misalnya kemampuan mengakses pendidikan yang berbahasa Inggris. *Kedua*, para elite kelas menengah memiliki tuntutan politik yang mewakili kepentingan publik secara umum, misalnya tuntutan yang melawan pemerintah kolonial. *Ketiga*, tuntutan perwakilan para elite kelas menengah tersebut berlanjut pada pengidentifikasian aliran politik, baik berbeda dari pemerintah kolonial sekaligus dengan kelompok masyarakat lainnya.<sup>193</sup>

Menurut Thomas Macauley, munculnya kelas menengah pada masa kolonial berhubungan dengan perkembangan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintahan kolonial Inggris.<sup>194</sup> Menurutnya, kebijakan pendidikan tersebut dibuat dengan bercita rasa Inggris namun dikerjakan oleh orang-orang India. Tujuan dari kebijakan pendidikan tersebut adalah untuk membantu berjalannya administrasi kolonial Inggris di India. Kesempatan yang tersedia untuk bekerja di pemerintahan kolonial Inggris terbatas. Lagi pula, untuk bisa mendapatkan kesempatan tersebut mereka yang berkeinginan terlibat harus orang yang berpendidikan. Kesempatan bekerja di pemerintahan kolonial Inggris ini digambarkan sebagai bentuk pekerjaan profesional yang modern. Melalui kebijakan-kebijakan pendidikan itu pula, umumnya pendidikan yang dikembangkan pemerintah kolonial Inggris, maka kelas menengah India memiliki keterhubungan dengan negara. Pada abad ke-19, kelas menengah India pun berkembang karena institusi-institusi pendidikan berbahasa Inggris di India meningkat.

Pendidikan masih merupakan arena sentral munculnya kelas menengah di India. Pada perkembangan selanjutnya, melalui dinamika proses politik,

<sup>192</sup> Leela Fernandes, *India's New Middle Class: Democratic Politics in An Era of Economic Reform* (Ninneapolis: University of Minnesota Press, 2006), hlm. 1.

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 3. Thomas Macauley adalah seorang administrator kolonial yang mengabdikan di Dewan Agung India pada 1835-1838 dan membela orang-orang yang berpendidikan berbahasa Inggris di India.

kelompok kelas menengah yang berpendidikan secara aktif membuat tuntutan-tuntutan terhadap negara dan institusi negara. Tuntutan-tuntutan tersebut sebagian besar berkaitan dengan kepentingan ekonomi, khususnya tuntutan pada pembangunan perkotaan. Sementara para pejabat negara, dalam hal ini politisi, yang mengkonsolidasikan kekuasaan dari kelompok tersebut, berusaha melindungi dan memperluas basis sosial kelompok kelas menengah.<sup>195</sup> Hubungan antara negara dan kelas menengah berada pada hubungan yang ketergantungan. Dengan demikian, munculnya kelas menengah di India merupakan produk dari model pembangunan yang dikelola oleh negara. Salah satu contoh pembangunan ekonomi yang dikelola negara adalah kebijakan reformasi ekonomi yang mulai diperkenalkan pemerintah pada tahun 1990-an. Maka, bila berdasarkan pendapat Leela Fernandes tersebut, maka baik pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan setelah kemerdekaan India, maka pendidikan adalah arena sentral yang menjadi latar belakang munculnya kelas menengah di India. Dengan kata lain, kelas menengah yang berpendidikan.

Kebijakan reformasi ekonomi yang diprakarsai oleh partai Congress, pada masa pemerintahan Rao kemudian dilanjutkan partai BJP sejak tahun 1999 hingga 2004. Partai BJP menilai bahwa di bawah pemerintahannya, perekonomian India bertumbuh dengan baik. Selain itu, partai BJP juga menilai bahwa partainya telah berhasil menghadirkan prestasi-prestasi lainnya bagi negara India. Oleh karena itu, partai BJP menggunakan *India Shining* atau India Bersinar sebagai slogan kampanyenya untuk menggambarkan prestasi-prestasi yang telah diberikan BJP sejak berkuasa tahun 1999. Slogan kampanye tersebut ditampilkan dengan media yang mewah dan mahal dan telah disiarkan di seluruh televisi India. Kampanye tersebut diudarakan sebanyak 9.472 kali.<sup>196</sup> Diperkirakan biaya untuk mengudarakan slogan kampanye tersebut, baik dalam bentuk media print dan elektronik dalam semua bahasa di India, sebanyak AS\$20 juta atau Rs 4,5 milyar. Yang menjadi pesan pokok dari kampanye tersebut menggambarkan bahwa India

<sup>195</sup> *Ibid.*, hlm 22.

<sup>196</sup> Ayantani Satpathi, "The Impact of The Electronic Media on The Modern India Voter: A Study of The Post Liberalization Era," *Global Media Journal*, Edisi India, Musim Panas, Juni 2011, hlm. 9.

belum pernah memiliki keadaan yang begitu baik sebelumnya di bawah pemerintahan BJP.<sup>197</sup>

Prestasi baik yang dinyatakan partai BJP melalui kampanye tersebut tentunya ditunjukkan dengan beberapa indikator. *Pertama*, indikator makroekonomi yang dinyatakan menjadi ekonomi besar dengan tingkat pertumbuhan GDP pada tahun 2003-2004 mencapai 8,2%. *Kedua*, pertumbuhan eskport yang sehat mencapai 20%. *Ketiga*, cadangan kurs asing mencapai \$ 110 milyar yang belum pernah terjadi sebelumnya. *Keempat*, cadangan makanan yang banyak mencapai 32 juta ton. *Kelima*, tingkat inflasi yang rendah. *Keenam*, sektor industri dan, khususnya, sektor jasa sejalan dengan pertumbuhan GDP. Dalam tehnologi informasi, India terus menunjukkan ketetapan kehebatannya dalam panggung dunia, bentuk-bentuk ekspor baru bertumbuh dengan cepat dalam bidang otomotif dan farmasi. Melimpahnya investasi portfolio menunjukkan kepercayaan dalam ekonomi India yang hebat. Singkatnya, iklan kampanye tersebut menekankan bahwa kemakmuran dan kekuatan India berada dalam keadaan yang lebih baik ketika dipimpin partai BJP dibandingkan sebelumnya.<sup>198</sup>

Terkesan dengan perkembangan ekonomi India, pemerintah India dengan percaya diri memutuskan untuk menolak bantuan asing kecuali dari yang memiliki kekuatan besar. Pada sisi yang lain, pemerintah yang merestruktur sektor industrinya, pada 2002 menunjukkan posisi yang lebih kuat. Keadaan ini berbeda pada tahun 1997 di mana India terancam dengan dibanjiri barang-barang impor murah dari Cina dan dibanjiri perusahaan-perusahaan multinasional asing. Dalam kampanye 'India Shining' tersebut juga ditambahkan bahwa India tidak lagi takut terhadap globalisasi dan India memiliki jaminan sendiri. Sikap ini kemudian meluas kepada kelas-kelas menengah, yang secara terus-menerus pembelanjaan ekonominya meningkat pada tingkat 6% atau lebih. Konsisten dengan kepercayaan tersebut, pemerintah BJP yang berbeda dengan pemerintahan proteksionis sebelumnya, bergerak dengan cepat untuk mempercepat pengintegrasian India dengan ekonomi dunia. Pada awal Januari 2004, India memotong tarik impor dari 25% menjadi 20% dan menghapuskan kewajiban

<sup>197</sup> Baldev Raj Nayar, *op.cit.*, hlm. 72.

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

tambahan khusus 4%. Kebiasaan reformasi ekonomi dan secara agresif mengejar privatisasi sektor publik, India berusaha menyetujui area perdagangan bebas dengan ASEAN.<sup>199</sup>

Dengan 'India Shining' tersebut, BJP berniat untuk menyampaikan perasaan optimisme nasional yang muncul dari prestasi-prestasi pemerintah di semua arena, dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan jalan-jalan raya yang modern dan perolehan secara internasional yang meningkat. Kelas-kelas menengah di India mendapatkan keuntungan yang lebih besar, India telah mencapai politik internasional, munculnya kekuatan militer India, keberhasilan professional-profesional *software* India secara global dan perusahaan-perusahaan lainnya.<sup>200</sup> Perasaan optimis partai BJP ini telah dipersiapkan partai BJP menjelang Pemilu 2004, seperti yang dapat dilihat dari kutipan presiden partai BJP berikut ini:

*"Today, as we begin preparations for the next Lok Sabha election, I can proudly claim that we have succeeded in unleashing the potential of India. After 50 years of despair and wasted opportunities, India has recovered its bearings. It has rediscovered its soul. Its energies have been harnessed. In ancient times, India was the vishwa guru, the world leader, at the cutting edge of the sciences, the arts and a trading centre of the world. We lost that position. We lost our freedom and our self-confidence. We moved into the Dark Ages. We lowered our sights. Today, we have set the stage to reclaim our rightful inheritance. We have set our goals and we have set them high. India must become a developed country by 2020. India must become an economic superpower. India must once again be jagat guru. Under the leadership of Shri Vajpayee, India is geared to making this leap forward. The NDA Government has created the environment for India to harness its creative energies. The Prime Minister has shown the way in discarding a negative mindset and the culture of cynicism. Vajpayee ji has shown us that our dreams are for real. Vajpayee ji has told us that we cannot be second-best. He has inspired us to think big. Vajpayee ji has made it proud to be made in India. The country's image has brightened and its standing has risen significantly in the international comity. Before the 1998 Parliamentary elections, we had described Shri Atal Bihari Vajpayee as "The Man India Awaits". Today we can proudly say that he is "The Statesman India Adores and the World Admires". Today, we can see and feel the change in the mood of the country. The*

<sup>199</sup> *Ibid.*

<sup>200</sup> Arun R. Swamy, *op.cit.*, hlm. 3.

*seeds we planted some six years are gradually beginning to yield fruit. The development process in India is visible and being felt.*"<sup>201</sup>

"Hari ini, sambil kita mulai persiapan untuk pemilu Lok Sabha berikutnya, saya dapat dengan bangga menyatakan bahwa kita telah berhasil dalam menyingkapkan potensi India. Setelah 50 tahun kehilangan harapan dan membuang kesempatan-kesempatan, India telah memulihkan tujuannya. India telah menemukan kembali jiwanya. Energy-energinya telah dipergunakan. Pada masa purbakala, India adalah vishwa guru, pemimpin dunia, memulai pengetahuan, seni dan pusat perdagangan dunia. Kita kehilangan posisi tersebut. Kita kehilangan kemerdekaan dan kepercayaan diri sendiri kita. Kita bergerak ke dalam Zaman Kegelapan. Kita menurunkan penglihatan kita. Hari ini, kita telah menyusun panggung untuk memperoleh kembali warisan sejati kita. Kita telah menyusun tujuan-tujuan kita dan kita membuatnya tinggi. India harus menjadi Negara berkembang pada tahun 2020. India harus menjadi ekonomi superpower. India sekali lagi harus menjadi jagat guru. Di bawah kepemimpinan Tuan Vajpayee, India dimajukan. Pemerintahan NDA telah menciptakan lingkungan untuk memanfaatkan energi-energi kreatifnya. Perdana Menteri telah menunjukkan cara membuang pola pikir yang negative dan budaya sinisisme. Tuan Vajpayee telah menunjukkan kepada kita bahwa impian-impian kita adalah untuk nyata. Tuan Vajpayee telah memberitahu kita bahwa kita tidak bisa menjadi terbaik kedua. Dia telah menginspirasi kita untuk berpikir besar. Tuan Vajpayee telah membuatnya bangga dibuat di India. Citra negara menjadi terang dan posisinya secara signifikan meningkat dalam komunitas internasional. Sebelum Pemilu Lok Sabha 1998, kita telah menggambarkan tuan Atal Behari Vajpayee sebagai "Menantikan Orang India". Hari ini kita dapat berbangga mengatakan bahwa dia adalah "negarawan yang dipuja India dan dikagumi dunia". Hari ini, kita dapat melihat dan merasakan perubahan dalam suasana negara. Benih yang kita tanam selama 6 tahun secara berangsur-angsur mulai menghasilkan buah. Proses pembangunan di India dapat dilihat dan dirasakan."

Menurut Zoya Hasan, penggunaan *India Shining* dalam tema kampanyenya menunjukkan bahwa isu utama bagi partai BJP adalah kemajuan dan kemakmuran serta menjelmakan India ke dalam kekuatan besar menjelang tahun 2020. BJP yakin bahwa selama kelas atas dan menengah kaya dan bahagia, populasi India lainnya tidaklah masalah. Bagi BJP, penggunaan Sensex menjadi parameter dalam menilai keberhasilan dan kemakmuran India. Akan tetapi realitas

<sup>201</sup> Pidato Presiden partai BJP, M. Venkiah Naidu, pada pertemuan Dewan Nasional BJP 6 Februari 2004. Diakses dari [http://www.bjp.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6276&catid=69:speeches&Itemid=495](http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6276&catid=69:speeches&Itemid=495).

sosial menunjukkan bahwa kemakmuran hanya dinikmati oleh 20% populasi India yang berkelas menengah dan atas, sementara sisa berada dalam keadaan tanpa harapan. Semua keadaan ini mencapai puncak dalam membentuk kemarahan masyarakat populer melawan pendirian pemerintah dan faktor 'Feel Good' sehingga menjadi sebuah pertunjukan kegagalan bagi BJP.<sup>202</sup> Secara keseluruhan kampanye India Bersinar/*India Shinning* memiliki pengaruh sebagian besar bagi masyarakat kelas atas dan menengah. Kebijakan-kebijakan ekonomi neo-liberal yang diimplementasikan selama satu dekade hanya menguntungkan aliansi dominan dari kelas-kelas pemerintah di India dan berkontribusi memperbesar kesengsaraan massa, pengangguran, perbedaan regional, perbedaan pendapatan kelas dan krisis pertanian yang mengarah pada tindakan bunuh diri oleh petani.<sup>203</sup> Oleh Hasan, model pembangunan BJP ini disebut dengan model eksklusifisme. Berbeda dengan model yang dipilih Congress, Kiri dan Sosialis yang bersifat inklusifisme, yang menawarkan demokrasi, sekulerisme dan keadilan sosial.

Pada umumnya, globalisasi yang melanda Asia Selatan, khususnya India, berpusat pada integrasi pasar tanpa memperbaiki kondisi mayoritas masyarakat Asia Selatan. Integrasi ekonomi yang lebih besar belum diterjemahkan ke dalam pemeliharaan pertumbuhan untuk mayoritas negara-negara di Asia Selatan walaupun pengaruh reformasi struktural pertumbuhan ekonomi pada umumnya adalah positif, setidaknya-tidaknya India telah dicatat pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebagian besar pengaruh globalisasi di Asia Selatan telah membuat harga lebih tinggi, kesempatan pekerjaan yang lebih sedikit, meningkatnya perbedaan dalam pendapatan dan timbulnya kemiskinan lebih tinggi. Untuk kasus India, anggaran keuangan India pada tahun 2003-2004 termasuk potongan pajak substansial dari kelas menengah, basis pendukung koalisi BJP, sebagaimana juga pebisnis, tetapi sedikit untuk orang miskin. Sementara 34,7% populasi India hidup dengan pendapatan kurang lebih \$1 perhari, 24% kurang makan dan 42% populasi India tidak dapat membaca atau menulis. Globalisasi telah berkontribusi kepada

<sup>202</sup> Maidul Islam, *op.cit.*, hlm. 5.

<sup>203</sup> Utsa Patnaik, "Progressive Nationalism Fascist Chauvinism", dalam K.N. Panikar dan Sukumar Muralidharan (ed.), *Communalism, Civil Society & The State: Reflections On A Decade of Turbulance* (New Delhi: SAHMAT, 2002), hlm. 42.

munculnya nasionalisme budaya Hindu yang didukung oleh BJP. Nasionalisme Hindu mungkin dapat dilihat sebagai kelas menengah, proyek kelas tinggi dari homogenisasi budaya.<sup>204</sup> Oleh karena itu, Pemilu 2004 bagi BJP adalah respon sosio-politik masyarakat terhadap reformasi ekonomi yang dibangga-banggakan BJP.

Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan partai BJP ternyata belum memberikan kontribusi yang sama rata keseluruh masyarakatnya. Oleh karena itulah, partai Congress yang berhasil menghidupkan kembali dan memproyeksikan model pembangunan yang pluralisme mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat yang belum menikmati pertumbuhan ekonomi yang diklaim oleh BJP.<sup>205</sup> Dalam manifesto Pemilu 2004, meskipun demikian, agenda yang ditawarkan atau ingin dicapai BJP tidak jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan atau ingin dicapai partai Congress, yaitu BJP menawarkan Revolusi Hijau Kedua. Partai Congress telah memperkenalkan revolusi hijau tersebut pada tahun 1960-an, dan kembali ditekankan pada pemilu 2004 yang lalu. Sebagaimana partai Congress mengangkat isu-isu pertanian dan kaum miskin pedesaan, maka sulit mengatakan bahwa partai BJP mengabaikan isu itu juga.

Kesamaan isu yang ditawarkan kedua partai ini, dibenarkan oleh Arvind Panagiriya. Menurutnya, kedua partai tersebut, baik partai BJP dan Congress, sama-sama mengangkat isu pertanian dan kaum miskin pedesaan. Akan tetapi, yang membedakan kedua partai tersebut, menurut Arvind Panagiriya, bukan pada isi manifesto pemilu, khususnya pertanian dan kaum miskin pedesaan, tetapi lebih kepada isu yang mendapatkan perhatian atau penekanan yang terbaik, dari masing-masing partai tersebut.<sup>206</sup> Dengan kata lain, meskipun menawarkan program-program atau janji-janji yang sama, pasti masing-masing partai memiliki isu yang paling dibanggakan atau yang diunggulkan dibanding isu lainnya. Hal inilah yang akan dapat dibedakan kedua partai tersebut.

Secara garis besar, kedua partai ini memang mempromosikan isu pertanian dan kaum miskin pedesaan dalam kampanye-kampanye politiknya. Akan tetapi,

<sup>204</sup> Giorgio Shani, *op.cit.*, hlm. 45-47.

<sup>205</sup> Zoya Hasan, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>206</sup> Arvind Panagiriya, "Vote Against Reforms?," *Economic and Political Weekly*, Vol. 39, No. 21, Mei 2004, hlm. 2080.

bila dibandingkan dalam manifesto pemilu atau pun dalam kampanye-kampanye politiknya, partai Congress memberikan penekanan yang lebih besar pada bidang ini bila dibandingkan dengan partai BJP. Untuk manifesto partai Congress mengenai hal ini, telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Partai BJP, walaupun menyebutkan isu pertanian di dalam manifesto atau kampanye-kampanye Pemilu 2004, isu ini mendapatkan penjelasan yang sedikit dari sebagian besar isu-isu lainnya yang diangkatnya partai tersebut, berikut kutipannya:

*“Major steps have been taken for addressing the long-neglected needs of agriculture. Agricultural credit has been nearly trebled and over 3.5 crore farmers have been given Kisen Credit Cards. Interest rates have been significantly lowered. Minimum Support Prices for over 25 crops have been raised every year. An innovative Farm Income Insurance Scheme has been introduced.”*<sup>207</sup>

“Langkah-langkah besar telah diambil terhadap kebutuhan-kebutuhan pertanian yang lama diabaikan. Kredit pertanian hampir dilipatgandakan dan lebih 35 juta petani telah diberikan Kartu Kredit Kisen, Suku bunga secara signifikan diturunkan. Harga Sokongan Minimum untuk 25 lebih jenis tanaman panen telah ditingkatkan setiap tahun. Sebuah inovatif Rencana Asuransi Pendapatan Petani telah diperkenalkan.”

Secara keseluruhan, manifesto pemilu partai BJP tersebut menguraikan tentang prestasi-prestasi yang sudah dicapai dan berjanji akan meneruskan prestasi yang sudah dicapainya, misalnya penguatan keamanan nasional, perlawanan terorisme yang lintas batas, memperkuat persatuan nasional, penataan India menjadi bagian dari pertumbuhan sosial ekonomi yang tinggi, meningkatkan citra India dan berdiri di depan masyarakat internasional yang telah menciptakan sentakan kebanggaan dan harapan nasional.<sup>208</sup> Selanjutnya, partai tersebut juga menekankan tentang keberhasilannya dalam teknologi informasi (IT) dan sektor industri yang telah hadir dalam persaingan global. Penekanan partai BJP terhadap prestasi dalam negeri selalu dikaitkan dengan kemampuannya untuk hadir di tengah dunia atau masyarakat Internasional. Dengan demikian, sebagaimana yang dinyatakan Panagiriya, bahwa yang membedakan kedua partai tersebut pada Pemilu 2004 adalah isu apa yang menjadi perhatian atau penekanan terbaik mereka (*the best of emphasis*). Partai Congress yang lebih memperhatikan sektor

<sup>207</sup> M. S. Rana, *India Votes: Lok Sabha & Vidhan Sabha Elections 2001-2005* (New Delhi: Sarup & Sons, 2006), hlm. 525.

<sup>208</sup> *Ibid.*

pertanian dan kaum miskin pedesaan, yang dianggap oleh partai Congress belum menikmati seperti yang dinilai partai BJP dalam kampanye *India Shining*-nya. Sementara partai BJP lebih menekankan pada pengaruh reformasi ekonomi atau globalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi India. Berikut kutipan dari manifesto pemilu partai yang memperlihatkan perhatian utama dari masing-masing partai.

Partai BJP yang menekankan perhatiannya pada globalisasi menyatakan:

*“In a short time, India has emerged as a leading power in Information Technology. In a short time, our manufacturing sector has restructured itself and become globally competitive. Individual Indians have always scripted success stories in India and overseas; now India as a whole is big news. Today, India stands tall in the international community. Its voice is heard and respected. Our people are finding fresh recognition and new audiences.”*<sup>209</sup>

“Dalam jangka pendek, India telah muncul sebagai kekuatan yang memimpin dalam teknologi informasi. Dalam jangka pendek, sektor industri kami telah mengatur dirinya sendiri dan menjadi kompetitif secara global. Masyarakat India selalu menuliskan cerita-cerita sukses di India dan di luar negeri; sekarang India secara keseluruhan adalah berita besar. Hari ini, India berdiri tinggi dikomunitas internasional. Suaranya didengar dan dihargai. Masyarakat kami menemukan pengenalan dan penonton yang baru.”

Sementara partai Congress yang lebih menekankan perhatiannya pada sektor pertanian dan kaum miskin pedesaan, menyatakan:

*“Congress policies have always been anchored in a vision of an economically prosperous, socially just, politically united and culturally harmonious India. These policies have never been reduced by rote to a mindless doctrine or empty dogma or simplistic mantra. The Congress has always created space for change. It has always been pragmatic. It has always been ready to respond to new challenges... The Congress’s six basics for governance: Samajik Sadbhavna (social cohesion and harmony), Yuva Rozgar (accelerate growth of productive and secure employment opportunities), Grameen Vikas (improve income and welfare), Arthik Navotthan (unleash the creative energies of professional and entrepreneurs), Mahila Sashaktikaran (political empowerment and full education), Saman Avsar (equality of opportunity in every way). These six priorities constitute the foundation of all policies of the Congress. The Congress has consistently maintained that liberalization and globalization can be meaningful only if they are aimed at local-level economic and social transformation that directly benefits the poor in rural and urban*

<sup>209</sup> *Ibid.*

*India, bringing prosperity to the 6 laks-odd villages of India and improving the living conditions of the urban poor.*<sup>210</sup>

“Kebijakan-kebijakan Congress selalu ditujukan dalam sebuah visi akan kemakmuran secara ekonomi, keadilan sosial, persatuan secara politis dan India secara budaya harmonis. Kebijakan-kebijakan ini tidak pernah dikurangi oleh tanpa berpikir kepada sebuah doktrin tanpa pertimbangan atau dogma kosong atau mantra simplistik. Congress selalu menciptakan ruang untuk perubahan. Congress selalu pragmatis. Congress selalu siap merespon tantangan-tantangan baru. Enam dasar Congress memerintah, keterpaduan dan keharmonisan sosial, percepatan pertumbuhan produksi dan menjamin kesempatan-kesempatan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, mendukung kreatifitas para professional dan pengusaha, dan persemaan dalam setiap kesempatan. Keenam prinsip ini menyusun fondasi dari semua kebijakan-kebijakan partai Congress. Congress secara konsisten telah memelihara bahwa liberalisasi dan globalisasi dapat berarti hanya jika hal tersebut ditujukan untuk ekonomi tingkat lokal dan transformasi sosial yang secara tidak langsung menguntungkan masyarakat miskin di desa-desa dan kota-kota India, membawa kemakmuran kepada enam puluh juta penduduk India dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat kota yang miskin.”

Pemerintahan BJP secara penuh bertaut pada pembangunan sayap kanan dengan menjelmakan ekonomi India pada bentuk neoliberal, didominasi oleh pengusaha besar India dan modal uang asing. Untuk pertama kali India, partai yang memerintah secara terbuka merayakan ide orang kaya menjadi super kaya. Kebijakan-kebijakan neoliberal dengan menekankan pada privatisasi menjadi tanda resmi pemerintahan Vajpayee. Dalam pemerintahannya, BJP telah menjual aset-aset sektor publik dengan mencapai total lebih dari Rs 330 M. kebijakan-kebijakan neoliberal tersebut menghasilkan deflasi secara besar-besaran, misalnya pengurangan secara sistematis pembelanjaan publik mengarah pada jatuhnya permintaan dalam ekonomi. Ratio GDP jatuh karena pemotongan tariff dan kelonggaran pajak bagi orang kaya dan sektor-sektor perusahaan; bunga kredit naik dan meningkatnya defisit keuangan. Cadangan uang asing yang besar dan kapasitas industri tidak bermanfaat. Hal ini mengarah pada pemotongan pembelanjaan oleh Pusat dan pemerintah negara bagian dipaksa untuk menuruti. Pemotongan ini dibuat pada pembelanjaan sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, investasi dan pengeluaran perkembangan pedesaan dan pemotongan

<sup>210</sup> *Ibid.*, hlm. 515-516.

subsidi-subsidi untuk sektor-sektor yang lebih miskin. Kurangnya kesempatan-kesempatan kerja, pengurangan dalam sistem distribusi publik, keburukan dalam sektor pendidikan dan sistem kesehatan dan penurunan yang tajam dalam kemampuan daya beli orang-orang miskin pedesaan.<sup>211</sup>

Dalam hal ini telah terjadi ribuan petani yang melakukan bunuh diri karena kesukaran pedesaan, jutaan orang muda tidak bekerja dan tutupnya industri skala kecil dalam ukuran yang besar dan rusaknya kehidupan yang terkait dengan industri-industri tradisional. BJP membuat kesalahan fatal dalam mengasumsikan keberhasilan kebijakan-kebijakan ekonomi mereka. Selama pemerintahan BJP, sejumlah rumah tangga dengan pendapatan di atas Rs 1 juta per tahun menjadi Rs 800 ribu.<sup>212</sup> Dengan kondisi ini, pada satu sisi, orang kaya menjadi lebih kaya dengan super kaya mendapatkan lebih banyak hadiah. Di sisi lain, kesusahan pedesaan, kematian orang lapar, bunuh diri petani dan pengangguran massa yang memperkuat nasib pemilu BJP.

Lebih jelas lagi, Arun R. Swamy menambahkan bahwa pertumbuhan tingkat GDP yang dibangga-banggakan BJP dari 8-10%, kenyataannya lebih lambat dibandingkan enam tahun sebelumnya, sebagian besar di bawah pemerintahan Congress. bahkan lebih rendah daripada rata-rata tingkat pertumbuhan 5,5% perolehan partai Congress pada tahun 1980-an. Lebih lagi, pertanian, di mana lebih 60% dari pekerjaan populasi India, berjalan dengan kurang baik dalam beberapa tahun di bawah pemerintahan BJP. Dalam perpabrikasi juga tidak menunjukkan keadaan yang lebih baik. Akhir tahun 2000 hampir setengah penghasilan India adalah dari sektor pelayanan jasa, tidak seperti penghasilan Cina yang setengah dari perpabrikasi.<sup>213</sup>

Pertumbuhan yang rendah dalam sektor pertanian berkontribusi pada meningkatnya tingkat pengangguran, tidak hanya selama pemerintahan BJP, bahkan sejak reformasi dimulai sejak awal 1990-an. Yang membuat keadaan memburuk bagi orang miskin adalah pemotongan pengeluaran sosial dan terutama sekali dalam subsidi makanan. Walaupun tingkat kemiskinan telah berkurang,

<sup>211</sup> Prakash Karat, "The Current Political Situation and the Party's Tasks," *The Marxist*, Vol. XXI, No. 4, 2006, hlm. 2.

<sup>212</sup> *Ibid.*

<sup>213</sup> Arun R. Swamy, *op.cit.*, hlm. 5.

banyak orang miskin mungkin semakin lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Selama pemerintahan NDA, pemerintahan juga secara lambat memotong jaminan harga bagi petani adan subsidi-subsidi bagi orang miskin, sementara tariff listrik yang semakin meningkat bagi petani. Berbeda dengan partai Congress yang selama kampanye Pemilu 2004 fokus pada kebutuhan investasi sosial dan sektor pertanian dalam kebijakan ekonomi. Hal ini membantu partai memobilisasi pemilih tradisionalnya di antara yang miskin dan memenangkan dukungan petani-petani.

#### **4.2.2 Kebijakan Partai BJP Untuk Meningkatkan Penerapan Agenda Hindutva**

Partai BJP yang merupakan partai Hindu Nasionalis, sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dalam perpolitikan India. Meskipun partai ini secara resmi muncul dalam perpolitikan India pada abad ke-19. Sejarah panjang partai ini dapat ditelusuri balik pada tahun 1890-an. Bila melihat tahun tersebut, maka dalam rentang waktu sejarah India, tahun tersebut merupakan munculnya organisasi atau gerakan kemerdekaan India yang melawan pemerintahan kolonial Inggris, yaitu Partai Congress yang sangat terkenal pada 1885. Bila partai Congress adalah partai yang menyuarakan pembelaan untuk munculnya pemerintahan India demokratis dan sekuler, maka kelompok sayap Hindu ini, dengan Bal Gangadhar Tilak, seorang militansi Hindu, sebagai tokoh utama, menyuarakan pembelaannya bahwa Hinduisme sebagai esensi dari identitas nasional India.<sup>214</sup> Dengan demikian, maka yang menjadi oposisi utama partai Congress sebenarnya bukanlah partai-partai Kiri, tetapi dari kelompok sayap Hindu.

Sebagaimana partai Congress mencari dukungan massa, maka Tilak pun melakukan tindakan yang sama yaitu mencari dukungan dari kelompok massa. Dalam mencari dukungan tersebut, ia sering mengordinasikan penyelenggaraan pesta-pesta tahunan untuk menghormati dewa Hindu, yaitu *Ganapati* atau Ganesha. Perbedaannya dengan golongan nasionalis partai Congress dalam mencari dukungan, Tilak beserta pengikutnya menyakini akan penggunaan kekerasan. Hal inilah yang membuat Tilak dipenjarakan oleh pemerintahan kolonial Inggris. Kelompok ini kemudian dilanjutkan oleh Vinayak Damodar

<sup>214</sup> Burton Stein, *A History of India* (West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010), hlm. 409-410.

Savarkar. Ia memiliki nasib yang sama dengan Tilak, yaitu dipenjara dalam waktu lama karena pandangannya yang sangat ekstrim. Ketika ia dipenjara, ia menulis tulisan pada tahun 1923, yang kemudian dikenal sebagai manifesto untuk kelompok Sayap Hindu, yaitu *Hindutva: Who is a Hindu?* Di mana sebelumnya ia terlibat dalam pembentukan organisasi Mahasabha Hindu pada 1915. Setelah terbentuknya Mahasabha Hindu, dibentuk pula RSS (*Rashtriya Swayamsevak Sangs*, selanjutnya disebut RSS) pada 1925. Organisasi ini mendapatkan dukungan dari kasta-kasta Brahmana dan kasta tinggi lainnya dengan ideologi militansi Hindu. Akan tetapi, setelah terbunuhnya Gandhi oleh kelompok Hindu yang ekstrim ini, nasionalisme Hindu mulai dideskreditkan dan RSS dilarang untuk sementara di India. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Mahasabha Hindu dan RSS kehadirannya hanyalah seperti bayangan dalam kehidupan politik India. Akan tetapi berlanjutnya konflik dengan Pakistan, yang identik dengan Islam, dan adanya ketidaksesuaian antara partai Congress dan partai-partai Kiri pada tahun 1970-an, memberikan kesempatan kepada kelompok sayap Hindu untuk meningkatkan kekuatannya.

RSS yang dikenal dengan Korps Relawan Nasional memiliki banyak sayap, sayap pertamanya adalah *Rashtriya Sevika Samiti* atau Organisasi Wanita India yang dibentuk pada 1936. Organisasi ciptaan RSS yang paling terkenal adalah *Vishwa Hindu Parisad* yang dibentuk pada 1964 dan dalam politik adalah Partai Bharatiya Janata yang merupakan reinkarnasi partai Bharatiya Jana Sangs. Sehingga walaupun resmi dibentuk pada tahun 1980, partai BJP sudah memiliki akar sejarah yang lama dalam politik India. Menurut Christophe Jaffrelot, walaupun pada tahun 1920-an telah muncul bentuk konkret dari paham Hindu nasionalisme, maka pada abad kesembilanbelaslah bentuk konkret ini mulai memiliki pengaruh yang besar, misalnya partai BJP.<sup>215</sup>

Anggota RSS yang pertama memegang kekuasaan politik di pusat adalah Atal Behari Vajpayee dan Lal Krishnan Advani ketika saat itu Jana Sangh menjadi bagian dari koalisi Partai Janata pada Pemilu 1977. Kedua tokoh ini kemudian menjadi orang penting dalam partai BJP, Atal Behari Vajpayee menjadi Perdana Menteri India dan L.K. Advani menjadi wakilnya pada tahun 1999-2004.

<sup>215</sup> Christophe Jaffrelot, *op.cit.*, hlm. 1.

Pengalaman selama di pemerintahan tersebut menyakinkan Vajpayee sekaligus Advani bahwa partai Hindu Nasionalis dapat menjadi kekuatan politik yang aktif dan menjadi partai oposisi utama di India. Awal BJP di bawah dipimpinan Vajpayee, secara strategis ia memandang bahwa BJP dapat menjadi alternatif terhadap partai Congress.<sup>216</sup>

Pada tahun 1990-an, gerakan nasionalisme Hindu di India mulai memonopoli di halaman depan surat kabar-surat kabar India, ketika partai politik mewakilinya dalam arena politik, khususnya partai BJP. Bermula dengan 2 kursi pada Pemilu 1984, BJP meningkatkan angkanya menjadi 88 kursi pada Pemilu 1989, 122 kursi pada Pemilu 1991, 161 kursi pada Pemilu 1996, 182 kursi pada Pemilu 1998, dan mendapatkan 182 pada Pemilu 1999. Untuk pertama kali dalam sejarah India, partai yang beraliran nasionalisme Hindu mengambil alih kekuasaan pemerintahan di pusat. Masa-masa menjelang pemilu, L.K. Advani dari BJP, secara intensif dalam kampanyenya menekankan agar diterapkannya konsep etos Hindu (*Hindutva*) dan negara Hindu (*Hindurashtra*). India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu harus mempunyai cita-cita pemerintahan yang sesuai dengan etos dan budaya Hindu. Alasan perlunya *Hindutva* diterapkan dalam politik India menurut BJP adalah karena toleransi yang diterapkan pemerintah selama ini dengan sekularisme. Konsep *Hindutva-Hindurashtra* diterima baik oleh rakyat India terutama kaum Hindu fanatik, yang telah merasakan kesenjangan antara kelompok Hindu dengan non Hindu. Salah satu cara yang digunakan BJP untuk menarik simpati masyarakat India adalah dengan menuntut dibongkarnya mesjid Babri di Ayodha, yang diklaim sebagai situs tempat berdirinya Kuil Rama. Demikianlah strategi BJP dalam memobilisasi pendukungnya.

Partai BJP di awal keterlibatannya secara langsung dalam perpolitikan India, sudah menerapkan strategi koalisi pada pemilu, misalnya pemilu di negara bagian pada 1982. Partai BJP membentuk koalisi dengan beberapa partai kecil, yaitu partai Lok Dal dan Congress (Sosialis) selama pemilu negara bagian tahun 1982. Bahkan koalisi tersebut oleh partai BJP disebut sebagai koalisi anti-

<sup>216</sup> Chetan Bhatt, *Hindu Nationalism: Origins, Ideologies, and Modern Myths* (Oxford: Berg, 2001), hlm. 168.

Congress. Strategi koalisi ini kemudian dilanjutkan BJP pada pemilu Lok Sabha pada 1998, dan Pemilu 1999. Partai BJP berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai regional lainnya. Kemampuan partai BJP membangun koalisi pada Pemilu 1999 salah satu faktor yang membuat partai ini berhasil menjadi partai yang memerintah India hingga pada 2004.

Selama masa pemerintahan koalisi NDA pada tahun 1999-2004, kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan eksekutif mereka hampir semuanya merupakan inisiatif partai BJP. Menurut Subrata K. Mitra, salah satu kesuksesan BJP dalam membentuk pemerintahan India pada 1999 adalah kemampuannya untuk mengikat isu-isu minoritas India sehingga mendapat simpati dari partai-partai regional lainnya.<sup>217</sup> Akan tetapi, sejak berlangsungnya pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh partai BJP ini, hampir sebagian besar kebijakan-kebijakan partai BJP bersifat eksklusif dan adanya penyeragaman terhadap India yang heterogen, lewat agenda *Hindutva* atau penekanan Hindu nasionalismenya. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan-kebijakan partai BJP yang bersifat eksklusif tersebut menjadi faktor eksternal bagi kemenangan partai Congress pada Pemilu Lok Sabha India 2004. Kebijakan eksklusifisme yang akan dijelaskan pada bagian ini, secara garis besar mengarah kepada eksklusifisme politik.

Sementara untuk bidang ekonomi, sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zoya Hasan bahwa munculnya partai Congress sebagai partai yang mendapatkan kursi terbanyak dibandingkan partai BJP, adalah karena partai Congress berhasil menawarkan pemerintahan yang lebih inklusif, berbeda dengan partai BJP. Contoh besar dari kebijakan yang bersifat eksklusif ini adalah kebijakan ekonomi yang *pro-rich* dan penekanan bahwa India adalah negara Hindu dengan adanya kejadian kerusuhan komunal di Gujarat. Sebagaimana kedua hal ini juga diakui oleh pemimpin partai BJP, bahwa yang membuat partainya tidak berhasil pada Pemilu 2004, oleh Vajpayee, perdana menteri India, adalah karena kerusuhan komunal di Gujarat, sementara L.K. Advani, wakil perdana menteri, menyebutkan bahwa kampanye *India Shining*

<sup>217</sup> Subrata K. Mitra, "The NDA and The Politics of 'Minorities' in India," dalam Katharine Adenay dan Lawrence Saez, *Coalitions Politics and Hindu Nationalism* (New York: Routledge, 2005), hlm. 77.

kurang tepat menggambarkan keadaan India. Pernyataan Vajpayee mengenai kejadian di Gujarat tersebut juga disinggung oleh Gopal, dalam suatu interview, menjelaskan bahwa peristiwa di Gujarat berpengaruh buruk terhadap citra partai BJP pada Pemilu 2004. Dengan demikian, kejadian tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada partai Congress, partai yang menjadi alternatif bagi masyarakat yang menjanjikan pemerintahan yang inklusif. Berikut akan dijelaskan beberapa peristiwa yang menunjukkan bagaimana partai BJP menekankan agenda *Hindutva*-nya.

Seperti yang disebutkan Mitra di atas, bahwa berhasilnya partai BJP membentuk pemerintahan koalisi pada tahun 1999-2004 adalah karena kemampuannya untuk mengangkat isu-isu minoritas pada kampanye politiknya. Misalnya Advani yang secara tidak langsung menyatakan adanya perlindungan, keadilan, persamaan dan kebebasan penuh dalam kepercayaan dan beribadah. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa tidak ada pemerintahan BJP yang mentoleransi adanya pelemahan terhadap jaminan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan-kebijakan minoritas pemerintahan koalisi NDA tersebut dilihat sebagai kebijakan yang anti-sekular, berlawanan dengan dasar negara India. kebijakan-kebijakan minoritas koalisi NDA yang dipimpin BJP tersebut, dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu berkaitan dengan model pembangunan bangsa; berkaitan dengan pembentukan negara bagian; dan terakhir berkaitan langsung dengan keadilan sosial. Pembagian kebijakan-kebijakan ini ke dalam tiga kelompok bersumber dari hasil analisa Theodore Wright. Wright telah menganalisa 12 isu-isu kebijakan di mana BJP dihadapkan dengan pilihan antara mengakomodasi minoritas tersebut atau mengeluarkannya dari politik nasional.<sup>218</sup>

Pada kategori pertama, sebagaimana permintaan nasionalis Hindu untuk menciptakan negara yang identitasnya adalah Hindu, maka partai tersebut berusaha menciptakan adanya simbol-simbol sakral yang menggambarkan legitimasi tersebut. Simbol sakral yang dijadikan elemen penting adalah sapi. Dengan demikian, maka usaha untuk melarang penyembelihan sapi telah menjadi kebijakan terdepan dari partai-partai nasionalis Hindu. Partai-partai tersebut pun berusaha melegalkannya dalam rancangan undang-undang. Dalam pengamatan

<sup>218</sup> *Ibid.*, hlm. 85-87.

Wright, ia melihat bahwa satu dari dua anggota dewan melawan rencana undang-undang tersebut. Ia menyebutkan rancangan undang-undang tersebut mengganggu komunitas minoritas Muslim selama acara *Bakr Id* atau hari urban yang merupakan hari raya penting Muslim. Sama halnya dengan Sri Lanka, ketika partai yang besar telah setuju maka tidak ada kesempatan bagi kelompok minoritas.

Untuk kategori kedua berkaitan dengan pembentukan negara bagian, contoh kasusnya terjadi negara bagian Uttar Pradesh. Pemerintahan koalisi yang dipimpin BJP di negara bagian tersebut membuat kebijakan yang sensitive berkaitan dengan kegiatan sembahyang di sekolah. Pemerintah membuat kebijakan bahwa sekolah-sekolah negeri wajib menyanyikan lagu *Vande Mataram*, yaitu lagu nasional India, dan lagu *Saraswati Vandana*, yaitu lagu hymne Hindu. Oleh ulama Muslim hal tersebut dianggap sebagai musyrik dan sebuah fatwa diisukan kepada orang tua murid yang Muslim untuk menarik anak-anak mereka dari sekolah jika pemerintah negara bagian bertahan melakukan kebijakan tersebut. Partai Congress Lok Tantrik, yang merupakan koalisi di negara bagian tersebut, menunjukkan ekspresi yang berbeda dengan BJP, partai tersebut menunjukkan keberatan mengenai pemaksaan siswa-siswa untuk membawakan hymne-hymne yang berkaitan dengan nasionalisme Hindu.

Isu lainnya yang diperbedatkan adalah sebuah program, yang menurut partai-partai kiri, ditujukan untuk penulisan ulang buku-buku teks supaya pahlawan-pahlawan Hindu lebih dipuja-puja dibandingkan penguasa-penguasa yang Muslim. Selama lima tahun pemerintahannya, pemerintahan BJP mengganti ulang orang-orang penting di departemen pendidikan dan mengganti kurikulum serta buku-buku teks. Sektor pendidikan merupakan sektor yang terlihat jelas di mana kebijakan-kebijakan Hindu dimasukkan. Hal ini disebutkan oleh Marie Lall, bahwa para pemimpin partai BJP mengetahui bahwa kebijakan dalam sektor pendidikan adalah satu cara yang efektif untuk mempromosikan dan menyebarkan ideologi nasionalis Hindu tersebut.<sup>219</sup>

<sup>219</sup> Marie Lall, "Indian Education Policy Under The NDA Government," dalam Katharine Adenay dan Lawrence Saez, *Coalitions Politics and Hindu Nationalism* (New York: Routledge, 2005), hlm. 153.

Pemerintah BJP memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan tujuan penyebaran nasionalis Hindu tersebut. Oleh karena itu, negara bagian India yang kuat atau besar menjadi perhatian utamanya. Untuk mematangkan tujuan tersebut, pemerintah BJP mengawasi pertumbuhan sekolah-sekolah Muslim atau *madrassas* dan mengawasi keras imigrasi-imigrasi yang tidak sah dari Bangladesh. Sehingga, di negara bagian terbesar, Uttar Pradesh ada peraturan yang mensyaratkan adanya izin dari pemerintah lokal untuk mendirikan bangunan agama yang ditujukan untuk mengawasi pertumbuhan *madrassas* atau mesjid-mesjid yang tidak mengenakan di daerah perbatasan Nepal. Polisi dan militer India mengawatirkan bila perkembangan-perkembangan *madrassas* atau mesjid tersebut berkaitan dengan Intelejen Pakistan. Akan tetapi, organisasi-organisasi Muslim mencurigai bahwa motif tersembunyi pemerintahan negara bagian BJP tersebut adalah untuk melarang atau bahkan mengurangi organisasi-organisasi Muslim. Selain itu, munculnya Undang-Undang Pencegahan Terorisme, yang dianggap sebagai hukum yang kontroversial membuat banyak Muslim ditahan tanpa adanya pemeriksaan.<sup>220</sup>

Untuk kebijakan terakhir, yang berkaitan langsung dengan keadilan sosial adalah usaha pemerintahan BJP untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan lewat pembuatan undang-undang untuk menyediakan satu pertiga kursi di parlemen untuk perempuan. Rancangan undang-undang ini dihalangi oleh koalisi partai-partai sekular kiri dan partai Congress yang melihat bahwa ini adalah usaha tersembunyi nasionalis Hindu untuk meningkatkan jumlah mereka. Menurut mereka, bila rancangan undang-undang tersebut lolos, kemungkinan yang diuntungkan adalah perempuan-perempuan dari kasta yang lebih tinggi. Menurut Wright, secara strategis BJP harus memodifikasi dan melembutkan atau bahkan menunda beberapa bagian penting dari platformnya supaya memobilisasi dukungan dan mempertahankan pemerintahan koalisinya. Para ekstrimis BJP melihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintahan BJP lebih berkomitmen kepada agenda *Hindutva* dan bersifat oportunistik. Pendapat ini senada dengan Aslan Sher Khan. Ia merupakan salah satu aktor Muslim yang penting yang bergabung dengan BJP seorang dan mantan Menteri Persatuan. Alasannya keluar

<sup>220</sup> Subrata K. Mitra, *op.cit.*, hlm. 86.

dari koalisi tersebut adalah setelah ia menyadari bahwa BJP tidak memiliki rasa kasih terhadap Muslim atau kasta Dalit, BJP hanya ingin menggunakan mereka sebagai tangga untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>221</sup>

Penerapan agenda *Hindutva* yang keras lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan BJP yang eksklusif tersebut, diduga menjadi penyebab kalahnya partai BJP. Salah seorang pemimpin BJP mengasumsikan bahwa kekalahan BJP pada Pemilu 2004 adalah dikarenakan pemerintahan Vajpayee yang telah mengecewakan begitu banyak orang Hindu. Walaupun partai BJP merupakan partai nasionalis Hindu, tidak semua masyarakat Hindu mendukung pemaksaan agenda *Hindutva* tersebut.<sup>222</sup> Kekerasan yang berlangsung di Gujarat adalah salah satu contoh di mana partai BJP menerapkan ideologi nasionalis Hindu tersebut.

Gujarat adalah basis utama partai BJP. Pada tahun 2002, terjadi kekerasan yang sangat serius antara Hindu dan Muslim di negara bagian tersebut. kejadian itu berlangsung dari tanggal 28 Februari 2002 hingga pertengahan April 2002. Kaum Muslimin di daerah tersebut yang menjadi korban, menolak agenda *Hindutva* BJP. Sekurang-kurangnya 1.000 orang meninggal dan beberapa dari 150.000 orang mengungsi. Beberapa Muslim kembali ke lingkungan mereka di mana mereka sebelumnya hidup. Pemerintah BJP di negara bagian tersebut tidak memberikan penyelesaian apa pun terhadap kejadian tersebut. Bahkan, pemerintah pusat BJP, Perdana Menteri Vajpayee tidak memecat Narendra Modi yang menjadi pemimpin di negara bagian tersebut. Keadaan ini membuat orang-orang Muslim yang menjadi korban kekerasan tersebut mendukung partai Congress untuk menegakkan pemerintahan yang sekular.<sup>223</sup> Hal ini dapat dilihat dengan berkurangnya dukungan masyarakat Muslim di Gujarat kepada partai BJP pada Pemilu 2004 dibandingkan Pemilu 1999 dengan dukungan masyarakat Muslim kepada partai Congress. Pada Pemilu 1999, BJP mendapatkan dukungan 52,5% suara. Pemilu 2004 hanya mendapatkan 47,4% sementara untuk partai Congress meningkat menjadi 43,9%.<sup>224</sup>

<sup>221</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>222</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>223</sup> Barbara D. Metcalf, *op.cit.*, hlm. 299.

<sup>224</sup> Katharine Adeney dan Lawrence Saez, *op.cit.*, hlm. 239.

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan partai BJP yang eksklusif, baik untuk ekonomi dan politik, membuat partai Congress diuntungkan karena lebih menawarkan pemerintahan yang lebih inklusif. Seperti yang dinyatakan oleh K. C. Suri bahwa pemilih India akan memilih partai yang menjanjikan dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebab pemahaman mereka akan pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang langsung mereka butuhkan, misalnya jalanan-jalanan, penyediaan air, pendidikan, kesehatan, perumahan, pakaian dan kebutuhan lainnya secara langsung. Kebutuhan ini tentunya tidak hanya merupakan tuntutan kaum miskin pedesaan yang dianggap sebagai pendukung utama partai Congress. Masyarakat perkotaan dari kelas menengah juga membutuhkan hal tersebut. Oleh karena itu, partai Congress menjadi alternatif selain partai BJP bagi mereka.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, temuan penelitian dan implikasi teoritis. Kesimpulan berkaitan dengan dua hal yang menjadi pertanyaan penelitian ini, yaitu: 1) faktor-faktor internal yang menyebabkan kemenangan partai Congress (INC) pada Pemilu Lok Sabha India 2004; dan 2) faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemenangan partai Congress (INC) pada Pemilu Lok Sabha India 2004.

India yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar di kawasan Asia Selatan berhasil menjalankan pemilu sebagai cara untuk mengganti pemerintahan atau regim. Dalam sejarah pemilu India, kerusuhan sering kali tidak terhindarkan setelah hasil pemilu diumumkan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kelompok yang kurang puas atau tidak setuju akan kekalahan partai politik yang didukungnya. Pemilu Lok Sabha India tahun 2004 berjalan dengan demokratis meskipun mendatangkan banyak pertanyaan bagi pengamat pemilu di dunia secara umum dan di India secara khusus. Hal ini berkaitan dengan hasil polling TV di India yang memprediksikan bahwa partai Congress tidak akan keluar sebagai pemenang pemilu, sementara partai BJP yang diyakini akan kembali memerintah India ternyata harus keluar dari kursi pemerintahan.

Hasil pemilu menunjukkan bahwa partai Congress berhasil menjadi partai yang mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha sejumlah 145 kursi. Berbeda dengan Pemilu 1999 dimana partai ini hanya berhasil memperoleh 114 kursi. Perolehan kursi ini dapat dikatakan sebagai kemajuan bagi partai Congress walaupun hanya menang tipis terhadap partai BJP yang memperoleh 138 kursi.

Partai BJP memiliki banyak alasan akan memenangkan pemilu tersebut, antara lain; perekonomian India di bawah pemerintahannya mengalami pertumbuhan yang baik, adanya kemajuan negosiasi dengan negara Pakistan mengenai permasalahan negara bagian Kashmir, polling-polling yang memprediksi bahwa partai BJP bersama dengan aliansinya akan memenangkan pemilu ataupun pemilu di lima negara bagian pada akhir tahun 2003 sebagian besar di menangkan partai tersebut. Alasan-alasan tersebut merupakan alasan yang kuat untuk menjadi

faktor pendukung percaya diri partai BJP memenangkan Pemilu Lok Sabha India 2004 yang lalu. Akan tetapi, keputusan hasil pemilu berkata lain bahwa partai Congress menjadi partai yang mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha dan bersama aliansinya sebanyak 18 partai berhasil menjadi partai yang memerintah India sejak tahun 2004 hingga 2009.

### **Temuan Penelitian**

Masyarakat India menyakini bahwa melalui pemilu mereka mampu mengganti siapa yang akan memerintah India. Melalui survey CSDS tahun 2004, 88% respon menyatakan dukungan mereka bahwa pemerintahan demokratis adalah bentuk pemerintahan yang lebih baik dibandingkan bentuk pemerintahan lainnya. Berkaitan dengan dukungan terhadap demokratis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih baik, penelitian ini menemukan bahwa **pemahaman masyarakat India akan pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari masyarakat.** Kedua partai terbesar India, yaitu partai Congress dan BJP, menjelang Pemilu Lok Sabha 2004 pada dasarnya menawarkan program-program yang sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang jelas. Perbedaan yang jelas ini menjadi temuan kedua dalam penelitian ini. **Partai Congress menawarkan pemerintahan yang lebih inklusif baik untuk ekonomi dan sosial. Sementara partai BJP yang Hindu nasionalis menawarkan kebijakan-kebijakan yang eksklusif.** Kelebihan partai Congress menawarkan pemerintahan yang inklusif menjadi faktor yang menguntungkan partai tersebut.

Temuan ketiga dalam penelitian ini adalah **dinasti sangat berpengaruh dalam perpolitikan India, khususnya partai Congress.** Setelah Rajiv Gandhi meninggal, Sonia Gandhi adalah kandidat yang dipertimbangkan memimpin partai Congress yang diyakini dapat mempertahankan popularitas partai Congress. Meskipun sejak tahun 1999 ketua partai Congress dipilih melalui pemungutan suara, anggota dinasti Nehru-Gandhi tetap terpilih sebagai pemenang. Hal ini juga terulang pada tahun 2005. Sonia Gandhi adalah bagian dari dinasti Nehru-Gandhi atau istri Rajiv Gandhi yang pertama dipertimbangkan oleh sindikat partai Congress untuk memimpin partai ini setelah suaminya meninggal pada 1991.

Dinasti tersebut menjadi faktor pertama yang membuat para sindikat menentukan ia sebagai ketua partai tersebut. Meski sudah dua kali menolak tawaran sebagai ketua partai Congress, Sonia akhirnya menggantikan Sitaram Kesri pada tahun 1998. Di bawah Sonia Gandhi, terdapat konsolidasi internal partai Congress yang sebelumnya mengalami kekacauan. Gaya kepemimpinannya yang memberikan kebebasan bagi elite-elite Congress di daerah untuk mengambil keputusan sangat berbeda dengan gaya kepemimpinan Indira dan Rajiv Gandhi yang dikenal bersifat sentralistik.

**Temuan keempat penelitian ini adalah kemenangan partai Congress juga didukung dengan keputusan partai Congress mengubah strategi pemilunya pada Pemilu 2004 yang lalu, yaitu dengan membangun koalisi pra-pemilu.** Berbeda dengan Pemilu 1999, di mana partai Congress menerapkan Deklarasi Pancmarhi yang menyatakan tidak akan membangun koalisi dengan partai-partai regional lainnya, maka pada Pemilu 2004 yang lalu partai Congress berhasil membangun koalisi dengan 18 partai regional lainnya. Setelah pertemuan para elite partai Congress Juni 2003 di Shimla dan kalahnya partai Congress pada pemilu di 5 negara bagian akhir 2003, partai Congress menyadari bahwa Deklarasi Pancmarhi tersebut berdampak negatif terhadap partai Congress. Bersama dengan partai-partai regional tersebut, partai Congress mendapatkan kursi 224 di Lok Sabha serta didukung dari luar oleh partai-partai Kiri di Lok Sabha.

### **Implikasi Teoritis**

India memiliki banyak partai politik sebagai peserta pemilu. Partai-partai politik ini memiliki kelompok pendukung yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda-beda pula. Selain dari partai politik, baik partai nasional dan regional, pihak independen pun masih ada sebagai peserta pemilu India. Akan tetapi, partai politik masih memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perpolitikan India. Dalam perpolitikan India, meskipun memiliki banyak partai, partai-partai ini sering dikelompokkan dengan dua kubu, yaitu partai Congress bersama aliansinya dan partai BJP bersama aliansinya.

Pada waktu pemilu India, secara jelas dapat dilihat bahwa masing-masing partai ini berusaha membangun basis pendukung dengan mengangkat isu-isu yang berbeda. Partai Congress yang lebih banyak menekankan pada isu-isu kesejahteraan sosial masyarakat kelas miskin dan pedesaan, mendapatkan dukungan yang lebih besar dari kelompok tersebut. Meskipun kelompok kelas menengah perkotaan juga masih banyak yang memberikan dukungan terhadap partai Congress. Demikian partai BJP yang sebagian besar kebijakan-kebijakannya *pro-rich* mendapatkan dukungan dari masyarakat kelas menengah di perkotaan India. Masing-masing partai politik ini berusaha mengakomodasi kepentingan-kepentingan pendukungnya dan berjanji akan melakukannya ketika berhasil menduduki jabatan di pemerintahan.

Pemilu India 2004 ini, berjalan dengan demokratis karena tidak ada kerusuhan. Partai BJP yang juga dikenal dengan partai Hindu nasionalis yang radikal akhirnya bisa menerima kekalahannya meskipun sebelumnya sangat keberatan terhadap Sonia Gandhi yang keturunan Italia bila menjadi PM India. Kondisi perpolitikan India setelah hasil Pemilu 2004 pun berjalan stabil setelah Sonia Gandhi menyatakan memberikan posisi perdana menteri kepada Manmohan Singh. Dengan demikian, teori partai politik Alen Ware terbukti dalam penelitian ini. Di mana partai-partai politik India, melalui pemilu berusaha mendapatkan kursi supaya mampu menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan. Partai politik di India juga terlihat mendukung lebih dari satu kepentingan kelompok pendukungnya.

Keberadaan dinasti Nehru-Gandhi sangat penting dalam tubuh partai Congress. Partai ini membutuhkan tokoh pemimpin yang dapat membawa persatuan yang kuat dalam partai tersebut. Berdasarkan kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin menurut Selligman, maka Sonia Gandhi dapat dikatakan telah berhasil memenuhi kriteria tersebut. *Pertama*, keahlian politik. Sonia Gandhi telah memiliki kemampuan ini. Pada Pemilu 2004 yang lalu, walaupun ia memiliki tim yang menyusun atau membuat draft pidatonya pada waktu kampanye, ia tetap menggunakan draft politik berdasarkan pemikirannya sendiri yang menurutnya sesuai dengan gaya penyampaiannya. Kemampuan politik Sonia ini berhasil mendapatkan simpati masyarakat, khususnya ketika ia

melakukan kampanye ke daerah-daerah terpencil selama tiga minggu untuk Pemilu 2004 yang lalu. Kemampuan politik Sonia lainnya ialah ia mampu mengorganisir dan menarik simpati pendukungnya. Hal ini terbukti ketika ia mengundurkan diri dari jabatan ketua partai pada tahun 1999. Pengunduran dirinya tersebut membuat pendukungnya yang loyal melakukan demonstrasi bahkan adanya mengancam akan bunuh diri bila Sonia Gandhi tidak menjadi ketua partai tersebut.

Kriteria pertama ini berkaitan dengan kriteria selanjutnya yaitu *integrasi tokoh-tokoh politik*. Integrasi tokoh-tokoh politik ini, berdasarkan dinasti sudah dimiliki oleh Sonia Gandhi. Akan tetapi, sejak peristiwa pengundurannya sebagai ketua partai pada tahun 1999 membuat kriteria ini semakin menguat. Walaupun untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi, ketua partai Congress dipilih melalui proses pemungutan suara, Sonia Gandhi mendapatkan dukungan lebih besar dibandingkan kandidat lainnya. Sonia Gandhi memiliki kepribadian lembut yang membuat sebagian besar elite-elite dan kader partai Congress memberikan dukungannya mereka pada Sonia. Kriteria selanjutnya, yaitu *representasi* juga dimiliki Sonia Gandhi. Sonia Gandhi merupakan bagian dari dinasti Nehru-Gandhi yang juga mempertahankan nilai-nilai para tokoh partai tersebut. Di antaranya penekanan nilai-nilai demokrasi dan persatuan India walaupun memiliki banyak perbedaan.

Keterlibatan Sonia Gandhi dalam politik ia jelaskan bukanlah untuk mencari kepentingan pribadi tetapi untuk memberikan kontribusi terhadap rakyat India. Kerelaan Sonia Gandhi untuk memberikan posisinya sebagai perdana menteri ke Manmohan Singh juga dapat sebagai bukti kriteria ini. Keberadaan Manmohan Singh mengangkat kepercayaan diri orang-orang Sikh dan juga yang beragama Islam. Singh adalah perdana menteri pertama yang beragama Islam di India. Demikian juga untuk kriteria *karir dan mobilitas*, meskipun secara resmi menjadi ketua partai Congress pada tahun 1998, Sonia Gandhi memiliki karir politik yang baik selama selama 6 tahun menjelang pemilu 2004 dan memiliki mobilitas yang tinggi. Dengan demikian, teori Selligman terbukti dalam penelitian ini.

Berdasarkan teori kepemimpinan karismatik Weber, maka Sonia Gandhi adalah pemimpin yang karismatik. Kehadiran Sonia Gandhi dalam partai Congress berawal karena partai Congress mengalami krisis kepemimpinan. Kriteria pemimpin yang karismatik menurut Weber diantaranya adalah rasa percaya diri, memiliki visi dan misi, memperlihatkan sifat-sifat yang luar biasa, harus dipandang sebagai ‘agent of change’, serta kesadaran akan situasi. Masuknya Sonia Gandhi dalam partai Congress diakuinya karena kesadarannya akan situasi yang dihadapi partai Congress. Partai Congress setelah tahun 1990-an mengalami penurunan. Kesadarannya akan keberadaan keluarga yang ia nikahi, yaitu dinasti Nehru-Gandhi yang memperuangkan India melalui partai Congress, semakin menguatkan alasannya terlibat dalam dunia politik. Sonia menjadi agent of change khususnya untuk internal partai Congress. Teori kepemimpinan karismatik Weber dibenarkan dalam penelitian ini.

Teori dinasti politik dalam penelitian ini digunakan untuk melihat keterlibatan Sonia Gandhi dalam politik. Mosca menyatakan bahwa ada kecenderungan suatu masyarakat untuk menurunkan kelasnya kepada generasinya. Sementara Hess menyebutkan bahwa anggota dinasti politik tersebut akan mendapat keuntungan yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya. Sebenarnya Sonia Gandhi adalah kandidat pertama yang dipertimbangkan oleh para Sindikat Congress untuk menjadi ketua partai Congress. Menurut mereka, Sonia Gandhi adalah salah satu anggota dinasti Nehru yang potensial yang mampu menjaga popularitas Congress dan mampu menjaga kesatuan partai Congress. Meskipun tawaran ini telah ditolak 2 kali dan menyadari bahwa partai Congress terus mengalami penurunan, Sonia Gandhi pun kemudian menerima tawaran tersebut. Toeri dinasti politik ini terbukti dalam penelitian ini.

Toeri marketing politik yang dikemukakan oleh Marshment juga terbukti dalam penelitian ini. Seperti yang dijelaskan oleh Marshment bahwa marketing politik tidak hanya sebatas masalah iklan dan komunikasi politik. Melainkan pendekatan komprehensif yang menyangkut cara sebuah institusi politik memformulasikan produk politik, menyusun program publikasi kampanye dan komunikasi politik, strategi segmentasi untuk memenuhi kebutuhan lapisan masyarakat sampai ke perhitungan harga sebuah produk politik. Oleh karena itu,

kondisi sosial budaya suatu wilayah geografis dan demografis juga harus diperhitungkan dalam segmentasi dan formulasi isu politik. Berdasarkan penelitian ini, di bawah kepemimpinan Sonia Gandhi, partai Congress berusaha mempelajari setiap kondisi negara bagian-negara bagian India. Karena menurut Sonia Gandhi, masing-masing daerah tersebut memiliki identitas dan permasalahan yang berbeda. Selain menggunakan iklan, partai Congress berusaha melibatkan kelompok-kelompok lainnya, misalnya perwakilan pemuda, untuk mengetahui kebutuhan kelompok tersebut.

Untuk Pemilu 2004 ini, terdapat perbedaan yang sangat penting dengan strategi partai Congress. Pada pemilu 2004, partai Congress tidak lagi menerapkan Deklarasi Pachmarhi. Tidak diterapkannya lagi deklarasi ini menunjukkan bahwa partai ini siap melakukan koalisi dengan partai-partai regional lainnya khususnya koalisi pra-pemilu. Sebagaimana menurut Golder, koalisi pra-pemilu umum terjadi dan juga mempengaruhi hasil pemilu. Melalui koalisi pra-pemilu ini, Golder menjelaskan bahwa dalam perundingan pemimpin partai yang ingin membentuk koalisi pra-pemilu harus mencapai persetujuan terhadap strategi pemilu bersama dan distribusi keuntungan-keuntungan jabatan yang mungkin bertambah di antara mereka. Proses ini mungkin melibatkan penguraian platform koalisi bersama; memutuskan partai mana yang akan menjalankan jabatan-jabatan kementerian yang lebih berkuasa; memilih kandidat partai mana yang mengundurkan diri dalam pemilihan di distrik tersebut; atau menentukan pemimpin partai mana yang menjadi perdana menteri. Pembentukan koalisi pra-pemilu kemungkinan besar didasarkan pada persamaan ideologi. Dalam praktiknya berdasarkan data-data yang ditemukan peneliti, pembicaraan platform koalisi bersama secara resmi dibuat setelah hasil keputusan pemilu diumumkan. Platform koalisi ini dikenal dengan *National Common Minimum Program*. Begitu juga dengan jabatan-jabatan kementerian ditentukan setelah hasil pemilu diketahui. Dengan demikian, penentuan kebijakan-kebijakan dan pos-pos jabatan menteri setelah pemilu berbeda dengan teori yang dinyatakan Golder. Sementara dalam penentuan kandidat-kandidat partai yang bersaing dengan beberapa partai berhasil dicapai.

Selain itu, Golder menjelaskan ada tiga kriteria koalisi pra-pemilu, yaitu koalisi harus diumumkan di depan umum, partai-partai dalam koalisi pemilu tidak dapat bersaing di pemilu seperti partai yang betul-betul independen, dan koalisi pemilu harus berada pada level nasional. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, ada satu kriteria yang berbeda dengan praktik koalisi pra-pemilu di India, yaitu kriteria kedua. Misalnya saja di negara bagian Jharkhand, di negara bagian tersebut partai Congress dengan partai JMM berkoalisi. Akan tetapi kandidatnya bersaing secara independen. Sementara untuk kedua kriteria tersebut, koalisi pra-pemilu UPA yang dipimpin partai Congress tersebut terlaksana. Berdasarkan koalisi pra-pemilu tersebut, partai Congress terbantu memenangkan pemilu 2004 dan bersama koalisinya berhasil menjadi partai yang memerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Adeney, Khatarine dan Lawrence Saez. *Coalition Politics and Hindu Nationalism*. New York: Routledge. 2005.
- Ahuja, M.L. *Handbook of General Elections and Electoral Reforms in India: 1952-1999*. New Delhi: Mital Publications. 2009.
- Almond, Gabriel A. dan Bingham Powell, Jr. *Competitive Politics Today: a World View*. New York: Harper Collins College Publishers. 1996.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Ansari, Yousuf. *Triumph of Will*. New Delhi: India Research Pres. 2006.
- Apter, David E. *Politik Modernisasi*. Jakarta: Gramedia. 1987.
- Bhatt, Chetan. *Hindu Nationalism: Origins, Ideologies, and Modern Myths*. Oxford: Berg. 2001.
- Brass, Paul R. *The Politics of India since Independence*. New York: Cambridge University Press. 1994.
- Brownstein, Ronald. *The Power and the Glitter: The Hollywood-Washington Connection*. New York: Pantheon. 1990.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Byrman, Alan. *Quantity and Quality in Social Research*. Boston: Unwin Hyman, 1988.
- Fernandes, Leela. *India's New Middle Class: Democratic Politics in an Era of Economic Reform*. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2006.
- Golder, Sona Nadenichek. *The Logic of Pre-Electoral Coalition Formation*. Ohio: The Ohio State University. 2006.
- Gunter, Richard dan Larry Diamond, *Political Parties and Democracy*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001.
- Gupta, D. C. *Indian Government & Politics*. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1983.
- Hardgrave, Robert L. dan Stanley A. Kochanek. *India: Government and Politics in Developing Nation*. New York: Harcourt-Braced World Inc. 2008.

- Hasan, Zoya. *Breaking New Ground: Congress and Welfarism in India*. Paris: Ifri. 2009.
- Hess, Stephen. *America's Political Dynasties*. New Jersey: Transaction Publishers. 1997.
- Jaffrelot, Christophe. *Hindu Nationalism*. New Jersey: Princeton University Press. 2007.
- Jeffrey, Robin dan Lance Brennan. *Spinning a Nation: into India*. Canberra: Curriculum Corporation. 2007.
- Kartodirjo, Sartono (ed.). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1990
- Palmer, Monte. *Comparative Politic: Political Economy, Political Culture, and Political Interdependence*. Ontorio: Thomson Wadsworth. 2006.
- Kohli, Atul. *The Success of India's Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press. 2001.
- Lamb, Beatrice Pitney. *India: A World in Transition*. New York: A. P. Publisher. 1968.
- Marshment, J. Lees. *Political Marketing and British Political Parties: The Party's Just Begun*. Manchester: Manchester University Press. 2001.
- Mosca, G. *La Classe Politica*. Bari: Laterza Editori. 1966.
- Newman, B. I. *Handbook of Political Marketing*. Thousand Oaks: Sage. 1999.
- Panikar, K.N. dan Sukumar Muralidharan (ed.). *Communalism, Civil Society & the State: Reflections on a Decade of Turbulence*. New Delhi: SAHMAT. 2002.
- Park, Richard L. dan Bruce Bueno de Mesquita. *India's Political System*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1979.
- Powell Jr, G. Bingham. *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*. New Haven: Yale University. 2000.
- Puhle, Hans-Jurgen "Still the Age of Catch-Allism? Volkspartein and Parteienstaat in Crisis and Re-aqulibirium", dalam Richard Gunter, Jose Ramon Montero dan Juan J. Linz (eds.), *Political Parties: Old Concepts and New Challenges*, New York: Oxford University Press, 2002.
- Rahman, Arifin. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: LPM IKIP. 1998.

- Rana, M. S. *India Votes: Lok Sabha & Vidhan Sabha Elections 2001-2005*. New Delhi: Sarup & Sons. 2006.
- Sanghvi, Vijay. *The Congress: Indira to Sonia Gandhi*. New Delhi: Kalpaz Publications. 2006.
- Sarkar, Nurul Islam. *Sonia Gandhi: Thirst with India*. New Delhi: Atlantic Publisher. 2007.
- Singh, Rani. *Sonia Gandhi: An Extraordinary Life, an Indian Destiny*. New York: Palgrave Macmillan. 2011.
- Stein, Burton. *A History of India*. West Sussex: Wiley-Blackwell. 2010.
- Thakurta, Paranjoy Guha. *Divided We Stand: India in a Time of Coalitions*. New Delhi: Sage Publications. 2007.
- Wallace, Paul dan Ramashray Roy. *India's 2009 Elections: Coalition Politics, Party Competition, and Congress Continuity*. New Delhi: Sage Publication India. 2011.
- Walsh, Judith E. *A Brief History of India*. New York: Infobase Publishing. 2011.
- Ware, Alan, *Political Parties and Party Systems*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology*. New York: Bedminster Press. 1968.
- Yukl, Gary. *Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: Prenhallindo. 1998.

**Jurnal:**

- Dal Bo Ernesto, et.al. "Political Dynasties", *The Review of Economic Studies*. Vol. 76. 2007.
- Hasan, Zoya. "Bridging a Growing Divide? The Indian National Congress and Indian Democracy". *Contemporary South Asia*. Vol. 15. No. 4. Desember 2006.
- Karat, Prakash. "The Current Political Situation and the Party's Tasks". *The Marxist*. Vol. XXI. No. 4. 2006.
- Kumar, Sanjay. "Regional Parties, Coalitions Government and Functioning of Indian Parliament: The Changing Pattern." *Journal of Parliamentary Studies*. Vol. 1. Juni 2010.

- Lefebvre Bertrand dan Cyril Robin. "Pre-electoral Coalitions, Party System and Electoral Geography: A Decade of General Elections in India (1999-2009)". *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*. No. 3. 2009.
- Lokniti Team. "National Election Study of 2004: An Introduction". *Economic and Political Weekly*. Special Articles. Desember 2004.
- Nayar, Baldev Raj. "Regime Change in a Divided Democracy". *Asian Survey*. Vol. XLV, No. 1, Januari/Februari 2005.
- Pai, Sudha. "Transformation of The Indian Party System: The 1996 Lok Sabha Elections". *Asian Survey*. Vol. XXXVI. No.12. 1996.
- Panagiriya, Arvind. "Vote Against Reforms?". *Economic and Political Weekly*. Vol. 39. No. 21. Mei 2004.
- Saez, Lawrence. "India in 2003: Pre-Electoral Maneuvering and the Prospects for Regional Peace". *Asian Survey*. Vol. 44. No. 1.
- Satpathi, Ayantani. "The Impact of The Electronic Media on The Modern India Voter: A Study of The Post Liberalization Era". *Global Media Journal*. Edisi India. Musim Panas. Juni 2011.
- Shani, Giorgio. "Re-branding India? Globalization, *Hindutva* and The 2004 Elections". *Ritsumeikan Annual Review of International Studies*. Vol. 3. 2004.
- Sridharan, Eswaran. "Coalition and Party Strategies in India's Parliamentary Federation". *Publius*. Vo. 33. No. 4. 2003.
- Sridharan, E. "Electoral Coalitions in 2004 General Elections: Theory and Evidence". *Economic and Political Weekly*. Vol. 39. No. 51. Desember 2004.
- Suri, K. C. "Democracy, Economic Reforms and Election Results in India". *Economic & Political Weekly*. Vol. 39. No. 51. Desember 2004.
- Swamy, Arun R. "Back to the Future: The Congress Party's Upset Victory in India's 14<sup>th</sup> General Election". *Asia-Pacific Center for Security Studies*. Terbitan Berkala. No. 0704-0188.
- Takur, Ramesh. "A Changing of The Guard in India". *Asian Survey*. Vol. XXXVIII. No. 6. 1998.

Wilkinson, Steven I. "Election in India: Behind the Congress Back", *Journal of Democracy*, Vol. 16, No. 1, Januari 2005.

Willner, Anna Ruth dan Dorothy Willner. "The Rise and Role of Charismatic Leaders." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. Vol. 358. No. 77. 1965.

**WEB:**

Hasan, Zoya. "Indian Elections 2004: A Setback for BJP's Exclusivist Agenda", diakses dari <http://www.ceri-sciencespo.com/archive/sept04/artzh.pdf>, pada tanggal 27 Oktober 2011.

"Human Development Report 2000", diakses dari [http://hdr.undp.org/en/media/HDR\\_2000\\_EN.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2000_EN.pdf), pada tanggal 21 Mei 2012.

Kekic, Laza "The Economist Intelligence Unit's Index of Democracy", diakses dari [http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY\\_INDEX\\_2007\\_v3.pdf](http://www.economist.com/media/pdf/DEMOCRACY_INDEX_2007_v3.pdf), pada tanggal 17 Mei 2012.

Palshikar, Suhas. "Regional Parties and Democracy: Romantic Rendezvous or Localized Legitimation?", diakses dari [http://www.democracy-asia.org/Suhas\\_Palshikar\\_democracy\\_regional\\_parties.pdf](http://www.democracy-asia.org/Suhas_Palshikar_democracy_regional_parties.pdf).

"Sonia Gandhi, Resignation Letter", diakses dari [http://www.congresssandesh.com/speeches/resignation\\_letter.htm](http://www.congresssandesh.com/speeches/resignation_letter.htm).

"Sonia Gandhi: Secular Life", diakses dari <http://marifa.hct.ac.ae/files/2011/06/TWENTY-FOUR-The-Security-Life-by-Sonia-Gandhi.pdf>, pada tanggal 10 Januari 2012, hlm. 210-211.

Suri, K.C. "Parties under Pressure: Political Parties in India Since Independence", diakses dari <http://www.democracy-asia.org/qa/india/KC%20Suri.pdf>.

Suri, K. C. "Patterns of Electoral Support and Party Leadership in India: Some Observation Based on Emperical Research" diakses dari <http://www.cses.org/plancom/2006Bangalore/Suri2006.pdf>, pada tanggal 27 November 2011.

[www.eci.gov.in](http://www.eci.gov.in)

**Makalah:**

Islam, Maidul. “ Verdict 2004: From Identities to Issues and Interests?”, makalah Seminar Sarjana Muda Internasional, Maret 2006.

Zavos, John. “The End of Hindutva? A Reflection on the General Election in India, April/May 2004”, makalah yang dipresentasikan pada Institut Eropa untuk Studi Asia, Brussels, 28 Mei 2004.

**Koran:**

“Partai Congress Terancam Pecah”, *Kompas*, 22 Mei 1999.

“Pemerintahan Vajpayee Sekadar Transisi”, *Media Indonesia*, 29 April 1999.

“Sejarah Konflik Ayodhya”, *Tempo*, 18 Desember 1992.

Suri, K.C. ‘Reform: The Elite Want It, The Masses Don’t’, *Hindu*, 20 Mei 2004.

“The Night Sonia Resigned: Congressmen Begged and Pleaded, But She Said No”, *Sunday*, 23-29 Mei 1999.

“The Revolt: Sharad Pawar, Tariq Anwar and P.A. Sangma Write a Letter”, *Sunday*, 23-29 Mei 1999.

**Interview:**

Hasil interview dengan Prof. Niraja Jaya Gopal, pada tanggal 7 April 2012 melalui surat elektronik.

Hasil Interview dengan Sanjay Kumar, pada tanggal 15 Maret 2012 melalui surat elektronik.

## Lampiran 1

### Term of Reference and List of Questions of Thesis Research

India has being known as the biggest democracy country in Asia's countries. Since the achievement of its independence, this country had had political parties. Even five years after independence, India hold its first election in 1952 that contested by many political parties. There is one impression that probably interesting in Indian political system, that the existence of Congress party which able dominating since Indian Independent until 1980s. According to Richard L. Park and Bruce Bueno de Mequita, the Congress party had four resources of it initial domination, that are the charisma of Gandhi and Nehru, the prestige of Congress party increased because of its role as the independence movement vehicle, vast organizational base either local or regional, and more vast communal societies.

Even under Rajiv Gandhi leadership, Congress party still able dominated Indian political until 1989. But, the 1989 election is indicated with shellacking of Congress party because failed to get backing of another parties in Lok Sabha.<sup>1</sup> This 'shellacking' of Congress party and the end of Nehru dynasty at 1991 after the passed away of Rajiv Gandhi, have changed the face of Indian political that dominated by Congress party. This matter could see with the shellacking of Congress party at the 1996, 1998, and 1999 election sequentially.

In outline, there are similarity that caused Congress party defeated in 1996, 1998, and 1999 elections. *First*, the rise of the Bharatiya Janata Party (BJP), as the Hindu nationalist party, became alternative toward Congress party.<sup>2</sup> *Second*, the regional parties mushroomed since 1989. *Third*, the emergence of new era political coalitions multiparty with characteristic is anti-Congress party. *Forth*, supporting toward BJP increased simultaneously with the increase of Hindu nationalist sentiment. *Fifth*, after Rajiv Gandhi died in 1991, there is leadership crisis in body of Congress party that decreased its popularities.

<sup>1</sup>Robert L. Hardgrave dan Stanley A. Kochanek, *India: Government and Politics in Developing Nation* (New York: Harcourt-Braced World Inc., 2008), hlm. 260.

<sup>2</sup>Desh Gupta, "India: The Weakening of the Congress Stranglehold and the Productivity Shift in India", *ASARC Working Paper*, No. 6, 2009, hlm. 11.

The verdicts of Indian 2004 general election given great astonishment for the most of election observers. The Hindu nationalist party—BJP led National Democrat Alliance (NDA) which incumbent party, had been expected to win the general election calmly. This party even had been predicted to win the majority of seat in parliament (300 seats) by his own without coalitions. The fact, NDA defeated by Right-Left alliance led by Congress party.

The verdicts of 2004 general election ago, it's really beyond of predicted and especially surprised both of the biggest party in India, that are Congress party and BJP. The BJP certainly highly disappointed for the verdicts because had overconfidence would win the election. While Congress party that had out of office for eight years felt contented because did not presumed before to win the election.

BJP had a line of reasons that assured its confidence to win the election, that is. *First*, under the BJP government, the economy of India experience growth well. *Second*, there is advancement of negotiation with Pakistan about the problems of Kashmir state. *Third*, from polling known that citizen of India constantly asserted that Prime Minister Vajpayee is the most desirable to lead India. *Forth*, most of surveys showed that BJP coalition would be the winner of 2004 election, even there is thin comparison with alliance led by Congress party. *Fifth*, the states election at the end of 2003, three states is won by BJP—Rajahstan, Madya Pradesh, and Chhattisgarh.<sup>3</sup> The victory of BJP in three states made BJP to call early Indian election.

Most of Indian political educated predicted that BJP will win the 2004 election. Beside unable anymore become dominant party in parliament as 1950s up to 1980a election, Congress party even estimated would not return to office in 2004 election ago. Unfortunately, all of the prediction did not happen. The Congress party had 145 seats (27%) and overall with its alliance had 219 seats (49%) from 543 seats of Lok Sabha. While BJP only had 138 seats (25%) and

<sup>3</sup> Steven I. Wilkinson, *lop.cit.*

together with its alliance secure 185 seats (34%). The setback of the Congress party which beyond of estimated raises a lot of questions about the causes of the Congress party victory.

Base on the explanation above, the writer want to explore the causes of setback or the Indian National Congress party's victory in 2004 general election ago. To know more about it, some of questions have been formulated. It would be helpful if you could answer it according to your own opinion.

**A. Interview dengan Prof. Niraja Gopal Jayal pada tanggal 7 April 2012 melalui surat elektronik**

1. Most of opinions of educated political observer in India predicted that Congress party would defeat in 2004 General Election. The fact is the INC emerges as the winner. According to you, how was the condition of India towards 2004 General Election? Are there issues of national or regional which impact toward 2004 General Election?

I do not know which academic opinion is being referred to here. There was no certainty at all that the BJP would win the 2004 election. On the contrary, the violence against Muslims in Gujarat in 2002 was expected to have a negative impact, as was the pro-middle class India Shining campaign. The BJP was in a position to, and did spend, a great deal of money on its campaign, but that could hardly be taken as a sign of impending victory.

2. The INC party is identical with Nehru-Gandhi's dynasty. The existence of its members reputed able to maintain of its popularity. The absence of Nehru-Gandhi dynasty as important elite within the party feared could lead to a crisis of leadership, thereby reducing the popularity of Congress, as happened after the death of Rajiv Gandhi in 1991. In your opinion, how much influence the Nehru-Gandhi dynasty in the Congress party's survival?

The Nehru-Gandhi family has definitely played a significant role in strengthening the Congress Party by acting as a unifying force. However, it is important to

remember that the Congress government of P.V. Narasimha Rao was the last Congress government outside of a coalition, and though it was a minority government ( not enjoying a majority in the lower house of parliament, the Lok Sabha), the post of prime minister was held by a non-member of the Gandhi-Nehru dynasty. Among the significant policies and laws enacted by the Rao government were the economic reforms of 1991 and the constitutional amendments decentralising power to the local bodies in both the rural and urban areas.

3. After the death of Rajiv Gandhi, Congress party a few years is not led by the Nehru-Gandhi dynasty. Until finally in 1998, Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi's wife accepted the ruling Congress party elites to become chairman of the Congress party. According to you, with the presence of Sonia Gandhi as the leader of Congress party ahead of 1999 elections, whether it has put an end to the crisis of leadership for the Congress party? In 1999 and 2004 elections, Congress was led by the same person, Sonia Gandhi. Lost the 1999 election, winning the 2004 election. In your opinion, what distinguishes the leadership style of Sonia Gandhi in the 1999 election with the election of 2004? Are there any dispute Congress party elites in the 1999 elections and 2004 elections? If there is, how it can be resolved?

Sonia Gandhi's assuming the reins of the party definitely helped it to win the election of 2004. She travelled extensively throughout the country to revive the party and succeeded in achieving her goal. Her recent illness, however, has led to concerns that she may not be able to cope with the physically demanding job of leading the party into the 2014 election, and there have even been suggestions that her son Rahul should now lead the party.

As for the question of why her leadership did not bring the Congress to power in 1999, she had taken over a party in complete disarray, torn apart by conflicting factions, barely a year earlier. Firstly, a year is too short a period in which to revive a party. Secondly, the way in which you pose the question suggests that it was Mrs. Gandhi's leadership alone that brought the Congress to power in 2004, whereas it was a complex phenomenon of many factors that achieved this result.

4. Ahead of the 1999 elections, the BJP raised the issue of nationalism. These issues were used to attack the Congress party, led by Sonia Gandhi who is a descendant of Italy. Thus, the Hindu nationalist sentiment had become one of which resulted in the defeat of Congress party in 1999 elections. According to you, the Congress party's victory in the 2004 election, get the sentiments of Hindu nationalism is said to have been reduced? If reduced, what things would indicate it?

It is difficult to say whether Hindu nationalist sentiments had reduced in 2004 - we have no way of measuring societal sentiments. But, certainly, the communal violence in Gujarat in February 2002 did cause anxiety amongst Indians, including Hindus, many of whom found the scale and intensity of the violence, and the sponsorship of it by the state government, deeply abhorrent. This certainly played an important role in the rejection of the BJP in the general election of 2004.

5. In the 2004 elections, Congress party has made a coalition with many other regional parties, in contrast to the 1999 elections marked by a Declaration Panmarhi 1998. Declaration to not coalesce. In your opinion, how to influence decision-Congress coalition against the Congress party's victory in the 2004 elections? How the Congress party build coalition in 2004 elections ago? What is the response of regional parties against the Congress party's decision?

The Congress Party's success in building a winning coalition contributed significantly to its electoral victory in 2004. Since the regionalisation of the party system in the 1980s, and the simultaneous decline of parties with a pan-Indian appeal, it is clear that multiparty coalitions have provided the basis for government formation at the Centre. Hence, any national party that entertains hopes of coming to power at the Centre must necessarily craft political alliances in a way that is strategic and effective. The Congress Party certainly managed to do this in 2004, even if there could have been no advance guarantee of the fruits that these alliances would yield.

6. BJP campaign slogan 'India Shining' and 'feel good' is used to demonstrate the economic progress of India. Campaign slogan was later suspected was meant for the middle classes, and not for lower classes. Meanwhile, Congress party's campaign slogan is a common man or *Aam Admi* is intended to accommodate low-class society. Do you think the Congress party's campaign slogan managed to increase the community support to the Congress party? What about the BJP? Are there differences in campaign strategies of both parties?

Definitely. The BJP's India Shining campaign appealed directly to the classes that had become prosperous after the economic reforms, which however have a limited influence on electoral outcomes due to their small numbers. For the vast majority, whose lives had not experienced any positive change since the economic reforms, the campaign had little resonance. It showed how disconnected the BJP had become from ground level realities. The Congress Party, which was in fact the architect of the economic reforms (in the Narasimha Rao government, with Dr. Manmohan Singh as Finance Minister) emphasised the *aam aadmi*, the common man, and this would naturally have a wider appeal. The BJP's campaign, run by a professional advertising agency, was hugely expensive and reflected the arrogance of power.

7. What do you think the 2004 election results unexpected political observers India, what factors contribute to more victories against the BJP Congress party? Whether internal or external factors?

Internal factors hold the key to understanding electoral outcomes in India. In the 2004 elections, there were a combination of factors that went against the BJP: the disadvantage of incumbency, the Gujarat riots of 2002, and an economic model skewed towards the prosperous and the privileged. The Congress was helped by strong leadership provided by Sonia Gandhi, a campaign that spoke to the concerns of ordinary citizens, and a history of providing broadly secular governance with security for minorities.

**B. Interview dengan Pak Sanjay Kumar pada tanggal 15 Maret 2012 melalui surat elektronik**

1. Most of opinions of educated political observer in India predicted that Congress party would defeat in 2004 General Election. The fact is the INC emerges as the winner. According to you, how was the condition of India towards 2004 General Election? Are there issues of national or regional which impact toward 2004 General Election?

**ANSWER:** Congress won the 2004 elections because of the pattern of alliance, they had stronger parties as allies compared to the BJP which had lost few alliance partners. Also the vote share of BJP did not go down drastically between 1999 and 2004, so it is not an election which BJP lost, Congress managed to form the government because, they had formed better alliance with regional parties.

2. The INC party is identical with Nehru-Gandhi's dynasty. The existence of its members reputed able to maintain of its popularity. The absence of Nehru-Gandhi dynasty as important elite within the party feared could lead to a crisis of leadership, thereby reducing the popularity of Congress, as happened after the death of Rajiv Gandhi in 1991. In your opinion, how much influence the Nehru-Gandhi dynasty in the Congress party's survival?

**ANSWER:** The influence of Nehru Gandhi dynasty in Indian Politics is great, even now the Congress party is heavily dependent upon Sonia Gandhi, her son Rahul Gandhi and her daughter Priyanka Gandhi also come out to campaign during elections.

3. After the death of Rajiv Gandhi, Congress party a few years is not led by the Nehru-Gandhi dynasty. Until finally in 1998, Sonia Gandhi, Rajiv Gandhi's wife accepted the ruling Congress party elites to become chairman of the Congress party. According to you, with the presence of Sonia Gandhi as the leader of Congress party ahead of 1999 elections, whether it has put an end to the crisis of leadership for the Congress party? In 1999 and 2004 elections, Congress was led by the same person, Sonia Gandhi. Lost the 1999 election, winning the 2004 election. In your opinion, what distinguishes the leadership

style of Sonia Gandhi in the 1999 election with the election of 2004? Are there any dispute Congress party elites in the 1999 elections and 2004 elections? If there is, how it can be resolved?

**ANSWER:** No there is no change in the leadership style of Sonia Gandhi, she is more assertive now compared to the past. Even leaders within the Congress party respect her more now compared to the past. This slight change in attitude is mainly because of her refusal of becoming the Prime minister after the 2004 elections. She could have easily become the P.M but she declined. This has increased her stature within the party. I have already stated why Congress was more successful in 2004 compared to 1999, it was mainly because of better alliance of the Congress compared to the BJP and nothing to do with change in leadership style.

4. Ahead of the 1999 elections, the BJP raised the issue of nationalism. These issues were used to attack the Congress party, led by Sonia Gandhi who is a descendant of Italy. Thus, the Hindu nationalist sentiment had become one of which resulted in the defeat of Congress party in 1999 elections. According to you, the Congress party's victory in the 2004 election, get the sentiments of Hindu nationalism is said to have been reduced? If reduced, what things would indicate it?

**ANSWER.** Yes the Hindu sentiments in favour of the BJP got reduced a little bit in 2004 compared to 1999, but it is incorrect to believe that only those having Hindu sentiment vote for the BJP. It gives an advantage to the BJP but the party does not win only due to that. Stated earlier why Congress was successful in 2004.

5. In the 2004 elections, Congress party has made a coalition with many other regional parties, in contrast to the 1999 elections marked by a Declaration Pancmarhi 1998. Declaration to not coalesce. In your opinion, how to influence decision-Congress coalition against the Congress party's victory in the 2004 elections? How the Congress party build coalition in 2004 elections ago? What is the response of regional parties against the Congress party's decision?

**ANSWER:** Congress realized that the only way to come to power was to have coalition since the party can't win majority of seats on their own, so they formed alliance with the parties. It was easier for the Congress to form alliance since many parties just don't like the BJP due to their Hindu agenda and so it was easier for Congress to form alliance with many regional parties.

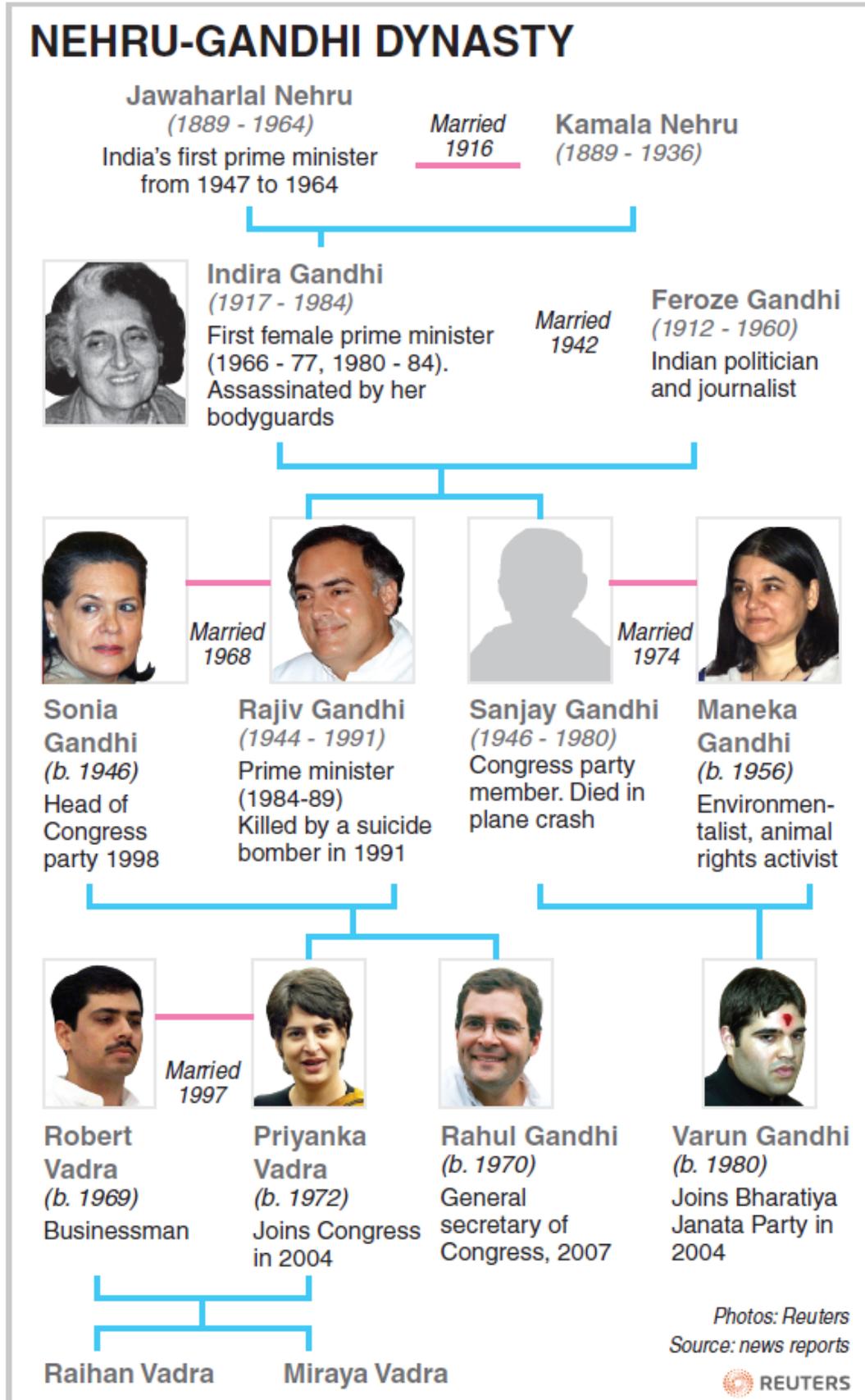
6. BJP campaign slogan 'India Shining' and 'feel good' is used to demonstrate the economic progress of India. Campaign slogan was later suspected was meant for the middle classes, and not for lower classes. Meanwhile, Congress party's campaign slogan is a common man or *Aam Admi* is intended to accommodate low-class society. Do you think the Congress party's campaign slogan managed to increase the community support to the Congress party? What about the BJP? Are there differences in campaign strategies of both parties?

**ANSWER:** Yes the India Shining slogan backfired for the BJP and Congress Aam Adami was much better for the Congress. When BJP started mentioning India is shining it seemed people starting making himself or his own family the reference point and comparing if he has benefitted or not and most of them felt disappointed, so they actually started asking question where is India shining?

7. What do you think the 2004 election results unexpected political observers India, what factors contribute to more victories against the BJP Congress party? Whether internal or external factors?

**ANSWER:** Mentioned earlier the reason why Congress was more successful during the 2004 Lok Sabha elections compared to the BJP.

Lapiran 2



**Lampiran 3**  
**Partai-Partai Politik di India Tahun 2004**

**National Parties**

- 1 . BJP Bharatiya Janata Party
- 2 . BSP Bahujan Samaj Party
- 3 . CPI Communist Party of India
- 4 . CPM Communist Party of India  
(Marxist)
- 5 . INC Indian National Congress
- 6 . NCP Nationalist Congress Party

**State Parties**

- 7 . AC Arunachal Congress
- 8 . ADMK All India Anna  
Dravida Munnetra Kazhagam
- 9 . AGP Asom Gana Parishad
- 10 . AIFB All India Forward Bloc
- 11 . AITC All India Trinamool Congress
- 12 . BJD Biju Janata Dal
- 13 . CPI(ML)(L) Communist Party of India  
(Marxist-Leninist) (Liberation)
- 14 . DMK Dravida Munnetra Kazhagam
- 15 . FPM Federal Party of Manipur
- 16 . INLD Indian National Lok Dal
- 17 . JD(S) Janata Dal (Secular)
- 18 . JD(U) Janata Dal (United)
- 19 . JKN Jammu & Kashmir National  
Conference
- 20 . JKNPP Jammu & Kashmir National  
Panthers Party

- 21 . JKDPDP Jammu & Kashmir Peoples  
Democratic Party
- 22 . JMM Jharkhand Mukti Morcha
- 23 . KEC Kerala Congress
- 24 . KEC(M) Kerala Congress (M)
- 25 . MAG Maharashtrawadi Gomantak
- 26 . MDMK  
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazha  
gam
- 27 . MNF Mizo National Front
- 28 . MPP Manipur People's Party
- 29 . MUL Muslim League Kerala State  
Committee
- 30 . NPF Nagaland Peoples Front
- 31 . PMK Pattali Makkal Katchi
- 32 . RJD Rashtriya Janata Dal
- 33 . RLD Rashtriya Lok Dal
- 34 . RSP Revolutionary Socialist Party
- 35 . SAD Shiromani Akali Dal
- 36 . SAD(M) Shiromani Akali Dal (Simranjit  
Singh Mann)
- 37 . SDF Sikkim Democratic Front
- 38 . SHS Shivsena
- 39 . SP Samajwadi Party
- 40 . TDP Telugu Desam
- 41 . UGDP United Goans Democratic Party
- 42 . UKKD Uttarakhand Kranti Dal

### **State Parties - Other States**

- 43 . AIFB All India Forward Bloc
- 44 . AITC All India Trinamool Congress
- 45 .CPI(ML)(L) Communist Party of India  
(Marxist-Leninist) (Liberation)
- 46 . INLD Indian National Lok Dal
- 47 . JD(S) Janata Dal (Secular)
- 48 .JD(U) Janata Dal (United)
- 49 . JKNPP Jammu & Kashmir National  
Panthers Party
- 50 . JMM Jharkhand MuktiMorcha
- 51 . MUL Muslim League Kerala State  
Committee
- 52 . NPF Nagaland Peoples Front
- 53 . RJD RashtriyaJanata Dal
- 54 . RLD RashtriyaLok Dal
- 55 . RSP Revolutionary Socialist Party
- 56 . SHS Shivsena
- 57 . SP Samajwadi Party

### **Registered (Unrecognised) Parties**

- 58 . AB AkhandBharti
- 59 .ABCD(A) AkhilBharatiya Congress Dal  
(Ambedkar)
- 60 . ABDBM  
AkhilBharatiyaDeshBhaktMorcha
- 61 . ABHM Akhil Bharat Hindu Mahasabha
- 62 . ABHS AkhilBharatiyaSena
- 63 . ABJS AkhilBharatiya Jan Sangh

- 64 . ABLTASJM AkhilBharatiyaLokTantrik  
Alp-Sankhyak Jan Morcha
- 65 . ABLTP AkhilBharatiyaLoktantra Party
- 66 . ABRAHP AkhilBharatiyaRashtriya  
Azad Hind Party
- 67 . ABRS AkhilBharatiyaRajaryaSabha
- 68 . AD Apna Dal
- 69 . AIMF All India Minorities Front
- 70 . AIMIM All India Majlis-E-  
IttehadulMuslimeen
- 71 . AJSU All Jharkhand Students Union
- 72 . AKMDMP All Kerala M.G.R.  
DravidaMunnetra Party
- 73 . AMB AmraBangalee
- 74 . ANC Ambedkar National Congress
- 75 . AP Awami Party
- 76 . ARP Ambedkarist Republican Party
- 77 . ASDC Autonomous State Demand  
Committee
- 78 . ASP AmbedkarSamaj Party
- 79 . BBM BharipaBahujanMahasangha
- 80 . BBP Bharatiya Backward Party
- 81 . BED BharatiyaEkta Dal
- 82 . BEP BharatiyaEklavya Party
- 83 . BGTD BharatiyaGaonTaj Dal
- 84 . BJVP BharatiyaJanvadi Party
- 85 . BKD BahujanKisan Dal
- 86 . BKLJP Bharat Ki LokJimmedar Party
- 87 . BKRP Bharat KrantiRakshak Party
- 88 . BLKD BharatiyaLokKalyan Dal
- 89 . BLP BharatiyaLabour Party

- 90 .BMP(AI) BharatiyaMuhabbat Party (All India)
- 91 . BMSM Bharatiya Minorities SurakshaMahasangh
- 92 . BMVP BharatiyaManavataVikas Party
- 93 . BNP BharatiyaNavshakti party
- 94 . BNRP BharatiyaNagrik Party
- 95 . BPSGKD BharatiyaPrajantrikShudhGandhiwad iKrishak Dal
- 96 . BPSP Bihar People's Party
- 97 . BPTP BharatiyaPrajantra Party
- 98 . BRP BharatiyaRashtravadiPaksha
- 99 . BRPP Bharatiya Republican Paksha
- 100 . BSDP BhartiSarvadarshiParishad
- 101 . BSJM BharatiyaSurajyaManch
- 102 . BSK BharatiyaSarvkalayanKranti Dal
- 103 . BVP BahujanVikas Party
- 104 . CSP Chhattisgarhi Samaj Party
- 105 . DBP DeshBhakt Party
- 106 . DBSP Democratic BharatiyaSamaj Party
- 107 .EKD(UP) EktaKranti Dal U.P.
- 108 . ES Ekta Shakti
- 109 . EU Ephraim Union
- 110 . FCI Federal Congress of India
- 111 . GGP GondvanaGantantra Party
- 112 . HEAP Hindu EktaAndolan Party
- 113 . HJP Hindustan Janta Party
- 114 . HM Hind Morcha
- 115 . HVP Haryana Vikas Party
- 116 . IBSP Indian BahujanSamajwadi Party
- 117 . IFDP Indian Federal Democratic Party
- 118 . IJP Indian Justice Party
- 119 . INL Indian National League
- 120 . JCP Jan Chetna Party
- 121 . JDP Jharkhand Disom Party
- 122 . JHP Jai Hind Party
- 123 . JHSP JanhitSamaj Party
- 124 . JJ JebamaniJanata
- 125 . JKAL Jammu And Kashmir Awami League
- 126 . JKP Jharkhand Party
- 127 .JKP(N) Jharkhand Party (Naren)
- 128 . JKPP Jharkhand People's Party
- 129 . JMP JanmangalPaksh
- 130 . JP Janata Party
- 131 . JSP Jansatta Party
- 132 . JUM Jana Unnayan Mancha
- 133 . JVP JanataVikas Party
- 134 . KKJHS Kranti Kari Jai Hind Sena
- 135 . KMM KrantikariManuwadiMorcha
- 136 . KNDP Kannada Nadu Party
- 137 . KSVP KrantikariSamyavadi Party
- 138 . KVSP KosiVikas Party
- 139 . LBP LokBhalai Party
- 140 . LCP LoktantrikChetna Party
- 141 . LJNSP Lok Jan Shakti Party
- 142 . LP(S) Labour Party (Secular)
- 143 .LPI(V) Labour Party Of India(V.V. Prasad)
- 144 . LPSP LokpriyaSamaj Party

- 145 . LRP LokRajya Party
- 146 . LSD LokSewa Dal
- 147 . LSWP LoktantrikSamajwadi Party
- 148 . MB(S)PMoolBharati (S) Party
- 149 . MBT MajlisBachaoTahreek
- 150 . MC Momin Conference
- 151 . MCO Marxist Co-Ordination
- 152 . MCPI(S) Marxist Communist Party of India (S.S. Srivastava)
- 153 . MJM ManavJagritiManch
- 154 . MNVP Manuvadi Party
- 155 . MRRC Maharashtra Rajiv Congress
- 156 . MRS MudirajRashtriyaSamithi
- 157 . NBNP NavbharatNirman Party
- 158 . NLP National Loktantrik Party
- 159 . NMNP Nidaya Malik (N) Party
- 160 . NSP National Students Party
- 161 . NSSP NiswarthSewa Party
- 162 . NSTP Naari Shakti Party
- 163 .NTRTDP(LP) NTR Telugu Desam Party (Lakshmi Parvathi)
- 164 . PBLP PhuleBhartiLok Party
- 165 . PBRML PaschimBangaRajya Muslim League
- 166 . PDP Peoples Democratic Party
- 167 . PDS Party for Democratic Socialism
- 168 . PHSP PichhraSamaj Party
- 169 . PMP Parmarth Party
- 170 . PMSP PragatisheelManavSamaj Party
- 171 . PP Praja Party
- 172 . PPOI Pyramid Party of India
- 173 . PRBP Peoples Republican Party
- 174 . PRCP Prabuddha Republican Party
- 175 . PRP Panchayat Raj Party
- 176 . PSJP ParivartanSamaj Party
- 177 . PTSS ProutistSarvaSamaj Party
- 178 . PWPI Peasants And Workers Party of India
- 179 . RCP Rashtravadi Communist Party
- 180 . RCPI(R) Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)
- 181 . RGD RashtriyaGarib Dal
- 182 . RHD RashtriyaHamara Dal
- 183 . RJAP RashtriyaJanadhikar Party
- 184 . RJVP Rajasthan Vikas Party
- 185 . RKSP RashtriyaKrantikariSamajwadi Party
- 186 . RLSM RashtriyaLokSevaMorcha
- 187 . RPD RashtriyaParivartan Dal
- 188 . RPI Republican Party of India
- 189 .RPI(A) Republican Party of India(A)
- 190 .RPI(D) Republican Party Of India (Democratic )
- 191 .RPI(KH) Republican Party Of India(Khobragade)
- 192 . RSBP RashtriyaSwabhimaan Party
- 193 . RSD RashtriyaSawarn Dal
- 194 . RSGP RashtriyaGarima Party
- 195 . RSKP RashtriyaSakar Party
- 196 . RSMD RashtriyaSamanta Dal
- 197 . RSNP RashtriyaSamajikNayakPaksha
- 198 . RSPS RashtriyaSamajPaksha

- 199 . RVNP RashtravadiJanata Party
- 200 . RVP RashtriyaVikas Party
- 201 . SAP Samata Party
- 202 . SBS ShikshitBerozgarSena
- 203 . SBSP SuheldevBhartiyaSamaj Party
- 204 . SDP Socialistic Democratic Party
- 205 . SHRP Sikkim HimaliRajyaParishad
- 206 . SHSP ShoshitSamaj Party
- 207 . SJP(R)  
SamajwadiJanataParty(Rashtriya)
- 208 . SLAP Social Action Party
- 209 .SLP(L) Socialist Party(Lohia)
- 210 . SMSP SamataSamaj Party
- 211 . SPI Secular Party of India
- 212 . SPVD SampurnaVikas Dal
- 213 . SSD ShoshitSamaj Dal
- 214 . SSJP SanatanSamaj Party
- 215 . SSP Sikkim SangramParishad
- 216 . SVRP Shivrajya Party
- 217 . SVSP SavarnSamaj Party
- 218 . SWD Swaraj Dal
- 219 . SWJP Samajwadi Jan Parishad
- 220 . TDK Tamil DesiyakKatchi
- 221 . TNGP TrinamoolGanaParishad
- 222 . TRS TelanganaRashtraSamithi
- 223 . UMFA United Minorities Front,  
Assam
- 224 . USYP UrsSamyukthaPaksha
- 225 . VJC VidharbhaJanata Congress
- 226 . VJP Vijeta Party
- 227 . VP Vikas Party
- 228 . VRP VidharbhaRajya Party
- 229 . YGP YuvaGantantra Party
- 230 . YSP Youth and Students Party

## EPILOG

Setelah mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha pada Pemilu 2004 serta berhasil mendapat dukungan dari partai-partai regional lainnya yang di Lok Sabha, partai Congress akhirnya menjadi partai yang memerintah India sejak 2004-2009. Sebagaimana umumnya dalam negara sistem parlementer, maka ketua partai yang mendapatkan suara terbanyak di parlemen akan menjadi perdana menteri. Namun, Sonia Gandhi yang merupakan ketua partai Congress telah memutuskan memberikan posisi tersebut kepada Manmohan Singh, mantan menteri keuangan pada pemerintahan Narasimha Rao, yang juga dikenal sebagai arsitek Rencana Reformasi Ekonomi. Alasan Sonia Gandhi menyerahkan jabatan tersebut ialah untuk menjaga stabilitas politik India setelah partai oposisi khususnya partai BJP yang menjadikan asal-usulnya yang merupakan keturunan Italia, sebagai alasan ketidaklayakan untuk menjadi PM India. Setelah Sonia Gandhi menyerahkan posisi tersebut, Sonia Gandhi mendapatkan rasa simpati yang besar dari masyarakat India dan menjadi politisi kuat serta disegani dalam perpolitikan India.

Di bawah kepemimpinannya, koalisi UPA yang dipimpin partai Congress, kembali berhasil memenangkan pemilu 2009. Perolehan kursi partai Congress di Lok Sabha mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 2004. Pemilu 2009 ini, Partai Congress sendiri mampu mendapatkan 206 kursi. Sonia Gandhi kembali memutuskan Manmohan Singh menjabat sebagai Perdana Menteri India untuk kedua kalinya.

Kedua anak Sonia Gandhi juga menjadi anggota penting partai Congress. Priyanka Gandhi membatasi dirinya untuk mengurus kampanye dan menjaga konstituen Sonia Gandhi. Sementara Rahul Gandhi mengambil jabatan resmi dalam partai Congress sebagai Sekretaris Jenderal. Ia diprediksi akan menjadi perdana menteri India mendatang. Pada bulan Agustus 2011, Sonia Gandhi berhasil menjalani operasi di Amerika Serikat. Pihak keluarga dan partai Congress menolak untuk menjelaskan penyakit yang dideritanya. Hingga sekarang, dinasti Nehru-Gandhi sangat penting untuk partai Congress.

Ada beberapa dinamika yang menjadi pertimbangan berkaitan dengan prediksi posisi partai Congress pada Pemilu India 2014 yang akan datang. Pertama, berita korupsi saat ini menjadi isu yang mempengaruhi hampir seluruh lapisan masyarakat India, baik kelas menengah di perkotaan dan orang-orang miskin di pedesaan. Kemarahan masyarakat terhadap pemerintah berkaitan dengan isu korupsi tersebut terus meningkat. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak negatif terhadap citra partai Congress dan koalisinya, terlebih lagi menghadapi pemilu 2014 yang akan datang. Sementara partai BJP merasa diuntungkan karena citra partai Congress yang tidak baik berkaitan dengan isu tersebut. Kendati pun demikian, partai BJP belum dapat dipastikan akan mendapatkan kursi terbanyak di Lok Sabha dibandingkan partai Congress. Belakangan ini, partai BJP mengalami krisis kepemimpinan, baik di pusat dan di negara bagian-negara bagian India. Pada sisi yang lain, dukungan partai-partai regional yang merupakan koalisi BJP juga mengalami penurunan. Misalnya partai Janata Dal (United), partai yang sangat potensial bagi koalisi partai BJP. Menurunnya dukungan terhadap partai BJP ini berkaitan dengan prestasi BJP sebelumnya yang masih menerapkan agenda Hindutva dan kebijakan-kebijakan yang eksklusif.

Partai politik lainnya yang berpengaruh selain partai Congress dan BJP adalah partai-partai regional. Menjelang Pemilu 2014 yang akan datang partai-partai regional India semakin berpengaruh. Partai-partai nasional yang telah dan sedang mengalami penurunan di beberapa negara bagian kemungkinan akan diuntungkan bila melakukan koalisi dengan partai-partai regional yang sangat berpengaruh, misalnya dengan DMK, PMK, dan MDMK di negara bagian Andhra Pradesh. Pembangunan koalisi dengan jumlah partai regional yang lebih besar kemungkinan masih akan terjadi untuk koalisi pimpinan partai Congress. Oleh karena itu, aliansi UPA, yang dipimpin partai Congress dengan kandidat pemimpin selanjutnya Rahul Gandhi, memiliki kemungkinan untuk terpilih lagi pada Pemilu India 2014 yang akan datang. Dengan demikian, pembangunan koalisi pra-pemilu sangat membantu partai-partai nasional untuk dapat menjadi partai yang memerintah pada Pemilu 2014 yang akan datang.